



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2023**



BUPATI BANJAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya segala tugas-tugas yang diembankan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar hingga saat ini. Berkenaan dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, kami selaku Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat.

Penyampaian LPPD ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Bupati Banjar selaku Kepala Daerah yang sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Bagian Kedua pasal 11 ayat (2) dan (3) yang dinyatakan bahwa LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang dipertegas lagi dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

LPPD merupakan instrumen pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional. Dengan berpijak pada kepentingan nasional dimaksud, LPPD merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga kedudukan dan peranan LPPD menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Ruang lingkup LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

LPPD Kabupaten Banjar Tahun 2023 terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan Bab V Penutup.

Melalui dukungan berbagai pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tokoh agama dan alim ulama, pemuka masyarakat, kalangan dunia usaha dan berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, segala kemajuan dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas diberbagai bidang telah tercapai selama tahun 2023 yang lalu. Selain dilandasi dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas ini, kami pun menyadari masih terdapat berbagai kekurangan termasuk pula dalam penyusunan LPPD ini, sehingga kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Martapura, 28 Maret 2024

BUPATI BANJAR, 

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR MASA JABATAN 2021 – 2024



H. SAIDI MANSYUR
Bupati Banjar



H. SAID IDRUS
Wakil Bupati Banjar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.1.1. Penjelasan Umum.....	6
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	18
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	34
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	40
2.1. Capaian Kinerja Makro	40
a. Indeks Pembangunan Manusia.....	40
b. Angka Kemiskinan	42
c. Angka Pengangguran	42
d. Pertumbuhan Ekonomi	43
e. Pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar harga berlaku)	44
f. Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	46
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	47
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>).....	47
b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	68
c. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	74
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	74
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kerja	76
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja...77	
c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	124
d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	128
e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.....	132
f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. ...	136
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	150
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	152
4.1. Urusan Pendidikan.....	152
4.2. Urusan Kesehatan	159
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	179
4.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	186
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	190
4.6. Urusan Sosial.....	209
4.7. Program dan Kegiatan	217
BAB V PENUTUP	320

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Banjar adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Selanjutnya dijelaskan sejarah perkembangan kewilayahan Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Pembentukan Kabupaten Banjar tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kesultanan Banjar yang berada di tanah Kalimantan Selatan yang dimulai pada tanggal 24 September 1526 sampai dengan 11 Juni 1860. Kesultanan ini semula beribukota di Banjarmasin kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya (sekarang Kabupaten Banjar). Ketika Ibukota berkedudukan di Martapura maka disebut juga Kesultanan Kayu Tangi. Pada saat itu wilayah ibukotanya masih berada di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Lahirnya Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kesultanan Negara Daha, yaitu Kesultanan Hindu yang beribukota di kota Nagara, sekarang merupakan ibukota kecamatan Daha Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Era Kesultanan Banjar berakhir pada tahun 1905, pada saat setelah berakhirnya perlawanan terhadap Belanda oleh Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Demang Lehman, Gusti Muhammad Seman dan para pengikutnya yang setia pada tahun periode 1859-1905. Kemudian Martapura diperintah oleh Belanda dan pada tahun 1942-1945 Martapura diperintah oleh Jepang. Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang menyerah kalah oleh Tentara Sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Pada masa revolusi fisik bangsa Indonesia berkobar dengan hebatnya untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1948, Pemerintah Belanda (NICA) di Kalimantan Selatan justru memaksakan kehendaknya untuk membentuk sebuah Dewan yang disebut Dewan Banjar yang wilayahnya meliputi Afdeling Banjarmasin dan Hulu Sungai. Pembentukan Dewan Banjar tersebut merupakan hasil Konferensi Malino di Sulawesi Selatan yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal H.J. Van Mook.

Pembentukan Dewan Banjar ternyata tidak mendapat dukungan dari Rakyat Kalimantan Selatan, sehingga keinginan Belanda untuk mendirikan negara bagian dengan tujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia tidak tercapai. Walaupun demikian Pemerintah Belanda tetap saja melaksanakan kehendaknya tersebut dengan mengangkat anggota-anggotanya dengan harapan dapat menjadi alat

Pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 Dewan Banjar dibubarkan dan Afdeling Banjarmasin dimasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pada saat itu belum memungkinkan adanya otonomi untuk Kabupaten Banjar. Namun atas dasar Kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 tanggal 13 Agustus 1950, ditetapkan Susunan Wilayah dan Jabatan Pemerintahan dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Surat Keputusan tersebut antara lain memuat perubahan *Afdeling* Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjarmasin.

Selain itu pula melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 186/OPB/92/14 tanggal 14 Agustus 1950 menetapkan Peraturan Sementara Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Banjarmasin. Pada tanggal 23 Desember 1950 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) telah dibentuk dengan jumlah anggota 22 orang dengan Ketua K.H. Hasan Corong. Dengan dilantiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara tersebut, maka resmiah terbentuknya Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten Banjar dengan Martapura sebagai Ibukotanya. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Banjarmasin, meliputi :

- 1) Kewedanaan Kayu Tangi Martapura
- 2) Kewedanaan Bakumpai Marabahan
- 3) Kewedanaan Barito Kuala Berangas
- 4) Kewedanaan Tanah Laut Pelaihari

Dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Nomor DPRDS/43/2 tanggal 27 Pebruari 1952 mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan dan Pemerintah Pusat agar nama Kabupaten Banjarmasin dirubah jadi nama Kabupaten Banjar, juga mengusulkan perubahan Kewedanaan, yaitu:

- 1) Kewedanaan Kayu Tangi Martapura
- 2) Kewedanaan Bakumpai Marabahan
- 3) Kewedanaan Barito Kuala
- 4) Kewedanaan Tanah Laut
- 5) Kewedanaan Ulin Gambut

Usul penambahan Kewedanaan tersebut disetujui oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Nomor C-246-2-3 diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menyetujui perubahan sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarmasin menjadi Daerah Kabupaten Banjar. Pada awalnya Kabupaten Banjar terdiri atas 15 Kecamatan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru dimekarkan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru, dan Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kota Banjarbaru. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 dibentuklah Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, Kecamatan Beruntung Baru, dan Kecamatan Sambung Makmur. Kemudian melalui Peraturan Daerah 12 Tahun 2006 dibentuk Kecamatan Paramasan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 membentuk Kecamatan Telaga Bauntung. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Dibentuklah Kecamatan Cintapuri

Darussalam. Sekarang secara administratif Kabupaten Banjar terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Banjar berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38" Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km² atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Banjar berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sebelah timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu
Sebelah selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru
Sebelah barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (0,250%) dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,006%).

Secara topografis, ketinggian wilayah Kabupaten ini berkisar antara 0–1.878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk, maka ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, dimana 35 % berada di ketinggian 0–7 m dpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50– 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang secara periodik.

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93 % bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39 % bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72 %, dan 30-60 cm hanya 14,83%.

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah dijumpai jenis tanah; Tanah organosol, gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57% dari luas wilayah. Tanah aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72%. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29%. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84%. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57%.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2015 tercatat mencapai 199,78 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan September (0,0

mm) dan tertinggi pada bulan April (613,0 mm). Dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari (23 hari), sebaliknya jumlah hujan terendah pada bulan September (0 hari).

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2023 sebanyak 580.100 Jiwa yang terdiri atas 292.820 Jiwa penduduk laki-laki dan 287.280 Jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebesar 9.753 Jiwa. Rincian jumlah penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022			JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Aluh-Aluh	14.850	14.333	29.183	15.224	14.614	29.838
2	Kertak Hanyar	20.558	20.675	41.233	20.904	21.006	41.910
3	Gambut	22.024	22.194	44.218	22.717	22.841	45.558
4	Sungai Tabuk	31.357	30.435	61.792	31.656	30.778	62.434
5	Martapura	62.188	62.164	124.352	63.151	63.124	126.275
6	Karang Intan	18.213	18.018	36.231	18.608	18.350	36.958
7	Astambul	18.054	17.977	36.031	18.255	18.192	36.447
8	Simpang Empat	12.159	11.635	23.794	12.284	11.824	24.108
9	Pengaron	8.722	8.446	17.168	8.922	8.660	17.582
10	Sungai Pinang	7.347	6.859	14.206	7.716	7.202	14.918
11	Aranio	4.789	4.470	9.259	4.889	4.544	9.433
12	Mataraman	12.706	12.495	25.201	12.749	12.484	25.233
13	Beruntung Baru	7.417	7.255	14.672	7.520	7.307	14.827
14	Martapura Barat	9.918	9.334	19.252	10.084	9.423	19.507
15	Martapura Timur	15.425	14.889	30.314	15.552	15.109	30.661
16	Sambung Makmur	6.236	6.059	12.295	6.508	6.372	12.880
17	Paramasan	1.975	1.750	3.725	2.014	1.784	3.798
18	Telaga Bauntung	1.690	1.631	3.321	1.693	1.648	3.341
19	Tatah Makmur	6.513	6.503	13.016	6.644	6.633	13.277
20	Cintapuri Darussalam	5.720	5.364	11.084	5.730	5.385	11.115
Jumlah		287.861	282.486	570.347	292.820	287.280	580.100

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab.Banjar, 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

Tabel 2
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Aluh-Aluh	19	
2.	Beruntung Baru	12	
3.	Gambut	12	2
4.	Kertak Hanyar	10	3
5.	Tatah Makmur	13	
6.	Sungai Tabuk	20	1
7.	Martapura	19	7
8.	Martapura Timur	20	
9.	Martapura Barat	14	
10.	Astambul	22	
11.	Karang Intan	26	
12.	Aranio	12	

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
13.	Sungai Pinang	11	
14.	Paramasan	4	
15.	Pengaron	12	
16.	Sambung Makmur	7	
17.	Mataraman	15	
18.	Simpang Empat	15	
19.	Telaga Bauntung	4	
20.	Cintapuri Darussalam	11	
Jumlah		277	13

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat daerah baru sesuai hasil pemetaan urusan konkuren dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 3
Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar

No	Perangkat Daerah	Sekretariat	Sub bagian	Bagian / Bidang	Sub bidang / Seksi	UP T
1.	Sekretariat Daerah					
	- Sekretaris Daerah	1		10 Bagian	29 Sub Bagian	
	- Asisten	3				
	- Staf Ahli	3				
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		1	3 Bagian	9 Sub Bagian	
3.	Inspektorat Daerah	1	3			
	- Inspektur Pembantu Wilayah	4				
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1	3	5	12	
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	3	3	6	
6.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1	3	6	18	
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	2	3	9	
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	3	3	6	
9.	Dinas Pendidikan	1	3	4	12	40
10.	Dinas Kesehatan	1	3	4	12	29

No	Perangkat Daerah	Sekretariat	Sub bagian	Bagian / Bidang	Sub bidang / Seksi	UP T
11.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1	3	6	18	
12.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1	3	5	15	2
13.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2	3	6	
14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	3	5	13	1
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	3	3	6	
16.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	3	5	11	1
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	3	4	8	2
18.	Dinas Perhubungan	1	2	3	6	2
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	3	4	8	
20.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	3	3	9	
21.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1	3	5	14	1
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	3	5	10	
23.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1	3	5	13	
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	3	2	4	
25.	Dinas Pertanian	1	3	6	18	4
26.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	2	2	4	
27.	Kecamatan (20 Camat)	20	40	-	80	
28.	Kelurahan (13 Lurah)	20	-	-	20	

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Banjar, 2024

Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banjar per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 7.259 yang terdiri atas 2.668 laki-laki dan 4.591 perempuan.

Tabel 4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Laki-Laki		Perempuan		Total		Jumlah Keseluruhan
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	Sekretariat Daerah	77		58		135	0	135
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15		15		30	0	30
3	Inspektorat Daerah	20		24		44	0	44
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	14		23		37	0	37
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14		7		21	0	21
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	31		33		64	0	64
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27		25		52	0	52
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14		8		22	0	22
9	Dinas Pendidikan	107	242	186	712	2933	954	3887
10	Dinas Kesehatan	408	102	108	288	1491	390	1881

No	Perangkat Daerah	Laki-Laki		Perempuan		Total		Jumlah Keseluruhan
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	45		22		67	0	67
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	58		27		85	0	85
13	Satuan Polisi Pamong Praja	43		5		48	0	48
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10		24		34	0	34
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7		15		22	0	22
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	18	28	26	25	44	53	97
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12		10		22	0	22
18	Dinas Perhubungan	27		8		35	0	35
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9		18		27	0	27
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12		14		26	0	26
21	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	18		27		45	0	45
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13		17		30	0	30
23	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	24		16		40	0	40
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9		14		23	0	23
25	Dinas Pertanian	64		96		160	0	160
26	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14		3		17	0	17
27	Kecamatan Aluh-aluh	12		0		12	0	12
28	Kecamatan Kertak Hanyar	13		10		23	0	23
29	Kecamatan Gambut	16		12		28	0	28
30	Kecamatan Sungai Tabuk	11		4		15	0	15
31	Kecamatan Martapura	31		34		65	0	65
32	Kecamatan Karang Intan	13		1		14	0	14
33	Kecamatan Astambul	9		3		12	0	12
34	Kecamatan Simpang Empat	9		1		10	0	10
35	Kecamatan Pengaron	11		2		13	0	13
36	Kecamatan Sungai Pinang	9		0		9	0	9
37	Kecamatan Aranio	11		1		12	0	12
38	Kecamatan Mataraman	9		3		12	0	12
39	Kecamatan Beruntung Baru	9		2		11	0	11
40	Kecamatan Martapura Barat	7		6		13	0	13
41	Kecamatan Martapura Timur	11		4		15	0	15
42	Kecamatan Sambung Makmur	9		0		9	0	9
43	Kecamatan Paramasan	6		0		6	0	6
44	Kecamatan Telaga Bauntung	9		1		10	0	10
45	Kecamatan Tatah Makmur	10		3		13	0	13
46	Kecamatan Cintapuri Darussalam	6		0		6	0	6
	Total	2668		4.591		5.862	1.397	7.259

Sumber : Data diolah BKPSDM, 2024

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 5
Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Urusan Program dan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

Urutan	Belanja Pegawai		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Hibah		Belanja Bantuan Sosial		Belanja Tanah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Belanja Tidak Terduga		Belanja Bagi Hasil		Belanja Bantuan Keuangan	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
Pendidikan	536.988.843,014,00	379.931.194.102,00	103.378.053.119,00	99.119.081.992,00	14.409.850.894,00	14.311.539.491,00	-	-	8.000.000.000,00	5.331.895.000,00	10.647.053.249,00	9.991.225.336,00	35.943.406.873,00	34.243.088.094,00	-	-	935.261.640,00	927.701.240,00	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	197.325.250.397,00	179.770.533.287,00	219.348.800.591,00	198.154.448.683,82	680.180.350,00	676.366.119,00	-	-	420.000.000,00	-	55.608.294.145,00	46.578.817.991,00	19.047.109.837,00	18.003.121.383,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.121.127.595,33	5.586.200.510,67	34.365.766.432,67	30.774.004.356,67	24.157.833.000,00	22.689.342.700,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	300.000.000,00	438.880,00	4.145.172.000,00	3.761.953.950,00	5.781.299.094,00	4.863.501.607,00	199.701.087.667,00	183.944.455.005,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.075.129.648,67	5.575.838.992,67	34.673.743.171,33	33.396.179.703,33	-	-	771.398.550,00	767.355.329,00	-	-	5.474.960.245,00	5.317.692.000,00	3.575.441.447,00	3.487.742.907,00	12.905.256.177,00	12.637.591.433,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketenagakerjaan dan Ketertarikan Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.411.904.443,00	10.772.902.025,00	16.116.847.136,00	14.937.475.129,00	-	-	-	-	-	-	1.261.378.450,00	1.238.480.132,00	445.844.164,00	381.120.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosial	3.876.758.350,67	3.417.351.327,33	12.684.264.010,00	11.236.410.478,00	-	-	2.319.295.000	2.248.654.000,00	-	-	464.116.333,33	449.717.000,00	642.511.973,00	618.294.666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Kerja	3.535.911.751,00	3.335.707.181,00	3.352.335.475,00	3.001.579.037,00	-	-	-	-	-	-	609.917.750,00	590.271.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	969.189.587,67	854.337.831,83	3.171.066.002,50	2.809.102.619,50	-	-	-	-	-	-	464.116.333,33	449.717.000,00	642.511.973,00	618.294.666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pangan	3.028.804.118,50	2.871.416.126,00	3.129.076.175,33	3.037.871.353	-	-	-	-	-	-	-	-	35.100.000,00	34.384.370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian	3.060.563.797,67	2.793.100.255,33	17.182.883.216,33	15.387.002.178,33	-	-	-	-	-	-	-	-	5.781.299.094,00	4.863.501.607,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lingkungan Hidup	3.047.164.824	2.796.919.496,33	17.336.871.585,67	16.698.089.851,67	-	-	-	-	-	-	1.932.741.000	1.575.747.000	545.000.000,00	519.430.000,00	325.000.000,00	314.382.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.760.565.742,00	3.233.757.138,00	4.933.345.000,00	4.816.015.964,00	-	-	-	-	-	-	88.504.250,00	85.990.000,00	-	-	-	-	61.960.000,00	61.345.000,00	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.943.359.692,00	3.803.395.708,00	8.709.550.296,00	7.832.145.572,00	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	73.140.000,00	69.500.000,00	-	-	-	-	-	-	8.916.525.800,00	8.508.135.897,00	144.936.468.620,00	144.508.433.864,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	969.189.587,67	854.337.831,83	3.171.066.002,50	2.809.102.619,50	-	-	-	-	-	-	464.116.333,33	449.717.000,00	642.511.973,00	618.294.666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perhubungan	4.753.474.323,00	4.184.425.833,00	4.142.702.254,00	3.961.839.933,00	2.264.500.000,00	2.240.800.000,00	-	-	-	-	1.555.203.955,00	1.507.307.000,00	740.588.000,00	733.839.000,00	-	-	60.000.000,00	59.350.000,00	-	-	-	-	-	-
Komunikasi dan Informatika	2.692.051.040,67	2.439.970.179,33	8.416.569.159,33	8.247.873.580,67	-	-	-	-	-	-	186.016.526,67	185.769.333,33	106.733.333,33	105.790.183,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.135.345.329,00	3.002.849.870,50	4.981.003.216,00	4.628.015.308,00	-	-	-	-	-	-	80.237.666,67	79.459.100,00	305.066.666,67	285.492.377,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanaman Modal	4.547.913.749,00	4.219.567.868,00	4.634.472.753,00	4.469.806.847,00	-	-	-	-	-	-	4.294.974.870,00	4.196.014.500,00	276.600.000,00	239.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keperempuanan dan Olahraga	2.795.559.743,00	2.521.856.333,00	4.565.409.992,67	4.461.141.699,00	3.378.916.900,00	3.184.380.861,00	-	-	-	-	465.040.291,67	450.170.725,33	428.776.383,33	391.359.125,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statistik	673.012.760,17	609.992.544,83	2.104.142.289,83	2.061.968.395,17	-	-	-	-	-	-	186.016.526,67	185.769.333,33	106.733.333,33	105.790.183,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persandian	673.012.760,17	609.992.544,83	2.104.142.289,83	2.061.968.395,17	-	-	-	-	-	-	186.016.526,67	185.769.333,33	106.733.333,33	105.790.183,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebudayaan	931.853.247,67	840.552.111,00	4.565.409.992,67	4.461.141.699,00	-	-	-	-	-	-	465.040.291,67	450.170.725,33	428.776.383,33	391.359.125,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perpustakaan	2.163.451.482,67	2.043.562.471,33	890.539.473,00	843.443.164,50	-	-	-	-	-	-	75.925.000,00	74.999.500,00	36.150.000,00	32.950.000,00	-	-	90.000.000,00	89.698.268,00	-	-	-	-	-	-
Kearsipan	1.081.725.741,33	1.021.781.235,67	890.539.473,00	843.443.164,50	-	-	-	-	-	-	75.925.000,00	74.999.500,00	36.150.000,00	32.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelautan dan Perikanan	3.028.804.118,50	2.871.416.126,00	1.564.538.088	1.518.935.676,33	-	-	-	-	-	-	-	-	35.100.000,00	34.384.370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parwisata	1.863.706.495,33	1.681.104.222,00	4.565.409.992,67	4.461.141.699,00	-	-	-	-	-	-	465.040.291,67	450.170.725,33	428.776.383,33	391.359.125,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian	25.675.468.328,00	24.283.739.336,00	10.920.140.011,00	9.988.469.122,00	-	-	-	-	-	-	643.940.000,00	576.607.118,00	2.129.700.000,00	2.029.603.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan	1.567.672.664,50	1.501.414.935,25	1.245.250.804,00	1.157.003.827,00	-	-	-	-	-	-	80.237.666,67	79.459.100,00	305.066.666,67	285.492.377,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perindustrian	1.567.672.664,50	1.501.414.935,25	1.245.250.804,00	1.157.003.827,00	-	-	-	-	-	-	80.237.666,67	79.459.100,00	305.066.666,67	285.492.377,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Pemerintahan	18.276.326.189,00	17.842.577.384,00	21.514.648.635,00	19.989.863.769,00	9.613.626.400,00	9.372.660.011,00	-	-	-	-	6.995.009.872,00	6.730.981.000,00	1.790.958.725,00	1.449.580.310,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan	8.732.108.698,00	8.379.828.193,00	3.766.541.503,00	2.958.729.113,00	-	-	-	-	-	-	673.424.807,00	635.150.000,00	130.750.000,00	59.201.137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan	4.008.610.607,33	3.306.537.430,00	3.663.036.009,50	3.468.548.746,00	-	-	-	-	-	-	271.965.800,00	255.785.500,00	35.250.000,00	31.155.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keuangan	44.032.034.994,00	36.759.793.907,00	9.740.950.675,00	9.295.631.264,00	-	-	-	-	-	-	897.714.000,00	853.488.594,00	-	-	-	-	25.980.000,00	24.800.000,00	8.000.000.000,00	5.889.091.877,00	-	-	222.580.763.000,00	222.580.763.000,00
Kepegawaian	5.188.315.863,00	4.848.785.501,00	9.586.691.000,00	7.410.829.080,20	180.000.000,00	169.531.390,00	-	-	-	-	898.221.000,00	875.904.000,00	743.095.000,00	742.012.644,80	-	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan	2.004.305.303,67	1.653.268.715,00	3.663.036.009,50	3.468.548.746,00	-	-	-	-	-	-	271.965.800,00	255.785.500,00	35.250.000,00	31.155.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	33.653.964.445,00	30.654.112.951,00	44.145.311.537,00	36.851.566.504,00	-	-	-	-	-	-	2.273.285.050,00	1.072.304.000,00	1.040.200.000,00	210.760.000,00	-	-	43.280.000,00	39.939.500,00	-	-	-	-	-	-
Kewilayahan	45.969.611.249,00	40.886.047.299,00	18.889.777.326,00	18.030.083.098,00	-	-	-	-	-	-	2.456.486.839,00	2.353.824.400,00	1.656.486.486,00	1.643.642.600,00	1.631.813.320,00	1.607.085.359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesatuan Bangsa dan Politik	3.517.770.215,00	3.378.586.680,00	4.939.277.715,00	4.454.131.334,00	35.565.381.000,00	35.467.726.000,00	-	-	-	-	849.436.000,00	829.593.000,00	61.743.700,00	61.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPPKPAD Kabupaten Banjar, 2023

Tabel 6
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	96.196.000.000,00	109.824.795.009,00	114,17
4	Pendapatan Retribusi Daerah	8.263.062.975,00	8.372.925.539,00	101,33
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.083.090.240,00	8.916.250.334,00	80,45
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.757.846.785,00	150.834.483.088,04	111,93
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	250.300.000.000,00	277.948.453.970,04	111,05
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
10	Dana Bagi Hasil Pajak	33.740.312.000,00	36.971.401.241,00	109,58
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	520.181.800.000,00	564.917.111.162,00	108,60
12	Dana Alokasi Umum	720.930.446.000,00	720.866.934.775,00	99,99
13	Dana Alokasi Khusus	358.265.891.000,00	341.356.453.666,00	95,28
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.633.118.449.000,00	1.664.111.900.844,00	101,90
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
16	Dana Insentif Daerah	0,00	5.672.424.000,00	
17	Dana Desa	222.580.763.000,00	222.580.763.000,00	100,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	222.580.763.000,00	228.253.187.000,00	102,55
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
20	Pendapatan Bagi Hasil	123.230.277.838,00	188.402.649.001,00	152,89
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	123.230.277.838,00	188.402.649.001,00	152,89
22	Total Pendapatan Transfer	1.978.929.489.838,00	2.080.767.736.845,00	105,15
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
24	Pendapatan Hibah	3.036.000.000,00	2.444.000.000,00	80,50
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.036.000.000,00	2.444.000.000,00	80,50
26	JUMLAH PENDAPATAN	2.232.265.489.838,00	2.361.160.190.815,04	105,77
27	BELANJA			
28	BELANJA OPERASI			
29	Belanja Pegawai	1.006.647.534.561,00	806.639.970.419,00	80,13
30	Belanja Barang dan Jasa	658.298.459.216,00	604.259.637.529,02	91,79
31	Belanja Hibah	90.250.288.544,00	88.112.346.572,00	97,63
32	Belanja Bantuan Sosial	5.090.693.550,00	5.016.009.329,00	98,53
33	Jumlah Belanja Operasi	1.760.286.975.871,00	1.504.027.963.849,02	85,44
34	BELANJA MODAL			
35	Belanja Tanah	8.720.000.000,00	5.332.333.880,00	61,15
36	Belanja Peralatan dan Mesin	105.589.831.537,00	92.930.369.497,00	88,01
37	Belanja Gedung dan Bangunan	84.424.927.489,00	78.000.133.887,96	92,39
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	214.563.157.164,00	198.503.513.797,00	92,52
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.301.481.640,00	1.287.834.008,00	98,95
40	Belanja Aset Lainnya	315.000.000,00	314.900.000,00	99,97
41	Jumlah Belanja Modal	414.914.397.830,00	376.369.085.069,96	90,71
42	BELANJA TIDAK TERDUGA			
43	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	5.889.091.877,00	73,61

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
44	Jumlah Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	5.889.091.877,00	73,61
45	BELANJA TRANSFER			
46	Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800,00	8.508.135.897,00	95,42
47	Belanja Bantuan Keuangan	367.517.231.620,00	367.089.196.864,00	99,88
48	Jumlah Belanja Transfer	376.433.757.420,00	375.597.332.761,00	99,78
49	JUMLAH BELANJA	2.559.635.131.121,00	2.261.883.473.556,98	88,37
50	SURPLUS(DEFISIT)	(327.369.641.283,00)	99.276.717.258,06	(30,33)
51	PEMBIAYAAN			
52	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
53	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	363.419.641.283,00	363.419.641.282,83	100,00
54	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.473.976.000,00	
55	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	363.419.641.283,00	365.893.617.282,83	100,68
56	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	36.050.000.000,00	36.050.000.000,00	100,00
58	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
59	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.050.000.000,00	36.050.000.000,00	100,00
60	PEMBIAYAAN NETO	327.369.641.283,00	329.843.617.282,83	100,76
61	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	429.120.334.540,89	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar, 2024

a. Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023, realisasi pendapatan Kabupaten Banjar adalah Rp. 2.361.160.190.815,04 Persentase proporsi realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 yaitu:

- Pendapatan asli daerah realisasinya sebesar Rp 277.948.453.970,04 dengan capaian 111,05%.
- Pendapatan transfer realisasinya sebesar Rp. 2.080.767.736.845 dengan capaian 102,55%.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasinya sebesar Rp. 2.444.000.000 dengan capaian 80,50%.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan transfer/dana transfer masih dominan dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun realisasi masing-masing uraian pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terealisasi Rp. 277.948.453.970,04 atau sebesar 111,05% dari target sebesar Rp. 250.300.000.000,00 terdiri atas :

- Pendapatan pajak daerah terealisasi Rp. 109.824.795.009 atau sebesar 114,17% dari target sebesar Rp. 96.196.000.000.
- Pendapatan retribusi daerah terealisasi Rp. 8.372.925.539 atau sebesar 101,33% dari target sebesar Rp. 8.263.062.975.
- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan terealisasi Rp. 8.916.250.334 atau sebesar 80,45% dari target sebesar Rp. 11.083.090.240.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 150.834.483.088,04 atau sebesar 111,93% dari target sebesar Rp. 134.757.846.785.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang diterima dengan realisasi Rp. 2.080.767.736.845 atau sebesar 105,15% dari target Rp. 1.978.929.489.838, Pendapatan transfer terbagi atas 3 (dua) hal yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi.

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dengan realisasi Rp. 1.664.111.900.844 dari anggaran Rp. 1.633.118.449.000 atau capaian 101,90% terdiri atas : Dana Bagi Hasil Pajak (realisasi Rp 36.971.401.241 dari anggaran Rp. 33.740.312.000 atau capaian 109,58%); Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) (realisasi Rp. 564.917.111.162 dari anggaran Rp. 520.181.800.000 atau capaian 108,60%); Dana Alokasi Umum (realisasi Rp. 720.866.934.775 dari anggaran Rp. 720.930.446.000 atau capaian 99,99%); Dana Alokasi Khusus (realisasi Rp. 341.356.453.666 dari anggaran Rp. 358.265.891.000 atau capaian 95,28%).
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (realisasi Rp. 228.253.187.000 dari anggaran Rp. 222.580.763.000 atau capaian 102,55%) terdiri atas : Dana Insentif Daerah (realisasi Rp. 5.672.424.000 dari anggaran Rp. 0); Dana Desa (realisasi Rp. 222.580.763.000 dari anggaran Rp. 222.580.763.000 atau capaian 100%).
- Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (realisasi Rp. 188.402.649.001 dari anggaran Rp. 123.230.277.838 atau capaian 152,89%) terdiri atas : Pendapatan Bagi Hasil (realisasi Rp. 188.402.649.001 dari anggaran Rp. 123.230.277.838 atau capaian 152,89%).

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi Rp. 2.444.000.000 atau sebesar 80,50% dari anggaran Rp. 3.036.000.000 terdiri atas : Pendapatan Hibah (realisasi Rp. 2.444.000.000 dari anggaran Rp. 3.036.000.000 atau sebesar 80,50%).

b. Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023

Belanja Pemerintah Kabupaten Banjar terdiri dari 1) belanja operasi 2) belanja modal 3) belanja tak terduga 4) belanja transfer. Selama tahun 2023, belanja ini untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Banjar terealisasi sebesar Rp. 2.261.883.473.556,98 dengan komponen belanja operasi 66,49% atau sebesar Rp. 1.504.027.963.849,02 kemudian belanja modal 16,64% atau Rp. 376.369.085.069,96 selanjutnya belanja tak terduga sebesar 0,26% atau Rp. 5.889.091.877 dan belanja transfer sebesar 16,61% atau Rp. 375.597.332.761.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah Rp. 2.261.883.473.556,98 atau 88,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.559.635.131.121. Adapun realisasi masing-masing jenis pengeluaran daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi dengan realisasi Rp. 1.504.027.963.849,02 atau 85,44% dari anggaran Rp. 1.760.286.975.871 terdiri atas: belanja pegawai (realisasi Rp. 806.639.970.419 dari anggaran Rp. 1.006.647.534.561 atau capaian 80,13%); belanja barang dan jasa (realisasi Rp. 604.259.637.529,02 dari anggaran Rp. 658.298.459.216 atau capaian 91,79%); Belanja hibah (realisasi Rp. 88.112.346.572 dari anggaran Rp. 90.250.288.544 atau capaian 97,63%); Belanja bantuan sosial (realisasi Rp. 5.016.009.329 dari anggaran Rp. 5.090.693.550 atau capaian 98,53%).
- 2) Belanja Modal dengan realisasi Rp. 376.369.075.069,96 atau 90,71% dari anggaran Rp. 414.914.397.830 terdiri atas: belanja tanah (realisasi Rp. 5.332.333.880 dari anggaran Rp. 8.720.000.000 atau capaian 61,15%); belanja Peralatan dan Mesin (realisasi Rp. 92.930.369.497 dari anggaran Rp. 105.589.831.537 atau capaian 88,01%); belanja gedung dan bangunan (realisasi Rp. 78.000.133.887,96 dari anggaran Rp. 84.424.927.489 atau capaian 92,39%); belanja jalan, jaringan, dan irigasi (realisasi Rp. 198.503.513.797 dari anggaran Rp. 214.563.157.164 atau capaian 92,52%); belanja modal aset tetap lainnya (realisasi Rp. 1.287.834.008 dari anggaran Rp. 1.301.481.640 atau capaian 98,95%); belanja aset tetap lainnya (realisasi Rp. 314.900.000 dari anggaran Rp. 315.000.000 atau capaian 99,97%).

3) Belanja Tak Terduga dengan realisasi Rp. 5.889.091.877 atau 73,61% dari anggaran Rp. 8.000.000.000.

4) Belanja Transfer dengan realisasi Rp. 375.597.332.761 atau 99,78% dari anggaran Rp. 376.433.757.420 terdiri atas: belanja bagi hasil (realisasi Rp. 8.508.135.897 dari anggaran Rp. 8.916.525.800 atau 95,42%); belanja bantuan keuangan (realisasi Rp. 367.089.196.864 dari anggaran Rp. 367.517.231.620 atau 99,88%).

c. Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 363.419.641.282,83 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 363.419.641.283 atau 100%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan realisasinya sebesar Rp. 36.050.000.000 dari anggaran Rp. 36.050.000.000 atau 100% terdiri atas: penyertaan modal pemerintah daerah (realisasi Rp. 36.050.000.000 dari anggaran Rp. 36.050.000.000 atau 100%).

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2023 yang berhubungan dengan prioritas daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas, dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas 1	<p>Penguatan Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan keunggulan pertanian dan perikanan Peningkatan akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital Peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM Penciptaan Lapangan Pekerjaan
Permasalahan	<p>Penurunan Daya Beli</p> <p>Kemampuan daya beli masyarakat yang menurun, apalagi dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini dapat di maknai dari dua sisi, yakni pendapatan dan keterjangkauan harga Permasalahan pokok yang dihadapi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan riil masyarakat turun Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan Pengangguran Terbuka dampak pandemi covid 19 Ketimpangan pendapatan terjadi peningkatan Melambatnya pertumbuhan sektor pertanian Nilai Tukar Nelayan Perikanan Masih Rendah Banyaknya koperasi yang tidak aktif Usaha Mikro tidak berkembang Pengelolaan pasca panen hasil perkebunan yang belum optimal Jumlah Kunjungan Wisnus dan Wisman masih rendah Realisasi Investasi Masih Rendah
Prioritas 2	<p>Peningkatan Kualitas Sdm Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter Agamis</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Sistem Pendidikan Peningkatan Sistem Kesehatan Penurunan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan Pengamalan nilai- nilai Pancasila dan nilai-nilai agama Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

	<p>Pembangunan Manusia Belum Kompetitif</p> <p>Adapun permasalahan pokok diatas tersebut disebabkan masalah sebagaimana disebutkan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rata-Rata lama Sekolah Dibawah angka provinsi karena banyak peserta didik yang setelah lulus sekolah dasar langsung masuk pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Angka kematian ibu disebabkan 4 T, terlalu muda, Terlalu tua melahirkan, terlalu dekat dan Terlalu banyak anak; PHBS perlu ditingkatkan; Stunting masih di angka 17.91 Masih membutuhkan perhatian serius Kepesertaan Jaminan Sosial ideal 95% dari jumlah penduduk. - Namun saat ini masih 54% dari jumlah penduduk; ODF masih cukup tinggi; Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum optimal Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih Rendah Konsumsi energi dan protein masih rendah
Prioritas 3	<p>Penguatan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni Peningkatan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi
	<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas & berkelanjutan.</p> <p>Adapun beberapa masalah lingkungan hidup di Kabupaten Banjar adalah sebagaimana disebutkan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerusakan Infrastruktur dampak banjir Cakupan Air minum (persoalan pendanaan, pipanisasi, persebaran yang jauh" Penyediaan Angkutan Umum Masih Rendah Masih ada rumah tidak layak huni Indeks kualitas Air Masih Rendah Timbunan Sampah yang makin meningkat, disebabkan Sarana prasarana armada persampahan yang belum memadai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku membuang sampah sembarangan Masih terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH) cakupan saat ini hanya 2% Ancaman Bencana Banjir dan Kebakaran Hutan, Bencana banjir mengancam pada saat musim hujan dengan intensitas tinggi pada bulan Desember, Januari dan Maret, hampir setiap tahun selalu ada wilayah yang terkena banjir terutama didekat bantaran sungai martapura. Pada musim kemarau bencana yang mengancam adalah kebakaran hutan dan lahan
Prioritas 4	<p>Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Ketahanan Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan Mitigasi Kebencanaan
Permasalahan	<p>Nilai-Nilai Agama belum terinternalisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Kasus HIV / AIDS Meningkatnya Kasus Nafza Masih Tingginya kasus Pekat
Prioritas 5	<p>Transformasi Pelayanan Publik Yang Melayani</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pelayan Publik Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Aparatur Penguatan SPBE
Permasalahan	<p>Pelayanan Publik belum optimal</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks SPBE masih rendah Kecamatan belum terkoneksi karena aspek geografis Kesadaran penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan rendah; Pelayan publik yang belum optimal dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang belum maksimal. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang belum optimal.

Sumber : RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2023

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”**.

Misi I Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.

Misi II Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.

Misi III Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi IV Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif

Misi V Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berikut ini kami sajikan data program pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjar periode 2021 - 2026.

Tabel 8
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Sasaran 1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan	Strategi 1.1 Menedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat
	Sasaran 1.2 Meningkatnya daya saing masyarakat melalui Pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan	Strategi 1.2 Meningkatkan <i>hard skill & soft skill</i> berlandaskan etika budaya & agama melalui fasilitasi akses dan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM yang cerdas, terampil & produktif
	Sasaran 1.3 Meningkatnya daya beli masyarakat	Strategi 1.3a Melakukan upaya untuk menstabilkan harga & akses masyarakat miskin & berdaya beli rendah terhadap barang2 kebutuhan pokok
		Strategi 1.3b Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut diatas dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
	Sasaran 1.4 Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Strategi 1.4 Melakukan upaya diversifikasi keanekaragaman pangan serta upaya ketahanan pangan dan gizi masyarakat secara terpadu
Sasaran 1.5 Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Strategi 1.5 Melakukan upaya untuk mewujudkan keberpihakan/ advokasi dan pemberdayaan terhadap perempuan & anak	
Misi 2 Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan		
Tujuan 2.1: Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Strategi 2.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pembangunan sektor unggulan
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya keunggulan pertanian	Strategi 2.1.2a Meningkatkan produktivitas pertanian

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif & berkualitas	dan perikanan	melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian masyarakat, mekanisasi pertanian
		Strategi 2.1.2b Ekstensifikasi pertanian melalui revitalisasi dan rehabilitasi lahan tidur dan lahan pertanian yang rusak menjadi lahan pertanian yang produktif.
		Strategi 2.1.2c Meningkatkan produktivitas hasil perikanan melalui penyediaan infrastruktur pendukung, sarana dan prasarana, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kemampuan nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan serta pemasar hasil perikanan
	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	Strategi 2.1.3a Meningkatkan daya saing industri besar, menengah & kecil serta industri kreatif, serta meningkatkan fasilitas sarana & prasarana pelayanan untuk menunjang perkembangan Industri. Hulunilasi dan hilirisasi sektor industri yang terintegrasi dengan baik
		Strategi 2.1.3b Peningkatan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif
		Strategi 2.1.3c Pengembangan infrastruktur digital dan program-program inovasi digital sektor perekonomian dan usaha produktif masyarakat dengan mengutamakan produk unggulan Kabupaten Banjar
Tujuan 2.2 Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran		Strategi 2.2.1a Pemenuhan lapangan pekerjaan melalui <i>link & match</i> antara kebutuhan <i>supply & demand</i> tenaga kerja, terutama tenaga kerja penganggur
	Sasaran 2.2.1 Menurunnya Angka Pengangguran	Strategi 2.2.1b Mempercepat tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan, sektor ekonomi kreatif, dan sektor ekonomi unggulan
	Sasaran 2.2.2 Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Strategi 2.2.2a Meningkatkan upaya pemulihan & pengembangan Koperasi Sehat & UMKM yang mandiri, serta hasil produk yang berdaya saing & terserap pasar melalui kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, swasta, media & akademisi
	Sasaran 2.2.3 Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Strategi 2.2.3 Upaya pengembangan hasil pertanian & perikanan yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani/ Nelayan & Masyarakat Pengguna hasil pertanian/perikanan
	Sasaran 2.2.4 Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial	Strategi 2.2.4a Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan PPKS Strategi 2.2.4b Reformasi sistem penyaluran bantuan sosial sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi serta memperhatikan penciptaan multiplier bagi ekonomi UMKM
	Sasaran 2.2.5 Menurunnya kesenjangan dan	Strategi 2.2.5 Meningkatkan kapasitas dan tata kelola

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	kemiskinan melalui pembangunan perdesaan	pemerintahan desa untuk melakukan inovasi, partisipatif inklusif, transparan serta akuntabel.
	Sasaran 2.2.6 Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Strategi 2.2.6 Upaya peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera khususnya melalui usaha mandiri ibu rumah tangga
	Sasaran 2.2.7 Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Strategi 2.2.7 Upaya membangun infrastruktur fisik dan non fisik termasuk komunikasi dan informasi melalui IT dll untuk pembangunan yang berkeadilan antar wilayah dan masyarakat.
Misi 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		
Tujuan 3 Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Sasaran 3.1 Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah	Strategi 3.1 Upaya mensinkronkan rencana tata ruang dengan realisasi pembangunan
	Sasaran 3.2 Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Strategi 3.2 Upaya penataan permukiman padat guna mewujudkan permukiman yang nyaman dan layak huni
	Sasaran 3.3 Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Strategi 3.3 Upaya peningkatan kesadaran masyarakat & desa agar siap, tangguh dan sadar akibat bencana alam
	Sasaran 3.4 Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup	Strategi 3.4 Upaya penataan sarana & prasarana lingkungan hidup mengikuti perkembangan regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja
Misi 4 Penyelenggaraan kePemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif		
Tujuan 4: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih & efektif	Sasaran 4.1 Terselenggaranya Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah	Strategi 4.1 Upaya ekstensi dan intensifikasi sumber PAD seperti penggalian potensi transaksi perdagangan dan ekonomi berbasis elektronik
	Sasaran 4.2 Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Strategi 4.2 Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat
	Sasaran 4.3 Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Strategi 4.3a Upaya peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan sistem yang terintegrasi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan & pelaporan
		Strategi 4.3b Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh SKPD berdasar standar akuntansi pemerintah
	Sasaran 4.4 Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Strategi 4.3c Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	Sasaran 4.5 Berkembangnya profesionalitas ASN	Strategi 4.4 Upaya pengembangan kinerja sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yang akuntabel, bersih & berintegritas
Sasaran 4.6 Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Strategi 4.5 Upaya peningkatan kinerja ASN yang berintegritas & berkapasitas tinggi berdasarkan sistem merit	
		Strategi 4.6 Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana & prasarana IT

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		yang memadai
		Strategi 4.7 Percepatan dalam koordinasi dan kolaborasi pengembangan e-government yang terintegrasi
Misi 5 Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis		
Tujuan 5 Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur	Sasaran 5.1 Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama	Strategi 5.1 Pengarusutamaan nilai-nilai pancasila dan agama dalam bidang pendidikan sejak usia dini
	Sasaran 5.2 Mengembangkan seni budaya Banjar & seni budaya religius yang mencerminkan karakter & kepribadian luhur masyarakat Banjar	Strategi 5.2 Upaya mendorong pengembangan kelompok budaya dan seni khas Banjar secara berkelanjutan secara nasional maupun internasional
	Sasaran 5.3 Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Strategi 5.3 Upaya fasilitasi peran pemuda dan santri yang berkinerja tinggi dalam seni budaya dan olah raga
	Sasaran 5.4 Meningkatkan ketertiban umum & ketenteraman di masyarakat	Strategi 5.4 Upaya pencegahan terjadi konflik ideologi dan SARA dimasyarakat melalui kolaborasi dengan sektor keamanan dan pertahanan lintas wilayah dan nasional
		Strategi 5.5 Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026

Arah kebijakan adalah pedoman yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan pembangunan prioritas tahunan untuk apa yang harus dilakukan yang kemudian dijadikan tema RKPD. Berikut arah kebijakan tahunan Kabupaten Banjar yaitu:

- 2022 Peningkatan kualitas SDM khususnya sektor kesehatan, pendidikan dan daya beli serta pemulihan ekonomi masyarakat dalam koridor karakter masyarakat yang agamis.
- 2023 Kemandirian ekonomi rakyat dengan dukungan SDM berkualitas serta Infrastruktur dan tata kelola pemerintahan baik sebagai penunjangnya.
- 2024 Reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pengembangan SDM dan Ekonomi kerakyatan yang berorientasi lingkungan.
- 2025 Pembangunan Lingkungan yang berkelanjutan dengan dukungan hasil reformasi birokrasi dan ekonomi hijau lingkungan dengan dukungan pemenuhan infrastruktur penunjangnya.
- 2026 Pembentukan karakter masyarakat yang religius agamis dalam mendukung SDM yang berkualitas dan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Prioritas Daerah

- Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia, memiliki tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan sebagai berikut:

Tujuan 1 .1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas

- a. Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem Kesehatan
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b. Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana Pendidikan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - c. Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya daya beli masyarakat
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - d. Sasaran 1.1.4 : Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat
 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - e. Sasaran 1.1.5 : Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak
 - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Program Perlindungan Perempuan
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Misi 2: Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan memiliki tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan sebagai berikut :
- 1) Tujuan 2.1 :Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas
 - a. Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi
 - Program Penyelenggaraan Jalan
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- b. Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - c. Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 2) Tujuan 2.2 : Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran
- a. Sasaran 2.2.1 : Menurunnya Angka Pengangguran
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Penempatan Tenaga Kerja
 - b. Sasaran 2.2.2 : Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM
 - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - c. Sasaran 2.2.3 : Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Program Penyuluhan Pertanian
 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - d. Sasaran 2.2.4 : Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial
 - Program Pemberdayaan Sosial
 - Program Rehabilitasi Sosial
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - e. Sasaran 2.2.5 : Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan
 - Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- f. Sasaran 2.2.6 : Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga
 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - g. Sasaran 2.2.7 : Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Penyelenggaraan Jalan
- Misi 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan memiliki tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan sebagai berikut :
- Tujuan 3.1 : Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan
- a. Sasaran 3.1.1 : Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Program Pengelolaan Izin Lokasi
 - b. Sasaran 3.1.2 : Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Kawasan Permukiman
 - Program Pengelolaan Persampahan
 - c. Sasaran 3.1.3 : Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan
 - Program Penanggulangan Bencana
 - d. Sasaran 3.1.4 : Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup
 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- Misi 4 : Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif memiliki tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan sebagai berikut :
- Tujuan 4.1 : Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif
- a. Sasaran 4.1.1 : Terselenggaranya Reformasi sumber - sumber pendapatan daerah
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- b. Sasaran 4.1.2 : Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik
 - Program Pendaftaran Penduduk
 - Program Pencatatan Sipil
 - Program Pelayanan Penanaman Modal
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Program Pembinaan Perpustakaan
 - Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Sasaran 4.1.3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Sasaran 4.1.4 : Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- e. Sasaran 4.1.5 : Berkembangnya profesional ASN
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- f. Sasaran 4.1.6 : Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik
 - Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - Program Aplikasi Informatika
 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- Misi 5 : Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis memiliki Tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Tujuan 5.1 : Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur

- a. Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya pengamalan nilai- nilai Pancasila dan nilai-nilai agama
 - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- b. Sasaran 5.1.2 : Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar
 - Program Pengembangan Kebudayaan
- c. Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- d. Sasaran 5.1.4 : Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat
 - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Adapun kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pada RKPD Kabupaten Banjar tahun 2023 terdapat 138 Program dan RKPD Perubahan Tahun 2023 139 Program, RKPD Tahun 2023 281 Kegiatan

dan RKPD Perubahan Tahun 2023 282 Kegiatan. RKPD Tahun 2023 terdapat 796 Sub Kegiatan dan RKPD Perubahan Tahun 2023 803 Sub Kegiatan, dimana total pagu indikatif pada RKPD tahun 2023 sebesar Rp 1.503.092.700,- dan Total pagu indikatif pada RKPD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp 2.488.488.844.711,- yang terinci pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Dokumen RKPD Tahun 2023 Sesuai Urusan

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu				Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 (Rp)	APBD 2023 (Rp)	RKPD 2023 Perubahan (Rp)	APBD 2023 Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	3	3	6	6	6	62	62	65	374.356.955.423	625.265.522.367	672.879.606.942	710.302.468.789	Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4	4	4	11	11	10	62	62	60	200.503.689.719	295.766.886.138	314.732.873.864	313.305.204.142	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										154.005.283.667	162.690.113.443	176.206.541.469	176.923.311.989	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	10	10	14	14	14	51	51	51	156.770.798.458	256.035.115.042	296.570.748.735	301.320.102.597	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	4	7	7	7	16	16	16	19.099.995.868	23.113.805.051	32.886.462.088	34.693.034.187	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										10.684.385.191	11.347.035.191	12.774.621.191	12.823.696.358	Satuan Polisi Pamong Praja
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	3	10	10	10	26	26	27	6.707.262.445	6.839.547.086	7.081.363.336	7.128.990.754	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										7.043.311.286	6.821.711.286	7.650.976.369	9.283.287.081	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4	4	4	8	8	8	24	24	24	12.729.350.301	15.141.101.701	15.672.804.701	16.199.762.560	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	4	8	8	8	13	13	13	6.589.029.925	6.548.988.825	7.206.256.625	7.352.828.976	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	6	6	11	11	11	12	12	12	418.983.900	2.268.950.700	2.268.950.700	2.268.950.700	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	4	4	7	7	7	16	16	16	9.065.242.772	9.678.490.472	9.833.237.482	9.998.071.490	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4	4	4	4	4	4	6	6	6	1.189.481.300	733.281.300	733.281.300	1.276.929.300	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9	9	9	12	12	12	25	25	26	35.691.589.860	36.241.124.578	43.106.593.690	43.603.374.792	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu				Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 (Rp)	APBD 2023 (Rp)	RKPD 2023 Perubahan (Rp)	APBD 2023 Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										4.999.997.500	5.280.997.500	8.366.297.670	8.366.297.670	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	3	3	5	5	5	8	8	8	7.712.983.532	8.508.770.911	8.784.258.111	8.844.374.992	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	4	4	4	4	4	18	18	18	145.707.859.873	154.072.040.141	166.239.185.913	166.581.144.408	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3	7	7	7	13	13	13	395.908.300	11.848.760.700	12.012.000.200	12.012.000.200	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	2	11	11	11	25	25	25	8.074.985.295	9.365.444.571	11.187.160.193	13.516.468.532	Dinas Perhubungan
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	2	2	3	3	3	12	12	12	13.805.171.375	14.031.382.525	17.254.141.325	17.319.853.940	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7	7	7	8	8	8	15	15	15	10.553.409.669	10.706.819.369	11.376.617.177	11.469.450.810	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	5	5	5	5	5	10	10	10	8.443.510.171	9.089.830.171	10.478.876.034	13.753.961.372	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	2	2	7	7	7	8	8	8	9.005.805.956	12.897.358.336	19.012.504.745	19.441.817.089	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	4	4	4	142.799.520	142.799.520	142.799.520	142.799.520	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	2	2	2	5	5	5	78.526.420	78.526.420	78.526.420	78.526.420	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	3	3	6	6	6	8	8	8	1.420.180.300	1.700.156.800	1.700.156.800	1.700.156.800	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	2	3	3	3	8	8	7	4.808.405.757	4.809.442.757	4.941.417.283	5.023.841.170	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	2	6	6	6	11	11	11	346.635.750	337.738.250	316.565.000	316.565.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	4	12	12	12	20	20	20	967.086.950	847.263.300	823.351.010	823.351.010	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	3	3	5	5	5	9	9	9	2.920.743.700	3.437.082.700	3.684.082.500	4.205.742.500	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	17	17	17	32	32	32	34.539.924.206	38.329.554.136	39.071.340.716	39.369.248.339	Dinas Pertanian

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu				Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 (Rp)	APBD 2023 (Rp)	RKPD 2023 Perubahan (Rp)	APBD 2023 Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	6	6	10	10	10	21	21	21	1.437.515.148	1.761.693.648	1.657.749.648	1.657.749.648	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	3	3	8	8	8	370.668.400	1.646.761.524	1.745.910.524	1.770.908.024	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	50.000.000	50.000.000	145.336.000	145.336.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	SEKRETARIAT DAERAH	2	2	2	8	8	8	20	20	20	37.250.051.045	49.668.885.445	57.063.299.173	58.190.569.821	Sekretariat Daerah
36	SEKRETARIAT DPRD	1	1	1	3	3	3	7	7	7	61.634.964.745	68.918.419.745	80.036.419.645	81.156.041.032	Sekretariat DPRD
37	PERENCANAAN	2	2	2	6	6	6	26	26	26	11.297.073.780	11.459.658.282	12.492.782.021	12.621.007.330	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
38	KEUANGAN	3	3	3	7	7	7	38	38	38	50.539.593.619	270.194.205.549	277.860.852.624	285.527.442.669	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
39	KEPEGAWAIAN	1	1	1	4	4	4	22	22	22	13.012.379.134	10.363.236.734	12.971.882.734	13.294.725.463	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
40	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1	1	0	2	2	0	6	6	-	3.103.138.400	3.451.597.400	3.451.597.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
41	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	3	3	3	4	4	4	953.938.700	1.355.869.200	1.332.412.200	1.332.412.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
42	INSPEKTORAT DAERAH	2	2	2	3	3	3	11	11	11	11.670.310.039	11.584.860.032	13.097.479.834	13.302.825.008	Inspektorat Daerah
43	KECAMATAN										5.361.927.255	5.407.227.255	6.265.227.255	4.778.265.721	Kecamatan Kertak Hanyar
44	KECAMATAN										2.429.170.851	2.474.470.851	2.582.470.851	2.614.419.841	Kecamatan Astambul
45	KECAMATAN										4.849.003.758	6.325.503.758	6.833.503.502	6.878.307.434	Kecamatan Gambut
46	KECAMATAN										2.794.095.747	2.830.595.747	3.011.740.889	3.035.554.557	Kecamatan Karang Intan
47	KECAMATAN										11.093.439.106	11.128.589.106	13.018.950.389	13.112.454.212	Kecamatan Martapura
48	KECAMATAN										2.089.785.983	2.137.835.983	2.504.074.606	2.576.560.063	Kecamatan Aranio
49	KECAMATAN										3.368.971.614	3.412.066.658	4.103.751.700	4.131.911.836	Kecamatan Sungai Tabuk
50	KECAMATAN										1.695.004.926	1.748.004.926	2.366.622.084	2.387.675.021	Kecamatan Aluh-Aluh
51	KECAMATAN										2.441.283.377	2.486.583.377	2.594.583.377	2.616.792.746	Kecamatan Mataraman
52	KECAMATAN	5	5	5	13	13	13	38	38	37	2.008.724.866	2.057.768.666	2.204.830.422	2.230.575.923	Kecamatan Simpang Empat
53	KECAMATAN										2.407.942.906	2.456.442.906	2.605.292.906	2.629.181.780	Kecamatan Pengaron
54	KECAMATAN										1.853.499.033	1.906.499.033	2.203.931.971	2.227.724.650	Kecamatan Sungai Pinang
55	KECAMATAN										2.259.364.242	2.304.664.242	2.438.647.717	2.467.434.091	Kecamatan Beruntung Baru
56	KECAMATAN										2.252.975.271	2.290.794.271	2.483.569.522	2.511.824.579	Kecamatan Martapura Barat
57	KECAMATAN										1.986.828.299	2.033.128.299	2.141.128.299	2.178.298.443	Kecamatan Sambung Makmur
58	KECAMATAN										2.637.843.743	2.677.243.743	3.018.448.624	3.044.092.937	Kecamatan Martapura Timur
59	KECAMATAN										1.979.107.276	2.017.107.276	2.625.107.276	2.654.522.507	Kecamatan Paramasan
60	KECAMATAN										2.211.193.182	2.256.493.182	2.408.393.182	2.436.728.532	Kecamatan Tatah Makmur

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu				Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 (Rp)	APBD 2023 (Rp)	RKPD 2023 Perubahan (Rp)	APBD 2023 Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	KECAMATAN										2.087.508.378	2.132.808.378	2.240.808.378	2.257.098.986	Kecamatan Telaga Bauntung
62	KECAMATAN										2.103.547.580	2.156.547.380	2.264.547.380	2.285.281.161	Kecamatan Cintapuri Darussalam
63	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5	5	5	5	5	11	11	11	6.185.693.719	13.440.075.769	41.643.893.469	44.933.608.630	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		138	139	139	281	283	282	796	802	803	1.503.092.700.11 1	2.249.762.820.65 2	2.488.844.711	2.559.635.131.121	

Sumber : Bappedalitbang, 2024

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak hanya ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Banjar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar hukum penerapan pelayanan standar pelayanan minimal yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kentenraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar; dan
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 188.45/18/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banjar.

Berikut adalah Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar yang mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023.

Tabel 10
Program Pemerintah Kabupaten Banjar yang Mendukung Penerapan SPM Tahun 2023

No	SPM (Peraturan Pemerintah No.02 Tahun 2018)	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
BIDANG PENDIDIKAN					
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	1. Program Pendidikan	Dinas Pendidikan		
2.	Pendidikan Dasar	2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
3.	Pendidikan Kesetaraan	3. Program Pengembangan Kurikulum			
BIDANG KESEHATAN					
4.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan		
5.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin.				
6.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.				
7.	Pelayanan kesehatan balita.				
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.				
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif				
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.				
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.				
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.				
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.				
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis				
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif				
BIDANG PEKERJAAN UMUM					
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan			Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1. Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar		
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	2. Program Perumahan & Kawasan Pemukiman Kumuh			
		3. Program Kawasan Permukiman			

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

No	SPM (Peraturan Pemerintah No.02 Tahun 2018)	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
21.	Pelayanan informasi rawan bencana.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Program Bencana	
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Penanggulangan, Kebakaran dan Non Kebakaran	Pencegahan, Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kabupaten Banjar
BIDANG SOSIAL			
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.		
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti.		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Program Rehabilitasi Sosial	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Banjar
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti,dan		
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Program Penanganan Bencana	

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2023

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

Kebijakan Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat. Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM termuat dalam RPJMD.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 11
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Banjar Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	% Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,72	74,01	4,652
2.	Angka Kemiskinan	2,79	2,44	-12,545
3.	Angka Pengangguran	2,72	2,73	0,369
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,48	4,35	-2,902
5.	Pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar harga berlaku) (miliar rupiah)	12.871	13.301	3,341
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,300	0,297	-1

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2024

a. Indeks Pembangunan Manusia

Meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia merupakan salah satu misi dari lima misi yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selama periode 2021 – 2026. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur keberhasilan suatu wilayah dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banjar, karena kualitas hidup penduduk merupakan aset yang memiliki peranan cukup besar dalam pembangunan suatu daerah. Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada tahun 2019 hingga 2023 nilai IPM Kabupaten Banjar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM provinsi Kalimantan Selatan, nilai IPM Kabupaten Banjar masih lebih rendah, dimana tahun 2023 IPM Kabupaten Banjar sebesar 74,01% sedangkan IPM provinsi Kalimantan Selatan mencapai 74,66%.

Tabel 12
Komponen Dasar Pembentuk IPM Kabupaten Banjar dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2023

Komponen	Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Dimensi Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	Kab. Banjar	66,97	67,21	67,41	67,73	68,01

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

Komponen	Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
	Prov. Kalsel	68,23	68,49	68,66	69,13	69,42
Dimensi Pendidikan (Harapan Lama Sekolah)	Kab. Banjar	12,28	12,44	12,73	13,02	13,03
	Prov. Kalsel	12,52	12,68	12,81	12,82	12,86
Dimensi Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah)	Kab. Banjar	7,34	7,35	7,52	7,71	7,94
	Prov. Kalsel	8,2	8,29	8,34	8,46	8,55
Dimensi Keuangan (Pengeluaran perkapita)	Kab. Banjar	12.681	11.013	12.707	12.871	13.301
	Prov. Kalsel	12,253	12.032	12.143	12.469	12.953
Indeks Pembangunan Manusia	Kab. Banjar	68,94	69,18	69,89	70,72	74,01
	Prov. Kalsel	70,17	70,72	70,91	74,00	74,66

Sumber : Data diolah Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar, 2024

IPM dapat dilihat dari komponen pembentuknya yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran riil/perkapita. Pada tahun 2023 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banjar mencapai 68,01 tahun, artinya seorang bayi yang baru lahir di tahun 2023 di Kabupaten Banjar diperkirakan akan memiliki harapan hidup hingga usia 68 tahun.

Indeks pendidikan masyarakat dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah atau *Expected Years of Schooling* (EYS) dan Rata-Rata Lama Sekolah atau *Mean Years of Schooling* (MYS). Harapan Lama Sekolah, Kabupaten Banjar berada di angka 13,03 tahun. Ini menyatakan bahwa penduduk usia sekolah diharapkan bisa bersekolah sampai tamat SMA. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banjar adalah 7,94 artinya penduduk Kabupaten Banjar yang berusia 7 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah adalah selama 8 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Banjar berpendidikan sampai dengan kelas 8 atau kelas 2 SMP dan putus sekolah ketika kelas 9 atau kelas 3 SMP.

Pada tahun 2023 pengeluaran perkapita Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dari Rp. 12.871 pada tahun 2022 menjadi Rp. 13.301 per kapita per tahunnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Kalimantan Selatan yang nilainya sebesar Rp. 12.953.

Kriteria dan tingkatan status IPM menurut UNDP adalah rendah $IPM < 60$; sedang $60 \leq IPM \leq 70$; tinggi $70 \leq IPM \leq 80$; sangat tinggi ≥ 80 . Dari kriteria membuat status IPM di Kabupaten Banjar adalah tinggi. Kemudian secara peringkat antar Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan peringkat IPM Kabupaten Banjar pada tahun 2015 adalah 9, pada tahun 2016 dan tahun 2017 adalah 10, pada tahun 2018 dan 2019 adalah 8, pada tahun 2020 adalah 7,

pada tahun 2021 adalah 6 dan pada tahun 2022 adalah 6, pada tahun 2023 adalah 6 Peringkat-peringkat ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten Banjar terus berusaha ditingkatkan.

b. Angka Kemiskinan

Pendekatan yang digunakan adalah Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Basic Need Approach*) dalam menentukan penduduk miskin. Definisi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). GK terbagi menjadi 2 yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan Garis Kemiskinan Non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dari tahun ke tahun, besaran nilai GK terus mengalami kenaikan karena adanya pengaruh kenaikan harga komoditi. GK Kabupaten Banjar pada tahun 2023 (Rp 561.521) mengalami kenaikan sebesar 9,035% dibanding GK tahun sebelumnya (Rp 514.991).

Tabel 13
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2019 - 2023 (%)

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase Penduduk Miskin	2,72	2,55	3,04	2,79	2,44

Sumber : BPS Kab. Banjar, 2024

Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar sebesar 2,44% mengalami penurunan sebanyak -12,545%, dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 2,79%. Tahun 2023 Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin nomor 13 di Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk miskin 14.770 jiwa.

c. Angka Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, permasalahan utama dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Permasalahan pengangguran memiliki dampak pada kerawanan sosial dan keamanan. Fenomena pengangguran menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*lexcess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lowongan yang tersedia. Pengangguran juga merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang sangat informatif yang dapat menggambarkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Tingginya angka TPT mencerminkan tingkat kegagalan penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Banjar tahun 2023 sebesar 2,73% yang artinya dari 100 orang Angkatan kerja di Kabupaten Banjar yang termasuk kategori pengangguran ada sekitar 3 orang. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,369%.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sebesar 4,35% menurun dibanding tahun 2022 sebesar 4,48%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan 4,84%. Pada tahun 2023 100% PDRB ADHK Kabupaten banjar disumbangkan oleh kategori pertanian sebesar 14,85%, kategori perdagangan sebesar 14,60% dan 22,05% kategori pertambangan. Tahun 2023 PDRB ADHB Kabupaten Banjar sebesar Rp. 22.634,50 miliar,- sedangkan PDRB ADHK Rp. 13.201,49 juta,-.

Tabel 1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 (%)

No.	Daerah	Pertumbuhan Ekonomi 2019	Pertumbuhan Ekonomi 2020	Pertumbuhan Ekonomi 2021	Pertumbuhan Ekonomi 2022	Pertumbuhan Ekonomi 2023
1.	Kota Banjarmasin	6,12	-1,91	3,41	5,69	5,62
2.	Kota Banjarbaru	6,92	6,92	3,33	7,93	6,81
3.	Kabupaten Banjar	4,52	-1,96	3,21	4,48	4,35
4.	Kabupaten Tanah Laut	3,74	-1,99	3,47	5,12	4,78
5.	Kabupaten Tapin	4,25	-1,49	3,41	4,91	4,88
6.	Kabupaten Tanah Bumbu	4,14	3,63	-1,46	5,45	4,84
7.	Kabupaten Kotabaru	4,89	-1,88	3,35	4,58	4,29
8.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	5,3	-1,19	4,19	4,02	5,27
9.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,78	-1,01	3,01	3,93	4,11
10.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	5,52	-0,67	3,12	4,08	4,54

11.	Kabupaten Balangan	3,17	-2,47	3,27	5,24	4,17
12.	Kabupaten Tabalong	3,67	-2,62	3,27	5,29	4,90
13.	Kabupaten Barito Kuala	5,05	-1,06	3,17	3,59	3,91
14.	Provinsi Kalimantan Selatan	5,08	-1,82	3,48	5,11	4,84

Sumber : Data diolah Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar, 2024

e. Pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar harga berlaku)

Ukuran kesejahteraan memang sulit dicakup dalam satu indikator yang komprehensif, dan untuk data pendapatan per kapita tidak tersedia di instansi-instansi Kabupaten Banjar, namun data yang mendekati dengan pendapatan per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah dalam tahun tertentu atau periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB per kapita dapat dilihat dari dua sisi, yaitu PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan PDRB mencakup juga menyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Hal ini dikarenakan Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, dimana semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Oleh karena itu, pendapatan per kapita menggunakan pendekatan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2022 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Banjar

sebesar Rp. 21.071,22,- sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp. 22.634,50,-.

Tabel 2
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2019-2023(Rp. Miliar)

PDRB	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
ADHB	16.626,08	16.527,38	17.934,87	22.634,50	22.634,50
ADHK	11.967,13	11.732,66	12.109,22	12.651,50	13.201,49

Sumber : BPS Kab. Banjar, 2024

Adapun komponen / lapangan usaha penyumbang pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dijelaskan sebagaimana di bawah ini :

Tabel 3
PDRB Kabupaten Banjar 2018-2023 atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.758,92	2.949,76	2.917,83	3.008,17	3.176,23	3.361
B Pertambangan dan Penggalian	2.497,47	2.419,57	2.231,37	2.883,49	4.860,82	4.990,45
C Industri Pengolahan	1.098,86	1.143,04	1.130,20	1.223,63	1.321,49	1.348,08
D Pengadaan Listrik dan Gas	21,88	23,46	25,25	27,11	29,45	32,30
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,14	37,86	39,74	42,12	47,7	51,79
F Konstruksi	1.602,86	1.741,06	1.732,04	1.855,07	2.020,99	2.205,43
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.260,27	2.493,03	2.419,90	2.568,43	2.882,38	3.304,95
H Transportasi dan Pergudangan	731,65	806,15	792,3	819,43	903,64	1.047,65
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	492,93	542,69	549,31	576,06	632,35	701,36
J Informasi dan Komunikasi	567,23	623,65	676,07	740,45	800,48	870,06
K Jasa Keuangan dan Asuransi	345,33	366,63	376,8	403,65	414,57	442,93
L Real Estat	525,4	567,1	596,43	643,28	683,46	733,85
M,N Jasa Perusahaan	55,53	61,73	62,26	65,03	71,46	81,06
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.101,85	1.224,17	1.270,84	1.261,90	1.290,26	1.374,08
P Jasa Pendidikan	856,94	952,23	988,69	1.039,07	1.086,67	1.163,98
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	353,98	382,24	426,49	475,24	519,1	567,30
R,S,T,U Jasa lainnya	262,84	289,91	291,87	302,19	330,69	359,24

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
PDRB	15.569,05	16.626,08	16.527,38	17.934,28	21.071,72	22.634,50

*Angka sementara / **Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kab. Banjar, 2024

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan pendapatan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara 0-1. Nilai nol berarti terjadi pemerataan sempurna, di mana semua nilai pendapatan penduduk adalah sama sedangkan nilai satu berarti terjadi ketimpangan sempurna, di mana satu orang menguasai semua pendapatan penduduk dan yang lainnya nihil. *Gini ratio* dibagi menjadi tiga kategori yaitu 0 sampai 0,3 berarti ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 berarti ketimpangan sedang dan antara 0,5 sampai 1 yang berarti ketimpangan tinggi. Semakin tinggi koefisien gini ratio, maka itu menjadi indikasi semakin tinggi ketimpangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh bahwa nilai koefisien gini Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 0,297 berarti di Kabupaten Banjar distribusi pendapatan penduduk cukup merata. *Gini ratio* tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 0,300. Mayoritas Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan koefisien gini pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, pada tahun 2023 Kabupaten Banjar dengan *gini ratio* sebesar 0,297 berada diperingkat 9 (Sembilan) dan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan *gini ratio* Kalimantan Selatan yang berarti secara rata-rata ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Banjar lebih kecil dibandingkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum.

Tabel 4
Perbandingan *Gini Ratio* Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023

No.	Daerah	<i>Gini Ratio</i> 2018	<i>Gini Ratio</i> 2019	<i>Gini Ratio</i> 2020	<i>Gini Ratio</i> 2021	<i>Gini Ratio</i> 2022	<i>Gini Ratio</i> 2023
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	0,34	0,334	0,332	0,33	0,317	0,313
2.	Kabupaten Tanah Laut	0,23	0,271	0,25	0,232	0,263	0,259
3.	Kabupaten Kotabaru	0,34	0,335	0,287	0,306	0,331	0,316
4.	Kabupaten Banjar	0,33	0,33	0,322	0,344	0,3	0,297
5.	Kabupaten Barito Kuala	0,34	0,285	0,277	0,284	0,289	0,312
6.	Kabupaten Tapin	0,28	0,268	0,274	0,289	0,291	0,281
7.	Kabupaten	0,32	0,288	0,3	0,275	0,26	0,293

No.	Daerah	Gini Ratio 2018	Gini Ratio 2019	Gini Ratio 2020	Gini Ratio 2021	Gini Ratio 2022	Gini Ratio 2023
	Hulu Sungai Selatan						
8.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	0,32	0,288	0,285	0,331	0,228	0,225
9.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,32	0,327	0,319	0,378	0,301	0,271
10.	Kabupaten Tabalong	0,31	0,306	0,346	0,288	0,337	0,284
11.	Kabupaten Tanah Bumbu	0,33	0,346	0,3	0,281	0,292	0,280
12.	Kabupaten Balangan	0,31	0,273	0,298	0,277	0,266	0,258
13.	Kota Banjarmasin	0,38	0,326	0,342	0,35	0,33	0,370
14.	Kota Banjarbaru	0,36	0,357	0,381	0,361	0,341	0,321

Sumber : BPS Kab. Banjar, 2024

Selama beberapa tahun terakhir ini, ekonomi Kabupaten Banjar tumbuh relatif cukup baik. Dari tahun 2018 - 2023, data *gini ratio* Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cukup stabil dan dapat dikategorikan ketimpangan rendah yang ditunjukkan oleh angka GR yang berada pada kisaran 0 sampai dengan 0,300 artinya distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar cukup merata tetapi masih pada klasifikasi ketimpangan rendah.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap.

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

Tabel 58
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Banjar Tahun 2023

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
1	Pendidikan				
01:01		Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (Negeri dan Swasta)	315	Dinas Pendidikan	
01:02	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	709	Dinas Pendidikan	
01:03		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
01:04		Jumlah kebutuhan minimal Pendidikan PAUD (Negeri dan Swasta)	1054	Dinas Pendidikan	
01:05		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	603	Dinas Pendidikan	
01:06		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan dan atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	129	Dinas Pendidikan	
01:07		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	81	Dinas Pendidikan	
01:08		Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	442	Dinas Pendidikan	
01:09		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
01:10		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1480	Dinas Pendidikan	
01:11		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	39.172	Dinas Pendidikan	
01:12		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	11.100	Dinas Pendidikan	
01:13		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.151	Dinas Pendidikan	
01:14		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan Swasta)	1.065	Dinas Pendidikan	
01:15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.750	Dinas Pendidikan	
01:16		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	921	Dinas Pendidikan	
01:17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	372	Dinas Pendidikan	
01:18		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	150	Dinas Pendidikan	
01:19		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	372	Dinas Pendidikan	
01:20		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	136	Dinas Pendidikan	
01:21		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.547	Dinas Pendidikan	
01:22		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	625	Dinas Pendidikan	
01:23		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	237	Dinas Pendidikan	
01:24		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	69	Dinas Pendidikan	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
01:25		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	40	Dinas Pendidikan	
01:26		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	10	Dinas Pendidikan	
01:27		Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	442	Dinas Pendidikan	
01:28		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
01:29		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1480	Dinas Pendidikan	
01:30	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	39.172	Dinas Pendidikan	
01:31		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	11.100	Dinas Pendidikan	
01:32		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.151	Dinas Pendidikan	
01:33		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.065	Dinas Pendidikan	
01:34		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.750	Dinas Pendidikan	
01:35		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	921	Dinas Pendidikan	
01:36		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	372	Dinas Pendidikan	
01:37		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	150	Dinas Pendidikan	
01:38		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	372	Dinas Pendidikan	
01:39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	136	Dinas Pendidikan		
01:40		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.547	Dinas Pendidikan	
01:41		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	625	Dinas Pendidikan	
01:42		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	237	Dinas Pendidikan	
01:43		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	69	Dinas Pendidikan	
01:44		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	40	Dinas Pendidikan	
01:45		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	10	Dinas Pendidikan	
01:46		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	23	Dinas Pendidikan	
01:47	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
01:48		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.940	Dinas Pendidikan	
01:49		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	849	Dinas Pendidikan	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
01:50		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	369	Dinas Pendidikan	
01:51		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	259	Dinas Pendidikan	
01:52		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Dinas Pendidikan	
01:53		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	17	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan				
02:01	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	11	Dinas Kesehatan	
02:02	Persentase RS Rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase RS Rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	0	Dinas Kesehatan	
02:03	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.061.646	Dinas Kesehatan	
02:04		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	768	Dinas Kesehatan	
02:05	Persentase bu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	25.089	Dinas Kesehatan	
02:06		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	768	Dinas Kesehatan	
02:07	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	53.100	Dinas Kesehatan	
02:08		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	768	Dinas Kesehatan	
02:09	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	504.960	Dinas Kesehatan	
02:10		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3.777	Dinas Kesehatan	
02:11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	163.598	Dinas Kesehatan	
02:12		Jumlah SDK Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	3.844	Dinas Kesehatan	
02:13	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	713.462	Dinas Kesehatan	
02:14		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.450	Dinas Kesehatan	
02:15	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	129.957	Dinas Kesehatan	
02:16		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.221	Dinas Kesehatan	
02:17	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	32.944	Dinas Kesehatan	
02:18		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	811	Dinas Kesehatan	
02:19	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22.967	Dinas Kesehatan	
02:20		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	875	Dinas Kesehatan	
02:21	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	75	Dinas Kesehatan	
02:22		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	763	Dinas Kesehatan	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
02:23	Persentase orang terduga TBS	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	48.507	Dinas Kesehatan	
02:24	mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	758	Dinas Kesehatan	
02:25	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	27.006	Dinas Kesehatan	
02:26	mendapatkan pelayanan deteksi dini sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	879	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum				
03:01		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)	24.816	DPUPRP	
03:02		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	540.261	DPUPRP	
03:03		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	1.377,6	DPUPRP	
03:04	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	4.47827	DPUPRP	
03:05		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	1	DPUPRP	
03:06		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1	DPUPRP	
03:07		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	4	DPUPRP	
03:08		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	24.816	DPUPRP	
03:09		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	540.261	DPUPRP	
03:10		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1.377,6	DPUPRP	
03:11	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	4.47827	DPUPRP	
03:12		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	1	DPUPRP	
03:13		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1	DPUPRP	
03:14		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	4	DPUPRP	
03:15		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	2.563%	DPUPRP	
03:16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	6.046%	DPUPRP	
03:17		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0%	DPUPRP	
03:18		Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten	Ada	DPUPRP	
03:19	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten	Ada	DPUPRP	
03:20		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten penyelenggaraan SPAM	Ada	DPUPRP	
03:21		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	2	DPUPRP	
03:22		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	1	DPUPRP	
03:23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	134.410	DPUPRP	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
03:24	domestik	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	447	DPUPRP	
03:25		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	130.439	DPUPRP	
03:26		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	3942	DPUPRP	
03:27		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	3942	DPUPRP	
03:28		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	130.439	DPUPRP	
03:29		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	129,53%	DPUPRP	
03:30		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD -S akses aman	9,86%	DPUPRP	
03:31		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	5,10%	DPUPRP	
03:32		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	85,44%	DPUPRP	
03:33		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100%	DPUPRP	
03:34		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100%	DPUPRP	
03:35		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	5,10%	DPUPRP	
03:36		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	2,59%	DPUPRP	
03:37		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	100%	DPUPRP	
03:38		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	234	DPUPRP	
03:39		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	DPUPRP	
03:40		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak	DPUPRP	
03:41	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	25	DPUPRP	
03:42		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	0	DPUPRP	
03:43		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	4.019	DPUPRP	
03:44		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	3.718	DPUPRP	
03:45		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	781,65	DPUPRP	
03:46		Panjang jalan yang dibangun	45,307	DPUPRP	
03:47		Panjang jembatan yg dibangun	0,06	DPUPRP	
03:48		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	34,15	DPUPRP	
03:49	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0,096	DPUPRP	
03:50		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	67,445	DPUPRP	
03:51		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0,4845	DPUPRP	
03:52		Panjang jalan yang dipelihara	32,4455 Km	DPUPRP	
03:53		Panjang jembatan yang dipelihara	0,39285 Km	DPUPRP	
03:54	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	4	DPUPRP	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
03:55	kompetensi	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	150	DPUPRP	
03:56		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	137	DPUPRP	
03:57		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	DPUPRP	
03:58		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1	DPUPRP	
03:59		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1	DPUPRP	
03:60		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	DPUPRP	
03:61		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	89	DPUPRP	
03:62		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	DPUPRP	
03:63		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	4	DPUPRP	
03:64		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan sertifikat operator teknisi/analisis dengan pelatihan	137	DPUPRP	
03:65		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	137	DPUPRP	
03:66		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	24	DPUPRP	
03:67		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPUPRP	
03:68		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	89	DPUPRP	
03:69		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPRP	
03:70		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	89	DPUPRP	
03:71		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DPUPRP	
03:72		Jumlah usaha perseorangan memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	DPUPRP	

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
03:73		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	DPUPRP	
03:74		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kot	24	DPUPRP	
03:75		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPUPRP	
03:76		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	89	DPUPRP	
03:77		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPRP	
03:78		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	89	DPUPRP	
4	Perumahan Rakyat				
04:01		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	91078	DPRKPLH	
04:02		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	396	DPRKPLH	
04:03		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	1272	DPRKPLH	
04:04	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	15	DPRKPLH	
04:05		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKPLH	
04:06		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKPLH	
04:07		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DPRKPLH	
04:08		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	92	DPRKPLH	
04:09		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DPRKPLH	
04:10		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKPLH	
04:11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKPLH		
04:12	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKPLH	
04:13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	13	DPRKPLH		
04:14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKPLH		
04:15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DPRKPLH		
04:16	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	119,54	DPRKPLH	
04:17		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	15	DPRKPLH	
04:18		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	30,98	DPRKPLH	
04:19	Berkurangnya jumlah	Jumlah rumah di kab/kota	175116	DPRKPLH	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)	
04:20	unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	385	DPRKPLH		
04:21		Jumlah rumah tidak layak huni	5553	DPRKPLH		
04:22		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DPRKPLH		
04:23		Rasio rumah dan KK	1,13	DPRKPLH		
04:24		Jumlah rumah pembangunan baru	0	DPRKPLH		
04:25		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	57	DPRKPLH		
04:26		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	5131	DPRKPLH		
04:27		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	5131	DPRKPLH		
04:28		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi akses sanitasi (on site / off site)	5131	DPRKPLH		
04:29		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	57	DPRKPLH		
04:30		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJJ	5131	DPRKPLH		
04:31		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	DPRKPLH		
04:32		Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	DPRKPLH		
04:33		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	DPRKPLH		
5	TRANTIBUMLINMAS					
05:01	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	476	Satpol PP		
05:02		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2126	Satpol PP		
05:03		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	39	Satpol PP		
05:04		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Satpol PP		
05:05		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	12	Satpol PP		
05:06		Tersedianya sarana prasarana minimal	89	Satpol PP		
05:07	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBD		
05:08		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD		
05:09	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD		
05:10		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD		
05:11		Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	0,213%	BPBD		
05:12		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,155%	BPBD		
05:13		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	BPBD		
05:14		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	1636%	BPBD		
05:15		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%	BPBD		
05:16		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD	
05:17		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD		
05:18		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD		
05:19	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	422	DPKP		
05:20		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1	DPKP		
05:21		Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara	7	DPKP		

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
		bergantian (shift) di kantor kecamatan			
05:22		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	125	DPKP	
05:23		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	180	DPKP	
05:24		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	29	DPKP	
05:25		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	115	DPKP	
05:26		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	7	DPKP	
6	Sosial				
06:01		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2	DSP3AP2KB	
06:02		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2353	DSP3AP2KB	
06:03		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	DSP3AP2KB	
06:04		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	2353	DSP3AP2KB	
06:05		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	DSP3AP2KB	
06:06		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1887	DSP3AP2KB	
06:07		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DSP3AP2KB	
06:08		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	8	DSP3AP2KB	
06:09	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	17	DSP3AP2KB	
06:10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	5	DSP3AP2KB	
06:11		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	12	DSP3AP2KB	
06:12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	13	DSP3AP2KB	
06:13		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1	DSP3AP2KB	
06:14		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	4	DSP3AP2KB	
06:15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	78	DSP3AP2KB	
06:16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	61	DSP3AP2KB		
06:17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	4	DSP3AP2KB		

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
06:18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	99	DSP3AP2KB	
06:19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	17	DSP3AP2KB	
06:20		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15	DSP3AP2KB	
06:21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	35	DSP3AP2KB	
06:22		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1853	DSP3AP2KB	
06:23		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	86	DSP3AP2KB	
06:24	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kabupaten/kota	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	7	DSP3AP2KB	
06:25		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	180	DSP3AP2KB	
06:26		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	75	DSP3AP2KB	
06:27		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	62	DSP3AP2KB	
7	Tenaga Kerja				
07:01		Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	1	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:02	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-30,043	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:03		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	3	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:04		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:05		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	21,154%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:06		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	8,784%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:07		Persentase LPK yang terakreditasi	35%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:08		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:09	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih	592	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:10		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:11		Persentase penyerapan lulusan	9,628%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:12		Lulusan bersertifikat kompetensi	2,703%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:13		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	16,667%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:14		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	5	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:15	Tingkat produktifitas tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	3,212%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:16		Data tingkat produktivitas	22485	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:17	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	35,789%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
07:18	kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:19		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	3244	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:20		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:21		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:22		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	4,283%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:23		Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:24		Jumlah penutupan perusahaan	1	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:25		Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:26		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:27		Jumlah perselisihan PHK	170	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:28		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	170	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:29		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	152	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:30		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/Kota yang diberdayakan	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:31		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator hubungan industrial	89,412%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:32		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	391	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:33		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota	1083	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:34		Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:35		Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	22	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:36		Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:37	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKSD) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:38		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	794	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:39		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) Online (SISNAKER)	391	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:40		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:41		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	30	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:42		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapat fasilitasi kepulangan	44,444%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:43		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
07:44		Data pemberdayaan Pekerja Migran	0%	Dinas Tenaga	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
		Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarga		Kerja & Transmigrasi	
07:45		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
08:01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilatih PUG	0	DSP3AP2KB	
08:02		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	39	DSP3AP2KB	
08:03		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	DSP3AP2KB	
08:04	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	DSP3AP2KB	
08:05		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	DSP3AP2KB	
08:06		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	DSP3AP2KB	
08:07		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD Kab/Kota)	0	DSP3AP2KB	
08:08		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	22	DSP3AP2KB	
08:09		Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	200	DSP3AP2KB	
08:10		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	DSP3AP2KB	
08:11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	0	DSP3AP2KB	
08:12		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	7	DSP3AP2KB	
08:13		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	DSP3AP2KB	
08:14		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DSP3AP2KB	
9	Pangan				
09:01		Tersedia Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	12	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
09:02		Terselurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
09:03		Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal	0	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
09:04	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam dan Bergizi Seimbang	5	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
09:05		Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	7	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
09:06		Tertanganinya Kerawanan Pangan	2	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
09:07		Terselurkannya Cadangan Pangan Pada Daerah Rentan Rawan Pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
09:08		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	2	Dinas Ketahanan	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
				Pangan & Perikanan	
10	Pertanahan				
10:01		SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota	100%	DPUPRP	
10:02	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	SK Bupati/Wali Kota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	0%	DPUPRP	
10:03		SK Bupati/Wali Kota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	0%	DPUPRP	
10:04		Dokumen izin membuka tanah	0%	DPUPRP	
10:05		Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kabupaten/Kota	100%	DPUPRP	
11	Lingkungan Hidup				
11:01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Hasil perhitungan Kabupaten terhadap :	71,62	DPRKPLH	
11:02	Tersedianya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	3	DPRKPLH	
11:03		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	86%	DPRKPLH	
11:04		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	0%	DPRKPLH	
11:05	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah Kab/Kota	0%	DPRKPLH	
11:06		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0%	DPRKPLH	
11:07		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0%	DPRKPLH	
11:08		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	100%	DPRKPLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
12:01		Penerbitan akta perkawinan	100%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
12:02	Perekaman Elektronik	Penerbitan akta perceraian	100%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	KTP
12:03		Penerbitan akta kematian	100%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
12:04		Penyajian data kependudukan	100%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
13:01		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	2	DPMD	
13:02	Persentase pengentasan tertinggal desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	DPMD	
13:03		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	31	DPMD	

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
13:04		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	13	DPMD	
13:05		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	3	DPMD	
13:06		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama desa tahun sebelumnya	2	DPMD	
13:07	Persentase peningkatan desa mandiri status	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	59	DPMD	
13:08		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	31	DPMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
14:01		Tersedianya dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK) yang di Perdakan	0	DSP3AP2KB	
14:02		Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun	19,9	DSP3AP2KB	
14:03	TFR (angka kelahiran total)	Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	42,5	DSP3AP2KB	
14:04		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	82,95%	DSP3AP2KB	
14:05		Jumlah stakeholder / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	40	DSP3AP2KB	
14:06		Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	DSP3AP2KB	
14:07	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	77,263%	DSP3AP2KB	
14:08		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	40	DSP3AP2KB	
14:09		Persentase pelayanan KB pasca persalinan	41,333%	DSP3AP2KB	
14:10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	17820	DSP3AP2KB	
14:11		Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	23,918%	DSP3AP2KB	
15	Perhubungan				
15:01		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe c	59,372%	Dinas Perhubungan	
15:02		Terlaksananya pelayanan uji berkala	74,632%	Dinas Perhubungan	
15:03	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Penetapan tarif angkutan orang antar Kota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	72,727%	Dinas Perhubungan	
15:04		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	56,827%	Dinas Perhubungan	
15:05	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	56,827%	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika				
16:01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
16:02	Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:03		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	3	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:04		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	41,3%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:05		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:06		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:07		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:08		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	33,333%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:09	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:10		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	45,45%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:11		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	36,957%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:12		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	36,957%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:13		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	13,043%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:14		Persentase data yang dapat berbagi pakai	22,22%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:15		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	47,83%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:16		Persentase ASN pengelola TIK yang bersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	44,44%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:17		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:18	Persentase Masyarakat Menjadi Sasaran	Persentase masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:19	Penyebaran Informasi Publik, Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16:20		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
17:01		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	4,44%	DKUMPP	
17:02		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	DKUMPP	
17:03		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	63,87%	DKUMPP	
17:04		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	DKUMPP	
17:05		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60,65%	DKUMPP	
17:06		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,19%	DKUMPP	
17:07	Meningkatnya Koperasi berkualitas yang	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,23%	DKUMPP	
17:08		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	DKUMPP	
17:09		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	52,26%	DKUMPP	
17:10		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30,97%	DKUMPP	
17:11		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	27,74%	DKUMPP	
17:12		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19,35%	DKUMPP	
17:13		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14,48%	DKUMPP	
17:14		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	28,31%	DKUMPP	
17:15		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	38,75%	DKUMPP	
17:16		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	13,12%	DKUMPP	
17:17	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,29%	DKUMPP	
17:18		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,29%	DKUMPP	
17:19		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,69%	DKUMPP	
17:20		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	1,78%	DKUMPP	
18	Penanaman Modal				

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
18:01		PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:02		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:03		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:04		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	5	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:05		Kegiatan pameran penanaman modal	3	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:06	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:07		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	281	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:08		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	9346	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:09		Laporan realisasi penanaman modal	1.214.951.268.638	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	4	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	200	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
18:12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga				
19:01	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	107	Disbudporapar	
19:02	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	426	Disbudporapar	
19:03		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Disbudporapar	
19:04	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	15	Disbudporapar	
19:05		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	6	Disbudporapar	
19:06					
20	Statistik				
20:01		Tersedianya buku profil	1	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20:02		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20:03	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	40	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20:04		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20:05		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	2	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20:06		Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral	100	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20:07		Persentase kelengkapan metadada variabel sektoral	100	Diskominfo, Statistik & Persandian	
21	Persandian				
21:01	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Diskominfo, Statistik & Persandian	

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
21:02		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	69,208	Diskominfo, Statistik & Persandian	
21:03		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0,293	Diskominfo, Statistik & Persandian	
21:04		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100	Diskominfo, Statistik & Persandian	
22	Kebudayaan				
22:01		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	25	Disbudporapar	
22:02		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	25	Disbudporapar	
22:03		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	25	Disbudporapar	
22:04		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Disbudporapar	
22:05		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	25	Disbudporapar	
22:06		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	25	Disbudporapar	
22:07		Layanan perijinan membawa cagar budaya Kabupaten keluar Kabupaten dengan dukungan data	0	Disbudporapar	
22:08		Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	25	Disbudporapar	
22:09	Terlestarikannya Cagar Budaya	Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	25	Disbudporapar	
22:10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disbudporapar	
22:11		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Disbudporapar	
22:12		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	Disbudporapar	
22:13		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disbudporapar	
22:14		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Disbudporapar	
22:15		Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten	1	Disbudporapar	
22:16		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5	Disbudporapar	
22:17		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	42	Disbudporapar	
22:18		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Disbudporapar	
22:19		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	28	Disbudporapar	
22:20		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Disbudporapar	
23	Perpustakaan				
23:01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	110,26%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
23:02		Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	94,06%	Dinas Perpustakaan	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)	
				& Kearsipan		
23:03		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,195%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
23:04		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	40,823%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
23:05		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	12	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
23:06		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
23:07	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
23:08		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
24	Kearsipan					
24:01	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
24:02		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
24:03		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
24:04		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	2,77%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
24:05		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
24:06		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
24:07		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24:08		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
24:09		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
24:10		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
25	Perikanan					
25:01		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	11	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan		
25:02		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0%	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan		
25:03	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	376	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan		
25:04		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	154	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan		
25:05		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	900.450	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan		
26	Pariwisata					
26:01	Persentase	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	37	Disbudporapar		

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No (1)	Urusan Pemerintahan (2)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Data (5)	Ket (6)
26:02	pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	jumlah infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	189	Disbudporapar	
26:03		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	108		
26:04		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	14.487		
26:05		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	18		
26:06		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0		
26:07		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	4		
26:08		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	21.678		
26:09		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100		
26:10		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	2		
27		Pertanian			
27:01	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	110.882	Dinas Pertanian	
27:02		Prasarana pertanian yang digunakan	285		
27:03		Penerbitan izin usaha pertanian	74		
27:04		Persentase prasarana yang digunakan	85,841%		
27:05		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100%		
27:06		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana		
28	Kehutanan				
28:01		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
28:02		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
28:03		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
28:04		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral				
29:01		Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
30	Perdagangan				
30:01	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0%	DKUMPP	
30:02		Persentase penerbitan TDG	0%		
30:03		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	23,81%		
30:04		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0%		
30:05		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0%		
30:06		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0%		
30:07		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30:08		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	2,49	DKUMPP	
30:09	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0,0035%	DKUMPP	
30:10	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	64,218%	DKUMPP	
30:11		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	52,07%	DKUMPP	
31	Perindustrian				
31:01	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0%	DKUMPP	
31:02	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	DKUMPP	
31:03	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	DKUMPP	
31:04	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	DKUMPP	
31:05	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	1,16%	DKUMPP	
32	Transmigrasi				
32:01		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
32:02		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
32:03		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	5	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2024

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Tabel 19
Indikator Kinerja Kunci Hasil Kabupaten Banjar Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.a.1	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 6 - 6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95,427%	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.a.2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	88,776%	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.a.3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	60,185%	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.a.4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96,885%	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.b.1		Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,755%	Dinas Kesehatan	
1.b.2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
1.b.3		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,589%	Dinas Kesehatan	
1.b.4		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,450%	Dinas Kesehatan	
1.b.5		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,574%	Dinas Kesehatan	
1.b.6		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,359%	Dinas Kesehatan	
1.b.7		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58,876%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61,683%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.b.9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	81,102%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.b.10		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,095%	Dinas Kesehatan	
1.b.11		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
1.b.12		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
1.b.13		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	90,717%	Dinas Kesehatan	
1.b.14		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
1.c.01			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	40,438%	DPUPRP
1.c.02	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab	66,683%	DPUPRP	
1.c.03		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	62,411%	DPUPRP	
1.c.04		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	88,064%	DPUPRP	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten			
1.c.05		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,892%	DPUPRP	
1.c.06		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	100%	DPUPRP	
1.c.07		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	52,441%	DPUPRP	
1.c.08		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	DPUPRP	
1.c.09		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPRP	
1.d.01		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	DPRKPLH & BPBD	
1.d.02		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100%	DPRKPLH	
1.d.03	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	25,916%	DPRKPLH	
1.d.04		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,171%	DPRKPLH	
1.d.05		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	DPRKPLH	
1.e.01		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
1.e.02		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	81,25%	Satpol PP	
1.e.03		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	
1.e.04	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	
1.e.05		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
1.e.06		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	68,639%	DPKP	
1.e.07		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11:43	DPKP	
1.f.01	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	DSP3AP2KB	
1.f.02		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	DSP3AP2KB	
2.a.01	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.02		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	3,858	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.a.03		Tingkat produktifitas tenaga kerja	72.044.804.627,8%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.04		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	29,122%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.05		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	44,044%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.g.01		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2,371%	DSP3AP2KB	
2.g.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100%	DSP3AP2KB	
2.g.03		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,088	DSP3AP2KB	
2.h.01	Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	31,99%	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
2.i.01		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DPUPRP & DPMPSTSP	
2.i.02		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	50%	DPUPRP	
2.i.03	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	DPUPRP & DPMPSTSP	
2.i.04		Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0%	DPUPRP	
2.i.05		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	DPUPRP & Kantor Pertanahan (BPN)	
2.i.06		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	DPUPRP	
2.j.01		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	71,62	DPRKPLH	
2.j.02	Lingkungan Hidup	Terlaksanakannya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	98,978%	DPRKPLH dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.j.03		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	5,714%	DPRKPLH	
2.k.1.01		Perekaman KTP Elektronik	97,983%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.k.1.02	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usi 01 - 7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	47,159%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.k.1.03		Kepemilikan akta kelahiran	94,284%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.k.1.04		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja	36,956%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.l.01	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	https://idm.kemendes.go.id/	
2.l.02		Persentase peningkatan status desa mandiri	65,445%	https://idm.kemendes.go.id/	
2.m.01	Pengendalian Penduduk dan	TFR (angka kelahiran total)	2,3	DSP3AP2KB	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.m.02	Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate / mCPR</i>)	77,05%	DSP3AP2KB	
2.m.03		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	7,267%	DSP3AP2KB	
2.n.01	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,842	Dinas Perhubungan	
2.n.02		V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,39	Dinas Perhubungan	
2.o.01	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.o.02		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	91,304%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.o.03		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Daerah Kabupaten/Kota	91,533%	Diskominfo, Statistik & Persandian dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab.Banjari	
2.p.01	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	48,387%	DKUMPP	
2.p.02		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	13,711%	DKUMPP	
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	176,811%	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
2.r.01	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,569%	Disbudporapar	
2.r.02		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,823%	Disbudporapar	
2.r.03		Peningkatan Prestasi Olahraga	39	Disbudporapar	
2.s.01	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.s.02		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	44,806%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Disbudporapar	
2.v.01	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	53,05	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
2.v.02		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,25	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
2.w.01	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,7	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
2.w.02		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
3.a	Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah	91,473%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		provinsi (sumber data: one data KKP)			
3.b.01		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1265,409%	Disbudporapar	
3.b.02	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	9,945%	Disbudporapar	
3.b.03		Tingkat hunuan akomodasi	58,179%	Disbudporapar	
3.b.04		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	7,727%	BPS Kab.Banjara	
3.b.05		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	6,063%	BPKPAD	
3.c.01		Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	367,347%	Dinas Pertanian
3.c.02	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		0%	Dinas Pertanian	
3.d	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0%	Pemerintah Kab.Banjara	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0%	Pemerintah Kab.Banjara	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0%	Pemerintah Kab.Banjara	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0%	Pemerintah Kab.Banjara	
3.d	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0%	Pemerintah Kab.Banjara	
3.f.01	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	DKUMPP	
3.f.02		Persentase Kinerja realisasi pupuk	25,768%	DKUMPP	
3.f.03		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	64,218%	DKUMPP	
3.g.01	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	2,198%	DKUMPP	
3.g.02		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	46,05%	DKUMPP	
3.g.03		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3,708%	DKUMPP	
3.g.04		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	DKUMPP	
3.g.05		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0%	DKUMPP	
3.g.06		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	DKUMPP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.h	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	5	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2024

c. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 20
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjar Tahun 2023

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan & Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	10,917%	BPKPAD	
		Rasio PAD	11,772%	BPKPAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	62,377%	BPKPAD	
		Opini Laporan Keuangan	10	BPKPAD	
2	Pengadaan	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	0%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	31,812%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
		Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan	24,756%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah	24,444%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	75,698%	BKPSDM	
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	16,968%	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	26,452%	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	0,539%	BPKPAD	
		Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD	11,046%	BPKPAD	
		<i>Assets Management</i>	1	BPKPAD	
			1	BPKPAD	
			1	BPKPAD	
Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	21,231%	BPKPAD			
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang Sumber Data yang Tersedia untuk Pelayanan	88,367%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian	
		Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	100%	BPKPAD	

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2024

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 merupakan laporan kinerja periode RPJMD 2021-2026, laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Kinerja ini pada prinsipnya mengungkap capaian sasaran terhadap target yang ditetapkan setiap tahunnya dalam RPJMD, disertai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran. Sebagai keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Hasil pengukuran secara mandiri terhadap 26 sasaran strategis yang terdiri atas 34 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/585/KUM/2023 Tentang Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, menunjukkan rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis adalah sebesar **105,38 persen** masuk dalam Kategori **TINGGI**. Capaian ini adalah tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 21
Skala Penilaian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	Predikat	Kode
1	≥ 110%	Sangat Tinggi	A	Biru
2	90% < 110%	Tinggi	B	Hijau
3	60% < 90%	Sedang	C	Orange
4	40% < 60%	Rendah	D	Kuning
5	< 40%	Sangat Rendah	E	Merah

Sumber : Permenpan No. 88 tahun 2022 dan Perbup Banjar No. 61 tahun 2022

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Banjar Tahun 2023, target kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2023 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 22
Sasaran Strategis, Indikator, target dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	73,76	Dinas Kesehatan
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	62,32	Dinas Pendidikan
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	78,29	DKUMPP
4.	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,29	DKPP
5.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,483	Dinsos P3AP2KB
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67,43	
6.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	72,70	DPUPRP/DISHUB
7.	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor Pertanian	2,25	Dinas Pertanian
		LPE sub sektor Perikanan	3,74	DKPP
		Nilai Tukar Petani (NTP)	106,42	DKPP, DISTAN
8.	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	4,02	DKUMPP
9.	Menurunnya tingkat pengangguran	Jumlah kunjungan wisatawan	4.250.000	Disbudporapar
10.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70	Disnakertrans
		Persentase Koperasi berkualitas	39,64	DKUMPP
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	13,85	
11.	Meningkatnya sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	17	Dinsos P3AP2KB
12.	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6793	DPMD
13.	Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mandiri	57	Dinsos P3AP2KB
14.	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	76,83	DPUPRP
15.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,519	DPUPRP
16.	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase kawasan kumuh	9,18	DPRKPLH
17.	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	150,6	BPBD
18.	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di bidang lingkungan hidup	Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup	22,85	DPRKPLH
19.	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	BPKPAD
20.	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Setda
		Nilai Opini BPK	WTP	BPKPAD
21.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	74,49	Bappedalitbang
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	4,20	ITDA
		Indeks SPBE	2,66	DKISP
22.	Berkembangnya Profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	61,50	BKPSDM
23.	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik Ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di masyarakat yang tertangani	0	Bakesbangpol
24.	Meningkatnya pelestarian seni budaya	Persentase cakupan pelestarian budaya	55,56	Disbudporapar

25.	Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Prestasi pemuda dan santri dalam olahraga	108	Disbudporapar
26.	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum	0,98	Satpol PP

Sumber : Data diolah dari Bagian Organisasi Setda Kab.Banjar, 2024

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Hasil pengukuran secara mandiri terhadap 26 Sasaran Strategis dengan 34 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 105,38 persen dan masuk dalam Kategori Tinggi. Capaian ini adalah tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023, Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 23
Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	73,76	73,86	100,62	Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	62,32	62,66	100,55	Tinggi
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	78,29	78,85	100,72	Tinggi
4.	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,29	81,63	101,67	Tinggi
5.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,483	0,498*	96,89	Tinggi
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67,43	61,25	90,83	Tinggi
6.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	72,70	79,10	109,51	Tinggi
7.	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor Pertanian	2,25	3,21*	142,67	Sangat Tinggi
		LPE sub sektor Perikanan	3,74	3,43	91,71	Tinggi
		Nilai Tukar Petani (NTP)	106,42	113,16	106,33	Tinggi
8.	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	4,02	2,47*	61,44	Sedang
		Jumlah kunjungan wisatawan	4.250.000	5.847.300	137,58	Sangat Tinggi
9.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70	2,73	98,88	Tinggi
10.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi berkualitas	39,64	39,72	100,20	Tinggi
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	13,85	13,71	98,99	Tinggi
11.	Meningkatnya sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	17	29,77	175,12	Sangat Tinggi
12.	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6793	0,7280	107,17	Tinggi
13.	Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mandiri	57	97,3	170,70	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	76,83	78,55	102,24	Tinggi
15.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan	Persentase kepatuhan	94,519	94,520	100	Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
	ruang	terhadap rencana tata ruang				
16.	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase kawasan kumuh	9,18	9,12	100,65	Tinggi
17.	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	150,6	133,44	111,39	Sangat Tinggi
18.	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di bidang lingkungan hidup	Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup	22,85	22,85	100	Tinggi
19.	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	30	100	Tinggi
20.	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	85,56	100,66	Tinggi
		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100	Tinggi
21.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	74,49	68,10	91,42	Tinggi
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	4,20	4,06	96,67	Tinggi
		Indeks SPBE	2,66	2,87	107,89	Tinggi
22.	Berkembangnya Profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	61,50	63,98	104,03	Tinggi
23.	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik Ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di masyarakat yang tertangani	0	0	100	Tinggi
24.	Meningkatnya pelestarian seni budaya	Persentase cakupan pelestarian budaya	55,56	60	107,99	Tinggi
25.	Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Prestasi pemuda dan santri dalam olahraga	108	76	70,37	Sedang
26.	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum	0,98	0,996	98,16	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					105,38	Tinggi

Sumber : diolah dari berbagai data.

Catatan : *angka pada tahun sebelumnya, nilai masih belum keluar/dipublikasi

Berdasarkan tabel atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 103,01 persen dengan kategori Tinggi.

Berikut rincian pencapaian 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Kabupaten Banjar tahun 2023:

- 5 IKU (14,71 %) dengan kategori Sangat Tinggi
- 27 IKU (79,41 %) dengan kategori Tinggi
- 2 IKU (5,88 %) dengan kategori Sedang

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023, sebagai berikut:

1. INDEKS KESEHATAN

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen penyusun dari Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan kesejahteraan, ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan dalam Indeks Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH).

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang

tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu.

Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Indeks Kesehatan merupakan indikator atas Sasaran strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”, untuk tahun 2023 ditargetkan Indeks Kesehatan nya adalah sebesar 73,76, dan setelah akhir periode tahun berjalan didapatkan nilainya adalah sebesar 73,86 yang artinya target kinerjanya terpenuhi dengan persentase capaian sebesar 100,62 persen. Nilai Indeks Kesehatan tahun 2023 ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 73,43, yang artinya ada kenaikan sebesar 0,59 persen.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kesehatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ Maks} - AHH \text{ min}} \times 100$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum sebagai berikut :

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

AHH (Angka Harapan Hidup) Kabupaten Banjar tahun 2023 yaitu 68,01 sehingga perhitungan Indeks Sehatannya adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kesehatan} &= \frac{68,01-20}{85-20} \times 100 \\ &= 73,86 \end{aligned}$$

Faktor keberhasilan ini didukung oleh kegiatan pelayanan Kesehatan yang semakin berkualitas baik itu di Dinas Kesehatan atau di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan Kesehatan di masyarakat, dan Kerjasama lintas sektor yang berjalan dengan baik serta dilakukan monitoring dan evaluasi

terhadap capaian kinerja secara periodik. Untuk itu Dinkes Kabupaten Banjar terus berupaya untuk menaikkan UHH dengan cara:

- 1) Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan (Ponek, AMP, Perbaikan Gizi, Rujukan, Jampersal, Pemberian Mikro nutrient, pemberian Vitamin bagi remaja putri, dll).
- 2) Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Immunisasi, Pencegahan Stunting/Wasting, Pencegahan penyakit menular.
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
- 4) Memperbaiki status gizi keluarga.
- 5) Survey Indeks Keluarga Sehat.
- 6) Perbaikan kesehatan lingkungan

2. INDEKS PENDIDIKAN

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen yang dipakai dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ukuran yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir. Dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS), sebagai pengganti indikator Angka Melek Huruf, dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Asumsi yang digunakan adalah kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama. Kemudian untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren, sumber data pesantren berasal dari Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Pada tahun 2023 Indeks pendidikan di Kabupaten Banjar ditargetkan sebesar 62,32 dan setelah akhir tahun didapatkan nilai indeksnya adalah sebesar 62,66 dengan persentase capaian sebesar 100,55 persen. Rumusan yang digunakan untuk menghitung Indeks Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Harapan Lama Sekolah

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$IHLS = \frac{13,03-0}{18-0} = 0,724$$

2. Indeks Rata rata Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$IRLS = \frac{7,94-0}{15-0} = 0,529$$

3. Indeks Pendidikan

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{IHLS + IRLS}{2} \times 100$$

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{0,724 + 0,529}{2} \times 100$$

$$= 62,66$$

3. INDEKS DAYA BELI

Indeks daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Indeks daya beli adalah cerminan dari standar hidup layak diukur dengan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (dalam hal ini konsumsi riil per kapita). Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok. Besaran nilai tingkat daya beli (purchasing power parity/PPP) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik.

Indikator kinerja atas Sasaran Strategis Meningkatnya daya beli masyarakat adalah Indeks Daya Beli, dimana pada tahun 2023 ditetapkan target kinerja sebesar 78,29 dan realisasi capaiannya adalah sebesar 78,85 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100,72 persen. Yang mendukung pencapaian kinerja peningkatan daya beli masyarakat ini adalah seluruh sektor pembangunan ekonomi baik pertanian, perikanan, kehutanan, konstruksi, pertambangan, perdagangan, jasa dan lain-lain. Adapun khusus untuk sektor Perdagangan menunjang pencapaian meningkatnya daya beli masyarakat melalui:

- 1) Meningkatnya sarana perdagangan yang representative sebanyak 37,50 persen dengan terlaksananya revitalisasi 3 pasar rakyat pada tahun 2023 dari target 16 pasar rakyat yang direvitalisasi selama 5 tahun periode 2022-2026. Tiga pasar tersebut adalah Revitalisasi/Rehab Pasar Rakyat Awang

Bangkal Barat Kec. Karang Intan. Lokasi: Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan, revitalisasi/Rehab Pasar Baru Desa Pasar Baru Kec. Sambung Makmur, Revitalisasi/Rehab Pasar Rakyat Arba Warik Kec. Beruntung Baru. Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru.

- 2) Terjaganya stabilitas harga bahan pokok dan penting (bapokting) dengan indikator koefisien variasi harga dengan realisasi 2,79% (target dibawah 6%). indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang diwakili oleh nilai koefisien variasi harga barang pokok yang berada dalam rentang waktu 1 bulan. Komoditi barang pokok dan penting yang digunakan sebagai acuan penghitungan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yaitu: beras; gula; minyak goreng; terigu; kedelai; daging sapi; daging ayam; telur ayam; cabe merah; cabe rawit merah; dan bawang merah. Nilai koefisien variasi diperoleh dengan membandingkan standar deviasi harga bulanan nasional dengan rata-rata harga bulanan nasional untuk masing-masing komoditas. Angka tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase (dikalikan 100%). Setelah diperoleh nilai koefisien variasi per bulan untuk masing-masing komoditas, selanjutnya dihitung rata-rata koefisien variasi bulanan seluruh komoditas. Semakin kecil nilai koefisien variasi mengindikasikan perbedaan harga kebutuhan pokok antar waktu semakin kecil. Hasil inilah yang diharapkan. Upaya yang dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan penting antara lain:
 - a. Monitoring harga bahan pokok dan penting pada 5 pasar rakyat yaitu Pasar Martapura, Pusat Perbelanjaan Sekumpul, Pasar Astambul, Pasar Gambut, dan Pasar Kertak Hanyar yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu.
 - b. Inspeksi mendadak (sidak) terkait kelangkaan stok dan melonjaknya harga pada agen dan distributor bapokting pada triwulan I terkait kelangkaan minyak goreng, sidak bapokting ramadhan dan menjelang idul fitri, idul adha serta menjelang natal tahun baru.
 - c. Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah bapokting: beras, gula, telur, minyak goreng, tepung dll. Operasi pasar tersebut antara lain operasi pasar Minyak goreng di triwulan I pada Kecamatan Martapura, Gambut, Kertak Hanyar, Karang Intan, Astambul, dan Martapura Timur. Operasi pasar ramadhan dan jelang Idhul Fitri ada 23 kali pada triwulan II, total operasi pasar pengendalian inflasi daerah sebanyak 64 kali di 20 Kecamatan sampai dengan triwulan IV tahun 2023.
- 3) Meningkatnya tertib ukur daerah sebesar 64.22% dari persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah

dan berlaku pada 3051 unit dibandingkan dengan seluruh potensi UTTP Kabupaten Banjar yang sejumlah 4751 unit. Pencapaian tersebut didukung oleh:

- a. Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang pada Pasar Rakyat seluruh wilayah Kabupaten Banjar, pelayanan tera ulang di kantor, pelayanan tera ulang pada seluruh SPBU/Pertashop, dan SPBE serta Timbangan Jembatan pada Perusahaan Batu bara maupun kelapa sawit.
 - b. Pengawasan UTTP pada pasar rakyat, SPBU, Pertashop, Jasa Ekspedisi.
 - c. Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) pada pasar rakyat, toko kelontong serta toko swalayan.
 - d. Inovasi Gelang Anting Manis (Gerakan Tera Ulang Antisipasi Stunting Manis) yaitu inovasi pelayanan tera/tera ulang pada sarana kesehatan baik puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar untuk memastikan semua alat timbang dan alat ukur tinggi badan sesuai standard dan hasil pengukurannya (berat dan tinggi) akurat untuk mendukung penurunan angka stunting Kabupaten Banjar.
- 4) Percepatan Program Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui kegiatan fasilitasi pemasaran produk UMKM pada ecatalog local, ecomerse, dan kemitraan dengan toko swalayan. Pada tahun 2023 ini telah ada sosialisasi Business Matching terhadap pelaku usaha mengenai ekatalog terhadap 30 pelaku usaha.

Tantangan yang dihadapi dari sektor perdagangan antara lain ketergantungan beberapa bahan pokok dari luar daerah, faktor cuaca/bencana alam sehingga membuat terhambatnya arus distribusi, gagal panen, meningkatnya permintaan konsumen pada saat tertentu misalnya pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional. Selain itu tingginya tingkat inflasi daerah imbas dari adanya tren kenaikan harga bahan pokok yang terjadi secara nasional seperti cabai merah, bawang putih, telur ayam ras, dan daging ayam ras, masih banyaknya sarana perdagangan yang belum representatif, dan masih rendahnya literasi digital masyarakat pelaku usaha perdagangan sehingga belum optimal memanfaatkan pemasaran produk melalui e-comerse.

4. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata,

dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam Indeks Ketahanan Pangan didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan Indeks Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.
- 2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
- 3) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.
- 4) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
- 5) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.
- 6) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
- 7) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan Penduduk.
- 8) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*).
- 9) Angka harapan hidup pada saat lahir

Indikator-indikator tersebut digabungkan penilaiannya untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Dari hasil penilaian yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional Kabupaten banjar mendapat skor 81,63 dengan kategori memiliki ketahanan pangan paling baik, dan menduduki peringkat 6 dari 11 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dan peringkat 126 dari 416 Kabupaten di Indonesia.

Untuk target indikator kinerja tahun 2023 ditetapkan nilai IKP adalah sebesar 80,29 dan capaiannya adalah sebesar 81,63 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 101,67 persen.

5. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Variabel pembentuk IKG antara lain:

- 1) Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 tahun terakhir.
- 2) Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun.
- 3) Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/ sederajat menurut jenis kelamin.
- 4) Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin.
- 5) Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin.

Pada sasaran strategis Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak, untuk indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2023 ditargetkan nilainya adalah sebesar 0,483, namun sampai laporan ini disusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Banjar masih belum keluar, sehingga untuk perhitungan capaian indikator kinerja tahun 2023 ini menggunakan data capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2022 dengan nilai indeks sebesar 0,498, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 96,89 persen.

6. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah wawasan baru dalam melihat anak dan mendefinisikan kembali makna anak bagi keluarga dan masyarakat, yaitu anak bukan obyek milik orang tua atau negara. Konvensi Hak Anak mengajak setiap negara melihat anak sebagai individu manusia yang utuh dan memiliki hak asasi yang melekat dan tidak dapat diambil oleh siapa pun. Salah satu arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati haknya. Indeks Perlindungan Anak (IPA)-Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan

pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) dikeluarkan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana upaya perlindungan anak berhasil melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.

Pada sasaran strategis Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak, untuk indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada tahun 2023 ditargetkan nilainya sebesar 67,43, dan capaiannya adalah sebesar 61,25 dengan persentase capaian 90,83 persen dengan kategori tinggi.

7. INDEKS KONEKTIVITAS

Terhubungnya wilayah di kabupaten yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang berupa jaringan jalan dan simpul jaringan perhubungan. Ukuran yang digunakan dalam perhitungan indeks konektivitas adalah jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 60% dan sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi pada angkutan jalan dan sungai sebesar 40%.

Untuk memperoleh nilai persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (60%) dengan definisi operasional jalan kabupaten dan desa dengan kondisi mantap adalah jalan kabupaten dan desa dalam kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana dengan rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Persentase panjang jalan} & \\ \text{dalam kondisi mantap} & \\ \text{(60\%)} & = \text{Persentase Panjang Jalan Kabupaten} \\ & \text{dan desa dalam Kondisi Mantap} \\ & = \frac{598,36 \text{ km} + 839,08 \text{ km}}{781,65 \text{ km} + 1.116,69 \text{ km}} \times 100 \\ & = \frac{1.437.44 \text{ km}}{1.898.34 \text{ Km}} \times 100 \\ & = 75,72 \% \end{aligned}$$

Sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi pada angkutan jalan dan sungai (40%), yang perhitungannya terdiri atas.

Rasio Konektivitas Kabupaten/kota

$$IK1 = \frac{\text{Jumlah trayek} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}$$

$$= \frac{11 \times 1}{12}$$

$$= 0,92$$

$$IK2 = \frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan} \times \text{bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan penyeberangan}}$$

$$= \frac{2 \times 1}{3}$$

$$= 0,67$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Konektivitas Kabupaten} &= (IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai}) \\ &= (0,92 \times 70) + (0,67 \times 30) \\ &= 64,17 + 20 \\ &= 84,17 \end{aligned}$$

INDEKS KONEKTIVITAS

= Sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi pada angkutan jalan dan sungai x (40%) + Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap x (60%)

$$= (84,17 \times 40\%) + (75,72 \times 60\%)$$

$$= 33,668 + 45,432$$

$$= 79,10$$

Dari perhitungan diatas dapat terlihat bahwa besaran Indeks Konektivitas Kabupaten Banjar pada tahun 2023 adalah sebesar 79,10 dimana nilai ini lebih besar daripada target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yakni sebesar 72,10 sehingga kalau dihitung persentase capaiannya adalah sebesar 108,10 dengan kategori Tinggi.

Terkait jumlah trayek yang menjadi perhitungan dalam IK1 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 24
Izin Trayek Angkutan Perkotaan/Perdesaan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sekumpul Ujung No. 93 Telp (0511)6749175 Martapura Kabupaten Banjar
e-mail : dinasperhubungan.kabbanjar@gmail.com

DATA REGISTRASI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN / PERDESAAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR

NO	KODE TRAYEK	RUTE TRAYEK	STATUS	JUMLAH IZIN TRAYEK		FREKUENSI (KEND/ JAM)	FREKUENSI (KEND/ HARI)	FREKUENSI (KEND/ MINGGU)
				PLAFON	BEROPERASI 2023			
1	A	Term. Martapura - Banjarbaru - Term. Gambut Barakat - Kertak Hanyar (PP)	Angkutan Perkotaan	200	113	6	18	54
2	AA	Term. Gambut Barakat - Talah Makmur - Beranang Baru - Alah Alah (PP)	Angkutan Perdesaan	10	2	2	6	18
3	BB	Term. Martapura - Karang Intan - Cempaka, PP	Angkutan Perdesaan	5	5	1	3	9
4	C	Term. Martapura - Amanio (PP)	Angkutan Perdesaan	30	14	4	12	36
5	D	Term. Martapura - Mataraman - Simp. Empat - Cintapuri Durassalam (PP)	Angkutan Perdesaan	80	42	5	15	45
6	E	Term. Martapura - Martapura Barat - Sei Tabuk - Term. Gambut Barakat (PP)	Angkutan Perdesaan	25	8	3	9	27
7	F	Term. Martapura - Martapura Timur - Astambul (PP)	Angkutan Perdesaan	15	5	3	9	27
8	G	Term. Martapura - Pengaron - Sambung Makmur - Sei Pinang (PP)	Angkutan Perdesaan	35	19	4	12	36
9	H	Term. Martapura - Macarawan - Simp Empat Pengaron - Berostong Baru - Sungai Pinang (PP)	Angkutan Perdesaan	5	3	3	3	18
10	L	Terminal Martapura - Sungai Sipai - Cindai Alus (PP)	Angkutan Pengumpan	5	3	1	3	18
11	M	Terminal Martapura - Taajung Rema - Sekumpul - Biacau (PP)	Angkutan Pengumpan	5	3	1	3	18
		JUMLAH		415	217	33	93	306
		RATA-RATA		38	20	3	8	61

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

IK2 diperoleh dari jumlah lintas penyeberangan dikali bobot lintas dibagi jumlah lintas kebutuhan penyeberangan. Berikut rincian lintas penyeberangan dan jumlah lintas kebutuhan penyeberangan yang ada di Kabupaten Banjar.

Tabel 25
Lintasan Operasi Angkutan Sungai Dan Danau

DATA LINTASAN OPERASI ANGGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR								
NO.	KODE TRAYEK	WILAYAH OPERASI	STATUS	JUMLAH IZIN OPERASI		FREKUENSI (KEND/JAM)	FREKUENSI (KEND/HARI)	FREKUENSI (KEND/MINGGU)
				PLAFON	BEROPERASI 2023			
1	AR	Waduk Riam Kanan, Kecamatan Aranio	Angkutan Sungai Danau	200	98	2	6	18
2	AL	Terusan Sungai Barito Muara, Kecamatan Aluh-Aluh	Angkutan Sungai Danau	25	15	2	6	18
JUMLAH				225	113	4	12	36
RATA-RATA				150	75	2	6	18

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR

Jumlah Kebutuhan Trayek : 3
Jumlah Trayek yang Tersedia : 2

8. LPE SUB SEKTOR PERTANIAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Pertanian adalah Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor pertanian Tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor pertanian tahun sebelumnya. Meliputi pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian.

Indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan” adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sub sektor pertanian. Pada tahun 2023 target atas indikator ini adalah sebesar 2,25, namun sampai laporan ini disusun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sub sektor pertanian Kabupaten Banjar masih belum keluar, sehingga untuk perhitungan capaian indikator kinerja tahun 2023 ini menggunakan data capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2022 dengan nilai LPE sebesar 3,21 sehingga persentasenya adalah sebesar 142,67 persen.

Faktor yang mendorong tercapainya target indikator kinerja ini adalah antara lain karena adanya bantuan/dukungan pemerintah berupa sarana produksi yang bersumber dari dana APBN, adanya perbaikan sarana pengelolaan air seperti perbaikan irigasi air tanah (dalam/dangkal), tabat/dam parit, saluran drainase dalam rangka konservasi air dan antisipasi perubahan iklim, peningkatan jalan usaha tani dan jalan produksi untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasca, adanya pembinaan dan bimbingan kepada kelompok untuk meningkatkan luas

tanam tanaman pangan dan hortikultura melalui pelatihan dan sosialisasi kepada petani melakukan budidaya tanaman pangan dan hortikultura secara komersil dan menerapkan teknologi terkini.

9. LPE SUB SEKTOR PERIKANAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Perikanan adalah Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan yang merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor perikanan Tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor perikanan tahun sebelumnya.

Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis “Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan” adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sub sektor perikanan. Pada tahun 2023 target atas indikator ini adalah sebesar 3,74 nilai LPE perikanan, dan capaian yang didapat pada tahun 2023 adalah sebesar 3,43 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 91,71 persen dengan kategori Tinggi.

Faktor yang menunjang pencapaian target ini adalah adanya peningkatan jumlah pelaku usaha bidang perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan, peningkatan jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi CBIB,CPPIB dan CPIB, adanya diversifikasi produk olahan, adanya program gemarikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kualitas benih menurun, indukan ikan sudah tidak produktif, harga jual tidak stabil, harga pakan tinggi, bahan baku untuk pembuatan pakan mandiri sulit didapat, kondisi perairan dari Aranio sampai dengan Sungai Martapura tercemar (menurunnya kualitas air), kemasan olahan masih sederhana.

10. NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

NTP merupakan salah satu indikator relatif yang menunjukkan kemampuan petani dalam meningkatkan pendapatannya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani (NTP).

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat tercapai dengan keadaan dimana adanya faktor penunjang yaitu dengan meningkatkan hasil produksi sektor pertanian dalam arti luas. yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan

dan hortikultura), perkebunan, peternakan dan perikanan. Dan dari hasil produksi tersebut nantinya untuk menjaga stabilitas harga dan daya saing maka perlu dilakukan sektor pertanian sub. sektor pangan dan hortikultura serta sektor perkebunan dengan memfasilitasi usaha pertanian untuk mendapatkan rekomendasi izin usaha. Sektor peternakan dengan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

Terkait penyediaan data NTP, pihak BPS baru bisa menyajikan indikator NTP sampai dengan tingkat provinsi, dengan asumsi kondisi NTP provinsi akan mewakili kondisi NTP di kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan” indikator ketiga yang dipakai adalah Nilai Tukar Petani (NTP), pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah sebesar 106,42. Sampai dengan bulan Desember 2023 NTP Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 113,16 dimana kalau dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang sebesar 106,42 maka persentase capaian target NTP ini pada tahun 2023 adalah sebesar 106,33 persen.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan pada Desember 2023, NTP Kalimantan Selatan naik 0,70 persen dibandingkan NTP November 2023, yaitu dari 112,37 menjadi 113,16. Kenaikan NTP pada Desember 2023 disebabkan oleh kenaikan nilai indeks yang diterima petani lebih besar dibanding kenaikan nilai indeks yang dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,07 persen, sementara indeks yang dibayar petani hanya naik sebesar 0,36 persen. Kenaikan NTP Desember 2023 juga dipengaruhi oleh naiknya NTP pada hampir seluruh subsektor kecuali subsektor tanaman pangan. Persentase kenaikannya bervariasi, yaitu Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 0,81 persen; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,77 persen; subsektor peternakan sebesar 1,59 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 1,46 persen. Sementara Subsektor Tanaman Pangan turun sebesar 0,21 persen.

11. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

LPE sektor industri pengolahan adalah persentase pertumbuhan PDRB sub sektor industri pengolahan, yang merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun sebelumnya. Tahun 2023 target yang ditetapkan atas indikator ini adalah sebesar 4,02 namun sampai laporan ini disusun nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor

Industri Pengolahan Kabupaten Banjar masih belum keluar, sehingga untuk perhitungan capaian indikator kinerja tahun 2023 ini menggunakan data capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2022 dengan nilai LPE sebesar 2,47 sehingga persentasenya adalah sebesar 61,44 persen dan masuk kategori Sedang.

Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang ditetapkan adalah antara lain :

- 1) Telah tersusunnya roadmap pembangunan industri daerah jangka pendek, menengah, dan panjang melalui Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dalam bentuk Peraturan Daerah 04 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar Tahun 2019 – 2039
- 2) Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) baik dari sisi SDM, teknologi pengolahan produk melalui pelatihan industri lanjutan antara lain Pelatihan Sasirangan dengan peserta 10 IKM, pelatihan Kerajinan Batu Permata dengan peserta 10 IKM, melakukan Pelatihan diversifikasi sasaringan sebanyak 30 Peserta
- 3) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk IKM Unggulan Batu Permata pada Inacraft Expo 2023, Promosi dan Pemasaran prduk Unggulan IKM pada Pameran MTQ Kalsel Expo 2023 di Banjarbaru.
- 4) Kebijakan percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang tertuang dalam Instruksi Bupati nomor D6.02/719/DKUMPP tanggal 26 Juni 2022
- 5) Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Fasilitasi PIRT dengan jumlah peserta 60 IKM
- 6) Fasilitasi desain kemasan produk IKM gratis melalui layanan Rumah Kemasan Banjar
- 7) Pembinaan Industri karet dan minyak atsiri secara berkala setiap triwulan pada IKM di Kecamatan Karang Intan, Mataraman, dan Simpang Empat.
- 8) Pendataan IKM di beberapa Desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, seperti Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Pengaron dalam rangka pemutakhiran data IKM.
- 9) Sosialisasi dan deseminasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang diikuti 30 perwakilan perusahaan industri untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan industri pada SIINas

12. JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN

Jumlah kunjungan wisatawan adalah penjumlahan dari wisatawan perhari yang berkunjung ke tempat destinasi wisata di Kabupaten Banjar

selama setahun. Data dikumpulkan dari total kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara pada tempat lokasi yang dikunjungi. Target yang dipasang untuk indikator "Jumlah kunjungan wisatawan" pada tahun 2023 adalah 4.250.000 orang wisatawan, sampai akhir tahun 2023 ini tercatat jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banjar adalah sekitar 5.847.300, dengan persentase capaian mencapai 137,58 persen dengan kategori Tinggi, persentase capaian indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2022. dimana pada tahun 2022 persentasenya capaiannya hanya sebesar 53,84 persen, sedangkan pada tahun 2023 adalah sebesar 137,58 persen sehingga ada peningkatan persentase capaian sebanyak 83,74 persen. memang untuk pencatatan jumlah wisatawan tidak bisa akurat 100 persen karena untuk kunjungan wisatawan pada even wisata banyak yang tidak bisa terdata secara pasti, karena tidak tersedia petugas pendata pada event/kegiatan tersebut sehingga nilai/data yang diambil berdasarkan perkiraan dan informasi publikasi dari media berita, dan untuk penyumbang jumlah wisatawan terbesar di Kabupaten Banjar adalah dari wisata religi, sebagaimana acara Haul tahunan Guru Sekumpul (Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari) yang diyakini bisa mendatangkan wisatawan sampai jutaan orang. Adapun tempat-tempat destinasi wisata di Kabupaten Banjar antara lain :

- 1) Wisata Oranje Nasau (Benteng), Kec. Pengaron
- 2) Wisata Sungai Rangas Tengah, Kec. Martapura Barat
- 3) Wisata Pulau Pinus I, II, Waduk Riam Kanan, Kec. Aranio
- 4) Wisata Kerajinan Penggosokan Intan
- 5) Wisata Religi Makam Guru Sekumpul, Kec. Martapura
- 6) Wisata Sungai Kembang, Kec. Aranio
- 7) Kiram Park, Aranaway
- 8) Wisata Pertokoan Permata Cahaya Bumi Selamat (CBS), Kec. Martapura
- 9) Wisata Religi Masjid Al-Karomah, Kec. Martapura
- 10) Wisata Religi Kalampaian, Kec. Astambul
- 11) Wisata Rumah Adat Banjar, Kec. Martapura Barat
- 12) Wisata Matang Kaladan, Kec. Aranio
- 13) Wisata Waterboom, Kec. Gambut
- 14) Wisata Pasar Terapung (Lokbaintan), Kec. Sungai Tabuk

- 15) Wisata tambak dan pemancingan Bincau, Kec. Martapura
- 16) Wisata Danau Tamiyang, Kec. Karang Intan
- 17) Wisata Tahura Sultan Adam, Kec. Karang Intan
- 18) Wisata Alam Bukit Bandangan
- 19) Kawasan Religi Makam Datuk Qobul (Rantau Balai)
- 20) Kawasan Religi Pangeran Suka Rama
- 21) Wisata Tepi Sungai Martapura
- 22) Kawasan Religi Kubah Wali Lima
- 23) Kawasan Religi Makam Datuk Ambulung
- 24) Masjid Bambu (kiram)

Tabel 2.6
Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2023

REKAPITULASI JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN BANJAR PERIODE TAHUN 2023		
I	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN PADA DESTINASI BERDASARKAN TITIK PENDATAAN	2,283,457
a	Wisatawan Nusantara	2,268,970
b	Wisatawan Manca Negara (14487 orang)	14,487
II	JUMLAH WISATAWAN BERDASARKAN KEGIATAN EVENT/ FESTIVAL KEBUDAYAAN	27,050
a	Festival Budaya Banjar	8,500
	- Maulid Habsi	
	- Lomba Rudat	
	- Festival Sinoman Hadrah	
	- Lomba Kue Tradisional	
b	Festival Bedug (Becaatuk Dauh) 4 Hari	5,500
c	Baayun Maulid	850
d	Peringatan Hari Santri	8,500
e	Pawai Hijriah (Event Tahunan)	3,500
f	Pembukaan Pasar Wadai Ramadhan	200
III	JUMLAH WISATAWAN BERDASARKAN KEGIATAN PEMASARAN (EVENT KEPARIWISATAAN)	25,300
a	Seleksi dan Grand Final Nanang Galuh	6,000
b	Festival Pasar Terapung	3,500
c	Expo Ekraf 2023	1,300
d	Banjar Bersholawat	11,500
e	Banjar Expo	3,000
IV	PERKIRAAN PENGUNJUNG DARI PENGINAPAN / HOTEL DI KABUPATEN BANJAR (Hasil Petugas Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata)	186,832
a	Pendataan sampai dengan September 2023	80,072
b.	Pendataan Okt - Des 2023	106,760
V	PERKIRAAN JUMLAH PENGUNJUNG/JAMA'AH HAUL KAWASAN RELIGI YANG TIDAK MEMILIKI PENDATA	3.324.661
a	Haul Datu Kalampaian	2,500

b	Haul Guru Sekumpul di Kawasan Sekumpul dan Sekitarnya	3.320.000
c	Haul di Kawasan Religi Pangeran Suka Rama	950
d	Haul di Kawasan Datu Kobul (Syech Jalaluddin bin Abubakar)	1,211
JUMLAH I+II+III+IV+V		5.847.300

13. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak ada keseimbangan pasar tenaga kerja, atau tidak mempunyai pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Sebagai akibatnya sejumlah pekerja yang tidak terserap dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan akibat tidak langsung dari supply (penawaran) tenaga kerja dipasar tenaga kerja melebihi demand (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta.

Pengangguran merupakan penyakit sosial yang diakibatkan oleh ketiadaan atau kekurangan kerja. Pengangguran (unemployment) terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan kata lain, jumlah yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Pembangunan merupakan upaya perubahan struktural yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Namun demikian tidak semua penduduk memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses dan kegiatan pembangunan, sehingga masih ada yang tertinggal dan tidak terangkat dari kemiskinan. Sementara, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang timbul dalam pembangunan bersama-sama dengan pengangguran dan kesenjangan sosial, dan ketiganya saling berkaitan. Menurut pakar pembangunan ekonomi, salah satu gejala pembangunan ekonomi yang pesat seperti negara berkembang yang lebih mengutamakan proses industrialisasi yang pesat khususnya industrialisasi yang padat modal, adalah terjadinya peningkatan pengangguran, terutama di daerah perkotaan yang merupakan pusat sebagian besar industri yang baru didirikan. Masalah pengangguran terbuka pada umumnya adalah ciri khas dari angkatan kerja di daerah perkotaan. Pengangguran banyak dicirikan oleh perempuan, berusia muda, berpendidikan relatif tinggi, dan baru pertama kali mencari pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Jumlah Angkatan Kerja

(TPT adalah Indikator dimana nilai semakin kecil maka semakin baik/bagus)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di kabupaten Banjar dapat dilihat dari data yang dikeluarkan secara resmi oleh BPS sebagai berikut :

Tabel 27
Tingkat Pengangguran Terbuka Per Kabupaten

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)					
	2021		2022		2023	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
KALIMANTAN SELATAN	4.33	4.95	4.20	4.74	3.95	4.31
TANAH LAUT	-	3.52	-	4.17	-	3.58
KOTABARU	-	5.57	-	6.70	-	6.08
BANJAR	-	3.98	-	2.72	-	2.73
BARITO KUALA	-	3.22	-	3.63	-	3.42
TAPIN	-	4.96	-	4.15	-	3.93
HULU SUNGAI SELATAN	-	2.44	-	2.29	-	2.12
HULU SUNGAI TENGAH	-	3.76	-	3.35	-	3.26
HULU SUNGAI UTARA	-	4.80	-	4.64	-	3.85
TABALONG	-	3.43	-	4.46	-	3.60
TANAH BUMBU	-	6.83	-	6.89	-	6.56
BALANGAN	-	2.44	-	3.98	-	2.70
KOTA BANJARMASIN	-	8.47	-	6.96	-	6.70
KOTA BANJAR BARU	-	5.70	-	5.47	-	5.01

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel diatas Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 2,73 persen, maka kalau dibandingkan dengan target TPT yang ditetapkan sebagai indikator pada sasaran strategis “Menurunnya tingkat pengangguran” yang sebesar 2,70 maka persentase capaian atas indikator ini adalah sebesar 98,88 persen dengan kategori Tinggi. Dan kalau dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan maka pengangguran terbuka di Kabupaten Banjar relatif kecil bahkan secara urutan TPT berada pada peringkat 3 terendah untuk tingkat Propvinsi Kalimantan Selatan, hal ini menunjukkan nilai positif bahwa angkatan kerja sudah semakin banyak yang tersebar pada berbagai sektor.

Sejumlah dana telah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung program pokok ketenagakerjaan yang meliputi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga tenaga Kerja, Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Pengembangan Wilayah Tertinggal, Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adapun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar berusaha mengurangi tingkat

pengangguran dengan menggerakkan minat masyarakat untuk berusaha dengan beberapa kegiatan seperti pelatihan dan kemudahan untuk berusaha dan mengadakan program pemagangan dalam negeri berbasis pengguna ini merupakan langkah tepat dalam melahirkan tenaga kerja yang terampil, keahlian dan berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berusaha mengurangi tingkat pengangguran dengan menggerakkan minat masyarakat untuk berusaha dengan beberapa kegiatan seperti pelatihan usaha dan memberikan fasilitasi kemudahan untuk berusaha, kemudian mengadakan program pemagangan dalam negeri berbasis pengguna sebagai langkah untuk melahirkan tenaga kerja yang terampil, keahlian dan berdaya saing. Selain hal tersebut dilaksanakan juga kegiatan pendorong dan fasilitasi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi/proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yaitu memberikan pelatihan pada masyarakat / penganggur baik yang dilaksanakan sendiri oleh Instansi maupun melalui kerjasama dengan LPK swasta dan BLK komunitas sehingga tercipta skill bagi peserta pelatihan dengan harapan mereka bisa berwirausaha dan bekerja serta bisa bersaing di pasar kerja baik formal ataupun informal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta pelatihan, pada tahun 2023 tercatat jumlah peserta pelatihan yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan jumlahnya sebanyak 512 orang, dan berdasarkan hasil moneyv ada 116 orang yang berhasil berwirausaha dan mendapat pekerjaan.
- 2) Pemberian pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online dengan memberikan informasi lowongan kerja melalui web banjarkerja.go.id dan sosial media seperti Whatshaap, Instagram, Facebook dan tercatat serapan tenaga kerja melalui kegiatan ini ada sebanyak 391 orang
- 3) Job Fair/Bursa kerja khusus yang dilaksanakan pada beberapa sekolah SMA dan SMK dan tercatat ada 140 orang yang berhasil terserap masuk dunia kerja.
- 4) Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) kegiatan ini menangani pekerja migran indonesia yang bekerja di luar negeri sebesar 153 orang.
- 5) Memfasilitasi peminjaman modal tanpa bunga melalui penyaluran KURMA MANIS (Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis) kepada peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan di Disnakertrans, bekerjasama dengan BPR Martapura Banjar Sejahtera.

14. PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS

Persentase koperasi berkualitas adalah perbandingan jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) , volume usaha dan aset terhadap jumlah seluruh koperasi aktif. Capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase Koperasi berkualitas ini adalah sebesar 39,72 dari target sebesar 39,64 sehingga persentase capaiannya sebesar 100,20 dengan kategori Tinggi, Pada tahun 2023 ini jumlah koperasi yang melaksanakan RAT berjumlah 67 Unit, yang meningkat volume usahanya dan Asetnya 26 unit, meningkat volumenya 6 unit, meningkat nilai asetnya 21 unit dan Koperasi RAT yang volume usaha dan asetnya tetap 14 unit dari jumlah 163 unit keseluruhan koperasi yang aktif di Kabupaten Banjar, yang jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28
Perbandingan Koperasi aktif dengan jumlah Koperasi yang berkualitas

No	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi berkualitas telah melaksanakan RAT			
		Meningkat Volume Usaha dan Aset	Meningkat Volume Usaha	Meningkat Nilai Aset	Volume Usaha dan Aset tetap
1	163	26	6	21	14

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pada 32 unit koperasi dan 9 unit KSP/USP dengan hasil 39,26% koperasi mematuhi peraturan perundang-undangan dan 44,83% KSP/USP mematuhi peraturan perundang-undangan
- 2) Pelaksanaan penilaian kesehatan pada 58 unit Koperasi dan pemberian penghargaan pada 6 unit koperasi
- 3) Peningkatan SDM Koperasi melalui pelatihan pengurus dan pengawas koperasi 60 orang
- 4) Fasilitasi kemitraan pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, dan standarisasi pada fasilitasi sosialisasi pembiayaan sebanyak 30 koperasi, fasilitasi sosialisasi pemasaran sebanyak 30 koperasi, penguatan kelembagaan 20 koperasi
- 5) Pendampingan koperasi oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan.

Adapun terkait tantangan yang dihadapi antara lain masih rendahnya SDM Koperasi, lemahnya Administrasi Kelembagaan Koperasi dan kurangnya modal yang dimiliki Koperasi.

15. PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA

Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha merupakan perbandingan Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha terhadap jumlah usaha mikro keseluruhan. Usaha mikro diklasifikasikan menjadi wirausaha apabila telah memiliki legalitas usaha minimal Nomor Induk Berusaha (NIB). Capaian atas indikator kinerja “Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha” pada tahun 2023 adalah sebesar 13,71 dari target yang ditetapkan yakni sebesar 13,85 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 98,99 dan termasuk kategori Tinggi. Tahun 2023 ini wirausaha berskala mikro yang terdata berjumlah 9220 unit berbanding jumlah usaha mikro yang sejumlah 67.258 unit. Faktor yang mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain

- 1) Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha dan terealisasi 2929 Pelaku Usaha Mikro (PUM) yang difasilitasi perijinan NIB, sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal, dan Haki. Hal ini didukung oleh kemudahan perijinan melalui OSS untuk NIB, kolaborasi yang baik dengan Dinas Kesehatan untuk Sertifikasi PIRT dan Program Halal gratis melalui *self declare*.
- 2) Pengembangan SDM, pengelolaan usaha melalui pelatihan kewirausahaan tingkat pertama dan lanjutan sejumlah 90 PUM
- 3) Fasilitasi kemitraan Usaha Mikro dengan BUMD, BUMN, maupun perhotelan maupun fasilitasi kemitraan dan permodalan Usaha Mikro melalui KURMA MANIS dan KUR perbankan Nasional dan Daerah.
- 4) Fasilitasi pengembangan usaha sebanyak 80 PUM melalui fasilitasi pemasaran produk UM melalui ecalog local (kegiatan P3DN), promosi UM melalui inovasi *mamaline.id*, fasilitasi desain kemasan produk kolaborasi dengan Rumah Kemasan (Bidang Industri) dan kemitraan pemasaran produk UM dengan toko swalayan yang wajib menyediakan space etalase 30% bagi produk UKM local
- 5) Pendampingan Usaha Mikro oleh lembaga pendamping sejumlah 618 PUM. Hal ini didukung oleh pembentukan kelompok Inklusif Usaha Mikro di 5 Kecamatan yaitu Martapura, Karang Intan, Martapura Timur, Sungai Tabuk dan Gambut. Yang mana setiap kelompok inklusif terdiri dari 25 PUM dan berkembang menjadi lebih 100 PUM disetiap kelompok inklusif.

Tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya kemampuan managerial dan keterampilan PUM, produksi dan pemasaran para pelaku usaha mikro yang belum optimal, dan belum optimalnya pemanfaatan kemitraan permodalan KUR perbankan nasional dan daerah.

16. PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) YANG MANDIRI

Sasaran “Meningkatnya sistem perlindungan sosial” diukur dengan menggunakan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Mandiri yang di maksud yaitu mampu berkehidupan sosial di masyarakat dengan bantuan-bantuan baik bersifat konsumtif atau berupa barang untuk beraktifitas sosial. PPKS terbagi menjadi 26 jenis, yaitu sebagai berikut :

- 1) Anak Balita Terlantar
- 2) Anak Terlantar
- 3) Anak Dengan Kedisabilitas
- 4) Anak Jalanan
- 5) Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
- 6) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
- 7) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan
- 8) Lanjut Usia Terlantar
- 9) Penyandang Disabilitas
- 10) Tuna Susila
- 11) Gelandangan
- 12) Pengemis
- 13) Pemulung
- 14) Kelompok Minoritas
- 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
- 16) Orang dengan HIV/AIDS
- 17) Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 18) Korban Trafficking
- 19) Korban Tindak Kekerasan
- 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
- 21) Korban Bencana Alam
- 22) Korban Bencana Sosial
- 23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
- 24) Fakir Miskin
- 25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi

26) Komunitas Adat Terpencil

Formulasi perhitungan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri adalah Jumlah PPKS yang mandiri di bagi Jumlah PPKS seluruhnya dikali 100 persen. Adapun Jumlah PPKS yang mandiri dari 26 Jenis PPKS adalah sebanyak 14.557 jiwa dengan total PPKS keseluruhan sebanyak 48.893 jiwa, maka realisasi capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 29,77 persen, sementara jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 17 persen maka persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 175,12 persen dengan kategori Sangat tinggi.

PPKS yang mandiri terdata diantaranya melalui masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) sebanyak 11.615 jiwa, penerima bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 35 jiwa, korban bencana dalam satu tahun baik bencana sosial maupun bencana alam sebanyak 2.263 jiwa. Perempuan rawan sosial ekonomi 20 orang, serta bantuan sosial berupa permakanan, sandang, alat bantu, untuk anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis serta warga binaan sebanyak 624 jiwa.

Kendala dalam mewujudkan kinerja diatas adalah faktor ketersediaan data yang akurat dan mutakhir. Data yang akurat dapat memberikan gambaran kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Informasi yang benar dan terperinci tentang populasi yang membutuhkan bantuan kesejahteraan sosial serta dapat membuat pemerintah merancang program serta kebijakan yang sesuai dan efektif, penggunaan data yang akurat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program kesejahteraan sosial serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Sementara Pemerintah dalam mewujudkan kinerja Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial menunjukkan komitmen yang tinggi melalui mengembangkan kebijakan yang inklusif, menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, penguatan sistem pendataan, serta penyediaan anggaran yang memadai untuk program-program kesejahteraan sosial.

17. INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Yang dimaksud dengan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hakasal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian desa tersebut Kementerian desa telah menetapkan 5 status desa yang menjadi tujuan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Adapun issue yang sangat berkembang saat ini dan menjadi prioritas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah yaitu peningkatan desa mandiri dan pengentasan desa tertinggal.

Pemerintah melakukan langkah dalam upaya menanggulangi permasalahan yang ada di desa dengan mengetahui perkembangan desa dengan menggunakan aplikasi pemuktahiran desa. Perkembangan status desa oleh pemerintah Kabupaten Banjar mulai tahun 2019 sampai dengan 2021 menggunakan Skor evaluasi perkembangan desa, kemudian baru Tahun 2022 ini menggunakan IDM. Namun penggunaannya sama untuk mengetahui perkembangan desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Desa. Tujuan dari indeks Desa Membangun(IDM) yaitu:

- 1) Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa
 - 2) Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa.
- Yang dimaksud dengan status kemajuan dan kemandirian desa adalah ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Yang merupakan status desa ditetapkan 5 (lima) yaitu:

- 1) Desa Mandiri.
- 2) Desa Maju.
- 3) Desa Berkembang
- 4) Desa Tertinggal
- 5) Desa sangat tertinggal.

Adapun pengertian dan formulasi perhitungan dari status desa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 29
DO Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis DPMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri	Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi	Persentase Desa Mandiri = (Jumlah Desa Mandiri / Jumlah Seluruh Desa se Kabupaten Banjar) x 100%	(https://idm.kemendes.go.id/)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
			secara berkelanjutan. Klasifikasi Desa Mandiri ditetapkan dengan ambang batas IDM > 0,8155		
		Persentase Desa Maju	Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Klasifikasi Desa Maju ditetapkan dengan ambang batas $0,7072 < IDM \leq 0,8155$	Persentase Desa Maju = $(\text{Jumlah Desa Maju} / \text{Jumlah Seluruh Desa se Kabupaten Banjar}) \times 100\%$	(https://idm.kemendes.go.id/)
		Persentase Desa Berkembang	Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Klasifikasi Desa Berkembang ditetapkan dengan ambang batas $0,5989 < IDM \leq 0,7072$	Persentase Desa Berkembang = $(\text{Jumlah Desa Berkembang} / \text{Jumlah Seluruh Desa se Kabupaten Banjar}) \times 100\%$	(https://idm.kemendes.go.id/)
		Persentase Penurunan Desa Tertinggal	Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Klasifikasi Desa Tertinggal ditetapkan dengan ambang batas $0,4907 < IDM \leq 0,5989$	Persentase Penurunan Desa Tertinggal = $(\text{Jumlah Desa Tertinggal Tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah Desa Tertinggal Tahun Sekarang} / \text{Jumlah Desa Tertinggal Tahun Sebelumnya}) \times 100\%$	(https://idm.kemendes.go.id/)

Hasil perkembangan dari Indeks Desa Membangun yang ada di Pemerintah Kabupaten Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan 2023 sebagai berikut :

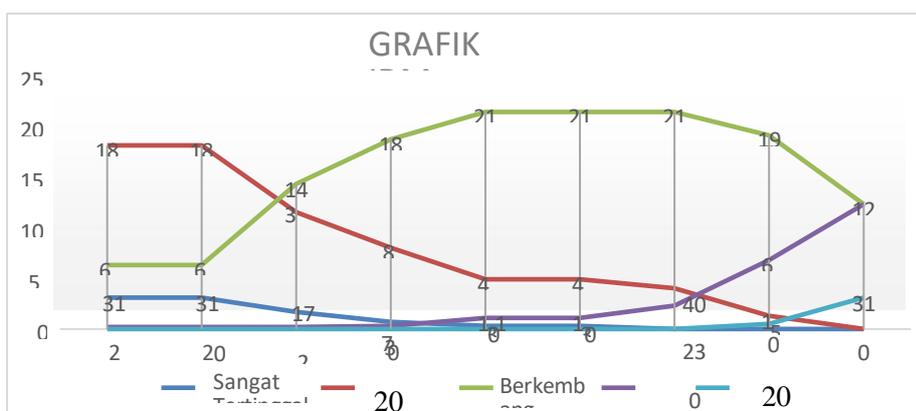
Tabel 30
Status Desa Di Kabupaten Banjar

NO	KRITERIA IDM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sangat Tertinggal	31	31	17	7	7	3	0	0	0
2	Tertinggal	181	181	115	80	80	49	40	13	0
3	Berkembang	63	63	143	187	187	214	214	191	123
4	Maju	2	2	2	3	11	11	23	68	123
5	Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	5	31
JUMLAH		277								

Sumber : Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa (diterbitkan setiap tahun dengan berupa Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi)

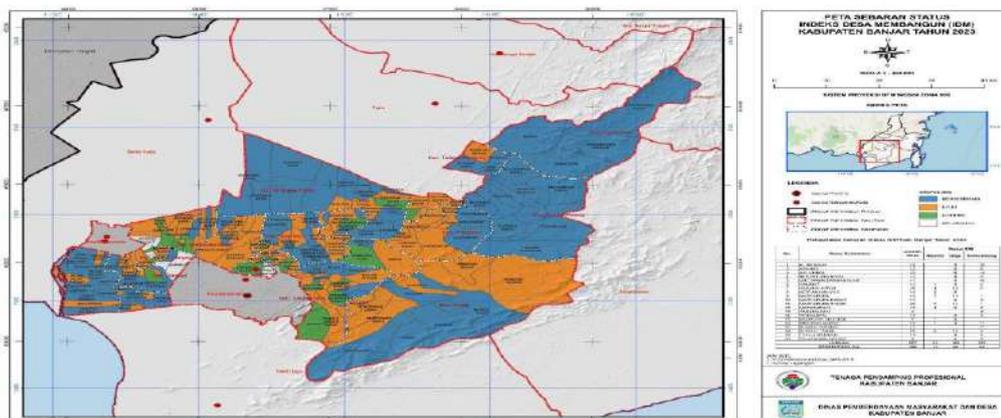
Untuk sasaran strategis “Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan” yang menggunakan indikator Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 0,6793 dan setelah dilakukan penghitungan maka capaian atas target ini adalah sebesar 0,7280 yang artinya persentase capaian atas indikator ini

adalah sebesar 107,17 persen sehingga masuk kategori Tinggi Grafik Perkembangan status desa pada Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023.



Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat pada garis merah, menunjukkan bahwa perkembangan status desa tertinggal yang ada di Kabupaten Banjar berada di titik nol (0) artinya target yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan desa tertinggal 13 desa itu sudah tercapai dan berhasil dituntaskan, demikian juga keberhasilan dalam meningkatkan status desa mandiri, dimana desa mandiri yang ditargetkan 2023 hanya 5 desa, ternyata berhasil mencapai 31 desa mandiri yang telah naik statusnya dari desa maju dan berkembang. Keberhasilan ini mencapai lebih dari 100% atau sebesar 620%. Hal ini merupakan bentuk keberhasilan bersama baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri disamping itu juga adanya Kerjasama yang baik dengan stake holder yang terkait diantaranya: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas SosialP3AP2KB, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Disperkim, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, BPBD, dan PD Pasar.

Peta Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Banjar Tahun 2023



Sumber data: laporan perkembangan IDM WEBSITE. Idm.kemendesa.go.id

Dari Peta ini juga dapat dilihat bagaimana status perkembangan desa yang ada di Kabupaten Banjar pada Tahun 2023 ini, dapat dilihat lokasi yang ada desa mandiri, desa Maju, desa berkembang dan desa tertinggal. Adapun letak desa mandiri posisinya berada diKecamatan Gambut, Kec Karang Intan, Kertak Hanyar, Martapura, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Kec. Sambung Makmur, Simpang Empat dan Sungai Tabuk. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan status desa yang ada di Kabupaten mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama desa mandiri yang pada tahun 2021 belum ada perkembangannya yaitu masih 0 (nol).

Pada tahun 2022 terdapat 5 desa dengan kriteria IDM sebagai desa mandiri, dan hingga tahun 2023 Desa Mandiri di Kabupaten Banjar telah mencapai menjadi 31 desa. Demikian juga dengan desa tertinggal yang pada tahun 2021 masih terdapat 40 desa , namun pada tahun 2022 hanya tersisa 13 desa tertinggal dan pada Tahun 2023 seluruh Desa tertinggal telah berhasil dituntaskan menjadi nol (0) dan menuju status desa berkembang. Progres status desa ini akan terlihat pada laporan IDM yang dirilis pada bulan Juni 2023 bukan pada akhir tahun anggaran berjalan (akhir bulan Desember). Peningkatan status ini merupakan hasil dari kerja keras baik pemerintah kabupaten maupun masyarakat yang ada di desa yang memang ingin merubah status hidupnya menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam mewujudkan Pembangunan di daerahnya terutama Pembangunan di perdesaan.

Pada tahun 2023 diKabupaten Banjar status desa tertinggal sudah tidak ada lagi dan ini sesuai amanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bahwa penanganan desa tertinggal sudah harus tuntas pada tahun 2023. Karenanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar telah melakukan perubahan Renstra yang seharusnya ditargetkan untuk status Desa tertinggal adalah 40 desa dan selesai pada tahun 2026, dengan adanya update pemutakhiran data IDM pada bulan Mei 2022 diketahui status desa tertinggal di Kabupaten Banjar telah berkurang menjadi 13 Desa, dan telah tuntas pada tahun 2023, keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kabupaten Banjar yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah yang terlibat dalam mendukung Indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

18. PERSENTASE USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) YANG MANDIRI

Sasaran Kinerja “Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga” diukur dengan “Persentase

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mandiri". UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera.

Tujuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Formulasi perhitungan indikator Persentase usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang mandiri adalah jumlah UPPKS yang mandiri dibagi jumlah UPPKS keseluruhan dikali 100 persen. Pada tahun 2023 ditargetkan persentase UPPKS ini adalah sebesar sebesar 57 persen dan berhasil terealisasi sebesar 97,3 persen, sehingga persentase capaiannya sebesar 170,70 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun jumlah UPPKS yang terbentuk hingga tahun 2023 adalah 37 UPPKS dengan jumlah yang mandiri sebanyak 36 UPPKS.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, membantu masyarakat untuk meningkatkan akses mereka ke pasar, baik melalui pengembangan saluran distribusi yang efisien, promosi produk lokal, menyediakan pendampingan dan konsultasi bisnis bagi keluarga yang ingin mengembangkan usaha mereka, hal ini mencakup aspek manajemen, pemasaran, dan strategi bisnis, serta membangun kemitraan yang kuat dengan pihak swasta dan lembaga keuangan untuk mendukung UPPKS seperti melibatkan perusahaan-perusahaan swasta dalam program-program pelatihan, penyediaan modal, dan dukungan teknis. Pemerintah juga secara berkelanjutan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan UPPKS di Kabupaten Banjar.

19. INDEKS INFRASTRUKTUR

Merupakan fasilitas infrastruktur dasar yang dapat diakses rumah tangga meliputi jaringan drainase, akses air minum, sistem air limbah ditambah persentase panjang jalan poros desa dalam kondisi mantap, jaringan irigasi, luas Kawasan strategis dan tersedianya tata bangunan dan lingkungan.

Indeks infrastruktur dihitung dengan persentase pembobotan yakni :

- a. Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase (10%)

- b. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (30%)
- c. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah (25%)
- d. Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap (35%)

Perhitungan Indeks infrastruktur sebagai berikut :

Tabel 31
Perhitungan Indeks Infrastruktur

Indikator Program	Persentase	Realisasi	Persentase x Realisasi
Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	10%	49,34	4,93
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak	30%	86,94	26,08
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	25%	84,95	21,24
Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	35%	75,14	26,30
Realisasi Indeks Infrastruktur			78,55

Target Indeks Infrastruktur pada tahun 2023 adalah sebesar 76,83 dan realisasi capaiannya adalah sebesar 78,55 dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,24 persen dengan kategori Tinggi. Capaian ini terwujud adanya komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk memaksimalkan pemenuhan fasilitas infrastruktur dasar yang dapat diakses rumah tangga seperti jaringan drainase, akses air minum, sistem air limbah ditambah persentase panjang jalan poros desa dalam kondisi mantap, jaringan irigasi, luas kawasan strategis dan tersedianya tata bangunan dan lingkungan.

20. PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG

Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang adalah pemanfaatan ruang dan penerbitan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Persentase kepatuhan terhadap rencana tata ruang adalah indikator atas sasaran strategis “Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang” dimana pada tahun 2023 target yang ditetapkan atas indikator ini adalah sebesar 94,519 persen, dan setelah dilakukan penghitungan maka didapatkan angka capaiannya adalah sebesar 94,520 persen pada tahun 2023 ini sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100 persen.

Untuk menghitung Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang menggunakan perhitungan: $(70\% \times \text{Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang}) + (30\% \times \text{Persentase Ijin yang Dikeluarkan yang Sesuai dengan Tata Ruang})$. Dimana harus diukur terlebih dahulu parameter berikut :

- 1) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang
 Formulasi Perhitungan

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang :

$$\frac{\sum \text{Luas Lahan Sesuai Peruntukannya}}{\sum \text{Luas Lahan Kabupaten}} \times 100 \%$$

$$= 422.978 \text{ Ha} / 458.900 \text{ Ha}$$

$$= 92,17$$

- Pembilang : Jumlah Luas lahan sesuai peruntukannya
- Penyebut : Jumlah luas lahan kabupaten.
- Ukuran konstanta adalah persen (%)

- 2) Persentase ijin yang dikeluarkan yang sesuai dengan tata ruang.

$$\frac{\sum \text{Realisasi Koordinasi tentang Ijin Lokasi yang Diterbitkan}}{\sum \text{Rencana Kegiatan Koordinasi tentang Ijin Lokasi yang Diterbitkan}} \times 100 \%$$

- Pembilang : Realisasi Koordinasi tentang Ijin Lokasi yang Diterbitkan
- Penyebut : Rencana Kegiatan Koordinasi tentang Ijin Lokasi yang Diterbitkan
- Ukuran konstanta adalah persen (%)

- 3) Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang dihitung dengan persentase pembobotan yakni :

$$= (70\% \times \text{Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang}) + (30\% \times \text{Persentase Ijin yang Dikeluarkan yang Sesuai dengan Tata Ruang})$$

$$= (70\% \times 92,17) + (30\% \times 100)$$

$$= 64,520 + 30$$

$$= 94,520$$

21. PERSENTASE KAWASAN KUMUH

Persentase kawasan kumuh merupakan indikator atas sasaran strategis “Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni”. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 9,18 persen dan realisasinya sebesar 9,12 persen dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,65 persen sebagaimana ditampilkan tabel berikut:

Tabel 32
Perhitungan Persentase Kawasan Kumuh

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2023	PD PENANGGUNG JAWAB
Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase kawasan kumuh	9,18	= $\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Permukiman Terbangun}} \times 100$	DPRKPLH (Bidang Kawasan Permukiman)
			= $\frac{291,48 \text{ Ha}}{3.195,84} \times 100$	
			=	
			= 9,12	

Disini capaian kinerja telah berhasil melebihi target yang ditetapkan, faktor pendukung terkait dengan tercapainya kinerja tersebut adalah adanya kolaborasi Provinsi Kalimantan selatan dan Kabupaten Banjar dalam penanganan dan pengelolaan Kawasan kumuh di Kabupaten Banjar, dan adanya koordinasi yang kuat dengan DPUPRP Kab. Banjar untuk masalah perbaikan/peningkatan jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi.

22. INDEKS RESIKO BENCANA

Indeks Risiko Bencana adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu wilayah rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, badai, atau kejadian lain yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan.

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Di mana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Pada tahun 2023 Indeks Risiko Bencana ditargetkan pada angka 150,6 dan setelah perhitungan selesai pada akhir tahun didapatkan nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjar adalah sebesar 133,44 dimana nilai tersebut menunjukkan adanya pencapaian yang lebih baik dibanding target yang ditetapkan mengingat pada Indeks Risiko Bencana nilai yang lebih kecil menunjukkan hasil yang lebih baik, sehingga persentase capaian atas target adalah sebesar 111,39 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya pemenuhan komponen kapasitas, kerentanan dan ancaman dalam unsur Indeks Risiko Bencana telah sesuai dan berhasil khususnya melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (*coping capacity*) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Pemenuhan ini juga menunjukkan kesiapan pemerintah Kabupaten Banjar dalam menghadapi bencana dan antisipasi bencana sesuai standar yang telah pemerintah pusat tetapkan.

23. PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP

Pelanggaran lingkungan hidup dapat mencakup berbagai tindakan yang merugikan ekosistem dan dapat membahayakan keseimbangan lingkungan seperti:

- Pencemaran Air, berupa pembuangan limbah industri atau domestik ke sungai, danau, atau laut tanpa pengolahan yang memadai dapat mencemari air dan merusak ekosistem perairan.
- Pencemaran Udara, berupa emisi polutan dari industri, kendaraan bermotor, atau pembakaran bahan bakar fosil dapat mencemari udara, menyebabkan masalah kesehatan manusia dan merusak lapisan ozon.

- Pencemaran Tanah, seperti pembuangan limbah toksik, penggunaan pestisida berlebihan, atau pembuangan sampah ilegal dapat mencemari tanah dan memengaruhi produktivitas lahan pertanian.
- Deforestasi, berupa penebangan hutan yang tidak berkelanjutan untuk memperluas pertanian atau mendapatkan kayu dapat merusak ekosistem hutan, menyebabkan hilangnya habitat dan mengurangi keragaman hayati.
- Overfishing, dengan penangkapan ikan secara berlebihan tanpa pengelolaan yang baik dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan merusak ekosistem laut.
- Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian atau industri tanpa tata kelola yang baik dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia.

Penanggulangan pelanggaran lingkungan melibatkan implementasi kebijakan lingkungan yang ketat, pengawasan, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mendukung praktek-praktek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penerapan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran juga penting untuk mendorong kepatuhan.

Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup merupakan indikator atas Sasaran strategis “Menurunnya pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup” dengan target 22,85 ditahun 2023, dan hasil realisasinya adalah sebesar 22,85 persen sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100 persen dengan kategori Tinggi.

Kegiatan monitoring dan pembinaan yang berkesinambungan serta berkala merupakan salah satu faktor utama dalam meminimalisasi resiko pelanggaran lingkungan, sehingga dapat mengantisipasi resiko pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi. Respon yang cepat dan terkoordinasi terhadap adanya pengaduan dari masyarakat terkait adanya pencemaran lingkungan merupakan hal yang tidak kalah penting dalam rangka meminimalkan potensi meluasnya pencemaran dan resiko gesekan antara masyarakat dengan perusahaan.

24. PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pada sasaran strategis “Meningkatnya pendapatan daerah” dengan indikator “Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah” yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) berhasil mendapat realisasi sebesar 30 persen dari target 4 persen dengan persentase capaian 750 persen. Hasil tersebut didapat dari perhitungan rata-rata pertumbuhan dari 4 (empat) komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Formulasi perhitungan pertumbuhan dari 4 (empat) komponen PAD adalah:

$$\frac{\text{realisasi tahun } n - \text{realisasi tahun } (n-1)}{\text{realisasi tahun } n-1} \times 100\%.$$

Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah + retribusi daerah + bagi hasil laba perusahaan daerah + lain-lain PAD yang sah dengan target Rp. 250.300.000.000. Pada 31 Desember 2023 diperoleh realisasi Rp. 277.948.453.970,04 yang terdiri dari realisasi pajak daerah Rp. 109.824.795.009 atau 114,27% dengan nilai pertumbuhan 17,17%. Retribusi daerah Rp. 8.372.925.539 atau 101,33% dengan nilai pertumbuhan 26,88%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 8.916.250.334 atau 80,45% dengan nilai pertumbuhan 24,39% dan lain-lain PAD yang sah Rp. 150.834.483.088 atau 111,93% dengan nilai pertumbuhan 60,44%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2023 berhasil merealisasikan 37,93% dari target 4% dengan capaian 948,25%.

25. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik, terdapat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

No	9 Unsur Pelayanan Publik
1	Persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan
8	Sarana dan prasarana
9	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan Pelayanan

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai Rata-rata Tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata (NRR) tertimbang dengan rumus :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Kategorisasi Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Nilai SKM Kabupaten Banjar diperoleh dari rata-rata nilai seluruh SKM unit pelayanan publik, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 33
Rekapitulasi survei kepuasan masyarakat (skm) tahun 2023 Unit kerja penyelenggara pelayanan publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pelayanan Publik	SKM Tahun 2023		
		IKM	Mutu Pelayanan	
I PERANGKAT DAERAH				
1	SEKRETARIAT DEWAN	88,41	A	SANGAT BAIK
2	INSPEKTORAT DAERAH	91,91	A	SANGAT BAIK
3	BADAN KEPEGAWAIAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA	88,22	A	BAIK
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	76,70	B	BAIK
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	89,70	A	SANGAT BAIK
6	DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	86,13	B	BAIK
7	BAKESBANGPOL	88,00	B	BAIK
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	83,60	B	BAIK
9	DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWASATA (DISBUDPORAPAR)	85,56	B	BAIK
10	SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)	81,05	B	BAIK
11	DINAS SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3AP2KB)	89,51	A	SANGAT BAIK
12	DPRKPLH	78,03	B	BAIK
13	DPUPRP	85,39	B	BAIK
14	BPKPAD	86,61	B	BAIK
15	DINAS KOPERASI USAHA MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DKUMPP)	84,75	B	BAIK
16	DINAS PERTANIAN (DISTAN)	80,42	B	BAIK
17	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (DPKP)	90,37	A	SANGAT BAIK
18	RSUD RAZA	86,02	B	BAIK
19	DINAS KESEHATAN (DINKES)	79,52	B	BAIK
20	DINAS PENDIDIKAN (DISDIK)	91,77	A	SANGAT BAIK
21	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)	89,47	A	SANGAT BAIK

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pelayanan Publik	SKM Tahun 2023		
		IKM	Mutu Pelayanan	
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)	90,24	A	SANGAT BAIK
23	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)	79,12	B	BAIK
24	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK PERSANDIAN (DKISP)	81,65	B	BAIK
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	81,32	B	BAIK
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (DISPERSIP)	90,95	A	BAIK
27	DKPP	85,22	B	BAIK
II KECAMATAN				
1	Kecamatan Aluh-Aluh	88,30	B	BAIK
2	Kecamatan Aranio	89,67	A	SANGAT BAIK
3	Kecamatan Astambul	89,51	A	SANGAT BAIK
4	Kecamatan Beruntung Baru	82,91	B	BAIK
5	Kecamatan Gambut	94,30	A	SANGAT BAIK
6	Kecamatan Karang Intan	89,47	A	SANGAT BAIK
7	Kecamatan Kertak Hanyar	91,80	A	SANGAT BAIK
8	Kecamatan Martapura	90,61	A	SANGAT BAIK
9	Kecamatan Martapura Barat	85,00	B	BAIK
10	Kecamatan Martapura Timur	81,25	B	BAIK
11	Kecamatan Mataraman	92,56	A	SANGAT BAIK
12	Kecamatan Paramasan	85,20	B	BAIK
13	Kecamatan Pengaron	84,76	B	BAIK
14	Kecamatan Sambung Makmur	85,04	B	BAIK
15	Kecamatan Simpang Empat	84,50	B	BAIK
16	Kecamatan Sungai Pinang	90,67	A	SANGAT BAIK
17	Kecamatan Sungai Tabuk	76,61	B	BAIK
18	Kecamatan Tatah Makmur	88,39	A	SANGAT BAIK
19	Kecamatan Telaga Bauntung	84,53	B	BAIK
20	Kecamatan Cintapuri Darussalam	86,00	B	BAIK
III KELURAHAN				
1	Kelurahan Gambut	89,62	A	SANGAT BAIK
2	Kelurahan Gambut Barat	85,02	B	BAIK
3	Kelurahan Jawa	83,62	B	BAIK
4	Kelurahan Keraton	80,74	B	BAIK
5	Kelurahan Kertak Hanyar	87,56	B	BAIK
6	Kelurahan Manarap Lama	87,77	B	BAIK
7	Kelurahan Mandar Sari	84,22	B	BAIK
8	Kelurahan Murung Keraton	92,82	A	SANGAT BAIK
9	Kelurahan Pasayangan	77,26	B	BAIK
10	Kelurahan Sekumpul	85,78	B	BAIK
11	Kelurahan Sungai Lulut	85,42	B	BAIK
12	Kelurahan Sungai Pering	90,67	A	SANGAT BAIK
13	Kelurahan Tanjung Rema Darat	76,84	B	BAIK

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pelayanan Publik	SKM Tahun 2023		
		IKM	Mutu Pelayanan	
IV	UPTD PUSKESMAS			
1	Puskesmas Aluh-Aluh	81,29	B	BAIK
2	Puskesmas Aranio	79,43	B	BAIK
3	Puskesmas Astambul	83,90	B	BAIK
4	Puskesmas Beruntung baru	77,37	B	BAIK
5	Puskesmas Gambut	85,35	B	BAIK
6	Puskesmas Karang Intan 1	92,17	A	SANGAT BAIK
7	Puskesmas Karang Intan 2	86,64	B	BAIK
8	Puskesmas Kertak Hanyar	82,82	B	BAIK
9	Puskesmas Martapura 1	87,38	B	BAIK
10	Puskesmas Martapura 2	99,35	A	SANGAT BAIK
11	Puskesmas Martapura Barat	77,37	B	BAIK
12	Puskesmas Martapura Timur	85,48	B	BAIK
13	Puskesmas Mataraman	83,90	B	BAIK
14	Puskesmas Paramasan	77,23	B	BAIK
15	Puskesmas Pengaron	82,71	B	BAIK
16	Puskesmas Sambung Makmur	81,69	B	BAIK
17	Puskesmas Simpang Empat 1	83,01	B	BAIK
18	Puskesmas Simpang Empat 2	82,11	B	BAIK
19	Puskesmas Sungai Pinang	86,47	B	BAIK
20	Puskesmas Sungai Tabuk 1	85,45	B	BAIK
21	Puskesmas Sungai Tabuk 2	92,50	A	SANGAT BAIK
22	Puskesmas Sungai Tabuk 3	85,23	B	BAIK
23	Puskesmas Telaga Bauntung	87,13	B	BAIK
24	Puskesmas Tatah Makmur	81,25	B	BAIK
25	Puskesmas Cintapuri Darussalam	87,13	B	BAIK
RATA-RATA NILAI SKM KABUPATEN		85,56	B	

Sumber data diolah dari SKM perangkat Daerah oleh bagian Organisasi.

Dari tabel tersebut diatas, didapat disampaikan sebagai berikut :

- Nilai rata-rata IKM Kabupaten Banjar Tahun 2023 adalah sebesar 85,56 dengan mutu pelayanan B, kategori Baik.
- Dari 85 unit pelayanan publik yang dinilai, sebanyak 62 unit atau 72,94 persen memperoleh IKM nilai “B” dengan kategori Baik, sedangkan 23 unit pelayanan publik lainnya atau sebesar 27,05 persen memperoleh IKM dengan nilai “A” kategori sangat baik.

Sehingga kalau dikaitkan dengan target IKM sebagai indikator atas sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik” yang pada tahun 2023 targetnya adalah 85, maka capaian nilai 85,56 menunjukkan bahwa persentase capaian keberhasilannya adalah sebesar 100,66 persen.

Tercapainya nilai IKM melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran dan komitmen dari pimpinan dan pelaksana layanan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan prima kepada masyarakat/penerima layanan. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sendiri dimulai sejak tahun 2020 setelah terbitnya Peraturan Bupati Banjar nomor 66 Tahun 2020 tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang mengamanatkan kepada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat kepada penerima layanan sebagai upaya peningkatan kinerja layanan pada perangkat daerah masing-masing. Dari hasil yang dicapai ditahun 2023 menunjukkan bahwa pelaksana pelayanan publik pada Perangkat Daerah telah berusaha semakin memperbaiki pemenuhan unsur pelayanan publik.

Faktor keberhasilan ini di dukung oleh kegiatan pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah khususnya pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Semua pihak unsur pimpinan, pemberi layanan dan pelaksana survei telah bekerjasama dengan baik sehingga pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan hasilnya telah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan publik kedepannya.

26. NILAI OPINI BPK

Nilai Opini BPK untuk tahun 2023 merujuk pada penilaian pada tahun 2022, sedangkan nilai tahun 2023 masih tahap proses penilaian. Pada sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan” dengan indikator “Nilai Opini BPK target yang dipakai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan pada tahun 2023 untuk kesekian kalinya Kabupaten Banjar berhasil mendapat Nilai Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Opini WTP tersebut dapat dicapai karena Kabupaten Banjar dinilai berhasil menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, memenuhi kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, memiliki kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektif dalam sistem pengendalian intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Hingga akhirnya BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK. Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karena capaian indikator ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan maka persentase atas capaian indikator ini adalah sebesar 100 persen.

27. NILAI AKIP

Salah satu indikator yang dipakai pada Sasaran Strategis “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan” adalah nilai SAKIP.

Nilai SAKIP atau Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja

atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa nilai sebesar 68,10 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,65	22,40
b. Pengukuran Kinerja	30	19,44	19,88
c. Pelaporan Kinerja	15	11,15	10,96
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,79	14,86
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,03	68,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Pada tahun 2023 indikator Nilai SAKIP ditargetkan pada angka 74,49, adapun realisasinya Kabupaten Banjar mendapat nilai hasil evaluasi sebesar 68,10 dengan persentase capaian kinerja sebesar 91,42 persen masuk pada kategori Tinggi. Secara capaian sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya nilai SAKIP ini berada di angka 68,03.

28. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme.

Penyuapan (bribery), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Pemerasan (extortion) yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Nepotisme yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-

teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

Implementasi terwujudnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dicapai dengan terwujudnya sasaran kinerja Inspektorat berupa Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas dan Efektif dengan indikator kinerja Indeks Integritas, dengan strategis seperti menerapkan kebijakan pengawasan berbasis resiko dan penjaminan mutu kapabilitas APIP.

SPAK adalah satu survei yang telah dilaksanakan oleh BPS dari tahun ke tahun, akan tetapi karena angka yang dihasilkan dari SPAK adalah angka nasional (IPAK Indonesia) maka tidak semua kabupaten/kota menjadi sampel dari pelaksanaan SPAK ini. Kabupaten Banjar termasuk salah satu kabupaten yang tidak menjadi sampel SPAK, sehingga untuk pemenuhan data perilaku anti korupsi ini Kabupaten Banjar khususnya Inspektorat Daerah melakukan kerjasama dengan BPS Kabupaten Banjar untuk membantu melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) di Kabupaten Banjar.

Pada tahun 2023 kegiatan pengukuran IPAK ditunda dikarenakan BPS sedang melaksanakan kegiatan pusat yaitu berdasarkan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Nomor B-057/63030/VS.190/2/2023 Tanggal 1 Februari 2023 yang menyatakan bahwa BPS Kabupaten Banjar diminta untuk menunda semua bentuk kerjasama hingga sensus pertanian 2023 selesai dilaksanakan, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pelaksanaan swakelola untuk pelaksanaan Survey Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2023 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar. Maka untuk realisasi nilai IPAK pada tahun 2023 masih menggunakan nilai IPAK 2022 karena dianggap masih relevan dengan justifikasi melihat tren nilai IPAK nasional yg nilainya tidak jauh berubah dengan nilai-nilai tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan akhir Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Kabupaten Banjar 2022 kerjasama Inspektorat Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar bahwa Berdasarkan penghitungan indeks komposit, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Banjar Tahun 2022 sebesar 4,06 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian IPAK Indonesia 2022 (3,93). Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Sehingga pada “indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)” ini dari target 4,20 yang ditetapkan pada tahun 2023 capaiannya adalah sebesar 4,06 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 96,67 dan masuk pada kategori Tinggi.

29. INDEKS PROFESIONALITAS ASN (IPA)

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu Instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Dimana menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan profesionalitas Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Standar dan Dimensi pengukuran Indeks professional ASN mencakup :

- 1) Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.
- 2) Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

Capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPA) Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 63,98 nilai ini melebihi target yang ditetapkan yakni 61,50 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 104,03 persen dan masuk kategori Tinggi.

30. INDEKS SPBE (SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah.

Indeks SPBE merupakan nilai menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan

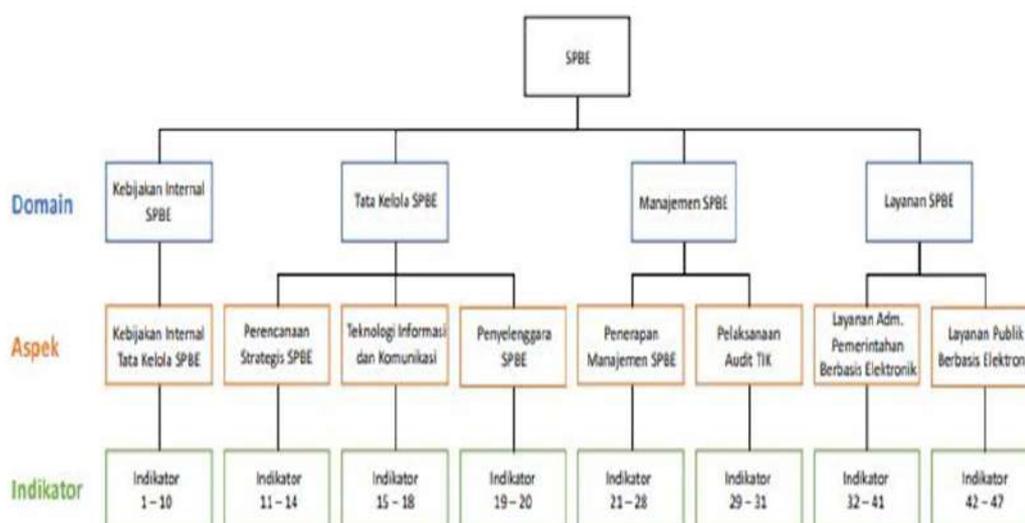
keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi. Kategori Indeks SPBE :

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- 1) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai
- 2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai
- 3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Struktur Penilaian SPBE



Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, menyatakan bahwa nilai Indeks SPBE Kabupaten Banjar adalah sebesar 2,87 dengan predikat Baik, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 34
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan tahun 2023

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2,69	Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik
4	Pemerintah Kab. Tapin	3,09	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	3,51	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,69	Baik
7	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,59	Cukup
8	Pemerintah Kab. Tabalong	3,21	Baik
9	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,28	Cukup
10	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2,18	Cukup
11	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,17	Baik
12	Pemerintah Kab. Balangan	2,69	Baik
13	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,00	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,68	Baik

Sesuai nilai yang didapatkan tersebut maka capaian indeks SPBE Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 2,87 melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 2,66 sehingga persentase capaiannya adalah 107,89 persen dengan kategori Tinggi.

31. ANGKA KASUS KONFLIK IDEOLOGI, SARA, SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DI MASYARAKAT YANG TERTANGANI

Secara umum Konflik dapat diartikan sebagai kejadian benturan atau bentrok fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan terganggunya stabilitas didaerah. Target pada indikator ini adalah 0 kasus konflik, pada tahun 2023 tercatat tidak ada terjadi konflik dibidang Ideologi, SARA, Sosial, Budaya Dan Ekonomi diwilayah Kabupaten Banjar sehingga capaian pada indikator sasaran ini adalah 100 persen dengan predikat Tinggi.

Beberapa usaha yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Banjar dalam menunjang tercapainya indikator ini antara lain:

- 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah dan mendeteksi dini terhadap semua potensi konflik di daerah.
- 2) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara maksimal dalam rangka memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
- 4) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai politik dan etika demokrasi khususnya kepada generasi muda calon pemilih pemula dan kaum wanita.

- 5) Meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat

Terkait masalah potensi konflik, pada tahun 2023 ada 2 (dua) kasus potensi konflik yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Banjar bersama instansi terkait lainnya, kedua potensi konflik tersebut terkait masalah agama yakni:

- 1) Masalah penolakan masyarakat sekitar atas rencana pembangunan Mesjid Al Mubarakah di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk. Inti masalah adalah masyarakat sekitar yang mayoritas penganut NU menolak rencana pembangunan mesjid yang dibangun oleh kelompok masyarakat lainnya yang menganut faham Muhammadiyah.

Untuk kasus ini telah diadakan koordinasi dan fasilitasi mediasi dengan melibatkan pihak panitia mesjid, perwakilan masyarakat, Kemenag, FKUB, Forkopimda Kecamatan, aparat keamanan dan pihak terkait lainnya.

- 2) Potensi adanya penolakan dan gesekan masyarakat atas rencana pelaksanaan misa Natal warga Nasrani di The Galeria Mall Lantai 7 yang bertempat di Kecamatan Gambut. Untuk hal ini telah dilakukan koordinasi dan langkah antisipatif dengan melibatkan Kemenag Banjar, Komunitas Intelijen Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Kodim Martapura, Kejaksaan Negeri Banjar, FKDM dan pihak terkait lainnya.

32. PERSENTASE CAKUPAN PELESTARIAN BUDAYA

Cakupan pelestarian budaya adalah unsur budaya benda dan tak benda yang telah dilakukan upaya perlindungan/pengembangan/pemanfaatan. Adapun 15 unsur budaya benda dan tak benda tersebut antara lain:

1. Tradisi Lisan
2. Manuskrip
3. Adat Istiadat
4. Ritus
5. Pengetahuan Tradisional
6. Teknologi Tradisional
7. Seni
8. Bahasa
9. Permainan Rakyat
10. Olahraga Tradisional
11. Benda Cagar Budaya
12. Struktur Cagar Budaya
13. Bangunan Cagar Budaya
14. Situs Cagar Budaya
15. Kawasan cagar budaya.

Persentase cakupan pelestarian budaya merupakan indikator dari sasaran strategis “Meningkatnya pelestarian seni budaya” dimana pada tahun 2023 ditargetkan capaiannya bisa mencapai 55,56 persen dan setelah dilakukan perhitungan dan pengukuran atas 15 unsur budaya tak benda dan unsur budaya benda tersebut maka dari 15 unsur tersebut telah ada 9 unsur yang telah diupayakan pelestariannya, sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 60 persen dan persentase capaiannya adalah 107,99 persen sehingga masuk kategori Tinggi

33. PRESTASI PEMUDA DAN SANTRI DALAM OLAHRAGA

Prestasi Pemuda dan Santri dalam Olahraga adalah prestasi yang didapatkan oleh atlet pemuda dan santri Kabupaten Banjar pada berbagai event olahraga resmi yang dibuktikan dengan didaptkannya medali penghargaan melalui event tersebut. Pada tahun 2023 event olahraga yang diikuti oleh para pemuda dan santri Kabupaten Banjar antara lain FORDA KORMI KALSEL 2023, POPDA KALSEL 2023, PESODA KALSEL 2023 dan medali yang diperoleh meliputi emas, perak, dan perunggu.

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan atas indikator ini adalah didaptkannya medali penghargaan sebanyak 108 buah dari berbagai event olahraga, namun sampai akhir tahun realisasi capaiannya baru bisa mendapatkan 76 medali dari berbagai event olahraga yang diikuti oleh para pemuda, pelajar dan santri Kabupaten Banjar, sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah sebesar 70,37 persen masuk kategori Sedang.

34. RASIO PELANGGARAN PERDA DAN TRANTIBUM

Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum merupakan perhitungan atas jumlah pelanggaran Perda dan gangguan trantibum dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas dikali Per 1.000 penduduk.

Sebagaimana diketahui instansi daerah yang bertanggung jawab dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagaimana dijelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 bahwa Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Terkait Sasaran strategis “Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat” dengan indikator Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum, ditargetkan pada tahun 2023 nilai rasionya adalah sebesar 0,98 dan sampai akhir tahun berjalan dari hasil perhitungan data didapatkan angka rasionya adalah sebesar 0,996 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 98,16 termasuk kategori Tinggi, dimana untuk jenis rasio ini semakin rendah capaian menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Sesuai data yang disampaikan bahwa untuk formulasi perhitungan rasio Pelanggaran Perda Dan Trantibum tahun 2023 jumlah pelanggaran yang tercatat adalah sebanyak 476 kasus, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Banjar yang berusia 10 tahun keatas ada sebanyak 477.994 orang, sehingga pada saat data jumlah pelanggaran tersebut dibagi jumlah penduduk Kabupaten Banjar berusia 10 tahun keatas lalu dikali 1000 maka didapatlah nilai jumlah 0,996.

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Untuk mengetahui peningkatan kinerja yang dicapai maka perlu membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan kinerja tahun 2023 dengan kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 35
Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	73,36	72,93	99,41	73,36	73,43	100,1	73,76	73,86	100,62
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	58,19	60,43	103,85	60,39	61,85	102,42	62,32	62,66	100,55
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	Belum menjadi indikator			78,04	77,84	99,74	78,29	78,85	100,72
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	51,1	60,9	119,18	80,19	80,17	99,98	80,29	81,63	101,67

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			0,483	0,498*	96,89
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Belum menjadi indikator			65,64	61,52	93,72	67,43	61,25	90,83
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	68,28	65,53	95,97	68,28	66	96,66	72,7	79,1	109,51
7	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor Pertanian	2	3,21	160,5	2	3,21	160,5	2,25	3,21*	142,67
		LPE sub sektor Perikanan	3,6	3,9	108,3	3,6	3,05	84,72	3,74	3,43	91,71
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103,82	105,88	100,65	103,82	105,88	100,65	106,42	113,16	106,33
8	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	5,6	4,07	72,68	1,98	2,47	124,75	4,02	2,47*	61,44
		Jumlah kunjungan wisatawan	Belum menjadi indikator			4.000.000	2.105.446	52,64	4.250.000	5.847.300	137,58
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,73	3,98	54,2	3,11	2,72	112,54	2,7	2,73	98,88
10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi berkualitas	Belum menjadi indikator			36,94	37,73	102,14	39,64	39,72	100,2
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Belum menjadi indikator			7,74	10,87	149,44	13,85	13,71	98,99
11	Meningkatnya sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	Belum menjadi indikator			15	14,92	99,47	17	29,77	175,12
12	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Belum menjadi indikator			0,6679	0,6793	101,71	0,6793	0,728	107,17
13	Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif	Belum menjadi indikator			72,22	63	87,23	57	97,3	170,7
14	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	73,25	73,09	99,78	73,25	75,34	102,85	76,83	78,55	102,24
15	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan terhadap rencana tata ruang	94,51	94,505	99,99	94,51	94,51	100	94,519	94,52	100
16	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase kawasan kumuh	9,67	9,98	96,79	9,67	9,33	103,52	9,18	9,12	101
17	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	152,6	165,1	92,43	151,6	151,6	100	150,6	133,44	111,39
18	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di bidang lingkungan hidup	Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			22,85	22,85	100

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
19	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	5,22	130,5	4	8,29	207,25	4	30	100
20	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,1	83,43	101,62	84	84,97	101,15	85	85,56	100,66
21	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP	70	68,97	98,53	72,65	68,03	93,64	74,49	68,1	91,42
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Belum menjadi indikator			3,05	4,06	133,11	4,2	4,06	96,67
		Indeks SPBE	2,2	2,43	110,45	2,2	2,56	116,36	2,66	2,87	107,89
22	Berkembangnya Profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	55	62,12	112,95	60	46,50	77,5	61,5	63,98	104,03
23	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik Ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di masyarakat yang tertangani	Belum menjadi indikator			0	0	100	0	0	100
24	Meningkatnya pelestarian seni budaya	Persentase cakupan pelestarian budaya	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			55,56	60	107,99
25	Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Prestasi pemuda dan santri dalam olahraga	Belum menjadi indikator			166	268	161,45	108	76	70,37
26	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum	1,10	1,23	88,18	2,01	1,07	146,77	0,98	0,996	98,16
Nilai Rata-rata			102,30			110,06			105,38		

Sumber : diolah dari berbagai data

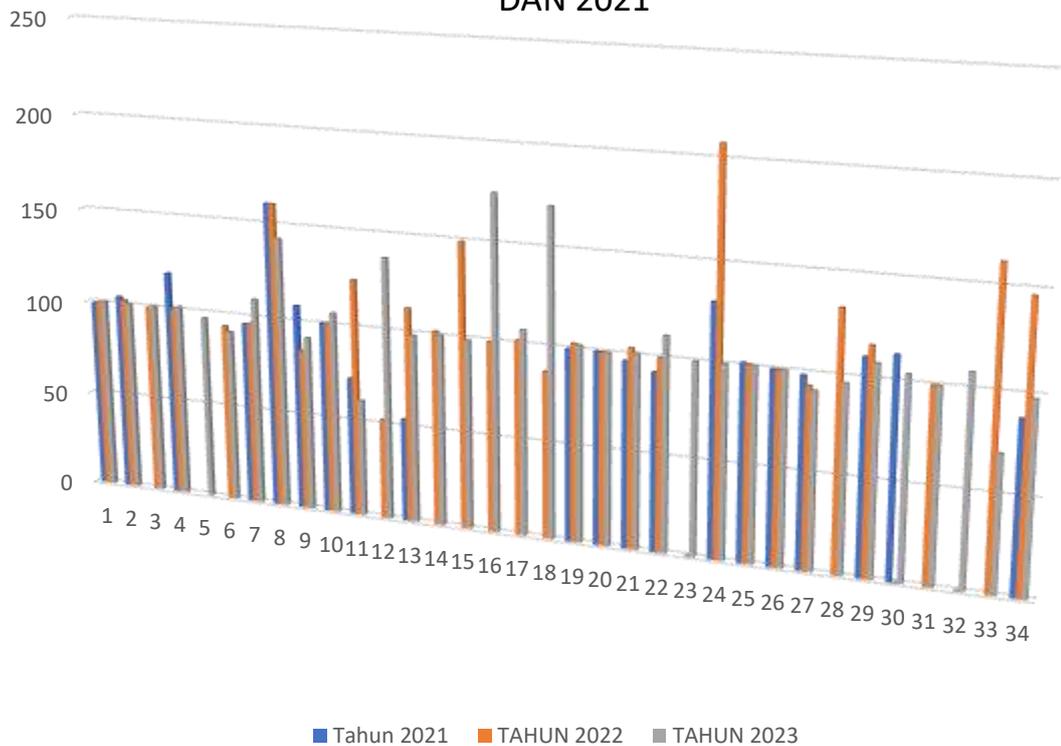
Rata-rata capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana terdapat penurunan sebesar 4,68 persen dari rata-rata capaian kinerja tahun sebelumnya yang sebesar 110,06 persen di tahun 2022, turun menjadi 105,38 persen pada tahun 2023. Penurunan ini disumbang oleh adanya penurunan persentase capaian kinerja pada beberapa indikator sasaran, seperti Indeks Pendidikan, Indeks Perlindungan Anak (IPA), LPE sub sektor Pertanian, LPE sektor industri Pengolahan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Koperasi berkualitas, Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha, Indeks Infrastruktur, Persentase kawasan kumuh, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks SPBE, Prestasi pemuda dan santri dalam olahraga, Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum. Dari sekian indikator tersebut yang paling besar penurunan persentase capaian kerjanya secara berurutan adalah indikator Prestasi pemuda dan santri dalam olahraga yang yang menurun 91,08 persen, LPE sektor industri Pengolahan menurun 63,31

persen, Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha turun sebesar 50,45 persen, Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum menurun 48,61 persen dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang menurun 36,44 persen. Namun penurunan persentase capaian kinerja ini tidak semuanya terjadi akibat nilai capaian kinerja tahunan yang menurun, karena pada beberapa indikator nilai capaiannya justru meningkat ditahun 2023, seperti pada indikator Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha yang capaian target tahunannya meningkat sebesar 2,84 persen, dan indikator Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum yang capaiannya meningkat sebesar 0,074 persen, kondisi ini terjadi karena angka target tahunan yang ditetapkan cukup tinggi dibanding nilai capaian yang didapat.

Secara keseluruhan dari 34 indikator pada 26 Sasaran Strategis diatas terdapat 24 indikator yang mencapai kinerja lebih dari 100 persen, dan ada 10 indikator yang nilai persentase capaiannya dibawah 100 persen. Dan dari sejumlah indikator tersebut terdapat 3 indikator baru yang sebelumnya pada tahun 2022 masih belum dipakai yakni indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup, dan Persentase Cakupan Pelestarian Budaya.

Kemudian kalau dibanding capaian tahun 2021, rata-rata persentase capaian ditahun 2023 ada sedikit peningkatan dibanding rata-rata persentase capaian tahun 2021 yang nilainya dikisaran 102,30 persen, ada peningkatan sebesar 3,08 persen, namun yang perlu diperhatikan pada tahun 2021 banyak indikator kinerjanya yang berbeda dengan tahun 2022 apalagi dengan tahun 2023, dimana tercatat pada tahun 2021 cuma ada 20 indikator kinerja yang sama dengan tahun 2023. Yang paling besar peningkatan persentase capaian indikator kinerja dari tahun 2021 ke 2023 adalah pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, ada peningkatan sebesar 44,68 persen, dimana pada tahun 2021 persentase capaiannya adalah sebesar 54,2 persen yang kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 98,88 persen. Yang artinya ada peningkatan kualitas dalam usaha menurunkan pengangguran terbuka di Kabupaten Banjar, dimana pada tahun 2021 capaiannya masih cukup jauh dari target, sedangkan pada tahun 2023 capaiannya tidak terpaut jauh dari target yang ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang penurunannya paling rendah ada pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan yang pada tahun 2023 persentasenya menurun sebesar 26,78 persen kalau dibanding capaian persentase indikator ini ditahun 2021 yang nilainya sebesar 108,3 persen. Secara detail perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021, terlihat dalam grafik sebagai berikut :

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DGN TAHUN 2022
DAN 2021**



d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD 2021-2026 yakni tahun 2026 maka hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap target indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 36
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023
dibandingkan dengan Target akhir dalam RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	% CAPAIAN
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74,94	73,86	98,56
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	62,29	62,66	100,59
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	79,02	78,85	99,78
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,59	81,63	101,29
5	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,451	0,498	89,58
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,89	61,25	84,03
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	80,96	79,10	97,70
7	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor Pertanian	3	3,21	107,00
		LPE sub sektor Perikanan	4,21	3,43	81,47
		Nilai Tukar Petani (NTP)	105,98	113,16	106,77
8	Meningkatnya industri	LPE sektor industri Pengolahan	3,42	2,47	72,22

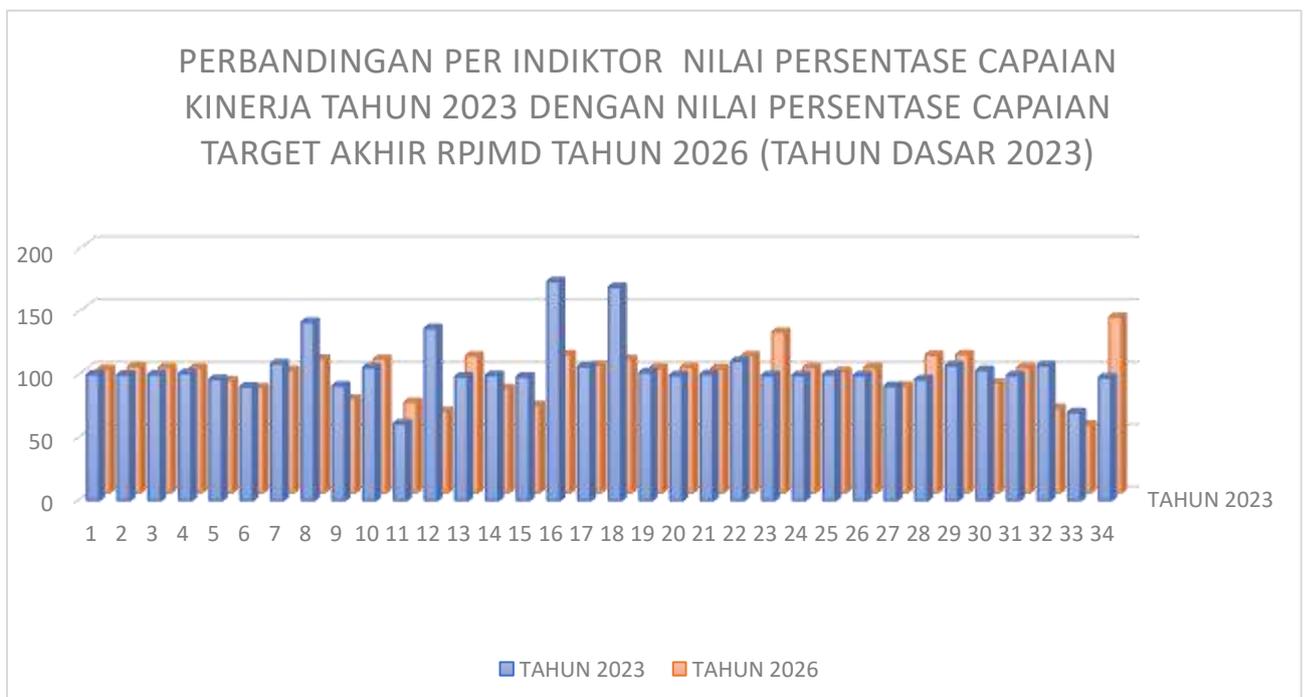
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	% CAPAIAN
	pengolahan, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	Jumlah kunjungan wisatawan	5.000.000	5.847.300	116,95
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	2,73	109,3
10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi berkualitas	47,75	39,72	83,18
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	19,64	13,71	69,81
11	Meningkatnya sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	27	29,77	110,26
12	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7135	0,7280	102,03
13	Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mandiri	91,38	97,3	106,48
14	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	78,82	78,55	99,66
15	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan terhadap rencana tata ruang	94,540	94,520	99,979
16	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase kawasan kumuh	9,05	9,12	99,23
17	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	147,6	133,44	109,59
18	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di bidang lingkungan hidup	Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup	17,80	22,85	128,37
19	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	30	100,00
20	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31	85,56	96,89
		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100
21	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	80	68,10	85,13
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,69	4,06	110,03
		Indeks SPBE	2,6	2,87	110,38
22	Berkembangnya Profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	73,00	63,98	87,64
23	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik Ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di masyarakat yang tertangani	0	0	100
24	Meningkatnya pelestarian seni budaya	Persentase cakupan pelestarian budaya	88,89	60	67,50
25	Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Prestasi pemuda dan santri dalam olahraga	633	344	54,34
26	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum	1,67	0,996	140,36

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Rata-rata Capaian Kinerja					96,58

Nilai rata-rata capaian kinerja tahun 2023 dengan perbandingan tahun 2026 sebagai periode akhir RPJMD 2021-2026 adalah sebesar 96,58 persen dan masuk kategori Tinggi. Dibandingkan nilai rata-rata capaian kinerja perbandingan akhir periode RPJMD tahun lalu yakni tahun 2022 yang nilainya sebesar 91,33 persen, maka nilai rata-rata tahun 2023 lebih tinggi 5,25 persen. Secara umum nilai capaian sebesar 96,58 persen sebagai capaian rata-rata tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar merupakan pencapaian yang sangat bagus mengingat masih ada tersisa 3 tahun lagi untuk bisa mencapai secara lebih optimal. Namun tentunya berbagai upaya perbaikan dan peningkatan harus terus dilakukan terutama pada indikator yang capaiannya masih rendah, sehingga target akhir periode RPJMD dapat tercapai dengan baik dan optimal.

Berikut disajikan grafik perbandingan persentase realisasi capaian tahun 2023 dengan persentase capaian periode akhir RPJMD 2021-2026 dengan perbandingan tahun dasar 2023:



Terdapat 17 indikator yang capaian kinerjanya seratus persen keatas sehingga perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui sebab tercapainya target periode akhir RPJMD 2021-2026 ditahun 2023, namun tentunya perlu ada pemilahan dalam melakukan evaluasi karena ada beberapa indikator yang memiliki target tetap setiap tahun sampai akhir periode RPJMD seperti pada

indikator Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Nilai Opini BPK, dan Angka kasus konflik Ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di masyarakat yang tertangani. Berikut indikator yang memiliki persentase capaian seratus persen ketas:

Tabel 37
Indikator Kinerja dengan capaian kinerja melebihi target akhir dalam RPJMD 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	62,29	62,66	100,59
2	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,59	81,63	101,29
3	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor Pertanian	3	3,21	107,00
4	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,98	113,16	106,77
5	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	Jumlah kunjungan wisatawan	5.000.000	5.847.300	116,95
6	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	2,73	109,3
7	Meningkatnya sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	27	29,77	110,26
8	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7135	0,7280	102,03
9	Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mandiri	91,38	97,3	106,48
10	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	147,6	133,44	109,59
11	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di bidang lingkungan hidup	Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup	17,8	22,85	128,37
12	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	30	100
13	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,69	4,06	110,03
		Indeks SPBE	2,6	2,87	110,38
14	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik Ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di masyarakat yang tertangani	0	0	100
15	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum	1,67	0,996	140,36

Pada sasaran strategis yang capaian target indikatornya telah mencapai angka seratus persen ketas dibandingkan target akhir periode RPJMD 2021-2026 maka harus dilakukan evaluasi dan reuiu kembali untuk menentukan target angka yang sesuai dengan melakukan pendalaman hasil capaian di tahun 2023, serta membuat analisa capaian dan kendala yang kemungkinan akan dihadapi apabila melakukan perubahan target.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Menyoroti penerapan anggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini dimana fokus Pemerintah adalah melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi dibidang anggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam anggaran. Efisiensi anggaran itu dilakukan dalam beberapa dimensi. Dimensi pertama harus mengutamakan manfaat. Oleh karena itu harus menjadi ukuran yang paling penting. Efisiensi kedua adalah prioritas.

Sehingga mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatannya, ada 3 (tiga) hal yang harus diingat dan dipahami, yaitu: (1) apa hasil dan manfaat yang bisa diperoleh masyarakat pengguna layanan (output and outcome oriented), hal ini untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai; (2) tugas-fungsi Unit Kerja yang melekat pada struktur organisasi (money follow function) hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam anggaran; dan (3) fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages) Hal-hal tersebut menjadi tuntutan bagaimana membelanjakan APBD secara efektif dan efisien.

Berbicara efisiensi Penggunaan Sumber Dana Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai didahului dengan menjabarkan pencapaian realisasi anggaran pada sasaran strategis kinerja dengan indikator yang telah perjanjikan oleh kepala daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 38
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Pencapaian Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	73,76	73,86	100,62	264.394.088.980	238.794.494.202	90,32
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	62,32	62,66	100,55	710.302.488.909	554.359.642.145	78,05
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	78,29	78,85	100,72	1.657.749.648	1.510.561.963	91,12
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,29	81,63	101,67	1.171.563.183	1.103.201.696	94,16
5	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,483	0,498	96,89	2.268.950.700	2.182.285.087	96,18
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67,43	61,25	90,83			
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	72,70	79,10	109,51	127.168.441.931	117.042.291.255	92,04
7	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor Pertanian	2,25	3,21	142,67	39.369.248.339	36.878.418.576	93,67
		LPE sub sektor Perikanan	3,74	3,43	91,71	546.896.510	537.666.050	98,31
		Nilai Tukar Petani (NTP)	106,42	113,16	106,33	276.454.500	271.651.400	98,26
8	Meningkatnya	LPE sektor	4,02	2,47	61,44	1.770.908.024	1.565.019.136	88,37

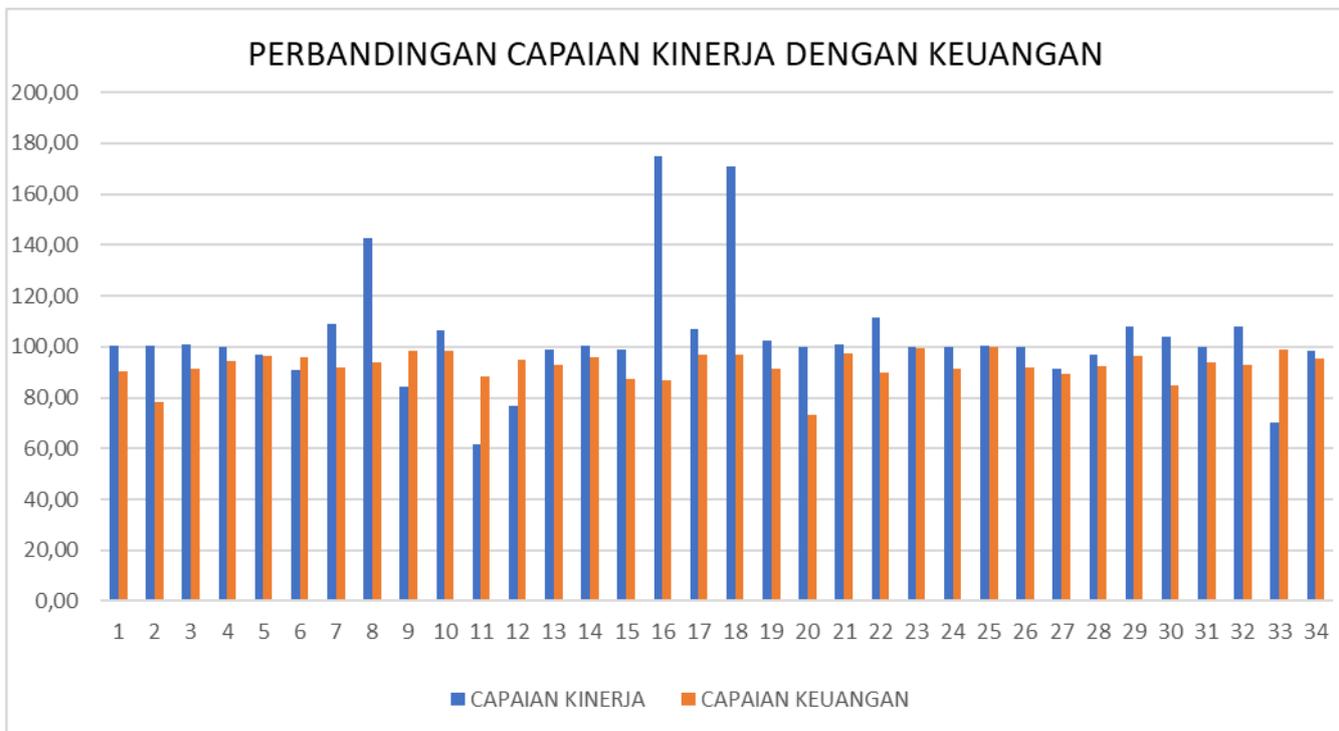
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
	industri pengolahan, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	industri Pengolahan Jumlah kunjungan wisatawan	4.250.000	5.847.300	137,58	4.205.742.500	3.984.069.569	94,73
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70	2,73	98,88	7.498.164.976	6.946.663.218	92,64
10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi berkualitas	39,64	39,72	100,20	447.664.960	428.184.536	95,65
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	13,85	13,71	98,99	665.420.260	579.915.010	87,15
11	Meningkatnya sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	17	29,77	175,12	16.199.762.588	14.029.746.288	86,60
12	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di pedesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6793	0,7280	107,17	88.000.000	85.150.000	96,76
13	Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mandiri	57	97,3	170,70	272.717.800	263.757.800	96,71
14	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	76,83	78,55	102,24	153.566.865.395	140.400.785.153	91,43
15	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan terhadap rencana tata ruang	94,519	94,520	100	2.736.057.866	2.005.054.026	73,28
16	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase kawasan kumuh	9,18	9,12	101,65	3.971.054.422	3.875.128.115	97,58
17	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	150,6	133,44	111,39	9283287081	8.334.201.536	89,78
18	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di bidang lingkungan hidup	Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup	22,85	22,85	100	44.576.720	44.418.300	99,64
19	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	30	100,00	6.128.880.743	5.612.041.417	91,57
20	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,56	100,66	11.900.070	11.900.070	100%
		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100			
21	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	74,49	68,10	91,42			
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	4,20	4,06	96,67	12.167.116.039	11.211.127.294	
		Indeks SPBE	2,66	2,87	107,89	17.541.179.980	16.897.444.190	96,33
22	Berkembangnya Profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	61,50	63,98	104,03	16.746.322.863	14.196.962.615	84,78
23	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik Ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan	0	0	100	11.933.608.630	11.191.737.014	93,78

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Ekonomi di masyarakat yang tertangani						
24	Meningkatnya pelestarian seni budaya	Persentase cakupan pelestarian budaya	55,56	60	107,99	11.199.078.339	10.407.135.445	92,93
25	Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Prestasi pemuda dan santri dalam olahraga	108	76	70,37	9.942.895.550	9.839.370.200	98,96
26	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum	0,98	0,996	98,37	12.823.696.358	12.206.275.308	95,19
Rata-rata Capaian Kinerja					105,38			92,28

Sumber : diolah dari berbagai data.

Untuk hasil pencapaian realisasi keuangan yang dikaitkan dengan kinerja sasaran strategis yang telah dijanjikan kepala daerah dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dirata-ratakan mencapai angka 92,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara capaian keuangan dan capaian kinerja pada sasaran strategis berbanding lurus dimana capaian kinerja melebihi capaian keuangan yang menunjukkan bahwa ada upaya efisiensi pendanaan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja.



Secara singkat efisiensi anggaran dapat dilihat dapat tabel berikut, yang menampilkan capaian kinerja pada indikator kinerja yang mencapai 100 persen keatas:

Tabel 39
Efisiensi Anggaran Atas Capaian Kinerja Melebihi Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TK. EFISIENSI (Rp)	TK. EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	264.394.088.980	238.794.494.202	90,32	25.599.594.778	9,68
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	710.302.488.909	554.359.642.145	78,05	155.942.846.764	21,95
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	1.657.749.648	1.510.561.963	91,12	147.187.685	8,88
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	127.168.441.931	117.042.291.255	92,04	10.126.150.676	7,96
5	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor Pertanian	39.369.248.339	36.878.418.576	93,67	2.490.829.763	6,33
		Nilai Tukar Petani (NTP)	276.454.500	271.651.400	98,26	4.803.100	1,74
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi berkualitas	447.664.960	428.184.536	95,65	19.480.424	4,35
7	Meningkatnya sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	16.199.762.588	14.029.746.288	86,60	2.170.016.300	13,40
8	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	88.000.000	85.150.000	96,76	2.850.000	3,24
9	Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mandiri	272.717.800	263.757.800	96,71	8.960.000	3,29
10	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	153.566.865.395	140.400.785.153	91,43	13.166.080.242	8,57
11	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan terhadap rencana tata ruang	2.736.057.866	2.005.054.026	73,28	731.003.840	26,72
12	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase kawasan kumuh	3.971.054.422	3.875.128.115	97,58	95.926.307	2,42
13	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	9.283.287.081	8.334.201.536	89,78	949.085.545	10,22
14	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di bidang lingkungan hidup	Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup	44.576.720	44.418.300	99,64	158.420	0,36
15	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6.128.880.743	5.612.041.417	91,57	516.839.326	8,43
16	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	11.900.070	11.900.070	100%	-	-
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Opini BPK					-
		Indeks SPBE	17.541.179.980	16.897.444.190	96,33	643.735.790	3,67

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TK. EFISIENSI (Rp)	TK. EFISIENSI (%)
18	Berkembangnya Profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	16.746.322.863	14.196.962.615	84,78	2.549.360.248	15,22
19	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik Ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di masyarakat yang tertangani	11.933.608.630	11.191.737.014	93,78	741.871.616	6,22
20	Meningkatnya pelestarian seni budaya	Persentase cakupan pelestarian budaya	11.199.078.339	10.407.135.445	92,93	791.942.894	7,07
RATA-RATA EFISIENSI ANGGARAN							8,49

Sumber : diolah dari berbagai data.

Dari tabel tersebut di atas, indikator yang capaian kinerjanya mencapai 100 persen lebih ada 20 Indikator kinerja sasaran strategis, dan dapat diketahui rata-rata efisiensi anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 8,49 persen. Upaya efisiensi menunjukkan bahwa telah dilakukan pencapaian kinerja secara maksimal dengan pendanaan yang diupayakan seminim mungkin, sehingga ada silpa sebagai efisiensi anggaran.

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh program/kegiatan sebagai alat atau sarana mencapai tujuan sesuai target yang ditetapkan, untuk itu harus dilakukan analisis atas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung tercapai tidaknya target kinerja. Secara rinci, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

1. INDEKS KESEHATAN

Indeks Kesehatan merupakan indikator atas Sasaran strategis "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", untuk tahun 2023 ditargetkan Indeks Kesehatan nya adalah sebesar 73,76, dan setelah akhir periode tahun berjalan didapatkan nilainya adalah sebesar 73,86 yang artinya target kinerjanya terpenuhi dengan persentase capaian sebesar 100,62 persen. Terpenuhinya target ini didukung dengan:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,

- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

2. INDEKS PENDIDIKAN

Pada tahun 2023 Indeks pendidikan di Kabupaten Banjar ditargetkan sebesar 62,32 dan setelah akhir tahun didapatkan nilai indeksny adalah sebesar 62,66 dengan persentase capaian sebesar 100,55 persen.

Keberhasilan target ini didukung dengan program pendukung seperti program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dimana telah dilaksanakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan PAUD, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan, Meningkatkan Peran Dan Partisipasi Madrasah Swasta/Pesantren Dalam Penyelenggaraan Program Paket, Meningkatkan Pelayanan Sekolah Inklusi, dan Pemerataan terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan.

3. INDEKS DAYA BELI

Indikator kinerja atas sasaran strategis “Meningkatnya daya beli masyarakat” adalah Indeks Daya Beli, dimana pada tahun 2023 ditetapkan target kinerja sebesar 78,29 dan realisasi capaiannya adalah sebesar 78,85 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100,72 persen. Adapun yang program yang mendukung pencapaian meningkatnya daya beli masyarakat melalui peningkatan kinerja sektor perdagangan antara lain :

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan,
- 2) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
- 3) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 4) Program Pengembangan Ekspor
- 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

4. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Sampai laporan ini disusun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banjar masih belum keluar, sehingga untuk perhitungan capaian indikator kinerja tahun 2023 ini menggunakan data capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2022, untuk target indikator kinerja tahun 2023 ditetapkan nilai IKP adalah sebesar 80,29 dan capaiannya adalah sebesar 80,17* (nilai tahun 2022), sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 99,85 persen.

Program pendukung pencapaian kinerja adalah target ini adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Program Penanganan Kerawanan Pangan.

5. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Pada sasaran strategis Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak, untuk indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2023 ditargetkan nilainya adalah sebesar 0,483, namun sampai laporan ini disusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Banjar masih belum keluar, sehingga untuk perhitungan capaian indikator kinerja tahun 2023 ini menggunakan data capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2022 dengan nilai indeks sebesar 0,498, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 96,89 persen. Program pendukung pencapaian kinerja ini adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan.

6. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

Pada sasaran strategis Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak, untuk indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada tahun 2023 ditargetkan nilainya sebesar 67,43, dan capaiannya adalah sebesar 61,25 dengan persentase capaian 90,83 persen dengan kategori tinggi. Program pendukung pencapaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program pemenuhan hak anak, Program perlindungan khusus anak dan Program pengelolaan sistem data gender dan anak.

7. INDEKS KONEKTIVITAS

Indeks Konektivitas Kabupaten Banjar pada tahun 2023 adalah sebesar 79,10 dimana nilai ini lebih besar daripada target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yakni sebesar 72,10 sehingga kalau dihitung persentase capaiannya adalah sebesar 108,10 dengan kategori Tinggi.

Program pendukung tercapainya kinerja ini adalah

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

8. LPE SUB SEKTOR PERTANIAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Pertanian adalah Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor pertanian Tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor pertanian tahun sebelumnya meliputi pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian.

Indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan” adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sub sektor pertanian. Pada tahun 2023 target atas indikator ini adalah sebesar 2,25, namun sampai laporan ini disusun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sub sektor pertanian Kabupaten Banjar masih belum keluar, sehingga untuk

perhitungan capaian indikator kinerja tahun 2023 ini menggunakan data capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2022 dengan nilai LPE sebesar 3,21 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 142,67 persen. Faktor keberhasilan sasaran ini didukung oleh program seperti:

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3) Program Penyuluhan Pertanian
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 5) Program Perizinan Usaha Pertanian

9. LPE SUB SEKTOR PERIKANAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Perikanan adalah Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan yang merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor perikanan Tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor perikanan tahun sebelumnya.

Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis “Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan” adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sub sektor perikanan. Pada tahun 2023 target atas indikator ini adalah sebesar 3,74 nilai LPE perikanan, dan capaian yang didapat pada tahun 2023 adalah sebesar 3,43 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 91,71 persen dengan kategori Tinggi. Pencapaian target pada sasaran ini dengan didukung program:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
- 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

10. NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Pada sasaran strategis “Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan” indikator ketiga yang dipakai adalah Nilai Tukar Petani (NTP), pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah sebesar 106,42. Sampai dengan bulan Desember 2023 NTP Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 113,16 dimana kalau dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang sebesar 106,42 maka persentase capaian target NTP ini pada tahun 2023 adalah sebesar 106,33 persen. Keberhasilan sasaran ini didukung program:

- 1) Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,

- 4) Program Penyuluhan Pertanian,
- 5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian,
- 6) Program Perizinan Usaha Pertanian,
- 7) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
- 8) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
- 9) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan
- 10) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

11. LPE SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

LPE sektor industri pengolahan adalah persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, yang merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun sebelumnya. Tahun 2023 target yang ditetapkan atas indikator ini adalah sebesar 4,02 namun sampai laporan ini disusun nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banjar masih belum keluar, sehingga untuk perhitungan capaian indikator kinerja tahun 2023 ini menggunakan data capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2022 dengan nilai LPE sebesar 2,47 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 61,44 persen dan masuk kategori Sedang. Usaha pencapaian pada sasaran ini didukung dengan pelaksanaan Program berikut:

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 2) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- 3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

12. JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN

Jumlah kunjungan wisatawan adalah penjumlahan dari wisatawan perhari yang berkunjung ke tempat destinasi wisata di Kabupaten Banjar selama setahun. Data dikumpulkan dari total kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara pada tempat lokasi yang dikunjungi. Target yang dipasang untuk indikator "Jumlah kunjungan wisatawan" pada tahun 2023 adalah 4.250.000 orang wisatawan, sampai akhir tahun 2023 ini tercatat jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banjar adalah sekitar 5.847.300, dengan persentase capaian mencapai 137,58 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Dengan didukung pada pelaksanaan program:

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- 3) Program Pemasaran Pariwisata.

13. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 2,73 persen, maka kalau dibandingkan dengan target TPT yang ditetapkan sebagai indikator pada sasaran strategis “Menurunnya tingkat pengangguran” yang sebesar 2,70 maka persentase capaian atas indikator ini adalah sebesar 98,88 persen dengan kategori Tinggi. Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menurunkan angka pengangguran melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan melalui Program berikut :

- 1) Program pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Hubungan Industrial

14. PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS

Capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase Koperasi berkualitas ini adalah sebesar 39,72 dari target sebesar 39,64 sehingga persentase capaiannya sebesar 100,20 dengan kategori Tinggi. Program pendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain :

- 1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

15. PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA

Capaian atas indikator kinerja “Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha” pada tahun 2023 adalah sebesar 13,71 dari target yang ditetapkan yakni sebesar 13,85 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 98,99 dan termasuk kategori Tinggi. Program yang mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain :

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Keci Dan Usaha Mikro (UMKM)
- 2) Program Pengembangan UMKM

16. PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) YANG MANDIRI

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 29,77 persen, sementara jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 17 persen maka persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 175,12 persen dengan kategori Sangat tinggi. Dengan program pendukung seperti:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial,
- 2) Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 3) Program Penanganan Bencana.

17. INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Untuk sasaran strategis “Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan” yang menggunakan indikator Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 0,6793 dan setelah dilakukan penghitungan maka capaian atas target ini adalah sebesar 0,7280 yang artinya persentase capaian atas indikator ini adalah sebesar 107,17 persen sehingga masuk kategori Tinggi. Program yang mendukung pencapaian kinerja tersebut yakni :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

18. PERSENTASE USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) YANG MANDIRI

Formulasi perhitungan indikator Persentase usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang mandiri adalah jumlah UPPKS yang mandiri dibagi jumlah UPPKS keseluruhan dikali 100 persen. Pada tahun 2023 ditargetkan persentase UPPKS ini adalah sebesar sebesar 57 persen dan berhasil terealisasi sebesar 97,3 persen, sehingga persentasenya sebesar 170,70 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Dengan program pendukung capaian kinerja yakni:

- 1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan
- 3) Program pengendalian Penduduk.

19. INDEKS INFRASTRUKTUR

Target Indeks Infrastruktur pada tahun 2023 adalah sebesar 76,83 dan realisasi capaiannya adalah sebesar 78,55 dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,24 persen dengan kategori Tinggi. Program yang menjadi penentu keberhasilan sasaran ini adalah:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5) Program Pengembangan Pemukiman
- 6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

20. PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG

Persentase kepatuhan terhadap rencana tata ruang adalah indikator atas sasaran strategis “Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang” dimana

pada tahun 2023 target yang ditetapkan atas indikator ini adalah sebesar 94,519 persen, dan setelah dilakukan penghitungan maka didapatkan angka capaiannya adalah sebesar 94,520 persen pada tahun 2023 ini sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100 persen. Program penunjang untuk keberhasilan tersebut adalah :

- 1) Program penataan bangunan gedung
- 2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3) Program Pengelolaan Izin Lokasi
- 4) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 5) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee

21. PERSENTASE KAWASAN KUMUH

Persentase kawasan kumuh merupakan indikator atas sasaran strategis “Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni” dengan indikator kinerja berupa Persentase Kawasan Kumuh. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 9,18 persen dan realisasinya sebesar 9,12 persen dengan persentase capaian kinerja sebesar 101 persen. Dengan program pendukung sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Persampahan,
- 2) Program Kawasan Permukiman,
- 3) Program Pengembangan Perumahan,
- 4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

22. INDEKS RESIKO BENCANA

Pada tahun 2023 Indeks Risiko Bencana ditargetkan pada angka 150,6 dan setelah perhitungan selesai pada akhir tahun didapatkan nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjar adalah sebesar 133,44 dimana nilai tersebut menunjukkan adanya pencapaian yang lebih baik dibanding target yang ditetapkan mengingat pada Indeks Risiko Bencana nilai yang lebih kecil menunjukkan hasil yang lebih baik, sehingga persentase capaian atas target adalah sebesar 111,39 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Dengan program penanggulangan bencana sebagai pendukung pencapaiannya.

23. PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup merupakan indikator atas Sasaran strategis “Menurunnya pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup” dengan target 22,85 ditahun 2023, dan hasil realisasinya adalah sebesar 22,85 persen sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100 persen dengan kategori Tinggi. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah:

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI),
- 3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3),
- 4) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH,
- 5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan Hidup Untuk Masyarakat,
- 6) Program Perencanaan Lingkungan Hidup,
- 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan
- 8) Program Pengelolaan Persampahan

24. PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2022 berhasil merealisasikan 30% dari target 4% dengan capaian 750%. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 2 indikator kegiatan, yaitu “Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah” dan “Persentase peningkatan wajib pajak yang patuh”.

25. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang pada tahun 2023 targetnya adalah 85, mendapatkan capaian nilai 85,56 yang menunjukkan bahwa persentase capaian keberhasilannya adalah sebesar 100,66 persen. Program pendukung atas sasaran pada indikator nilai IKM adalah :

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan program Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu dengan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Program Perizinan Penggunaan Arsip.
- 4) Sekretariat daerah dengan Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- 5) Sekretariat DPRD dengan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- 6) Kecamatan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

26. NILAI OPINI BPK

Pada sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan” dengan indikator “Nilai Opini BPK target yang dipakai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan pada tahun 2023 untuk kesekian kalinya Kabupaten Banjar berhasil mendapat Nilai Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Program pendukung pencapaian target ini adalah:

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

27. NILAI SAKIP

Pada tahun 2023 indikator Nilai SAKIP ditargetkan pada angka 74,49, adapun realisasinya Kabupaten Banjar mendapat nilai hasil evaluasi sebesar 68,10 dengan persentase capaian kinerja sebesar 91,42 persen masuk pada kategori Tinggi. Secara capaian sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya nilai SAKIP ini berada di angka 68,03. Program yang mendorong pencapaian target ini adalah:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah

28. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Pada “indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)” ini dari target 4,20 yang ditetapkan pada tahun 2023 capaiannya adalah sebesar 4,06 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 96,67 dan masuk pada kategori Tinggi. Faktor keberhasilan capaian IPAK tersebut didukung dengan program:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

29. INDEKS PROFESIONALITAS ASN (IPA)

Capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPA) Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 63,98 nilai ini melebihi target yang ditetapkan

yakni 61,50 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 104,03 persen dan masuk kategori Tinggi. Faktor Keberhasilan didukung oleh Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

30. INDEKS SPBE

capaian indeks SPBE Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 2,87 melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 2,66 sehingga persentase capaiannya adalah 107,89 persen dengan kategori Tinggi. Program pendukung pencapaian kinerja ini adalah :

- 1) Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- 2) Program Aplikasi Informatika
- 3) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.

31. ANGKA KASUS KONFLIK IDEOLOGI, SARA, SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DI MASYARAKAT

Target pada indikator ini adalah 0 kasus konflik, pada tahun 2023 tercatat tidak ada terjadi konflik dibidang Ideologi, SARA, Sosial, Budaya Dan Ekonomi diwilayah Kabupaten Banjar sehingga capaian pada indikator sasaran ini adalah 100 persen dengan predikat Tinggi. Program pendukung atas sasaran ini adalah:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi penanganan Konflik Sosial

32. PERSENTASE CAKUPAN PELESTARIAN BUDAYA

Persentase cakupan pelestarian budaya merupakan indikator dari sasaran strategis “Meningkatnya pelestarian seni budaya” dimana pada tahun 2023 ditargetkan capaiannya bisa mencapai 55,56 persen dan setelah dilakukan perhitungan dan pengukuran atas 15 unsur budaya tak benda dan unsur budaya benda tersebut maka dari 15 unsur tersebut telah ada 9 unsur yang telah diupayakan pelestariannya, sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 60 persen dan persentase capaiannya adalah 107,99 persen sehingga masuk kategori Tinggi. Dengan program pendukung yakni:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- 3) Program Pembinaan Sejarah.

33. PRESTASI PEMUDA DAN SANTRI DALAM OLAHRAGA

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan atas indikator ini adalah didapatkannya medali penghargaan sebanyak 108 buah dari berbagai event olahraga, namun sampai akhir tahun realisasi capaiannya baru bisa mendapatkan 76 medali dari berbagai event olahraga yang diikuti oleh para pemuda, pelajar dan santri Kabupaten Banjar, sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah sebesar 70,37 persen masuk kategori Sedang. Pencapaian kinerja ini didukung oleh program:

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

34. RASIO PELANGGARAN PERDA DAN TRANTIBUM

Terkait Sasaran strategis “Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat” dengan indikator Rasio pelanggaran Perda dan Trantibum, ditargetkan pada tahun 2023 nilai rasionya adalah sebesar 0,98 dan sampai akhir tahun berjalan dari hasil perhitungan data didapatkan angka rasionya adalah sebesar 0,996 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 98,16 termasuk kategori Tinggi. Untuk memenuhi pencapaian target tersebut didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Secara detail anggaran dan realisasi belanja APBD Kabupaten Banjar tahun 2023 dirinci per Perangkat Daerah tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 40
Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan per Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Belanja dan Transfer		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	710.302.468.789,00	543.855.725.255,00	76,57
2	Dinas Kesehatan	315.506.323.331,00	283.404.635.380,67	89,83
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	176.923.311.989,00	159.778.652.084,00	90,31
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	302.597.031.897,00	276.663.501.050,00	91,43
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	78.296.408.979,00	75.046.600.509,00	95,85
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.823.696.358,00	12.256.603.308,00	95,58
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.283.287.081,00	8.334.201.536,00	89,78
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	7.128.990.754,00	6.739.173.242,00	94,53
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30.480.713.460,00	27.433.331.708,00	90,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.498.164.976,00	6.927.557.218,00	92,39
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.821.422.500,00	10.368.408.021,00	95,81
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	8.366.297.670,00	8.040.368.204,00	96,10
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.844.374.992,00	8.197.108.102,00	92,68
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	166.581.144.408,00	164.723.711.041,00	98,88

No.	Perangkat Daerah	Belanja dan Transfer		%
		Anggaran	Realisasi	
15	Dinas Perhubungan	13.516.468.532,00	12.687.561.766,00	93,87
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	17.541.179.880,00	16.906.444.190,00	96,38
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	14.898.108.482,00	14.042.577.135,00	94,26
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.753.961.372,00	13.124.369.215,00	95,42
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.347.716.389,00	24.135.708.175,14	95,22
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.340.406.170,00	5.057.827.304,00	94,71
21	Dinas Pertanian	39.369.248.339,00	36.878.418.576,00	93,67
22	Sekretariat Daerah	58.190.569.821,00	55.385.662.474,17	95,18
23	Sekretariat DPRD	81.156.041.032,00	68.828.682.955,00	84,81
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	13.953.419.530,00	12.470.785.637,00	89,37
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	285.527.442.669,00	275.653.568.642,00	96,54
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.746.322.863,00	14.196.962.616,00	84,78
27	Inspektorat Daerah	13.302.825.008,00	12.032.908.443,00	90,45
28	Kecamatan Sambung Makmur	2.178.298.443,00	2.002.974.409,00	91,95
29	Kecamatan Pengaron	2.629.181.780,00	2.351.916.682,00	89,45
30	Kecamatan Tatah Makmur	2.436.728.532,00	2.338.142.098,00	95,95
31	Kecamatan Martapura Timur	3.044.092.937,00	2.667.258.153,00	87,62
32	Kecamatan Paramasan	2.654.522.507,00	2.288.851.739,00	86,22
33	Kecamatan Kertak Hanyar	6.327.735.921,00	5.748.752.617,00	90,85
34	Kecamatan Aluh-Aluh	2.387.675.021,00	2.105.250.642,00	88,17
35	Kecamatan Martapura	13.112.454.212,00	12.734.531.077,00	97,12
36	Kecamatan Martapura Barat	2.511.824.579,00	2.369.772.519,00	94,34
37	Kecamatan Simpang Empat	2.230.575.923,00	2.151.485.788,00	96,45
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	2.285.281.161,00	1.867.012.493,00	81,70
39	Kecamatan Beruntung Baru	2.467.434.091,00	2.286.861.024,00	92,68
40	Kecamatan Karang Intan	3.035.554.557,00	2.695.610.467,00	88,80
41	Kecamatan Aranio	2.576.560.063,00	2.353.401.300,00	91,34
42	Kecamatan Mataraman	2.616.792.746,00	2.270.890.241,00	86,78
43	Kecamatan Sungai Tabuk	4.131.911.836,00	3.512.158.649,00	85,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	2.227.724.650,00	1.986.704.264,00	89,18
45	Kecamatan Gambut	6.878.307.434,00	6.407.828.686,00	93,16
46	Kecamatan Telaga Bauntung	2.257.098.986,00	2.034.628.599,00	90,14
47	Kecamatan Astambul	2.614.419.841,00	2.346.651.309,00	89,76
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	44.933.608.630,00	44.191.737.014,00	98,35
Jumlah		2.559.635.131.121,00	2.261.883.473.556,98	88,37

Sumber: BPKPAD Banjar

Dari tabel tersebut di atas rata-rata capaian keuangan pada Perangkat Daerah adalah 88,37 persen. Capaian tertinggi realisasi keuangan ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan capaian realisasi sebesar 98,88, sedangkan capaian realisasi keuangan terendah pada Dinas Pendidikan dengan capaian realisasi yakni 76,57 persen.

Dalam upaya memaksimalkan pencapaian kinerja yang akan dilakukan ditahun berikutnya, harus dilakukan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja yang beorientasi hasil dan dampak dengan pertimbangan efisiensi anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala baik dilakukan oleh internal perangkat daerah maupun oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan, terdapat keterkaitan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dimana selain melaksanakan tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pula tugas pembantuan.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Dana Tugas Pembantuan sangat berarti bagi daerah karena dapat membiayai pembangunan daerahnya tanpa membebani APBD dan tidak memerlukan pendamping dari APBD, Dana Tugas Pembantuan berasal anggaran Kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan

rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah. Pengaturan dana Tugas Pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan. Kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan data dari Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Prov. Kalsel bahwa Kabupaten Banjar selama 4 (empat) tahun ini tidak menerima Kegiatan Pembangunan dengan sumber pendanaan dari Dana Tugas Pembantuan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41
Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Banjar Tahun 2016 s/d 2023

NO.	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR	-	-	-	990.600.000	-	-	-	-
2.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANJAR	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
3.	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANJAR	12.419.039.000	-	-	-	-	-	-	-
6.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANJAR	7.000.000.000	6.939.094.000	-	4.000.000.000	-	-	-	-
7.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR	1.261.588.000	-	-	-	-	-	-	-
8.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BANJAR	-	-	950.000.000	950.000.000	-	-	-	-
TOTAL		21.180.627.000	6.939.094.000	950.000.000	5.940.600.000	-	-	-	-

Sumber : DIPA Dana Tugas Pembantuan Masing-Masing Perangkat Daerah

Dari tabel tersebut diketahui jumlah dana tugas pembantuan yang diterima Kabupaten Banjar terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik dari jumlah dana yang diterima dan jumlah organisasi perangkat daerah yang menjadi pengelola.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur tentang :

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.
4. Penerima pelayanan dasar pada:
 - a. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- b. SPM Pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 15 tahun yang Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- c. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Capaian SPM

Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan

$$= \frac{\text{kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2023 sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7 – 15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata – rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata – rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai dengan jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2023 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

Tabel 42
Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	19.332	18.448	95,427%	1. Angka Partisipasi Sekolah	100	95,427	95,43%
						2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	63,8	63,80%
						3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	100	80,33	80,33%
						4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100	55	55,00%
						5. Kecukupan formasi guru ASN	100	149,29	100%
						6. Indeks distribusi guru	0,29	0,29	100%
						7. Proporsi PTK bersertifikat	100	36,06	36,06%
						8. Proporsi PTK penggerak	100	40	40,00%
						9. Pengalaman pelatihan guru	100	100	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92.386	73.233	79,269%	SD			
						1. Angka partisipasi kasar	100	91,44	91,44%
						2. Angka partisipasi sekolah	100	91,71	91,71%
						3. Angka partisipasi murni	100	83,79	83,79%
						4. Kemampuan Literasi	63,75	63,75	100%
						5. Kemampuan Numerasi	46,66	46,66	100%
						6. Perbedaan Skor Literasi	56,37	63,75	100%
						7. Perbedaan Skor Numerasi	31,88	46,66	100%
						8. Indeks Iklim Keamanan	69,55	69,55	100%
						9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	68	68	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						10. Kecukupan formasi ASN	100	84,63	84,63%
						11. Indeks Distribusi Guru	0,4	0,4	100%
						12. Proporsi PTK bersertifikat	100	64,62	64,62%
						13. Proporsi PTK Penggerak	100	64,7	64,70%
						14. Pengalaman pelatihan guru	100	100	100%
						SMP			
						1. Angka partisipasi kasar	100	70,54	70,54%
						2. Angka partisipasi sekolah	100	72,18	72,18%
						3. Angka partisipasi murni	100	55,57	55,57%
						4. Kemampuan Literasi	50,91	72,71	100%
						5. Kemampuan Numerasi	32,88	48,03	100%
						6. Perbedaan Skor Literasi	50,91	72,71	100%
						7. Perbedaan Skor Numerasi	32,88	48,03	100%
						8. Indeks Iklim Keamanan	68,95	68,95	100%
						9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	67,33	67,33	100%
						10. Kecukupan formasi guru ASN	100	76,71	76,71%
						11. Indeks Distribusi Guru	0,34	0,34	100%
						12. Proporsi PTK bersertifikat	100	84,95	84,95%
						13. Proporsi PTK Penggerak	100	15,38	15,38%
						14. Pengalaman pelatihan guru	100	100	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	18.814	18.228	96,885%	1. Angka partisipasi sekolah	100	88	87,59%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						2. Kemampuan Literasi	49,59	49,59	100%
						3. Kemampuan Numerasi	41,5	41,5	100%
						4. Perbedaan Skor Literasi	5,4	5,4	100%
						5. Perbedaan Skor Numerasi	3,01	3,01	100%
						6. Indeks Iklim Keamanan	67,94	67,94	100%
						7. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	58,8	58,8	100%
						8. Kecukupan formasi ASN	100	16	16,00%
						9. Proporsi PTK bersertifikat	10,9	10,9	100%
						10. Pengalaman pelatihan guru	100	100	100%

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024

$$IP_{\text{SPM Pendidikan Anak Usia Dini}} = (95,43\% \times 20) + (76,34\% \times 80) = 14,90\% + 74,51\% = 91,24\%$$

$$IP_{\text{SPM Pendidikan Dasar}} = (87,72\% \times 20) + (88,08\% \times 80) = 17,54\% + 63,41\% = 80,96\%$$

$$IP_{\text{SPM Pendidikan Kesetaraan}} = (90,36\% \times 20) + (96,88\% \times 80) = 18,07\% + 77,51\% = 95,58\%$$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023 adalah Tuntas Madya dengan nilai 89,26%.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2023 berasal dari dana lainnya yaitu APBN DAK Fisik dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 112.971.778.734 dan APBD murni sebesar Rp. 39.734.006.034 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pendidikan Anak Usia Dini	14.990.212.391	14.863.199.499
Pendidikan Dasar	111.356.031.697	102.522.410.845
Pendidikan Kesetaraan	26.359.540.680	26.158.126.400
TOTAL	152.705.784.768	143.543.736.744

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2024

4.1.5 Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terdiri dari:

Tabel 44
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas Pendidikan	Pembina TK 1	S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam		1
2	Sekretaris Dinas Pendidikan	Pembina	S2 Manajemen Pendidikan		1
3	Kabid. Bina PAUD, Pendidikan Keluarga dan Dikmas	Pembina	S2 Magister Manajemen		1
4	Kabid Bina SD	Pembina	S1 Hukum Keperdataan		1
5	Kabid Bina SMP	Penata Tk. 1	S2 Manajemen Pendidikan		1
6	Kabid Sarpras	Pembina	S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam		1
7	Kasi PAUD dan Pendidikan Keluarga	Pembina	S1 Pendidikan		1
8	Kasi PTK PAUD	Pembina	S2 Manajemen Pendidikan		1
9	Kasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penata Tk. 1	S2 Manajemen Pendidikan		1
10	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Pembina Tk, 1	S2 Magister Pendidikan		1
11	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter SD	Pembina	S2 Ilmu Manajemen		1
12	Kasi PTK SD	Pembina	S1 Ekonomi		1
13	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Penata	S2 Pendidikan		1
14	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Penata Muda Tk. 1	DIII		1
15	Kasi PTK SMP	Penata Tk. 1	S1 Administrasi Negara		1
16	Kasi Sarpras Paud dan Dikmas	Penata Tk. 1	S1 Teknik Sipil	Diklat PBJ	1
17	Kasi Sarpras SD	Penata	S1 Teknik Sipil	Diklat PBJ	1
18	Kasi Sarpras SMP	Pembina	S2 Manajemen Pendidikan	Diklat PBJ	1
19	Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang bersertifikat Pendidik			233	893
20	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang bersertifikat Pendidik			1.812	1.810
21	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP yang bersertifikat Pendidik			664	548

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Banjar, 2024

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pendidikan merupakan sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar, yaitu meningkatnya akses dan mutu Pendidikan baik dari Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, maupun Pendidikan Kesetaraan. Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Banjar telah menyelenggarakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yang salah satunya urusan Pendidikan. Dengan merujuk pada

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

gagasan pokok bahwa pelayanan dasar yang diatur dengan kebijakan SPM harus menjangkau seluruh warga negara, maka target kinerja semestinya 100% dengancakupai capaian SPM 100%.

Diperlukan strategi dalam meningkatkan partisipasi sekolah anak warga negara, antara lain meningkatkan kerjasama lintas sektor, terutama penyelenggara Pendidikan swasta dan penyelenggaraan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dalam penguatan data. Kemudian, penyediaan unit sekolah baru dan peningkatan sarana dan prasarana di sekolah, sehingga dapat memperluas akses dan kualitas standar sarana dan prasarana.

Adapun permasalahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 45
Permasalahan, Solusi dan Tindaklanjut Penerapan SPM Urusan Pendidikan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	Pengumpulan data belum optimal karena data yang diperoleh dari Emis (Kemenag) hanya berupa rekapitulasi tidak dapat diakses untuk melihat data personil berdasarkan usia	Perlu adanya koordinasi dan persamaan persespsi tentang kebutuhan data, serta ketersediaan data yang valid dan akuntabel	Lebih meningkatkan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pendidikan
2	Regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian bersifat dinamis (cepat berubah)	Percepatan dalam pendataan serta penentuan penarikan data yang akan menjadi sumber utama/base data	Kedepannya tentang Penarikan data dilakukan setiap 3 bulan sekali
3	Data yang dihimpun selalu bergerak, terutama terkait jumlah siswa, dan data akreditasi sekolah dikarenakan perubahan nilai akreditasi sekolah oleh tim asesor Jumlah Peserta Didik yang cukup banyak memerlukan alokasi dana yang besar Seringkali data pendidik dan tenaga kependidikan yang diserahkan melebihi batas waktu yang ditentukan	Penentuan penarikan data yang harus ditentukan sebelum penghitungan dikarenakan data yang digunakan selalalu bergerak	Terkait dengan validnya data, sekolah dihimbau mengisi data dapodik dengan sebenarnya
4	Masih ditemukannya Data Siswa fiktif di aplikasi Dapodik, untuk mendongkrak jumlah Dana BOS, sedangkan Data Siswa digunakan untuk mengetahui capaian SPM pada urusan pendidikan	Perlunya diadakan sosialisasi dan himbauan tentang kebenaran data ke setiap sekolah agar data yang tersedia valid	Meminta tiap sekolah untuk melaporkan data sekolah yang valid dan akuntabel
5	Indikator yang ada di Form Excel SPM berbeda dengan Indikator Rapor Pendidikan misal skor literasi laki laki dengan perempuan ada di Form SPM, tetapi di Rapor	Adanya persamaan indicator antara form SPM dengan data kebutuhan terkait Rapor Pendidikan	Kementerian selaku pemilik aplikasi E SPM hendaknya dalam form SPM sesuai dengan Aplikasi serta dengan Rapor Pendidikan
6	Perbedaan Sumber data yang akurat, tidak ada penjelasan yang lebih detail dari data dukung Rapor Pendidikan	Sumber data yang digunakan adalah Rapor Pendidikan, akan tetapi dalam penghitungan	Rapor Pendidikan hendaknya memaparkan perhitungan data yang legih rinci dan sesuai dengan SPM agar lebih memudahkan dalam proses

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
		capaiannya tidak diketahui lebih rinci dari mana hasil datanya	pelaporan ESPM
7	Data siswa sifatnya dinamis sehingga penghitungan selalu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan (riil) pada saat pelaksanaan kegiatan	Pengisian data hendaknya di isi dengan data sebenarnya valid	Kedepannya seluruh sekolah yang di ambil datanya dihimbau mengisi data yang valid
8	Masih banyak peserta didik yang belum mendapatkan bantuan personil peserta didik minimal mendapatkan kebutuhan dasar pendidikan (alat tulis). Data pendidik dan tenaga kependidikan yang diisi sekolah melalui aplikasi Dapodik kurang valid karena beberapa tidak melakukan mutasi pegawai, gaji berkala, serta Pendidik yang masih pensiun masih terdata di Dapodik	Perlunya diadakan sosialisasi dan himbauan tentang kebenaran data ke setiap sekolah agar data yang tersedia valid	Meminta tiap sekolah untuk melaporkan data sekolah tiap 3 bulan
9	Penganggaran menyesuaikan dengan pagu indikatif yang disediakan oleh Sekretariat Daerah (Bappedalitbang)	Terkait penganggaran untuk pencapaian SPM menyesuaikan dengan anggaran yang disetujui	Memaksimalkan anggaran yang tersedia terkait peningkatan capaian standar pelayanan minima
10	Kurangnya fasilitas dalam penyusunan anggaran terkait Program SPM, Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana penunjang fasilitas peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.	Terkait penganggaran untuk pencapaian SPM menyesuaikan dengan anggaran yang disetujui	Memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan metode skala prioritas
11	Kegiatan menyesuaikan regulasi yang berlaku pada saat pelaksanaan	Hendaknya regulasi lebih dulu ditetapkan sebelum penyusunan kegiatan agar kegiatan yang mendukung SPM lebih tepat sasaran	Harus lebih menyiapkan strategi yang cepat ketika rencana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku
12	Anggaran yang direncanakan tidak selalu disetujui untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pemenuhan tenaga kependidikan seringkali tidak dapat terlaksana disebabkan salah satunya operator/tenaga admin dipegang oleh guru/kepala sekolah bukan operator khusus	Tenaga Operator hendaknya lebih dipokuskan untuk mengelola data saat pengisian aplikasi Dapodik yang merupakan sumber data	Setiap Sekolah harus memiliki tenaga Khusus pengelolaan data (Dapodik)

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2024

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Kesehatan RI menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten, kota tersebut dalam kurun waktu tertentu (nominator)}}{\text{jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten, kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

$$\begin{aligned} \text{Capaian SPM} &= \frac{\text{jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten, kota di dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten, kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\% \end{aligned}$$

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28hari, yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten, kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- d. Pelayanan kesehatan balita;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah balita usia 12 – 23bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 24 – 35bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 36 – 59bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{jumlah balita usia 12 – 59 bulan di wilayah kerja kabupaten, kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten, kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten, kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$$

- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

$$\begin{aligned} \text{Capaian SPM} &= \frac{\text{jumlah orang usia 15 – 59tahun di kabupaten, kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah orang usia 15 – 59tahun di kabupaten, kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\% \end{aligned}$$

- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah warga negara berusia 60th atau lebih yang mendaat skrining kesehatan sesuai standar minimal lkali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten, kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{jumlah semua warga negara berusia 60tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten, kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15\text{tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15\text{tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten, kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

$$\begin{aligned} \text{Capaian SPM} &= \frac{\text{jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15\text{tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15\text{tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten, kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\% \end{aligned}$$

- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten, kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten, kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2023 sebagai OPD pelaksana SPM Kesehatan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 46
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2023 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

Tabel 47
Realisasi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.838	10.360	95,5896%	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10838	10360	95,59%
						2. Tablet tambah darah	975.420	932.400	95,59%
						3. Alat deteksi resiko ibu hamil : test kehamilan	10838	10360	95,59%
						4. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaan HB	10838	10360	95,59%
						5. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaa golongan darah	10838	10360	95,59%
						6. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaan glukoprotein rin	10838	10360	95,59%
						7. Kartu ibu / rekam medis ibu	10838	10360	95,59%
						8. Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	10838	10360	95,59%
						9. Tenaga kesehatan : Dokter / dokter spesialis kebidanan	100	54	54,00%
						10. Tenaga kesehatan : Bidan	562	420	74,73%
						11. Tenaga kesehatan : Perawat	425	294	69,18%
						12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dua kali pada trimester ketiga)	10838	10360	95,59%
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	9.046	8.363	92,4497%	1. Formulir partograf	9.046	8.363	92,45%
						2. Kartu ibu (rekam medis)	9.046	8.363	92,45%
						3. Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	9.046	8.363	92,45%
						4. Tenaga kesehatan : Dokter / dokter spesialis kebidanan dan kandungan	100	54	54,00%
						5. Tenaga kesehatan : Bidan	562	420	74,73%
						6. Tenaga kesehatan : Perawat	425	294	69,18%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8.978	8.850	98,5743%	1. Vaksin hepatitis B0	8.850	8.850	100,00%
						2. Vitamin K1 Injeksi	8.850	8.850	100,00%
						3. Salep / tetes mata antibiotik	8.850	8.850	100,00%
						4. Formulir bayi baru lahir	8.850	8.850	100,00%
						5. Formulir manajemen terpadu bayi muda (MTBM)	8.850	8.850	100,00%
						6. Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	8.850	8.850	100,00%
						7. Tenaga kesehatan : Dokter / dokter spesialis anak	100	54	54,00%
						8. Tenaga kesehatan : Bidan	562	420	74,73%
						9. Tenaga kesehatan : Perawat	425	294	69,18%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	44.015	35.370	80,3590%	1. Kuisioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	35.370	35.370	100,00%
						2. Formulir deteksi dini tumbuh kembang anak (DDTK)	35.370	35.370	100,00%
						3. Buku kartu ibu dan anak (KIA)	35.370	35.370	100,00%
						4. Vitamin A Biru	35.370	35.370	100,00%
						5. Vitamin A Merah	35.370	35.370	100,00%
						6. Vaksin imunisasi dasar : HBO	35.370	35.370	100,00%
						7. Vaksin imunisasi dasar : BCG	35.370	35.370	100,00%
						8. Vaksin imunisasi dasar : Polio	35.370	35.370	100,00%
						9. Vaksin imunisasi dasar : IPV	35.370	35.370	100,00%
						10. Vaksin imunisasi dasar : DPT - HB -Hib	35.370	35.370	100,00%
						11. Vaksin imunisasi dasar : Campak	35.370	35.370	100,00%
						12. Vaksin imunisasi dasar : Rubella	35.370	35.370	100,00%
						13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	35.370	35.370	100,00%
						14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	35.370	35.370	100,00%
						15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	35.370	35.370	100,00%
						16. Jarum suntik dan	35.370	35.370	100,00%

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						bahan habis pakai (BHP)			
						17. Peralatan anafilaktik	35.370	35.370	100,00%
						18. Tenaga Kesehatan : dokter	100	54	54,00%
						19. Tenaga Kesehatan : bidan	562	420	74,73%
						20. Tenaga Kesehatan : perawat	425	294	69,18%
						21. Tenaga Kesehatan : ahli gizi	121	64	52,89%
						22. Tenaga Kesehatan : kader kesehatan	2945	2945	100,00%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92.594	54.516	58,8764%	1. Buku raport kesehatanku	54.516	54.516	100,00%
						2. Buku pemantauan kesehatan	54.516	54.516	100,00%
						3. Kuesioner skrining kesehatan	54.516	54.516	100,00%
						4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	25	25	100,00%
						5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	25	25	100,00%
						6. Tenaga Kesehatan : Dokter / dokter gigi	152	78	51,32%
						7. Tenaga Kesehatan : Bidan	562	420	74,73%
						8. Tenaga Kesehatan : Perawat	425	294	69,18%
						9. Tenaga Kesehatan : Ahli gizi	121	64	52,89%
						10. Tenaga Kesehatan : masyarakat	81	43	53,09%
						11. Tenaga Kesehatan : Kader kesehatan	2.945	2.945	100,00%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	385.442	237.754	61,6835%	1. Pedoman dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	25	25	100,00%
						2. Alat ukur berat badan	25	25	100,00%
						3. Alat : Alat ukur tinggi badan	25	25	100,00%
						4. Alat : alat ukur lingkaran perut	25	25	100,00%
						5. Alat : tensimeter	25	25	100,00%

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						6. Alat : glukometer	25	25	100,00%
						7. Alat : tes strip gula darah	237.754	237.754	100,00%
						8. Alat : lancet	237.754	237.754	100,00%
						9. Alat : kapas alkohol	237.754	237.754	100,00%
						10. Alat : KIT IVA Tes	25	25	100,00%
						11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM)	25	25	100,00%
						12. Tenaga Kesehatan : Dokter	100	54	54,00%
						13. Tenaga Kesehatan : Bidan	562	420	74,73%
						14. Tenaga Kesehatan : Perawat	425	294	69,18%
						15. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	121	64	52,89%
						16. Tenaga kesehatan masyarakat	81	43	53,09%
						17. Tenaga non kesehatan terlatih / mempunyai kualifikasi tertentu	1.575	1.575	100,00%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	53.413	43.319	81,1020%	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	43.319	43.319	100,00%
						2. Instrumen geriatric depression scale (GDS), instrumen abbreviated mental test (AMT) dan instrumen activity daily living (ADL) dalam paket pengkajian paripurna pasien geriatri (P3G)	43.319	43.319	100,00%
						3. Buku kesehatan lansia	43.319	43.319	100,00%
						4. Tenaga Kesehatan : Dokter	100	54	54,00%
						5. Tenaga Kesehatan : Bidan	562	420	74,73%
						6. Tenaga Kesehatan : Perawat	425	294	69,18%
						7. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	121	64	52,89%
						8. Tenaga kesehatan masyarakat	81	43	53,09%
						9. Tenaga non kesehatan terlatih /	1.274	1274	100,00%

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38.626	32.869	85,0955%	mempunyai kualifikasi tertentu			
						1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	25	25	100,00%
						2. Tensimeter	25	25	100,00%
						3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi penyakit menular (SIPTM)	25	25	100,00%
						4. Tenaga Kesehatan : Dokter	100	54	54,00%
						5. Tenaga Kesehatan : Bidan	562	420	74,73%
						6. Tenaga Kesehatan : Perawat	425	294	69,18%
						7. Tenaga kesehatan masyarakat	81	43	53,09%
8. Obat hipertensi	32.869	32.869	100,00%						
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5.723	5.723	100,00%	1. Alat : Glukometer	25	25	100,00%
						2. Alat : Strip tes gula darah	5723	5723	100,00%
						3. Alat : kapas alkohol	5723	5723	100,00%
						4. Alat : lancet	5723	5723	100,00%
						5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM)	25	25	100,00%
						6. Pedoman dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	25	25	100,00%
						7. Tenaga Kesehatan : Dokter	100	54	54,00%
						8. Tenaga Kesehatan : Bidan	562	540	96,09%
						9. Tenaga Kesehatan : Perawat	425	294	69,18%
						10. Tenaga Kesehatan : Ahli gizi	121	64	52,89%
						11. Tenaga kesehatan masyarakat	81	43	53,09%
						12. Obat diabetes melitus	5723	5723	100,00%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang	1034	1034	100,00%	1. Buku pedoman diagnosis penggolongan	25	25	100,00%

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
		mendapatkan pelayanan kesehatan				gangguan jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru (bila sudah tersedia)			
						2. Kit berisi 2 alat fiksasi	0	0	100,00%
						3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	1034	1034	0,00%
						4. Media komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	25	25	54,00%
						5. Tenaga kesehatan : dokter	100	54	100,00%
						6. Tenaga kesehatan : perawat terlatih jiwa	25	25	65,90%
						7. Tenaga kesehatan : tenaga kesehatan lainnya	1038	684	65,90%
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8079	7329	90,72%	1. Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	8079	7329	90,72%
						2. Reagen Zn TB	8079	7329	90,72%
						3. Masker jenis rumah tangga dan masker N95	8079	7329	90,72%
						4. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohollampu spirtus/bunsen, ose/lidi) rak pengering	8079	7329	90,72%
						5. Catridge tes cepat molekuler	8079	7329	90,72%
						6. Formulir tes cepat molekuler	8079	7329	90,72%
						7. Pedoman / standar operasional prosedur (SOP)	33	33	100,00%
						8. Dokter / dokter spesialis penyakit dalam / dokter spesialis paru	100	54	54,00%
						9. Tenaga kesehatan :Perawat	425	294	69,18%
						10. Tenaga kesehatan :Analis teknis laboratorium medik (ATLM)	100	62	62,00%
						11. Tenaga kesehatan : Penata rontgen	15	15	100,00%
						12. Tenaga kesehatan	81	43	53,09%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						masyarakat			
						13. Tenaga non kesehatan terlatih / mempunyai kualifikasi tertentu	290	290	100,00%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	13.473	13.473	100,00%	1. Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	120	30	25,00%
						2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	13473	13473	100,00%
						3. Bahan medis habis pakai, handschoen, alkohol swab, plester, lancet / jarum steril, jarum spuit yang sesuai / vacutainer dan jarum biasa	30	30	100,00%
						4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP / NIK	13473	13473	100,00%
						5. Tenaga kesehatan : Dokter / dokter spesialis penyakit dalam / dokter spesialis kulit dan kelamin	100	54	54,00%
						6. Tenaga kesehatan : Perawat	425	294	69,18%
						7. Tenaga kesehatan : Bidan	562	420	74,73%
						8. Tenaga kesehatan : Ahli teknologi laboratorium medis (ATLM)	100	62	62,00%
						9. Tenaga kesehatan masyarakat	81	43	53,09%
						10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	6	6	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

$$IP_{SPM} \text{ Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil} = (88,18\% \times 20) + (95,59\% \times 80) = 17,64\% + 76,47\% = 94,11\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin} = (79,21\% \times 20) + (92,45\% \times 80) = 15,84\% + 73,96\% = 89,80\%$$

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

IP ^{SPM} Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	=	(88,66% x 20) + (99% x 80) = 17,73% + 78,86% = 96,59%
IP ^{SPM} Pelayanan Kesehatan Balita	=	(93,22% x 20) + (80,36% x 80) = 18,64% + 64% = 82,93%
IP ^{SPM} Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	=	(81,93% x 20) + (58,88% x 80) = 16,38% + 47,01% = 63,49%
IP ^{SPM} Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	=	(88,46% x 20) + (61,68% x 80) = 17,69% + 49,35% = 67,04%
IP ^{SPM} Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	=	(78,21% x 20) + (81,10% x 80) = 15,64% + 64,88% = 80,52%
IP ^{SPM} Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	=	(81,37% x 20) + (85,09% x 80) = 16,27% + 68,07% = 84,34%
IP ^{SPM} Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	=	(85,44% x 20) + (100% x 80) = 17,09% + 80% = 97,09%
IP ^{SPM} Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	=	(69,40% x 20) + (100% x 80) = 13,88% + 80% = 94,85%
IP ^{SPM} Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	=	(83,27% x 20) + (91% x 80) = 16,65% + 72,57% = 89,23%
IP ^{SPM} Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	=	(73,80% x 20) + (100% x 80) = 14,76% + 80% = 94,76%

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023 adalah Tuntas Madya dengan nilai 86,14%.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2023 sebagian besar berasal dari DAK Non Fisik yaitu sebesar Rp. 7.370.301.600 sedangkan dari APBD murni sebesar Rp. 1.279.150.250 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

Tabel 48
Alokasi & Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2.989.010.000	2.523.950.220
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	159.990.000	46.162.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	18.103.100	15.693.100
4	Pelayanan kesehatan balita	919.326.100	820.686.100
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.026.381.000	759.566.000

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	923.092.400	905.139.850
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	480.246.500	419.951.500
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	11.700.000	5.937.500
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	55.191.000	49.041.000
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	251.942.000	239.922.000
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	1.069.060.000	282.973.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	745.409.750	694.874.750
TOTAL		8.649.451.850	6.763.897.020

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

4.2.5. Dukungan Personil

Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam upaya memberikan pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang sesuai standar di Kabupaten Banjar Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 49
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas	IV c	S2 Manajemen		Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
2	Kepala Bidang SDK				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
3	Kepala Bidang Kesmas				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
4	Kepala Bidang P2P				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
5	Kepala Bidang Yankes				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
6	Kepala Seksi Data, Informasi Kesehatan dan SDMK				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
7	Kepala Seksi Faskes				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
8	Kepala Seksi Farmalkes				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
9	Kepala Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
10	Kepala Seksi Kesling, Kesja dan Olahraga				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
11	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
12	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
13	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
14	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
					2019
15	Kepala Seksi Yankesprimer dan Akreditasi				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
16	Kepala Seksi Rujukan dan Pembiayaan				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
17	Kepala Seksi Yankestrad dan Perizinan				Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
18	Dokter				
19	Perawat				
20	Bidan				
21	Petugas Gizi				
22	Petugas Promosi Kesehatan				
23	Apoteker dan Asisten Apoteker				
24	Kepala Puskesmas				
25	Ahli Teknologi Laboratorium Medis				

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Tabel 50
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter , perawat , bidan	Dokter : 100 Bidan : 562 Perawat : 425	Dokter : 54 Bidan : 420 Perawat : 294
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter , perawat , bidan	Dokter : 100 Bidan : 562 Perawat : 425	Dokter : 54 Bidan : 420 Perawat : 294
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter, Perawat, Bidan	Dokter : 100 Bidan : 562 Perawat : 425	Dokter : 54 Bidan : 420 Perawat : 294
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter, Perawat, Bidan , Gizi	Dokter : 100 Bidan : 562 Perawat : 425 Gizi : 121 Kader Kesehatan : 2945	Dokter : 54 Bidan : 420 Perawat : 294 Gizi : 64 Kader Kesehatan : 2945
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter, Perawat, Bidan , Gizi, Kesmas	Dokter : 100 Bidan : 562 Perawat : 425 Gizi : 121 Kesmas : 81 Kader Kesehatan : 2945	Dokter : 54 Bidan : 420 Perawat : 294 Gizi : 64 Kesmas : 43 Kader Kesehatan : 2945
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter, Perawat, Bidan , Gizi, Kesmas	Dokter : 100 Bidan : 562 Perawat : 425 Gizi : 121 Kesmas : 81 Tenaga non kesehatan mempunyai Kualifikasi tertentu: 1575	Dokter : 54 Bidan : 420 Perawat : 294 Gizi : 64 Kesmas : 43 Tenaga non kesehatan mempunyai Kualifikasi tertentu: 1575
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter, Perawat, Bidan , Gizi, Kesmas	Dokter : 100 Bidan : 562 Perawat : 425 Gizi : 121 Kesmas : 81 Tenaga non kesehatan mempunyai Kualifikasi tertentu: 1274	Dokter : 54 Bidan : 420 Perawat : 294 Gizi : 64 Kesmas : 43 Tenaga non kesehatan mempunyai Kualifikasi tertentu: 1274
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter, Perawat, Bidan , Kesmas	Dokter : 100 Bidan : 562 Perawat : 425 Kesmas : 81	Dokter : 54 Bidan : 420 Perawat : 294 Kesmas : 43
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter, Perawat, Bidan , Gizi, Kesmas	Dokter : 100 Bidan : 562 Perawat : 425 Gizi : 121 Kesmas : 81	Dokter : 54 Bidan : 420 Perawat : 294 Gizi : 64 Kesmas : 43
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dokter, Perawat	Dokter : 100 Perawat : 25 Tenaga Kesehatan Lainnya : 1038 (Dokter Gigi, Bidan, ATLM, Petugas Gizi, Promkes/Kesmas, Kesling, Farmasi)	Dokter :54 Perawat : 25 Tenaga Kesehatan Lainnya : 684 (Dokter Gigi, Bidan, ATLM, Perugas Gizi, Promkes/Kesmas, Kesling, Farmasi)

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Dokter, Perawat, ATLM, Kesmas	Dokter : 100 Perawat : 425 Kesmas : 81 ATLM : 100 Penata Rontgen: 15 Kader Kesehatan TB : 290	Dokter : 54 Perawat : 294 Kesmas : 43 ATLM : 62 Penata Rontgen : 15 Kader Kesehatan TB : 290
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dokter, Perawat, Bidan, ATLM, Kesmas	Dokter : 100 Bidan : 562 Perawat : 425 ATLM : 100 Kesmas : 81 Tenaga non kesehatan dgn kualifikasi tertentu : 6	Dokter : 54 Bidan : 420 Perawat : 294 ATLM : 62 Kesmas : 43 Tenaga non kesehatan dgn kualifikasi tertentu : 6

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dijalankan dalam rangka upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2022 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut :

Tabel 51
Permasalahan, Solusi dan Tindaklanjut Penerapan SPM Urusan Kesehatan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	Perlunya peningkatan koordinasi internal untuk pengumpulan data sasaran SPM Bidang Kesehatan	Koordinasi dengan Bidang SDK untuk jumlah penduduk untuk dibagikan ke Bidang sebagai dasar penghitungan sasaran SPM	Bidang SDK mengirimkan surat permintaan data ke Disdukcapil dan BPS Kabupaten Banjar untuk estimasi jumlah penduduk yang dijadikan dasar penghitungan sasaran SPM.
2	Kurangnya kemampuan SDM untuk melakukan penghitungan kebutuhan karena tidak ada pelatihan khusus untuk hal tersebut	Penghitungan kebutuhan sementara yang bisa diperhitungkan hanya rencana kebutuhan tenaga kesehatan.	Bidang SDK sudah melakukan perhitungan rencana kebutuhan tenaga kesehatan.
3	Penganggaran kegiatan terkait SPM kadang terhambat dengan perubahan kebijakan serta sistem pada aplikasi sehingga pagu untuk kegiatan SPM bergabung dengan sub kegiatan lainnya	Penganggaran yang bergabung dengan subkegiatan lain tidak dapat dihindari karena merupakan pemetaan dari Kemendagri	Membuat form khusus untuk memisahkan rincina pagu dalam satu subkegiatan gabungan sehingga bisa dilihat pagu SPM berapa dalam subkegiatan tersebut.
4	Penganggaran kegiatan terkait beberapa indikator SPM berada di sub kegiatan yang tidak terkait dengan SPM secara langsung	penganggaran berada dalam sub kegiatan yang tidak terkait SPM , hal ini tidak dapat di hindari karena merupakan pemetaan dari kemendagri sehingga harus di patuhi.	membuat form khusus untuk memisahkan rincian pagu dalam subkegiatan tersebut sehingga bisa terlihat pagu SPM berapa dalam sub kegiatan tersebut.
5	Cakupan kurang maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke puskesmas / pustu atau kegiatan ukbm	Memaksimalkan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau ukbm.	Telah dilaksanakan upaya promosi kesehatan.

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
	lainnya seperti posyandu, posbindu		
6	Kondisi geografis pada wilayah kerja	-	-
7	Keterbatasan tenaga kesehatan	Melakukan penghitungan rencana kebutuhan tenaga kesehatan	Telah dilaksanakan penghitungan rencana kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan
8	Pelayanan kesehatan ibu hamil, <i>coverage</i> data antar wilayah tidak terupdate karena di trimester 3 mendekati masa kelahiran terkadang ibu hamil pindah ke rumah orangtuanya	Sewaktu pelayanan K4 di tempat lain, maka ibu hamil harus melaporkan K4 nya ke bidan asal.	Bidan memasukkan pelayanan K4 bumil di tempat lain ke dalam laporannya.
9	Pelayanan kesehatan ibu bersalin, <i>coverage</i> data antar wilayah tidak terupdate karena terkadang ibu berada di luar wilayah puskesmas	1. Memberikan edukasi kepada bumil untuk melahirkan faskes terdekat 2. Pemerintah daerah melengkapi sarana dan prasara terutama untuk Kesehatan ibu bersalin sesuai standart	Dinas Kesehatan membuat perencanaan kebutuhan sarana prasarana Kesehatan ibu bersalin yang pemenuhan nya bsa diusulkan melauai dana DAK dan APBD
10	Pelayanan bayi baru lahir: 1) <i>Coverage</i> data antar wilayah tidak terupdate karena bayi dilahirkan diluar wilayah puskesmas tempat ibu memeriksakan diri. 2) Tingginya angka kematian neonatal. Penyebab kematian tertinggi kematian neonatal adalah asfiksia dan BBLR dan penyebab lain (kelainan kongenital, penyakit infeksi, dll). Faktor 3T (Terlambat mengambil keputusan, ke tempat rujukan, serta mendapat penanganan).	1) Melaksanakan pelatihan <i>antenatal care</i> (ANC), persalinan, nifas dan SHK bagi bidan pelayanan kesehatan balita. 2) Peningkatan kapasitas bidan dalam pelaayanan neonatal esensial. 3) Pendampingan dokter spesialis anak ke puskesmas.	1. Melakukan Upaya monitoring evaluasi / validasi data dan 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas Bidan di Desa dalam Pelayanan Kesehatan Neonatal. 3. Melakukan Upaya monitoring evaluasi / validasi data dan bimtek pelaksanaan program 4. Koordinasi dengan Puskesmas untuk memberikan materi pentingnya ASI pada kelas ibu hamil
11	Pelayanan usia produktif dan usia lanjut, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan / posbindu/posbindu lansia	Memaksimalkan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam	1. Membuat Draf Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kab.Banjar Tentang mengaktifkan Posyandu Remaja 2. Melaksanakan sosialisasi dan monev ke Puskesmas, Melaksanakan monev kesehatan usia produktif 3. 3. Pelaksanaan posbindu

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
			secara berpindah-pindah tempat untuk menjangkau masyarakat yang belum pernah dilakukan deteksi dini faktor risiko penyakit menular. 4. Memaksimalkan peran serta kader dalam sistem pencatatan dan pelaporan. 5. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan jaringan dan jejaring puskesmas. 6. Memaksimalkan kerjasama dengan lintas sektor (SKPD terkait) untuk mewajibkan setiap PNS, PPPK (usia produktif) melakukan deteksi dini Faktor Risiko PTM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wilayahnya masing-masing (Puskesmas setempat)
12	Pelayanan orang terduga tuberkulosis: 1) Orang yang termasuk sasaran pelayanan sudah melakukan pemeriksaan akan tetapi tidak memeriksakan sputum sehingga masuk kategori terlayani tapi tidak standar. 2) Orang beresiko tuberkulosis tidak memeriksakan sputum (dahak) yang merupakan salah satu pemeriksaan penunjang dalam menentukan risiko tertular tuberkulosis	Meningkatkan upaya sosialisasi secara massif kepada masyarakat khususnya kader desa dan tokoh masyarakat tentang upaya penanggulangan tuberkulosis.	1. Memaksimalkan sosialisasi, monev, bimtek tentang upaya pencegahan dini penyakit menular untuk meningkatkan peran serta lintas sektor, 2. Membuat SK tim POKJA penanggulangan tuberkulosis
13	Pelayanan kesehatan ibu hamil: 1) Ibu hamil tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan akan tetapi datang ke dukun kampung. 2) Tingkat pendidikan ibu hamil sebagian masih rendah yang kurang memahami pentingnya memeriksakan kesehatan kehamilan ke fasilitas Kesehatan. 3) Ibu hamil	1) Meningkatkan edukasi dan promosi pentingnya pemeriksaan ibu hamil sedini mungkin. 2) <i>Sweeping</i> ibu hamil. 3) Koordinasi dengan linsek termasuk tim pendamping keluarga untuk penjangkauan ibu hamil. 4) Pembentukan jejaring skrining layak hamil, ANC dan stunting 5. pendampingan dokter spesialis <i>obsgyn</i> ke Puskesmas.	1. Melaksanakan koordinasi dengan RSUD Ratu Zalekha kegiatan Pendampingan Tim Ahli (Sp.A dan Sp.OG) ke Puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, Kegawatdaruratan matneo. Melakukan Upaya monitoring evaluasi / validasi data dan bimtek pelaksanaan program. 2. Monitoring capaian ANC. 3. Melakukan Upaya

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
	berpindah domisili mendekati masa persalinan. 4) Masih ada ibu hamil yang melaksanakan kunjungan pertama ke tenaga Kesehatan lebih dari 12 minggu (K1 Akses). Hal ini disebabkan karena, budaya malu (kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah), akses jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, keguguran, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemeriksaan ibu hamil sedini mungkin.		monitoring evaluasi / validasi data dan bimtek pelaksanaan program. 4. Melaksanakan kampanye pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil di Tingkat Desa. 5. Melaksanakan evaluasi cakupan anemia pada ibu hamil. 6. Koordinasi dengan Puskesmas untuk lebih meningkatkan edukasi pentingnya anemia di kelas ibu hamil.
14	Pelayanan kesehatan ibu bersalin: 1) Ibu tidak melahirkan di fasilitas Kesehatan, hal ini dikarenakan masih ada desa yang tidak ada poskesdes atau polindes, sehingga persalinan dilayani di rumah bidan atau bidan dipanggil ke rumah ibu untuk menolong persalinan dan masih ada nya dukun kampung/beranak 2) Kurang berfungsinya poskesdes atau ketiadaan poskesdes sehingga lebih banyak melahirkan di rumah kecuali pada kasus rujukan (resiko tinggi).	1) Berkoordinasi dengan kepala Desa/Pembakal yang belum mempunyai Poskesdes untuk mengusulkan melalui dana desa 2) Menganjurkan ibu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan jika tidak berada di desa tempat domisili ibu dianjurkan bersalin di puskesmas atau poskesdes desa tetangga. 3) Kemitraan dengan dukun kampung/ dukun beranak 4) Melaksanakan pelatihan <i>antenatal care</i> (ANC), persalinan, nifas dan SHK bagi bidan pelayanan kesehatan balita. 5) Melaksanakan pelatihan APN.	1. Melaksanakan pendampingan Tenaga Ahli (Sp A dan Sp OG ke Puskesmas 2. Pembinaan kepada pengelola ibu terkait indikator kinerja di bidang kesga . 3. Bimbingan teknis ke pengelola puskesmas
15	Pelayanan kesehatan balita: 1) balita tidak datang berkunjung ke posyandu lagi jika sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. 2) Masih adanya anggapan bahwa vaksin	1) Koordinasi lintas program dengan pengelola program imunisasi 2) Meningkatkan promosi kesehatan untuk pemantauan tumbuh kembang anak. 3) Edukasi pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak	1. Melakukan Upaya monitoring evaluasi / validasi data dan bimtek pelaksanaan program 2. Melaksanakan kegiatan pelatihan pemantauan tumbuh kembang balita bagi kader Posyandu, Meningkatkan kapasitas bidan di desa dalam pelaksanaan kelas ibu balita, Praktek

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
	<p>mengandung bahan yang tidak halal.</p> <p>3) Pelayanan dimulai usia bayi dan masih ada yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap.</p> <p>4) Banyak balita yang sudah tidak datang ke posyandu atau fasilitas pelayanan Kesehatan untuk pemantauan tumbuh kembang.</p> <p>5) Kurangnya kesadaran orang tua untuk pemantauan tumbuh kembang anak.</p>	<p>kepada orangtua/masyarakat.</p> <p>4) Peningkatan kapasitas bidan dalam pelaksanaan kelas ibu balita.</p>	<p>Lapangan Kalakarya MTBS.</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan pelatihan pemantauan tumbuh kembang balita bagi kader Posyandu,</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan pelatihan pemantauan tumbuh kembang balita bagi kader Posyandu,</p>
16	<p>Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar:</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan hanya penjangkaran di sekolah formal, sementara sasaran usia Pendidikan dasar bukan hanya sekolah formal saja, tetapi anak dalam kategori usia Pendidikan dasar yang tidak bersekolah/putus sekolah dan sekolah non formal seperti di pesantren atau diniyah</p>	<p>1) Melakukan penjangkaran anak usia pendidikan dasar pada posyandu remaja dan pondok pesantren atau diniyah.</p> <p>2) Menghimbau untuk mengaktifkan atau membentuk posyandu remaja di desa.</p>	<p>1. Melakukan Upaya monitoring evaluasi / validasi data dan bimtek pelaksanaan program</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kesehatan penjangkaran anak usia sekolah dasar, Melakukan monitoring kegiatan penjangkaran anak usia sekolah Dasar</p> <p>3. Koordinasi dengan pengelola Puskesmas, untuk menjadwalkan ulang kegiatan penjangkaran bagi siswa yang tidak hadir</p>
17	<p>Pelayanan kesehatan usia produktif / lansia:</p> <p>1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular karena menganggap bahwa ke fasyankes hanya untuk berobat saja</p> <p>2) Adanya kunjungan berulang</p>	<p>1) Meningkatkan sosialisasi Surat Edaran Menpan RB, Surat Edaran Bupati Banjar dan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar tentang Pelaksanaan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan pemeriksaan IVA Test.</p> <p>2) Meningkatkan sosialisasi tentang penyakit tidak menular melalui kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor melalui media KIE.</p>	<p>1. Membuat Draf Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kab.Banjar Tentang mengaktifkan Posyandu Remaja</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi dan monev ke Puskesmas, Melaksanakan monev kesehatan usia produktif .</p>
18	<p>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi/diabetes mellitus:</p> <p>1) Kurangnya pengetahuan penderita hipertensi / diabetes mellitus</p>	<p>1) Meningkatkan sosialisasi Surat Edaran Menpan RB, Surat Edaran Bupati Banjar dan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar tentang Pelaksanaan Deteksi</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program untuk memaksimalkan sosialisasi tentang penyakit tidak menular terutama diabetes melitus.</p>

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
	<p>untuk berobat secara rutin.</p> <p>2) Masih rendahnya tingkat kepatuhan penderita untuk minum obat secara teratur</p> <p>3) Masih rendahnya tingkat kesadaran penderita untuk memeriksakan diri secara rutin (penderita tidak mau memeriksakan diri kalau tidak ada keluhan)</p>	<p>Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan pemeriksaan IVA Test.</p> <p>2) Meningkatkan sosialisasi tentang Penyakit Tidak Menular melalui kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor melalui media KIE.</p>	<p>2. Memaksimalkan kerjasama dengan jaringan dan jejaring puskesmas untuk memantau penderita hipertensi yang sudah terdata</p> <p>3. Memaksimalkan pembinaan dan bimbingan teknis tentang tata cara pencatatan dan pelaporan SPM program Hipertensi baik secara langsung maupun secara daring (via zoom meeting/google meet)</p>
19	<p>Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat:</p> <p>1) Tidak tersedianya alat fiksasi karena pengadaan barang jasa di puskesmas tidak mengganggu untuk itu.</p> <p>2) Masih kurangnya penggunaan aplikasi simkeswa oleh petugas pengelola kesehatan jiwa di puskesmas</p>	<p>1) Memaksimalkan sosialisasi dan implementasi penggunaan aplikasi simkeswa untuk pencatatan dan pelaporan program kesehatan jiwa.</p> <p>2) Meningkatkan skrining kesehatan jiwa baik di sekolah maupun di kantor-kantor.</p> <p>3) Meningkatkan kerjasama dan peran serta lintas sektor untuk penanganan masalah kesehatan jiwa di masyarakat.</p>	<p>1. Memaksimalkan pembinaan dan bimbingan teknis tentang tata cara pencatatan dan pelaporan SPM baik secara langsung maupun secara daring (via zoom meeting/google meet)</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data melalui aplikasi simkeswa.</p> <p>3. Melaksanakan pertemuan untuk memaksimalkan implementasi penggunaan aplikasi simkeswa bagi petugas pengelola kesehatan jiwa</p>
20	<p>Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut:</p> <p>1) Lansia yang datang ke posyandu adalah orang yang sama setiap bulannya.</p> <p>2) Akses yang cukup jauh untuk kelurahan atau desa yang wilayahnya luas karena posyandu lansia rata-rata hanya 1 posyandu per desa.</p> <p>3) Tidak ada yang mengantar lansia ke posyandu.</p> <p>4) Kunjungan lansia hanya ke lansia resti.</p> <p>5) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke posbindu lansia karena</p>	<p>1) Membentuk posyandu lansia baru bila memungkinkan atau psyandu lansia yang ada berpindah-pindah per RT sehingga bisa menjangkau semua lansia.</p> <p>2) Menambah jumlah kunjungan rumah lansia.</p>	<p>1. Melakukan Upaya monitoring evaluasi / validasi data dan bimtek pelaksanaan program</p> <p>2. Mendorong Puskesmas untuk membuat inovasi pelayanan kesehatan pada lansia melalui bimbingan teknis dengan pengelola</p>

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
	menganggap bahwa ke fasyankes hanya untuk berobat saja.		
21	Pelayanan kesehatan pada orang beresiko tertular virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>): 1) Komunitas selain dari LSL belum memiliki penjangkau. 2) Kurangnya dana untuk media komunikasi informasi dan edukasi. 3) Petugas pengelola data pada UPTD masih perlu diingatkan untuk input data hasil pemeriksaan.	1) Membentuk penjangkau untuk komunitas baru untuk meningkatkan deteksi dini. 2) Mengusulkan penambahan dana untuk media informasi dan edukasi. 3) Peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan data hasil pemeriksaan.	1. Melakukan Upaya monitoring evaluasi dan bimtek pelaksanaan program 2. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor dan lintas program untuk memaksimalkan koordinasi mengenai pentingnya pencegahan dini penyakit menular, membangun sinergi dan komitmen dalam upaya memandirikan masyarakat untuk hidup sehat. 3. Memaksimalkan sosialisasi, monev, bimtek tentang upaya pencegahan dini penyakit menular untuk meningkatkan peran serta lintas sektor, membangun sinergi dan komitmen dalam upaya memandirikan masyarakat untuk hidup sehat.

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjara, 2024

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 52
Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah

No.	Indikator	Sub Indikator
1.	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2.	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya.

No.	Indikator	Sub Indikator
	c.	Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air.
	d.	Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak.
	e.	Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banjara, 2023

Berdasarkan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR disebutkan bahwa indikator kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Formulasi perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Formula 1 :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di Kabupaten}} \times 100\%$$

Pembilang : Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangganya mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut

Formula 2 :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{Masyarakat Terlayani}}{\sum \text{Masyarakat}} \times 100\%$$

Pembilang : Masyarakat terlayani pada tahun-n penerapan SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota pada tahun-n penerapan SPM.

Penyebut : Proyeksi total masyarakat pada tahun ke-n penerapan SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh kabupaten/kota tersebut pada tahun ke-n penerapan SPM.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air

limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pelayanan air limbah domestik regional dilaksanakan dengan merujuk pada Pedoman Penyiapan Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Target Pembangunan Sanitasi menurut target RPJMN 2024 sebesar 90% akses layak dan menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebesar 100% akses layak. Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik. a) Kuantitas Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik. b) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari: 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan. Formulasi perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$$

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 53
Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	

1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi SPM yang sejalan dengan target RPJMD dan Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 54
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	575.115	510.856	89%	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	152.146	135.149	88,83%
						Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	152.146	135.149	88,83%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	575.115	480.793	84%	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	152.146	127.194	83,60%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	110.746	108.560	98,03%	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	85.171	6.740	7,91%	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	10	10	100%	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1	1	100%	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan, 2024

$$P_{\text{SPM}} \text{ Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari} = (88,83\% \times 20) + (89\% \times 80) = 17,77\% + 71,06\% = 88,83\%$$

$$IP_{\text{SPM}} \text{ Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik} = (77,91\% \times 20) + (84\% \times 80) = 15,58\% + 66,88\% = 82,46\%$$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 adalah Tuntas Madya dengan nilai 85,64%.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasional dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD murni sebesar Rp. 12.003.155.782 dan DAK Fisik sebesar Rp. 22.494.095.000. Adapun alokasi anggaran dan realisasinya untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Alokasi & Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	24.079.268.031	21.996.033.206
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	12.828.317.381	12.575.554.800
TOTAL	36.907.585.412	34.571.588.006

Sumber : Dinas PUPRP, 2024

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil dalam mencapai target SPM terdiri dari :

Tabel 56
Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas	Pembina Tk. I (IV/b)	S-2		Permendagri No.59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM
2	Sekretaris	Pembina Tk. I (IV/b)	S-2		Permendagri No.59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM
3	Kepala Bidang Cipta Karya	Pembina (IV/a)	S-1		
4	Kepala Seksi Air Minum	Penata (III/c)	D3		
5	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman	Penata Tk. I (III/d)	S-1		

Sumber : Dinas PUPRP, 2024

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain:

Tabel 57
Permasalahan, Solusi dan Tindaklanjut Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	<p>Pelayanan Air Minum</p> <p>1) Adanya perbedaan klasifikasi dalam penentuan akses layanan air minum jaringan perpipaan, bukan jaringan perpipaan, air minum layak dan air minum aman.</p> <p>2) Belum adanya koordinasi dengan pihak desa terkait kebutuhan air minum karena banyaknya jumlah desa serta sebaran yang sangat luas. Serta seringnya terjadi pergantian aparat desa, sehingga desa tidak memiliki database yang valid.</p> <p>3) Untuk memenuhi kebutuhan air minum aman dan layak diperlukan pendanaan yang besar, sehubungan dengan luasnya wilayah Kabupaten Banjar dan kondisi kualitas air yang memerlukan sistem pengolahan. Sehingga perlu pendanaan dari APBD dan APBN.</p> <p>4) Pada pekerjaan peningkatan dan perluasan sistem penyediaan air minum sudah dilaksanakan sesuai spesifikasi yang tertuang dalam perencanaan teknis, adapun kendala yang dihadapi saat pelaksanaan yaitu adanya perubahan daftar penerima manfaat, perubahan sumber air baku akibat debit air yang tidak cukup serta koordinasi antar aparat desa.</p>	<p>1) Membuat kebijakan terkait penentuan klasifikasi dalam penentuan akses layanan air minum jaringan perpipaan, bukan jaringan perpipaan, air minum layak dan air minum aman.</p> <p>2) Penyusunan database terkait data kebutuhan air minum.</p> <p>3) Mengikuti program - program pendanaan APBN</p> <p>4) Membuat komitmen dengan pihak desa terkait dengan perubahan data, baik perubahan daftar penerima manfaat maupun perubahan jenis sumber air baku</p>	<p>1) Melaksanakan koordinasi dengan Bappedalitbang dan Dinas Kesehatan untuk penyusunan kebijakan tersebut.</p> <p>2) melakukan survei investigasi untuk penyusunan database tersebut.</p> <p>3) Melakukan pengusulan Penyelenggaraan SPAM melalui pembiayaan dana APBN</p> <p>4) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pihak desa sebagai penerima manfaat terhadap batas waktu pengumpulan dan perubahan data (jika ada)</p>
2	<p>Pelayanan Air Limbah</p> <p>1) Perbedaan klasifikasi dalam menentukan akses layanan layak</p>	<p>1) Melakukan konversi data yang bersesuaian dengan desa dan kota</p>	<p>1) Melakukan rapat dengan SKPD terkait</p> <p>2) Melakukan</p>

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
	>25jiwa / ha dan aman perkotaan atau <25jiwa/ha.	2) Perlu update data di Tingkat desa dan puskesmas sebagai sumber data	3) singkronisasi data dengan SKPD terkait
2)	Perbedaan data yang dimana akses sanitasi ternyata belum sinkron dengan data desa.	3) Diperlukan anggaran yang bersesuaian dengan target	3) Memerlukan anggaran yang sesuai
3)	Pemenuhan akses sanitasi baik layak maupun aman memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan juga diperlukan pendaan dari APBD dan APBN	4) Melakukan perencanaan agar meminimalisir kerusakan konstruksi	4) Perancangan dan perencanaan selalu diawasi dengan seksama
4)	Adanya kondisi gahar dimana pembangunan dilokasi yang sulit seperti di bantaran sungai yang memerlukan biaya konstruksi lebih mahal		

Sumber : Dinas PUPRP Kab.Banjar, 2024

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018, Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota, dengan ketentuan:

- Pada saat masa pasca bencana
- Surat Penetapan bencana dari Bupati/ Walikota dan/atau
- Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/ kota

Adapun perhitungan Capaian pada Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

- Pengurangan Kawasan Kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Adapun perhitungan Capaian Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

$$\begin{aligned}
 & \text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian} \\
 & \text{Hak Atas Penguasaan Tanah dan/ atau Bangunan} \\
 & + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \\
 & \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah} \\
 & \text{Layak Huni} \\
 \text{Capaian SPM} = & \frac{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi}}{\text{Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi}} \times 100\% \\
 & \text{Kriteria Penerima Pelayanan}
 \end{aligned}$$

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2023 sebagai OPD pelaksana SPM Perumahan Rakyat untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 58
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Warga korban yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Negara yang terkena akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Warga yang relokasi program	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.4.3. Realisasi

Adapun penjabaran realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar:

Tabel 59
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	15	15	100%	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	15	15	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	13	13	100%	Subsidi uang sewa	13	13	100%
						Penyediaan rumah layak huni	13	13	100%

Sumber : DPRKPLH, 2024

$$\begin{aligned} & \text{IP}_{\text{SPM}} \text{ Penyediaan dan} \\ & \text{Rehabilitasi Rumah yang} \\ & \text{Layak Huni bagi Korban} \\ & \text{Bencana Kabupaten / Kota} \end{aligned} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

$$\begin{aligned} & \text{IP}_{\text{SPM}} \text{ Fasilitasi Penyediaan} \\ & \text{Rumah yang Layak Huni Bagi} \\ & \text{Masyarakat yang Terkena} \\ & \text{Relokasi Program Pemerintah} \\ & \text{Daerah Kabupaten / Kota} \end{aligned} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 adalah Tuntas Paripurna dengan nilai 100%.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD murni. Adapun alokasi anggaran dan realisasi SPM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar di tahun 2023 yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

Tabel 60
Anggaran & Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	394.443.900	390.215.400
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.357.288.550	1.333.189.236
TOTAL	1.751.732.450	1.723.404.636

Sumber Data : DPRKPLH Kab. Banjar 2024

4.4.3. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 61
Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S-2		
2	Kepala Bidang Penyediaan Perumahan	Pembina (IV/a)	S-2		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Permen PUPR No.19/PRT/M/2018 - Sosialisasi Permendagri No.59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM - Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
3	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Pembina (IV/a)	S-2		
4	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	Penata Tk.I/ III d	S-1		
5	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman	Penata Tk.I/ III d	S-2		

Sumber Data : DPRKPLH Kab. Banjar 2024

4.4.4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat yaitu :

Tabel 62
Permasalahan, Solusi dan Tindakanjnut Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	<p>Pengumpulan Data</p> <p>1) Jenis Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Banjar adalah angin puting beliung dan tanah longsor. Kejadian dapat terjadi sepanjang tahun dengan skala yang bervariasi tersebar di seluruh Kab. Banjar. Sehingga untuk membuat Rencana Aksi pelaksanaan SPM harus di akhir tahun berdasarkan rekapitulasi sepanjang tahun BERJALAN.</p> <p>2) Untuk mengumpulkan data perlu adanya identifikasi calon</p>	<p>1) Keterbatasan anggaran dan personil untuk mengumpulkan data di wilayah administratif Kab. Banjar dilakukan per tahun anggaran, tidak bisa sekaligus untuk memenuhi form isian SPM</p> <p>2) Membuat Rencana Aksi tahunan harus di akhir tahun untuk mengumpulkan data seluruh kejadian sepanjang tahun berjalan.</p> <p>3) Membuat Rencana Aksi berdasarkan laporan rekapitulasi kejadian bencana dari BPBD yang diverifikasi ulang di lapangan.</p>	<p>1) Membuat Rencana Aksi pelaksanaan SPM di akhir tahun berdasarkan data seluruh kejadian bencana tahunan, kemudian ditindaklanjuti dengan skala prioritas layanan SPM yang disesuaikan dengan Anggaran Daerah yang ditangani dalam waktu 3 tahun pasca tanggap darurat bencana.</p> <p>2) Pengumpulan data dilakukan menyesuaikan dengan anggaran, personil yang tersedia pada PD dan waktu pendataan, maka data yang tersedia berdasarkan sub kegiatan</p>

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
	penerima, namun calon penerima kurang responsif. 3) SK Bupati untuk kejadian bencana tidak diterbitkan untuk kejadian bencana skala kecil		identifikasi/pendataan yang dianggarkan per Tahun. 3) Apabila tidak ada SK Bupati, tindak lanjutnya pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan data dari BPBD
2	Perhitungan Kebutuhan Jumlah kejadian bencana tahun sebelumnya tidak dapat seluruhnya tertangani pada tahun-n, sehingga dalam penyusunan Rencana Aksi harus menentukan skala prioritas penerima bantuan.	Dalam penyusunan Rencana Aksi dengan menentukan skala prioritas menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.	Layanan SPM Rehabilitasi RTLH Bencana Alam dilaksanakan dengan membuat Rencana Aksi untuk 3 tahun berjalan pasca masa tanggap darurat bencana. Apabila lewat 3 tahun rehab rekonstruksi, maka sudah tidak termasuk wajib layanan SPM sesuai instruksi PermenPUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM.
3	Perencanaan dan Penganggaran 1) Keterbatasan anggaran daerah, masih banyak rumah terdampak bencana yang tidak dapat tertangani sebagai bagian dari SPM. 2) Keterbatasan anggaran, masih adanya proses identifikasi dan verifikasi yang tidak dapat dilaksanakan.	1) Rumah terdampak bencana yang tidak dapat tertangani pada tahun N dilaksanakan pada tahun berikutnya mengikuti anggaran yang tersedia dalam jangka waktu tanggap darurat. 2) Proses identifikasi dan verifikasi kelayakan hunian sehingga dimasukkan ke perencanaan dan rencana aksi triwulan selanjutnya.	Melaksanakan pelayanan SPM sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam 3 tahun masa tanggap darurat bencana, yaitu masa rehab rekonstruksi.
4	Pelaksanaan Untuk layanan fasilitasi, Masyarakat Sebagian besar tidak mau terlibat karena tidak ingin dipindahkan dari Kawasan tempat tinggal asal.	Melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, melaksanakan fasilitasi sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan.	Melaksanakan layanan SPM mengikuti instruksi peraturan yang ada sesuai dengan target.
5	Lain-Lain Dalam proses pembayaran uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10(Sepuluh) Ha adalah berkaitan dengan kelengkapan administrasi berupa kepemilikan rekening bank di BPD Kalsel yang memerlukan waktu beberapa hari sehingga ada keterlambatan dalam proses pembayaran.	Perangkat Daerah memberikan fasilitasi kepada penerima bantuan uang sewa dalam pembuatan rekening Bank BPD Kalsel sehingga prosesnya lebih cepat	Pembangunan Rumah Khusus (Deret Tunggal) telah selesai dilaksanakan dan warga terdampak program pembangunan dapat menempati Rumah Khusus (Deret Tunggal) tersebut pada tahun 2024 sehingga tidak dianggarkan lagi bantuan uang sewa pada tahun 2024.

Sumber : Dinas DPRKPLH Kab.Banjar, 2024

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa terdapat 5 (lima) jenis Pelayanan Dasar yaitu:

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum indikator pencapaiannya adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada. Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar hal yang menjadi utama adalah mutu pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dimana mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak, dalam sub urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mutu pelayanan dasar meliputi :

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Capaian Penegakan PERDA atau PERKADA} + \text{sesuai mutu} + \text{capaian pelayanan ganti rugi}}{2} \times 100\%$$

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berada di Kawasan Rawan Bencana}} \times 100\%$$

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berada di Kawasan Rawan Bencana}} \times 100\%$$

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana}}{\text{Perkiraan Jumlah Korban Bencana Secara Keseluruhan}} \times 100\%$$

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban

kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran. Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Secara kuantitatif teknis perhitungan SPM Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

a. Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

$$\text{Layanan Pemadaman Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

$$\text{Layanan Penyelamatan \& Evakuasi Korban Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran (jiwa)}}{\text{Jumlah penyelamatan evakuasi korban kebakaran (jiwa)}} \times 100\%$$

$$\text{Kualitas Mutu SPM Layanan Respon Cepat 15 Menit} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time atau 15 menit)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

b. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM Non Kebakaran

Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia, operasi darurat non kebakaran.

$$\text{Layanan Operasi Darurat Non Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan operasi darurat non kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian darurat non kebakaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &\text{Evakuasi dan Penyelamatan Non Kebakaran} \\ &= \frac{\text{Jumlah layanan evakuasi dan penyelamatan korban non kebakaran (jiwa)}}{\text{Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban non kebakaran (jiwa)}} \times 100\% \end{aligned}$$

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal target SPM terkait trantibumlinmas yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 63
Target SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten / Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.5.3. Realisasi

Tabel 64
Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten / Kota	476	476	100%	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	150	89	59,33%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	12	12	100%
						3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	167	158	94,61%
						4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	370.653	370.653	100%	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100%
						Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	543.535	543.535	100%
						3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	370.653	370.653	100%
						4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	29	29	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	370.653	370.653	100%	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	720	615	85,42%
						2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	790	790	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	94.616	94.616	100%	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2	2	100%
						2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	94.616	94.616	100%
						3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	2	100%
						4. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	8.280	8.280	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	343	343	100%	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan	169	116	68,64%

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
		dan evakuasi korban kebakaran				penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)			
						2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	7	7	100%
						3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	892	180	20,18%
						4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	91	29	31,87%
						5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	169	168	99,41%
						6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	9	9	100%

Sumber : Data Diolah oleh Bagian Pemerintahan, 2024

$$IP_{SPM} \text{ Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum} = (88,49\% \times 20) + (100\% \times 80) = 17,70\% + 80\% = 97,70\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Pelayanan informasi rawan bencana} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana} = (100\% \times 20) + (92,71\% \times 80) = 20\% + 18,54\% = 98,54\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran} = (70,02\% \times 20) + (100\% \times 80) = 14\% + 80\% = 94\%$$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Bencana Tahun 2023 adalah Tuntas Utama dengan nilai 97,07%.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Tabel 65
Anggaran & Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pelayanan Ketenteraman	1.299.266.000	1.255.480.550

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar dan Ketertiban Umum	Anggaran (Rp.)	Realisasi(Rp.)
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	135.902.500	126.314.800
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	728.302.300	676.773.900
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.562.605.101	1.890.956.236
Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	613.265.500	403.905.573
TOTAL	5.339.341.401	4.353.431.059

Sumber : Data Diolah oleh Bagian Pemerintahan, 2024

Selain anggaran dan realisasi tersebut, juga terdapat dukungan penanggaran urusan trantibumlinmas dari Dana BTT sebesar Rp. 697.537.714.

4.5.5. Dukungan Personil

Secara komposisi pegawai yang mendukung penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 66
Dukungan Personil SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Trantibum Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Satuan	Pembina Utama Muda	S2	-	Managemen PPNS
2	Sekretaris Satpol	Penata Tk./III.d	S1	-	Managemen PPNS
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Penata Tk.I	S1	Diklat PPNS	
4	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	Penata Tk.I	S1	Diklat PPNS	
5	Kepala Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah	Pembina	S2	Diklat PPNS	
6	Kepala Seksi Operasi dan Penegakan	Penata Tk.I	S1	Diklat Satpol PP	
7	Kepala Seksi Kerjasama dan Pengendalian	Penata	S1	-	Bimtek/Diklat tentang Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
8	Kepala Seksi Bina Teknis Fungsional dan Pelatihan Dasar	Penata Tk.I	S1	-	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9	Kepala Seksi Bina Potensi dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Penata Tk.I	S1	-	Bimtek tentang Peran Satpol PP atau Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
10	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Pembina	S1	-	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
11	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	Penata	S1	Diklat PPNS	Diklat PPNS lanjutan
12	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	Penata	S1	-	Bimtek/Diklat tentang Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
13	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Penata Tk.I	S1	-	Bimtek/Diklat tentang Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
14	PPNS	Pembina	S2	Diklat PPNS	Diklat PPNS lanjutan
15	PPNS	Penata	S1	Diklat PPNS	Diklat PPNS lanjutan
16	PPNS	Penata	S1	Diklat PPNS	Diklat PPNS lanjutan
17	Intel	Penata Muda	SMA	Intelejen Satpol PP	Intelejen Satpol PP lanjutan
18	Intel	Pengatur Tk.I	SMA	Intelejen Satpol PP	Intelejen Satpol PP lanjutan
19	Daton Trantibum	Penata Muda	SMA	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
20	Daton Unit Reaksi Cepat Satpol PP	Penata Muda	S1	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
21	Danru 1 Unit Reaksi Cepat Satpol PP	Pengatur Tk.I	SMA	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
22	Danru 2 Unit Reaksi Cepat Satpol PP	Pengatur Tk.I	SMA	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
23	Danru 3 Unit Reaksi Cepat Satpol PP	Pengatur Tk.I	SMA	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
24	Danru 1 Trantibum	Pengatur Tk.I	S1	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
25	Danru 2 Trantibum	Pengatur Tk.I	SMA	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
26	Danru 3 Trantibum	Pengatur Tk.I	SMA	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
27	PTI	Penata Muda Tk.I	S1	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
28	PTI	Penata Muda Tk.I	S1	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
29	PTI	Pengatur Tk.I	SMA	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
30	PTI	Pengatur	SMA	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
31	PTI	Pengatur	SMA	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
32	PTI	Pengatur	SMA	Diklat Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
					Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
33	Anggota Pelaksana Trantibum	Pengatur Tk.I	SMA	Latsar	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
34	Anggota Pelaksana Trantibum	Pengatur	SMA	Latsar	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
35	Anggota Pelaksana Trantibum	Pengatur Tk.I	SMA	Latsar	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
36	Anggota Pelaksana Trantibum	Pengatur	SMA	Latsar	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
37	Anggota Pelaksana Trantibum	Pengatur Tk.	SMA	Latsar	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
38	Anggota Pelaksana Trantibum	Pengatur	SMA	Latsar	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
39	Anggota Pelaksana Trantibum	Pengatur Tk.I	SMA	Latsar	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
40	Anggota Pelaksana Trantibum	Pengatur	SMA	Latsar	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sumber : Satpol PP, 2024

Tabel 67
Dukungan Personil SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Kebencanaan Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Pelaksana	Pembina TK.I	S.2		
2	Sekretaris	Pembina	S.1		
3	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembina	S.2		
4	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pembina	S.1	Bimtek Barang dan Jasa	
5	Kabid kedaruratan dan Logistik	Pembina	S.1	Bimtek Pelatihan Teknik Pengadaan Langsung Menggunakan Aplikasi SPSE.V,4.3 sesuai Perpres 16 tahun 2018 dan Perlem LKPP	
6	Analisis Kebijakan Muda	Pembina	S.2	Diklat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	TOT
7	Kasubbag Perencanaan dan Program	Pembina	S.2	Implementasi PP.No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Mengikuti Kaji Terap dan	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
				Bimbingan Teknis Teknik Inarisk dan IKD.	
8	Analisis Kebijakan Muda	Penata TK.I	S.1		
9	Analisis Kebijakan Muda	Penata TK.I	S.2	Bimtek Pemanfaatan Pesawat Tanpa Awak (UAV/ Drone) Untuk Pengolahan Sistem Informasi Geografis (SIG)	
10	Analisis Kebijakan Muda	Penata TK.I	S.1	Bimtek Peningkatan Kapasitas Personil TRC	
11	Analisis Kebijakan Muda	Penata TK.I	S.1		
12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata TK.I	S.2	ketentuan formulir dan Materil dalam Pengelolaan Keuangan daerah berdasarkan ketentuan PP.No.12 Tahun 2019.	
13	Kasubbag Keuangan	Penata TK.I	S.1	Implementasi PP.No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
14	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	Penata	S.1		
15	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Penata Muda TK.1	D.3	Implementasi PP.No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
16	Bendahara	Penata Muda	S.1	Implementasi PP.No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
17	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Penata Muda	S.1		
18	Penyuluh Bencana	Penata Muda	S.1	Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Bencana	
19	Analisis Mitigasi Bencana	Penata Muda	S.1		
20	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Penata Muda	S.1		
21	Pengadministrasi Umum	Pengatur	SMA		
22	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	S.1		
23	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	S.1		
24	Penata Laporan Keuangan	-	S.1		
25	Penata Laporan Keuangan	-	SMA		
26	Penyusun Laporan Keuangan	-	S.1		
27	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	-	S.1		
28	Pengadministrasi Umum	-	S.1		
29	Pengadministrasi Umum	-	SMA		
30	Pengadministrasi Kepegawaian	-	S.1		
31	Pengadministrasi Kepegawaian	-	SMA		
32	Pengemudi	-	SMA		
33	Pramu Kebersihan Kantor	-	SMA		
34	Pramu Taman	-	SMA		
35	Pengelola Data	-	S.1	Pembekalan Fasilitas system peringatan dini bencana , Diklat penyuluh mitigasi bencana gerakan tanah dan kaji cepat TRC	
36	Penyuluh Bencana	-	S.1	Pelatihan Fasilitas DesaTangguh Bencana	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
37	Analisis Mitigasi Bencana	-	S.1		
38	Pengadministrasi Umum	-	S.1		
39	Pengolah Data Kedaruratan	-	S.1		
40	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	-	S.1		
41	Koordinator Gudang Peralatan	-	S.1		
42	Koordinator Gudang Logistik	-	S.1		
43	Pengadministrasi Umum	-	S.1		
44	Pengadministrasi Umum	-	SMA		
45	Pengolah Data Rekonstruksi	-	S.1		
46	Pengumpul Data	-	S.1		
47	RESCUE	-	S.1		
48	RESCUE	-	D3		
49	RESCUE	-	SMA		
50	Petugas PUSDALOPS	-	S.1	Pelatihan di Permukaan Air Water Rescue Training	

Sumber : BPBD, 2024

Tabel 68
Dukungan Personil SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Damkar Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Pelaksana	Pembina TK.I	S.2		
2	Sekretaris	Pembina	S.1		
3	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembina	S.2		
4	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pembina	S.1	Bimtek Barang dan Jasa	
5	Kabid kedaruratan dan Logistik	Pembina	S.1	Bimtek Pelatihan Teknik Pengadaan Langsung Menggunakan Aplikasi SPSE.V,4.3 sesuai Perpres 16 tahun 2018 dan Perlem LKPP	
6	Analisis Kebijakan Muda	Pembina	S.2	Diklat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	TOT
7	Kasubbag Perencanaan dan Program	Pembina	S.2	Implementasi PP.No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Mengikuti Kaji Terap dan Bimbingan Teknis Teknik Inarisk dan IKD.	
8	Analisis Kebijakan Muda	Penata TK.I	S.1		
9	Analisis Kebijakan Muda	Penata TK.I	S.2	Bimtek Pemanfaatan Pesawat Tanpa Awak (UAV/ Drone) Untuk Pengolahan Sistem Informasi Geografis (SIG)	
10	Analisis Kebijakan Muda	Penata TK.I	S.1	Bimtek Peningkatan Kapasitas Personil TRC	
11	Analisis Kebijakan Muda	Penata TK.I	S.1		
12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata TK.I	S.2	ketentuan formulir dan Materiil dalam Pengelolaan Keuangan daerah berdasarkan ketentuan PP.No.12 Tahun 2019.	

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
13	Kasubbag Keuangan	Penata TK.I	S.1	Implementasi PP.No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
14	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	Penata	S.1		
15	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Penata Muda TK.1	D.3	Implementasi PP.No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
16	Bendahara	Penata Muda	S.1	Implementasi PP.No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
17	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Penata Muda	S.1		
18	Penyuluh Bencana	Penata Muda	S.1	Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Bencana	
19	Analisis Mitigasi Bencana	Penata Muda	S.1		
20	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Penata Muda	S.1		
21	Pengadministrasi Umum	Pengatur	SMA		
22	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	S.1		
23	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	S.1		
24	Penata Laporan Keuangan	-	S.1		
25	Penata Laporan Keuangan	-	SMA		
26	Penyusun Laporan Keuangan	-	S.1		
27	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor		S.1		
28	Pengadministrasi Umum	-	S.1		
29	Pengadministrasi Umum	-	SMA		
30	Pengadministrasi Kepegawaian	-	S.1		
31	Pengadministrasi Kepegawaian	-	SMA		
32	Pengemudi	-	SMA		
33	Pramu Kebersihan Kantor	-	SMA		
34	Pramu Taman	-	SMA		
35	Pengelola Data	-	S.1	Pembekalan Fasilitas system peringatan dini bencana , Diklat penyuluh mitigasi bencana gerakan tanah dan kaji cepat TRC	
36	Penyuluh Bencana	-	S.1	Pelatihan Fasilitas Desa Tangguh Bencana	
37	Analisis Mitigasi Bencana	-	S.1		
38	Pengadministrasi Umum	-	S.1		
39	Pengolah Data Kedaruratan	-	S.1		
40	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	-	S.1		
41	Koordinator Gudang Peralatan	-	S.1		
42	Koordinator Gudang Logistik	-	S.1		
43	Pengadministrasi Umum	-	S.1		
44	Pengadministrasi Umum	-	SMA		
45	Pengolah Data Rekonstruksi	-	S.1		
46	Pengumpul Data	-	S.1		
47	RESCUE	-	S.1		
48	RESCUE	-	D3		
49	RESCUE	-	SMA		
50	Petugas PUSDALOPS	-	S.1	Pelatihan Pertolongan di	

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
				Permukaan Air Water Rescue Training	

Sumber : BPBD, 2023

Dalam pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Bidang Damkar selain ditunjang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga dibantu oleh Relawan Kebakaran sebagaimana terjadi dalam tabel berikut ini :

Tabel 69
Dukungan Relawan Kebakaran di Kabupaten Banjar Tahun 2023

No.	Nama	Jenis Kelamin	Keterampilan	No Register
1	Irwan	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030313
2	Mifatahul Jannah	Perempuan	Regu Penyuluh	63030314
3	Muhammad Ramadhani	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030315
4	Gusti Akhmad Hafizi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030316
5	H.Muhammad Arifin,S.Sos.Map	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030317
6	H.Tatak Kusdaryono	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030318
7	Mashudi.S.Sos,M.Si	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030319
8	Akhmad Kharisma Adzandy	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030320
9	Irfan Noor	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030321
10	Feri Rusadi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030322
11	Ahmad Juliansyah	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030323
12	Ahmad Guzali	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030324
13	Ahmad Zainuri	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030325
14	M. Lambri	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030326
15	Padelianyah	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030327
16	Muhammad Fahrani Hasbi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030328
17	Gazali Rahman H	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030329
18	Nafsul Mutmainah	Perempuan	Regu Penyuluh	63030330
19	M.Yasir Wahyudi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030331
20	Yoga Maulana	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030332
21	Syahriil	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030333
22	Muhammad Maulidi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030334
23	Fadeli	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030335
24	A. Faisal	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030336
25	Dana	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030337
26	Abdurrahman	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030338
27	Hendri Setiawan	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030339
28	Muhammad Zacky	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030340

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

No.	Nama	Jenis Kelamin	Keterampilan	No Register
29	Muhammad Rasyad	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030341
30	Ahmad Habibi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030342
31	Yunus Adi Putra	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030343
32	Abd Syukur	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030344
33	Muhammad Norhafiji	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030345
34	Putri Sekar Wijayanti	Perempuan	Regu Penyuluh	63030346
35	A Riduan	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030347
36	M.Riduan	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030348
37	Abqari Wajidi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030349
38	Jamani	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030350
39	Muhammad Amin Ramadan	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030351
40	Rusdi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030352
41	M.Baidawi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030353
42	Zaini	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030354
43	Rommy Akmal	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030355
44	Muhammad	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030356
45	Hasbullah	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030357
46	Gt. Khalimatus Sa'diah	Perempuan	Regu Penyuluh	63030358
47	Aditya Wijaya	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030359
48	Abdus Samad	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030360
49	Abdul Halim	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030361
50	Ahmad Rizali	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030362
51	Siti Jamilah	Perempuan	Regu Penyuluh	63030363
52	Muhammad Ihdi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030364
53	Ahmad Fargali	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030365
54	Arif Rahman	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030366
55	Ahmad Yani	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030367
56	Rafi'i Hamdi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030368
57	Nasrullah	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030369
58	Muhammad Alwi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030370
59	Ahmad Rifa'i	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030371
60	Apreiza Rosada	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030372
61	Asra	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030373
62	Muhammad Ariyani	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030374
63	Muhammad Rasyid	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030375
64	Sarbani	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030376
65	Pahmi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030377
66	Tanjung Heru Nurtama	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030378

No.	Nama	Jenis Kelamin	Keterampilan	No Register
67	Muhammad Nazir	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030379
68	Habibi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030380
69	Muhammad Halim	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030381
70	Hiro Rahman	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030382
71	Zainudin	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030383
72	Zainal Hakim	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030384
73	Kabian	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030385
74	Afrian	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030386
75	Muhklis Fuadi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030387
76	Heria Asmarani	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030388
77	Muhammad Jaelani	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030389
78	M.Zacky	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030390
79	Muhammad Al Khudairi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030391
80	M.Ilmi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030392
81	Muhammad Aripin	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030393
82	Muhammad Nawawi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030394
83	Abdul Kholiq	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030395
84	Ahmad Yazid	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030396
85	Gusti Abdurrahman	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030397
86	Maulida Rahmafany	Perempuan	Regu Penyuluh	63030398
87	Rahmadani	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030399
88	Nor Halimah	Perempuan	Regu Penyuluh	63030400
89	Rizki Ananda	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030401
90	Khesia Kartika Primesti	Perempuan	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030402
91	Ahmad Muhammad	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030403
92	Muhammad Hakim Abdillah	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030404
93	A.Shofwani	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030405
94	Muhammad Fakhri	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030406
95	M. Kholil	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030407
96	Marhani	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030408
97	Akhmad Lukman Karimullah	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030409
98	Gusti Mauliani Kusuma	Perempuan	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030410
99	Fathul Arifin	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030411
100	M.Rizalianoor	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030412
101	Muhammad Irwansyah	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030413
102	Muhammad Hamidi	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030414
103	Ghina Aulia	Perempuan	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030415
104	Hasrul Abdilah F. Mastho	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030416

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Keterampilan	No Register
105	Fajrillia Firmanda Qudsi	Perempuan	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030417
106	Isriani Hidayah	Perempuan	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030418
107	Gusti Ernawati	Perempuan	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030419
108	Muhammad Shobi Rahman	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030420
109	Muhammad Saufi Ansori	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030421
110	M. Wahyu Fajriannor	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030422
111	Wahyu Rahmad Bawani Putra	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030423
112	Muhammad Hadya	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030424
113	Dwi Noor Wahidah	Perempuan	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030425
114	Rasidul Gapur	Laki-Laki	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030426
115	Ade Rizky Puspa Ningrum	Perempuan	Pemadaman Dan Penyelamatan	63030427

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, 2024

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan, solusi dan tindaklanjut yang dihadapi dalam penerapan SPM yaitu:

Bidang Trantibum

Tabel 70
Permasalahan, Solusi dan Tindaklanjut Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Trantibum

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	Belum dilakukan kerja sama terkait dengan data kependudukan	Melakukan koordinasi dengan DUKCAPIL Kabupaten Banjar terkait permintaan data kependudukan dengan solusi satpol pp berkonsul dengan kekepentrian dalam negeri	Sudah melakukan konsultasi dengan kekepentrian dalam negeri dengan hasil tidak mendapat izin.
2	Tidak bisa mengisi tabel 5A1, A2, A6		melakukan konsultasi dengan tim SPM kabupaten
3	Terbatasnya anggaran sesuai yg diamanatkan permendagri 121	Mengajukan usulan anggaran lebih terkait pemenuhan SPM	melakukan konsultasi dengan tim TAPD
4	Tidak bisa mengisi tabel 5B5		melakukan konsultasi dengan tim SPM kabupaten
5	Satpol PP Kabupaten Banjar telah membuat/memiliki SOP terkait trantibum atau untuk memenuhi mutu sesuai dengan permendagri no. 54 tahun 2011 tapi belum membuat revisi SOP sesuai dengan permendagri yang baru tentang SOP Satpol PP nomor 16 tahun 2023	Akan berkonsultasi dengan bagian organisasi dan bagian hukum kabupaten banjar bagaimana permendagri tentang SOP Satpol PP nomor 16 tahun 2023 agar diturunkan menjadi SK bupati atau perbup	Membuat tim penyusunan SOP Satpol PP
6	Tidak bisa mengisi tabel 5C6		melakukan konsultasi dengan tim SPM kabupaten
7	Tidak bisa mengisi tabel 5D2		melakukan konsultasi dengan tim SPM kabupaten dan TAPD

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
8	Masih belum memahami permintaan data terkait capaian spm di aplikasi spm kementerian		melakukan konsultasi dengan tim SPM kabupaten

Sumber : Satpol PP, 2024

Tabel 71
Permasalahan, Solusi dan Tindakanlanjutan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Kebencanaan

Bidang Kebencanaan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	Sulitnya mendapatkan bukti dukung (KK/KTP) untuk pendataan BNBA pada saat kondisi darurat bencana	Dilakukan Pendataan semaksimal mungkin di lapangan terkait nama dan alamat korban /terdampak bencana dan di lakukan koordinasi /verifikasi kepada RT/Kades ybs	Data dilengkapi secara bertahap
2	Kurangnya pemahaman yg sama dari aparat desa / kecamatan tentang pentingnya data korban / terdampak bencana yang lengkap pada saat melaporkan korban / terdampak bencana	Sosialisasi menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pendataan korban/ terdampak bencana	Menyampaikan informasi terkait pentingnya data korban bencana yang benar benar pada setiap kesempatan yang ada
3	Belum adanya pemahaman yang sama terkait 4 tahapan SPM, karena minimnya sosialisasi/bimtek khusus SPM	Mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman dan informasi yang diterima dan mohon kepada kemendagri/ pihak terkait yang mengeluarkan regulasi SPM untuk memberikan informasi dan penjelasan detail,khususnya kebencanaan termasuk pengisian form aplikasi SPM yang ada	Memohon kepada pihak terkait SPM untuk melakukan bimtek tentang SPM kepada SKPD pengampu SPM dan berharap melalui form ini yang berkepentingan dapat merespon hal tersebut
4	Kurangnya kemampuan SDM	Meningkatkan kemampuan melalui Pelatihan	Memohon kepada pihak terkait SPM untuk melakukan bimtek tentang SPM kepada SKPD pengampu SPM dan berharap melalui form ini yang berkepentingan dapat merespon hal tersebut
	Jarak dan Demografi wilayah Kabupaten Banjar yang luas	Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melibatkan relawan	Melakukan pembinaan kepada relawan di daerah rawan bencana
	Kesulitan memprediksi jumlah kejadian bencana dan jumlah korban bencana	Menggunakan angka perkiraan rata rata 5 tahun terakhir Menggunakan target yang sudah terencana di dokumen renstra	Mengupdate data review dokumen berikutnya
	Kurangnya pemahaman untuk pengisian Form 5.B.1 dan 5.B.2	Mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman dan informasi yang diterima dan mohon kepada kemendagri/ pihak terkait yang mengeluarkan regulasi SPM untuk memberikan informasi	Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana pengaplikasian SPM dan mencari Referensi pengisian pada SKPD lain

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
		dan penjelasan detail,khususnya kebencanaan termasuk pengisian form aplikasi SPM yang ada	
	Belum ditetapkan kebijakan perhitungan yang jelas dalam menentukan target kinerja, indikator kinerja dan capaian kinerja	Merumuskan dan menetapkan kebijakan	Mengusulkan untuk dibuat dan atau kebijakan terkait perhitungan , target kinerja ,indicator kinerja dan capaian kinerja SPM
	Belum jelas ketentuan dan belum ada kebijakan terkait Definisi Operasional	Nerumuskan Definisi Operasional	Mengusulkan untuk dilakukan pembuatan Definisi Operasional SPM berdasarkan kearifan lokal
	Keterbatasan pagu anggaran	Menyusun dan merencanakan Kembali anggaran yang disesuaikan dengan SPM	Mengusulkan rencana kegiatan yang menyesuaikan dengan SPM
	Kurangnya pemahaman untuk pengisian Form 5.C.1 dan 5.C.2	Mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman dan informasi yang diterima dan mohon kepada kemandagri/ pihak terkait yang mengeluarkan regulasi SPM untuk memberikan informasi dan penjelasan detail,khususnya kebencanaan termasuk pengisian form aplikasi SPM yang ada	Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana pengaplikaasian SPM dan mencari Referensi pengisian pada SKPD lain
	Sulitnya dalam menetapkan target karena kondisi darurat merupakan situasi yang tidak diharapkan	Menggunakan angka perkiraan rata rata 5 tahun terakhir Menggunakan target yang sudah terencana di dokumen renstra	Mengupdate data review dokumen berikutnya
	Belum maksimalnya koordinasi dengan masyarakat wilayah ditempat pelaksanaan kegiatan	Bentuk tim Bersama untuk memastikan pelaksanaan kegiatan	Mengusulkan untuk kebijakan dan penetapan susunan tim koordinasi di lingkup SKPD/Pengampu SPM Kab.Banjara
	Kurangnya pemahaman untuk pengisian Form 5.D.1 dan 5.D.2	Mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman dan informasi yang diterima dan mohon kepada kemandagri/ pihak terkait yang mengeluarkan regulasi SPM untuk memberikan informasi dan penjelasan detail,khususnya kebencanaan termasuk pengisian form aplikasi SPM yang ada	Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana pengaplikaasian SPM dan mencari Referensi pengisian pada SKPD lain
	Pendataan penerima layanan PPE saat keadaan darurat bencana belum optimal	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan mengusulkan penambahan sumberdaya untuk kegiatan tersebut	Melakukan pengusulan rekrutmen pegawai baru melalui bagian umpeg
	Pelayanan PPE terhadap korban terluar / terjauhbelum optimal-Kurang luasannya merencanakan kegiatan di	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan mengusulkan	Menyediakan anggaran untuk dapat menggunakan lebih

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
	karenakan anggaran sdh di pagu, sehinggaa perencanaan di sesuaikan dengan dana yang ada dan sdh ditetapkan	penambahan sumberdaya untuk kegiatan tersebut	banyak tenaga relawan pada saat keadaan darurat

Sumber : BPBD, 2024

Tabel 72
Permasalahan, Solusi dan Tindakanlanjutan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Damkar

Bidang Damkar

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	Belum adanya tenaga khusus investigasi dan pengumpulan data	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan mengusulkan penambahan sumberdaya untuk kegiatan tersebut	Melakukan pengusulan rekrutmen pegawai baru melalui bagian umpeg
2	Kurangnya sarana yang mendukung untuk melakukan investigasi dan pengumpulan data	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan mengusulkan penambahan sumberdaya untuk kegiatan tersebut	Menyediakan anggaran untuk dapat mendukung kegiatan investigasi
3	Kurangnya keberadaan pos sector yang ada dimasing-masing kecamatan bila dibandingkan dengan luasnya wilayah yang dimiliki kabupaten banjar	Menambah pos sector sehingga memperluas jangkauan layanan	Mengusulkan anggaran untuk dapat mendambah pos sector di beberapa kecamatan yang wilayahnya sulit diakses oleh DPKP
4	Kesulitan memprediksi jumlah kejadian kebakaran dan jumlah korban kebakaran	Menggunakan angka perkiraan rata rata 5 tahun terakhir Menggunakan target yang sudah terencana di dokumen renstra	Mengupdate data review dokumen berikutnya
8	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran mencapai target, terdapat efisiensi anggaran.	Mengoptimalkan perencanaan kegiatan bidang dengan lebih efisien	melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBD.
9	Pembentukan redkar di 20 desa/kelurahan sudah mencapai target yang ditetapkan, terdapat efisiensi anggaran.	Mengoptimalkan perencanaan kegiatan bidang dengan lebih efisien	melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBD.
10	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi edukasi tentang pencegahan kebakaran melebihi yang ditargetkan, terdapat efisiensi anggaran.	Mengoptimalkan perencanaan kegiatan bidang dengan lebih efisien	melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT APBD.
----	--------------	--------	-----------------------

Sumber : DPKP, 2024

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial bahwa ada 5 (lima) jenis Pelayanan Dasar yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten atau Kota yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten atau Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\%$$

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2023 sebagai OPD pelaksana SPM Sosial untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 74
Target SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Rehabilitasi sosial	Jumlah Warga	100%	Setiap	Jumlah	100% (sesuai)	Setiap	Indikator mutu

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		tahun	barang, jasa dan sumber daya manusia	dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	tahun	minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten / Kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.6.3. Realisasi

Adapun penjabaran realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2023 :

Tabel 75
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.479	1.479	100%	1. Layanan data dan pengaduan	1479	1479	100%
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	18	18	100%
						3. Penyediaan permakanan	1370	1370	100%
						4. Penyediaan sandang	1	1	100%
						5. Penyediaan alat bantu	12	12	100%
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	3	3	100%
						7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20	20	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	20	20	100%
						9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan	1	1	100%
						10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	13	13	100%
						11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	7	7	100%
						12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100%
						13. Layanan rujukan	11	11	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	317	317	100%	1. Layanan data dan pengaduan	317	317	100%
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	8	8	100%
						3. Penyediaan permakanaan	235	235	100%
						4. Penyediaan sandang	4	4	100%
						5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	11	11	100%
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	100%
						7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	20	20	100%
						8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan	1	1	100%
						9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	13	13	100%
						10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6	6	100%
						11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	100%
						12. Layanan rujukan	9	9	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	484	484	100%	1. Layanan data dan pengaduan	484	484	100%
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	83	83	100%
						3. Penyediaan permakanaan	260	260	100%
						4. Penyediaan sandang	1	1	100%
						5. Penyediaan alat bantu	5	5	100%

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100%
						7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	37	37	100%
						8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	20	20	100%
						9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan	1	1	100%
						10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	68	68	100%
						11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100%
						12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100%
						13. Layanan rujukan	5	5	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	73	73	100%	1. Layanan data dan pengaduan	73	73	100%
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	10	10	100%
						3. Penyediaan permakanaan	22	22	100%
						4. Penyediaan sandang	2	2	100%
						5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	4	4	100%
						6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10	10	100%
						7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	1	1	100%
						8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan	1	1	100%
						9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	5	100%
						10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100%
						11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	100%
						12. Layanan rujukan	10	10	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota	1853	1853	100%	1. Penyediaan permakanan	1853	1853	100%
						2. Penyediaan sandang	86	86	100%
						3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	7	7	100%
						4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	180	180	100%
						5. Pelayanan dukungan Psikososial	75	75	100%

Sumber : DinsosP3AP2KB, 2024

$$IP_{SPM} \text{ Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten /Kota} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023 adalah Tuntas Paripurna dengan nilai 100%.

4.6.4. Alokasi Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Banjar dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, tidak ada mealokasikan anggaran SPM baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 76
Anggaran & Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	81.589.400	77.167.400
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	35.895.000	33.345.000
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	159.090.000	157.879.000
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	45.172.000	31.691.000

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	296.995.500	292.932.000
TOTAL	618.741.900	593.014.400

Sumber : DSP3AP2KB, 2024

Selain pendanaan yang berasal dari APBD, Kabupaten Banjar pada tahun 2023 juga menerima bantuan keuangan dari APBN dan Lain-Lain. Selain itu ada pula anggaran BTT APBD II kegiatan belanja bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas sebesar Rp.336.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp.336.350.000,-. BTT APBD II kegiatan belanja bantuan sosial untuk korban bencana berupa bantuan uang tunai bagi korban kebakaran sebesar Rp.620.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.620.000.000,-. Adapun besaran dana yang dialokasikan adalah sejumlah Rp.30.480.713.460,- dengan realisasi Rp.27.433.391.708,- dan untuk bantuan keuangan dari lain-lain berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar yang dalam bantuan yang berikan dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp.4.300.000,- dengan realisasi Rp.4.300.000,-.

4.6.3. Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar terdiri dari :

Tabel 77
Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/IV.c	S2	-	-
2	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Pembina/IVa	S2	-	-
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pembina/IVa	S2	-	-
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kesejahteraan Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia	Penata Tk. I/III.d	S1	-	-
5	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan NAPZA	Penata Tk. I/III.d	S2	-	-
6	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pembina/IV.a	S2	-	-
7	Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial	Pembina/IV.a	S2	-	-
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	Penata Tk. I/III.d	S1	-	-
9	Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Penata Tk. I/III.d	S1	-	-
10	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	Penata Muda Tk. I/III.b	S1	-	-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
11	Analisis Pelayanan Sosial	Penata Tk. I/III.d	S1	-	-
12	Pengadministrasi pada Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan NAPZA	Penata Muda Tk. I/III.b	SMA	-	-
13	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	Penata Muda Tk. I/III.b	S1	-	-
14	Pengelola Perlindungan Sosial	Pengatur Tk. II/II.d	SMA	-	-
15	Pengadministrasi pada Kasi Rehabilitasi Sosial, Kesejahteraan Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	S1	-	-
16	Pengadministrasi pada Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan NAPZA di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	S1	-	-
17	Operator Komputer pada Kasi Rehabilitasi Sosial, Kesejahteraan Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	S1	-	-
18	Pengadministrasi pada Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	S1	-	-
19	Pengadministrasi Rumah Singgah pada Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan NAPZA di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	SMA	-	-
20	Psikolog Rumah Singgah pada Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan NAPZA di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	S1	-	-
21	Pramu Sosial Rumah Singgah pada Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan NAPZA di	-	SMA	-	-

Dalam pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial, juga dibantu oleh Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan sebagaimana terjadi dalam tabel berikut ini :

Tabel 78
Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial di Kabupaten Banjar Tahun 2023

No.	Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS/atau Relawan Sosial	Jenis Kelamin		Pendidikan			Jumlah	
		Perempuan	Laki-Laki	SMA	D3	S1		S2
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	5	15	8	-	11	1	20
2	Supervisor Kabupaten	7	3	-	-	4	6	10
3	Supervisor Kecamatan	6	14	8	-	11	1	20
4	Fasilitator	3	17	15	-	5	-	20
5	Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan	-	1	-	-	1	-	1
6	Administrator Pangkalan Data Program Keluarga Harapan	1	1	-	-	2	-	2
7	Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan	31	18	-	21	26	2	49
8	Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak	1	-	-	-	1	-	1
9	Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	1	-	-	-	-	-	1
Total		55	69	31	21	62	10	124

Sumber : DSP3AP2KB, 2024

4.6.4. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :

Tabel 79
Permasalahan, Solusi dan Tindaklanjut Penerapan SPM Urusan Sosial

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	<p>Pengumpulan data</p> <p>1) Belum adanya aplikasi (database) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).</p> <p>2) Belum updatenya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).</p> <p>3) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti : Perangkat Daerah pengampu SPM, kesulitan menentukan target capaian pelayanan dikarenakan pelayanan diberikan secara darurat.</p>	<p>1) Menggunakan aplikasi (database) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).</p> <p>2) Melakukan update data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).</p> <p>3) Menentukan target capaian pelayanan dikarenakan pelayanan diberikan secara darurat.</p>	<p>1) Berkoordinasi dengan provinsi mengenai teknis aplikasi (database) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).</p> <p>2) Berkoordinasi dengan pihak terkait data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</p> <p>3) Menentukan target capaian pelayanan dikarenakan pelayanan diberikan secara darurat.</p>
2	<p>Penghitungan kebutuhan</p> <p>1) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti : Dikarenakan tidak ada target, maka Perangkat Daerah pengampu SPM, mengalami kesulitan dalam penghitungan kebutuhan.</p> <p>2) Belum optimalnya penghitungan kebutuhan yang jelas mengenai Standar Pelayanan Minimal permakanan sesuai standar gizi.</p>	<p>1) Melakukan penghitungan kebutuhan.</p> <p>2) Mengoptimalkan penghitungan kebutuhan yang jelas mengenai Standar Pelayanan Minimal permakanan sesuai standar gizi.</p>	<p>1) Melakukan koordinasi antar pihak terkait mengenai penghitungan kebutuhan.</p> <p>2) Berkoordinasi antar pihak terkait mengenai penghitungan kebutuhan yang jelas mengenai Standar Pelayanan Minimal permakanan sesuai standar gizi.</p>
	<p>Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>1) Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran karena keterbatasan anggaran sehingga bantuan yang diberikan belum maksimal.</p> <p>2) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti : Dikarenakan perhitungan kebutuhan belum berbasis data, untuk penganggaran hanya memprediksiperkiraan jumlah yang harus dilayani setiap tahunnya.</p>	<p>1) Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran sehingga bantuan yang diberikan akan menjadi maksimal.</p> <p>2) Melakukan perhitungan kebutuhan berbasis data, untuk penganggaran jumlah yang harus dilayani setiap tahunnya.</p>	<p>1) Berkoordinasi antar pihak terkait mengenai perencanaan dan penganggaran sehingga bantuan yang diberikan akan menjadi maksimal.</p> <p>2) Melakukan koodrinasi antar pihak terkait mengenai perhitungan kebutuhan berbasis data, untuk penganggaran jumlah yang harus dilayani setiap tahunnya.</p>
	<p>Pelaksanaan</p> <p>1) Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga pelayanan belum optimal.</p> <p>2) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti : Dalam Pelaksanaannya tidak bisa menentukan target di awal tahun, karena kegiatan bersifat kedaruratan atau bila kasus terjadi baru ditangani.</p>	<p>1) Menambahkan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga pelayanan akan optimal.</p> <p>2) Menentukan target di awal tahun</p>	<p>1) Brekoordinasi antar pihak terkait mengenai sarana dan prasarana yang tersedia sehingga pelayanan akan optimal.</p> <p>2) Berkoordinasi antar pihak terkait mengenai target di awal tahun</p>
	<p>Lain-Lain</p> <p>1) Belum maksimalnya koordinasi lintas perangkat daerah sehingga pelayanan belum optimal</p>	<p>1) Memaksimalkan koordinasi lintas perangkat daerah sehingga pelayanan lebih optimal</p>	<p>1) Berkoordinasi antar lintas perangkat daerah sehingga pelayanan lebih optimal</p>

Sumber : DSP3AP2KB, 2024

4.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang mendukung pelaksanaan SPM pada tahun 2022 yaitu :

Tabel 80
Program, Kegiatan & Sub Kegiatan yang Menunjang Penerapan SPM di Kabupaten Banjar Tahun 2023

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2023	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	Urusan Pendidikan	152.705.784.768	143.543.736.344
	Dinas Pendidikan	152.705.784.768	143.543.736.344
	Program Pengelolaan Pendidikan	152.609.911.968	143.464.211.544
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	14.990.212.391	14.863.199.499
	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.456.585.426	1.454.713.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.366.936.315	1.365.740.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	167.553.750	99.563.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.367.590.000	9.325.422.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	118.274.000	115.274.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	101.615.000	101.494.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	349.999.800	349.143.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	270.756.000	270.546.399
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	297.196.000	297.196.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	325.084.600	318.583.600
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.168.621.500	1.165.524.500
	Pengelolaan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar	78.678.684.989	73.456.891.927
	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	1.509.029.880	1.505.741.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	511.189.999	470.421.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	920.324.999	917.332.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.196.433.748	954.229.000
	Sub Kegiatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.333.373.192	2.275.843.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	16.488.779.594	15.592.977.544
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	1.634.961.399	1.631.321.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan sekolah	926.748.781	910.231.900
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	988.227.644	983.782.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	302.530.000	302.530.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.952.930.000	1.220.100.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	852.281.800	684.744.800
	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.860.216.757	2.858.186.757
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	812.390.600	719.225.600
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	546.244.300	543.190.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidik Sekolah Dasar	2.303.759.400	1.426.069.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS SD	41.413.722.896	39.794.727.326

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2023	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.125.540.000	666.240.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	32.581.473.908	28.985.993.718
	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	8.647.180.000	5.878.713.903
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	498.820.000	470.421.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	138.877.500	138.681.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	15.000.000	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	479.760.000	435.594.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	915.494.240	800.849.116
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	839.805.000	805.686.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	375.340.000	374.775.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	10.000.000	8.490.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	680.647.500	641.270.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	386.025.000	333.015.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	261.142.500	260.590.907
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	97.955.000	97.895.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	199.185.000	198.965.000
	Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	199.920.000	188.700.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan siswa	135.891.000	135.891.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	589.631.550	462.231.550
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	453.008.300	445.508.300
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	970.010.200	685.058.200
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	104.873.200	71.243.200
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.311.907.918	16.307.725.542
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	261.000.000	234.700.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	10.000.000	9.990.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	26.359.540.680	26.158.126.400
	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	727.730.000	618.925.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	374.254.780	373.846.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	126.955.000	89.105.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	101.955.000	101.885.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	4.431.793.900	4.388.513.400
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.890.352.000	11.879.352.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	8.706.500.000	8.706.500.000
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	61.177.800	49.369.800

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2023	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Kegiatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	61.177.800	49.369.800
	Sub Kegiatan Pemetaan dan Penataan Penempatan untuk Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.494.400	32.890.400
	Sub Kegiatan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas untuk Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.683.400	16.479.400
	Program Pengembangan Kurikulum	34.695.000	30.155.000
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	34.695.000	30.155.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	34.695.000	30.155.000
2	Urusan Kesehatan	8.649.451.850	6.763.897.020
	Dinas Kesehatan	8.649.451.850	6.763.897.020
	Program Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.649.451.850	6.763.897.020
	Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota	8.649.451.850	6.763.897.020
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin	2.989.010.000	2.523.950.220
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bersalin	159.990.000	46.162.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	18.103.100	15.693.100
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	919.326.100	820.686.100
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.026.381.000	759.566.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	923.092.400	905.139.850
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	480.246.500	419.951.500
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	11.700.000	5.937.500
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus	55.191.000	49.041.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	251.942.000	239.922.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1.069.060.000	282.973.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	745.409.750	694.874.750
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	-
3	Urusan Pekerjaan Umum	36.907.585.412	34.571.588.006
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	36.907.585.412	34.571.588.006
	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	24.079.268.031	21.996.033.206
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	24.079.268.031	21.996.033.206
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	-	-
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	-	-

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2023	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	16.521.795.425	15.186.886.006
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	2.012.000.000	2.012.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tarif Air Minum	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Kebutuhan Sendiri	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	443.867.711	414.184.200
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	-	-
	Sub Kegiatan Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	5.101.604.895	4.382.963.000
	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah	12.828.317.381	12.575.554.800
	Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.828.317.381	12.575.554.800
	Sub Kegiatan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis system pengelolaan air limbah domestic dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Supervisi pembangunan/rehabilitasi / peningkatan / perluasan system pengelolaan air limbah Domestik terpusat skala kota	-	-
	Sub Kegiatan pembangunan / penyediaan system pengelolaan Air Limbah terpusat skala kota	-	-
	Sub Kegiatan rehabilitasi/ peningkatan / perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	-	-
	Sub Kegiatan rehabilitasi / peningkatan / perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	-	-
	Sub Kegiatan pembangunan / penyediaan sub sistem pengolahan setempat	11.507.717.381	11.311.350.550
	Sub Kegiatan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	-	-

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2023	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	712.650.000	697.706.600
	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-
	Sub Kegiatan Operasi pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	251.500.000	211.828.450
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan system pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan sarana pengangkutan Lumpur tinja	356.450.000	354.669.200
	Sub Kegiatan penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan sarana dan prasarana IPLT	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi / peningkatan / Perluasan sarana dan prasarana IPLT	-	-
	Sub Kegiatan Supervisi pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / perluasan sarana dan prasarana IPLT	-	-
4	Urusan Perumahan Rakyat	1.751.732.450	1.723.404.636
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.751.732.450	1.723.404.636
	Program Pengembangan Perumahan	394.443.900	390.215.400
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	67.447.200	65.588.200
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan Di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	67.447.200	65.588.200
	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	-
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat Bencana	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	-
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	326.996.700	324.627.200
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	326.996.700	324.627.200
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	-	-

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2023	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten / Kota	-	-
	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	54.198.550	49.898.329
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	54.198.550	49.898.329
	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan	54.198.550	49.898.329
	Program Kawasan Permukiman	1.303.090.000	1.283.290.907
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha	1.303.090.000	1.283.290.907
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Pemukiman Kumuh	1.303.090.000	1.283.290.907
5	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5.339.341.401	4.353.431.059
	Satuan Polisi Pamong Praja	1.299.266.000	1.255.480.550
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.299.266.000	1.255.480.550
	Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	1.175.643.700	1.133.029.700
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	626.448.500	608.280.000
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.562.000	5.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	413.047.700	411.719.700
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	123.634.600	108.030.000
	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	450.900	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	6.500.000	-
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	123.622.300	122.450.850
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60.861.900	60.290.450
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.946.900	5.946.900
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	56.813.500	56.213.500
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	-	-
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.426.809.901	2.694.044.936
	Program Penanggulangan Bencana	3.426.809.901	2.694.044.936

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2023	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	135.902.500	126.314.800
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	135.902.500	126.314.800
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	623.882.700	587.989.300
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	78.679.500	67.640.600
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	240.215.200	238.702.200
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	229.692.000	220.410.500
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-
	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	-	-
	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	-
	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	75.296.000	61.236.000
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.562.605.101	1.890.956.236
	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	-	-
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	2.062.685.100	1.399.093.736
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	499.920.001	491.862.500
	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-
	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit	-	-
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	104.419.600	88.784.600
	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	67.177.600	58.523.400

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2023	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-
	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	37.242.000	30.261.200
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	613.265.500	403.905.573
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	613.265.500	403.905.573
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	228.546.500	212.251.573
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	15.094.500	15.094.500
	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	49.072.000	46.972.000
	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	139.380.000	127.435.073
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	25.000.000	22.750.000
	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	-
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	71.750.000	42.515.000
	Sub Kegiatan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	34.625.000	7.075.000
	Sub Kegiatan Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	37.125.000	35.440.000
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-
	Sub Kegiatan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	301.900.000	138.070.000
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	242.900.000	118.540.000
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	59.000.000	19.530.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	11.069.000	11.069.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Penimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	11.069.000	11.069.000

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2023	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	-	-
6	Urusan Sosial	618.741.900	593.014.400
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	618.741.900	593.014.400
	Program Rehabilitasi Sosial	321.746.400	300.082.400
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	321.746.400	300.082.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	158.990.000	158.590.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	20.012.000	19.875.000
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	35.895.000	32.595.000
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	19.161.400	17.043.400
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	12.516.000	12.459.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	-	-
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-	-
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	45.172.000	31.691.000
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-
	Sub Kegiatan Layanan Rujukan	30.000.000	27.829.000
	Program Penanganan Bencana	296.995.500	292.932.000
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	296.995.500	292.932.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	296.995.500	292.932.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	-
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	-	-
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	-	-

Sumber : Data diolah Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar, 2024

1. Urusan Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh 3 Program, 6 Kegiatan dan beberapa sub kegiatan berikut ini:

Program Pengelolaan Pendidikan

Pagu anggaran program Pengelolan Pendidikan sebesar Rp 14.990.212.391 dengan realisasi keuangan Rp. 14.863.199.499 (99.15%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar PAUD dengan target sebesar 63.90 % dan realisasi 90.78%. Program ini didukung oleh 1 Kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pagu anggaran kegiatan Pengelolan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp. 14.990.212.391 dengan realisasi keuangan Rp. 14.863.199.499 (99.15%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar PAUD dengan target sebesar 63.90 % dan realisasi 90.78%. Kegiatan ini didukung oleh 11 Sub Kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 1.456.585.426 dengan realisasi keuangan Rp. 1.454.713.000 (99.87%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun : 11 Unit dari 11 Unit, dengan target 100% dan realisasi 100% dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	TK Negeri Pembina Pengaron	Pengaron
2	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah	TK Negeri Pembina Pengaron	Pengaron
3	Pembangunan Ruang Guru	TK Negeri Pembina Pengaron	Pengaron
4.	Pembangunan WC/Jamban Guru dan Siswa	TK Negeri Pembina Pengaron	Pengaron
5	Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	TK Negeri Pembina Pengaron	Pengaron
6	Pembangunan Halaman Bermain	TK Negeri Pembina Pengaron	Pengaron
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	TK Al Ishlah	Martapura
8	Pembangunan Gedung Aula	TK Negeri Pembina Mataraman	Mataraman
9	Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	TK Sejahtera Mandiri	Gambut
10	Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	TK Islam Bakti	Martapura Barat
11	Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	TK Az Zahra	Astambul

b) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 1.366.936.315 dengan realisasi keuangan Rp. 1.365.740.000 (99.91%). Indikator kinerja

pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun : 11 Unit dari 11 Unit dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Pembangunan Halaman Bermain	TK Negeri Pembina Cintapuri Darussalam	Cintapuri Darussalam
2	Pembangunan Halaman Bermain	TK Negeri Pembina Beruntung Baru	Beruntung Baru
3	Pembangunan Halaman Bermain	TK Negeri Pertiwi Podok	Aluh Aluh
4.	Pembangunan Pagar	PAUD Ceria	Sungai Tabuk
5	Pembangunan area bermain beserta ruang	APE luar TK Sejahtera Mandiri	Gambut
6	Pembangunan area bermain beserta ruang	APE luar TK Islam Bakti	Martapura Barat
7	Pembangunan area bermain beserta ruang	APE luar TK Az Zahra	Astambul
8	Pembangunan (jamban) sanitasinya	toilet beserta TK Sejahtera Mandiri	Gambut
9	Pembangunan Halaman Bermain	TK Negeri Pertiwi	Martapura
10	Pembangunan Halaman Bermain	TK Negeri Jawa	Martapura
11	Pembangunan Halaman Bermain	TK Negeri Sekumpul	Martapura

c) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 9.367.590.000 dengan realisasi keuangan Rp. 9.325.422.000 (99.55%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP : 422 Satuan Pendidikan dari 426 Satuan Pendidikan dengan target sebesar 100.% dan realisasi 99.06%. Dari 426 sesuai dengan target awal terdapat 4 Satuan Pendidikan yang tidak mengambil dana BOP dengan alasan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dana BOP dari pusat. Dengan rincian sebagai berikut :

Count of Nama Sekolah	Column Labels			
	KB	TK	TPA	Grand Total
Kec. Aluh-Aluh	17	6		23
Kec. Aranio	12	1		13
Kec. Astambul	20	5		25
Kec. Beruntung Baru	14	3		17
Kec. Cintapuri Darussalam	8	4		12
Kec. Gambut	15	15		30
Kec. Karang Intan	23	13		36
Kec. Kertak Hanyar	14	11	3	28
Kec. Martapura	24	41	3	68
Kec. Martapura Barat	8	5		13
Kec. Martapura Timur	15	8		23
Kec. Mataraman	17	17		34

Count of Nama Sekolah	Column Labels			
	Row Labels	KB	TK	TPA
Kec. Pengaron	5	3		8
Kec. Sambung Makmur	6	1		7
Kec. Simpang Empat	13	6		19
Kec. Sungai Pinang	5	6		11
Kec. Sungai Tabuk	16	20		36
Kec. Tatah Makmur	11	2		13
Kec. Telaga Bauntung	4	2		6
Grand Total	247	169	6	422

d) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp118.274.000 dengan realisasi keuangan Rp. 115.274.000 (97.46%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD : 480 Orang dari 480 Orang dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Jenjang
1	Aluh-aluh	24	PAUD
2	Aranio	14	PAUD
3	Astambul	25	PAUD
4	Beruntung Baru	18	PAUD
5	Cintapuri Darussalam	12	PAUD
6	Gambut	36	PAUD
7	Karang Intan	42	PAUD
8	Kertak Hanyar	33	PAUD
9	Martapura	79	PAUD
10	Martapura Barat	13	PAUD
11	Martapura Timur	26	PAUD
12	Mataraman	39	PAUD
13	Pengaron	10	PAUD
14	Sambung Makmur	8	PAUD
15	Simpang Empat	22	PAUD
16	Sungai Pinang	12	PAUD
17	Sungai Tabuk	48	PAUD
18	Tatah Makmur	13	PAUD
19	Telaga Bauntung	6	PAUD
	Grand Total	480	

e) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp167.553.750 dengan realisasi keuangan Rp. 99.563.000 (59.42%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : 1 Unit dari 2 Unit dengan target sebesar 100.% dan realisasi 50%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Rehabilitasi Ruang Kelas TK	TK Bunga Matahari	Karang Intan
2	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas DAK	Tidak terealisasi karena tidak mendapatkan Dana DAK untuk kegiatannya	

f) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 101.615.000 dengan realisasi keuangan Rp. 101.494.000 (99.88%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia : 10 Unit dari 10 Unit dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Pengadaan Mebel (Meja dan Kursi) Siswa PAUD	TK Negeri Pembina Mataraman	Mataraman
2	Pengadaan Mebel (Meja dan Kursi) Siswa PAUD	TK Negeri Tunas Pratama	Martapura
3	Pengadaan Mebel (Meja dan Kursi) Siswa PAUD	TK Negeri Pembina Pengaron	Pengaron
4	Pengadaan Mebel (Meja dan Kursi) Siswa PAUD	TK Negeri Tanjung Rema Darat	Martapura
5	Pengadaan Mebel (Meja dan Kursi) Siswa PAUD	TK Negeri Pembina	Martapura
6	Pengadaan Mebel (Meja dan Kursi) Siswa PAUD	TK Negeri Jawa	Martapura
7	Pengadaan Mebel (Meja dan Kursi) Siswa PAUD	TK Negeri Permata 2	Martapura
8	Pengadaan Mebel (Meja dan Kursi) Siswa PAUD	TK Negeri Pertiwi	Martapura
9	Pengadaan Mebel (Meja dan Kursi) Siswa PAUD	TK Negeri Podok	Aluh Aluh
10	Pengadaan Mebel (Meja dan Kursi) Siswa PAUD	TK Negeri Sekumpul	Martapura

g) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 349.999.800 dengan realisasi keuangan Rp. 349.143.000 (99.76%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia : 8870 Paket dari 8870 Paket dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

Daftar Jumlah Penerima Buku Mewarnai Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Aluh-Aluh	408

No	Kecamatan	Jumlah
2	Aranio	219
3	Astambul	530
4	Beruntung Baru	278
5	Cintapuri Darussalam	233
6	Gambut	693
7	Karang Intan	758
8	Kertak Hanyar	704
9	Martapura	1608
10	Martapura Barat	210
11	Martapura Timur	476
12	Mataraman	396
13	Pengaron	190
14	Sambung Makmur	113
15	Simpang Empat	390
16	Sungai Pinang	211
17	Sungai Tabuk	919
18	Tatah Makmur	141
19	Telaga Bauntung	91
Jumlah		8.568

Daftar Jumlah Penerima Perlengkapan Didik PAUD Per Kecamatan (Ransel Anak, Buku Gambar, Crayon, Pensil, Penghapus, Buku Tulis)

No	Kecamatan	Jumlah
1	Aluh-Aluh	32 Set
2	Aranio	10 Set
3	Astambul	14 Set
4	Beruntung Baru	17 Set
5	Cintapuri Darussalam	6 Set
6	Gambut	19 Set
7	Karang Intan	22 Set
8	Kertak Hanyar	22 Set
9	Martapura	60 Set
10	Martapura Barat	3 Set
11	Martapura Timur	5 Set
12	Mataraman	22 Set
13	Pengaron	4 Set
14	Sambung Makmur	3 Set
15	Simpang Empat	18 Set
16	Sungai Pinang	-
17	Sungai Tabuk	21 Set
18	Tatah Makmur	4 Set
19	Telaga Bauntung	14 Set
Jumlah		302 Set

h) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 270.756.000 dengan realisasi keuangan Rp. 270.546.399 (99.92%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia : 18 Paket dari 18 Paket dengan target sebesar

100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	KB AL-IKHLAS	Aranio
2	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	PAUD AL-JIHAD	Mataraman
3	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	KB RAJAWALI	Sambung Makmur
4	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	TK AL MANSYUR	Sambung Makmur
5	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	KB PERTIWI	Karang Intan
6	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	TK PERMATA	Martapura
7	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	KB TERPADU LAMPINI	Karang Intan
8	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	PAUD HARAPAN BUNDA	Karang Intan
9	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	KB HARAPAN IBU	Martapura Barat
10	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	KB DAHLIA	Pengaron
11	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	KB ANGGREK	Martapura
12	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	PAUD MELATI	Aluh Aluh
13	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	PAUD SUBUR	Martapura
14	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	KB HARAPAN BUNDA	Martapura Timur
15	Pengadaan APE Dalam untuk TK Swasta	PAUD AN NAJWA	Martapura Timur
16	Pengadaan Alat Permainan Edukatif	TK Sejahtera Mandiri	Gambut
17	Pengadaan Alat Permainan Edukatif	TK Islam Bakti	Martapura Barat
18	Pengadaan Alat Permainan Edukatif	TK Azzahra	Astambul

i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 297.196.000 dengan realisasi keuangan Rp. 297.196.000 (100%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar : 14300 Peserta Didik dari 14300 Peserta Didik dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	KB	TK	TPA	Total
1	Aluh-Aluh	540	163		703
2	Aranio	260	32		292
3	Astambul	673	93		766
4	Beruntung Baru	398	76		474
5	Cintapuri Darussalam	217	114		331
6	Gambut	327	825	0	1152
7	Karang Intan	746	546		1292
8	Kertak Hanyar	542	780	82	1404
9	Martapura	713	2034	83	2830
10	Martapura Barat	181	126		307
11	Martapura Timur	454	229		683
12	Mataraman	359	469		828

No	Kecamatan	KB	TK	TPA	Total
13	Pengaron	121	136		257
14	Sambung Makmur	117	32		149
15	Simpang Empat	380	224		604
16	Sungai Pinang	110	174		284
17	Sungai Tabuk	704	875		1579
18	Tatah Makmur	214	37		251
19	Telaga Bauntung	65	49		114
20	Prasmanan				
Total		7121	7014	165	14300

j) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 325.084.600 dengan realisasi keuangan Rp. 318.583.600 (98.00%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi : 260 orang dari 185 orang dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

1) Bimbingan Teknis Pengawas, Penilik dan Pamong

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengawas, penilik dan pamong dalam membina PAUD, pada tanggal Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang di Aula Dinas Pendidikan.

2) Bimtek guru PAUD Non ASN

Bimbingan Teknis Guru PAUD Non ASN dilaksanakan untuk Meningkatkan Kompetensi Guru PAUD untuk Mewujudkan layanan PAUD yang Berkualitas, pada bulan maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang di Aula Dinas Pendidikan.

3) Bimtek Kepala TK

Bimbingan Teknis Kepala TK dilaksanakan untuk Meningkatkan Kompetensi Kepala TK untuk Mewujudkan layanan PAUD yang Berkualitas, pada tanggal Mei 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang di Aula Dinas Pendidikan.

4) Bimtek Perencanaan Berbasis Data bagi PTK PAUD

Bimbingan Teknis perencanaan berbasis data bagi PTK PAUD dilaksanakan untuk Meningkatkan Kompetensi guru TK untuk Mewujudkan layanan PAUD yang Berkualitas, pada tanggal

november 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang di Aula Dinas Pendidikan.

k) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 1.168.621.500 dengan realisasi keuangan Rp. 1.165.524.500 (99.73%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen : 443 Satuan Pendidikan dari 443 Satuan Pendidikan dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	KB	TK	TPA	Total
1	Aluh-Aluh	17	6		23
2	Aranio	12	1		13
3	Astambul	22	5		27
4	Beruntung Baru	14	3		17
5	Cintapuri Darussalam	8	4		12
6	Gambut	15	15	1	31
7	Karang Intan	23	13		36
8	Kertak Hanyar	15	13	3	31
9	Martapura	31	42	8	81
10	Martapura Barat	8	5		13
11	Martapura Timur	15	8		23
12	Mataraman	17	17		34
13	Pengaron	5	3		8
14	Sambung Makmur	6	1		7
15	Simpang Empat	13	6		19
16	Sungai Pinang	5	6		11
17	Sungai Tabuk	17	20		37
18	Tatah Makmur	12	2		14
19	Telaga Bauntung	4	2		6
20	Paramasan				
Total		259	172	12	443

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp. 52.719.081.360 dengan realisasi keuangan Rp. 52.316.252.800 (99.23%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar dengan target sebesar 88.00 % dan realisasi 84.89%. Kegiatan ini didukung oleh 7 Sub Kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan in sebesar Rp. 727.730.000 dengan realisasi keuangan Rp. 618.925.000 (85.05%). Indikator kinerja

pada sub kegiatan ini adalah jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun : 2 Unit dari 2 Unit dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.

No	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Pembangunan Ruang Praktek Tata Boga Beserta Perabotnya	SPNF-SKB Banjar	Kab. Martapura
2	Pembangunan Ruang Praktek Tata Busana Beserta Perabotnya	SPNF-SKB Banjar	Kab. Martapura

b) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan in sebesar Rp. 374.254.780 dengan realisasi keuangan Rp. 373.846.000 (99.89%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun : 1 Unit dari 1 Unit dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.

No	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	SPNF-SKB Kab. Banjar	Martapura
2	Pembangunan Halaman	SPNF-SKB Kab. Banjar	Martapura

c) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan in sebesar Rp. 126.955.000 dengan realisasi keuangan Rp. 89.105.000 (70.19%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 Paket Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia dengan realisasi 1 Paket Rehabilitasi Ruang Kelas TK KBM Al Hidayah di Kecamatan Gambut.

d) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan in sebesar Rp. 101.955.000 dengan realisasi keuangan Rp. 101.885.000 (99.93%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 Paket Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia dengan realisasi 1 Paket Pengadaan Alat dan Praktek Tata Boga SKB di SPNF-SKB Kab.Banjar di Kecamatan Martapura.

e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan in sebesar Rp. 4.431.793.900 dengan realisasi keuangan Rp. 4.388.513.400 (99.02%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Dididik yang Mengikuti Proses Belajar : 9.583 Peserta Didik dari 9.583 Peserta

Didik dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Jumlah anak usai 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan berjumlah 9.583 Peserta Didik dari PKBM (Paket A, B, dan C yang bersumber dari Dinas Pendidikan (Dapodik) dan 8.645 Peserta Didik dari Kemenag (Emis) Ula, Wustha, dan Ulya dengan jumlah 18.228 peserta didik. Akan tetapi terkait penganggaran sub kegiatan ini peruntukannya hanya untuk peserta didik yang mengikuti pendidikan di PKBM di bawah Dinas Pendidikan.

f) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan in sebesar Rp. 11.890.352.000 dengan realisasi keuangan Rp. 11.879.352.000 (99.91%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen : 26 Satuan Pendidikan dari 26 Satuan Pendidikan dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Dengan realisasi berupa kegiatan pemberian insentif kepada guru sebagai berikut :

- Pendidik PAUD : 1.070 orang
- Pondok pesantren : 1.202 orang
- Madrasah Diniyah: 1.003 orang
- BKPRMI : 2.095 orang
- Al Banjari : 490 orang

g) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan in sebesar Rp. 8.706.500.000 dengan realisasi keuangan Rp. 8.706.500.000 (100%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP : 50 Satuan pendidikan dari 50 Satuan pendidikan dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Pagu 1 Tahun	Laporan Penggunaan Dana (Kegiatan)	
				Tahap 1	Tahap 2
1	PKBM HARAPAN KITA	Kec. Aluh-Aluh	693.120.000	346.560.000	346.560.000
2	PKBM PAMATON	Kec. Aranio	207.100.000	103.550.000	103.550.000
3	PKBM BATU SAWAR	Kec. Astambul	207.560.000	103.780.000	103.780.000

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Pagu 1 Tahun	Laporan Penggunaan Dana (Kegiatan)	
				Tahap 1	Tahap 2
4	PKBM KARYA BERSAMA	Kec. Astambul	302.150.000	128.575.000	173.575.000
5	PKBM ABNAUL AMIN	Kec. Beruntung Baru	105.090.000	52.545.000	52.545.000
6	PKBM AL-HIDAYAH	Kec. Gambut	168.420.000	84.210.000	84.210.000
7	PKBM ANNISA	Kec. Karang Intan	599.540.000	299.770.000	299.770.000
8	PKBM INSAN SEKUMPUL	Kec. Martapura	25.450.000	12.725.000	12.725.000
9	PKBM BANUA	Kec. Martapura	367.850.000	183.925.000	183.925.000
10	PKBM AL-MUHAJIRIN	Kec. Martapura	372.750.000	186.375.000	186.375.000
11	PKBM BARAKAT	Kec. Martapura	389.350.000	194.675.000	194.675.000
12	PKBM NURHUDA	Kec. Martapura	421.050.000	210.525.000	210.525.000
13	SPNF SKB BANJAR	Kec. Martapura	445.640.000	222.820.000	222.820.000
14	PKBM WANNA	Kec. Martapura	685.950.000	342.975.000	342.975.000
15	PKBM DARUSSALAM	Kec. Martapura	987.330.000	493.665.000	493.665.000
16	PKBM AL-HUSNA	Kec. Martapura Barat	381.050.000	190.525.000	190.525.000
17	PKBM ARSYADIYAH	Kec. Martapura Timur	274.690.000	137.345.000	137.345.000
18	PKBM MANDIRI	Kec. Mataraman	318.470.000	136.735.000	181.735.000
19	PKBM MEKAR JAYA	Kec. Paramasan	132.780.000	66.390.000	66.390.000
20	PKBM HAJJAH MUFLIAH	Kec. Pengaron	67.270.000	33.635.000	33.635.000
21	PKBM BENTENG MUDA	Kec. Pengaron	151.100.000	75.550.000	75.550.000
22	PKBM PELANGI	Kec. Sambung Makmur	105.130.000	52.565.000	52.565.000
23	PKBM AL-FIRDAUS	Kec. Simpang Empat	259.760.000	129.880.000	129.880.000
24	PKBM ANGGREK MERATUS	Kec. Sungai Pinang	790.180.000	372.590.000	417.590.000
25	PKBM SINAR BARU	Kec. Sungai Tabuk	247.720.000	101.360.000	146.360.000
JUMLAH			8.706.500.000	4.263.250.000	4.443.250.000

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pagu anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. 78.739.862.789 dengan realisasi keuangan Rp. 73.506.262.127 (93.35%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Sekolah Dasar dengan target sebesar 100 % dan realisasi 96.20%. Kegiatan ini didukung oleh 18 Sub Kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 1.509.029.880 dengan realisasi keuangan Rp. 1.505.741.000 (99.78%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah : 7 Ruang dari 7 Ruang, dengan target 100% dan realisasi 100%. dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama sekolah	Kecamatan	Ruang
1	SDN PASAR JATI 3	ASTAMBUL	1
2	SD Negeri Bunglai	Aranio	1
3	SD Negeri Gambut 6	Gambut	1
4	SD Negeri Pasar Kamis 1	Kertak Hanyar	1
5	SD Negeri Sungai Batang Ilir 1	Martapura Barat	1
6	SD Negeri Indrasari 1	Martapura	1
7	SD Negeri Cindai Alus 2	Martapura	1

- b) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 511.189.999 dengan realisasi keuangan Rp. 470.421.000 (92.02%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun : 2 Ruang dari 2 Ruang dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kecamatan	Ruang
1	SDN PASAR JATI 3	ASTAMBUL	1
2	SDN SUNGAI KITANO 1	MARTAPURA TIMUR	1

- c) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 920.324.999 dengan realisasi keuangan Rp. 917.332.000 (99.67%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun : 10 Ruang dari 10 Ruang dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kecamatan	Ruang
1	SD NEGERI SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG	1
2	SD NEGERI SUNGAI ALANG 1	KARANG INTAN	1
3	SD NEGERI SUNGAI ASAM	KARANG INTAN	1
4	SD NEGERI SUNGAI KITANO 1	MARTAPURA TIMUR	1
5	SD NEGERI PEMATANG DANAU 1	MATARAMAN	1
6	SD NEGERI PASAR JATI 3	ASTAMBUL	1
7	SD NEGERI GUNUNG BATU	MATARAMAN	1
8	SD NEGERI BAWAHAN SELAN 5	MATARAMAN	1
9	SD NEGERI MANARAP LAMA 1	KERTAK HANYAR	1
10	SD NEGERI LOK CANTUNG	SIMPANG EMPAT	1

- d) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 1.196.433.748 dengan realisasi keuangan Rp. 954.229.000 (59.42%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun : 5 Ruang dari 5 Ruang dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kecamatan	Ruang
1	SD NEGERI SUNGAI KITANO 1	MARTAPURA TIMUR	1
2	SD NEGERI PEKAUMAN 2	MARTAPURA TIMUR	1
3	SD NEGERI GUNUNG BATU	SIMPANG EMPAT	1
4	SD NEGERI MANARAP LAMA 1	KERTAK HANYAR	1
5	SD NEGERI LOK CANTUNG	SIMPANG EMPAT	1

e) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 2.333.373.192 dengan realisasi keuangan Rp. 2.275.843.000 (97.53%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun : 16 Unit dari 16 Unit dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kecamatan	Ruang
1	SD NEGERI GUNUNG BATU	MATARAMAN	1
2	SD NEGERI ASTAMBUL KOTA	ASTAMBUL	1
3	SD NEGERI MANARAP LAMA 1	KERTAK HANYAR	1
4	SD NEGERI LOK CANTUNG	SIMPANG EMPAT	1
5	SD NEGERI KELAMPAIAN ILIR 2	ASTAMBUL	1
6	SD Negeri Sungai Rangas Ulu	Martapura Barat	1
7	SD Negeri Tajau Landung 1	Sungai Tabuk	1
8	SD Negeri Sungai Alang 2	Karang Intan	1
9	SD Negeri Sungai Alat 1	Astambul	1
10	SD Negeri Malintang 2	Gambut	1
11	SD Negeri Batu Balian 3	Simpang Empat	1
12	SD Negeri Madurejo 1	Sambung Makmur	1
13	SD Negeri Sungai Lulut 3	Sungai Tabuk	1
14	SD Negeri Simpang Tiga	Mataraman	1
15	SD Negeri Mataraman 3	Mataraman	1
16	SD Negeri Dalam Pagar Ulu 2	Martapura Timur	1

f) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 16.488.779.594 dengan realisasi keuangan Rp. 15.592.977.544 (94.57%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat : 31 Unit dari 38 Unit dengan target sebesar 100.% dan realisasi 81.57%. dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kecamatan	Ruang
1	SD NEGERI SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG	6
2	SD NEGERI SUNGAI ASAM	KARANG INTAN	6
3	SD NEGERI SUNGAI KITANO 1	MARTAPURA TIMUR	3
4	SD NEGERI PEKAUMAN 2	MARTAPURA TIMUR	6
5	SD NEGERI PEMATANG DANAU 1	MATARAMAN	5
6	SD NEGERI PASAR JATI 3	ASTAMBUL	4
7	SD NEGERI GUNUNG BATU	MATARAMAN	5
8	SD NEGERI ASTAMBUL KOTA	ASTAMBUL	6
9	SD NEGERI ANTASAN SENOR	MARTAPURA TIMUR	5
10	SD NEGERI BAWAHAN SELAN 5	MATARAMAN	6
11	SD NEGERI MANARAP LAMA 1	KERTAK HANYAR	6
12	SD NEGERI LOK CANTUNG	MATARAMAN	3
13	SD NEGERI KELAMPAIAN ILIR 2	ASTAMBUL	6
14	SD Negeri Sungai Arpat 1	Karang Intan	1
15	SD Negeri Jingah Habang Ulu	Karang Intan	1
16	SD Negeri Karang Intan 1	Karang Intan	1
17	SD Negeri Remo	Paramasan	1
18	SD Negeri Sungai Pinang Baru 2	Sungai Tabuk	1
19	SD Negeri Tajau Landung 2	Sungai Tabuk	1
20	SD Negeri Keramat	Martapura Timur	1
21	SD Negeri Gambut 9	Gambut	1
22	SD Negeri Sungai Lulut 3	Kertak Hanyar	1
23	SD Negeri Indrasari 1	Martapura	1
24	SD Negeri Bunipah 2	Aluh aluh	1
25	SD Negeri Handil Bujur 2	Aluh aluh	1
26	SD Negeri Aluh aluh Kecil 1	Aluh aluh	1

No	Nama sekolah	Kecamatan	Ruang
27	SD Negeri Bunipah 2	Aluh aluh	1
28	SD Negeri Lubang Baru 1	Pengaron	2
29	SD Negeri Tatah Pemangkih Darat	Tatah Makmur	1
30	SD Negeri Mali mali	Karang Intan	1
31	SD Negeri Tanah Habang	Mataraman	1

g) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 1.634.961.399 dengan realisasi keuangan Rp. 1.631.321.000 (99.78%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : 10 Ruang dari 10 Ruang dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kecamatan	Ruang
1	SD NEGERI SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG	1
2	SD NEGERI PEKAUMAN 2	MARTAPURA TIMUR	1
3	SD NEGERI PEMATANG DANAU 1	MARTAPURA TIMUR	1
4	SD NEGERI ASTAMBUL KOTA	ASTAMBUL	1
5	SD NEGERI ANTASAN SENOR	MARTAPURA TIMUR	1
6	SD NEGERI BAWAHAN SELAN 5	MATARAMAN	1
7	SD NEGERI KELAMPAIAN ILIR 2	ASTAMBUL	1
8	SD Negeri Gambut 4	Gambut	1
9	SD Negeri Handil Bujur 2	Aluh aluh	1
10	SD Negeri Tatah Layap 3	Tatah Makmur	1

h) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 926.748.781 dengan realisasi keuangan Rp. 910.231.900 (98.22%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : 6 Ruang dari 6 Ruang dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kecamatan	Ruang
1	SD NEGERI PEMATANG DANAU 1	MATARAMAN	1
2	SD NEGERI PASAR JATI 3	ASTAMBUL	1
3	SD NEGERI BAWAHAN SELAN 5	ASTAMBUL	1
4	SD NEGERI KELAMPAIAN ILIR 2	ASTAMBUL	1
5	SD Negeri Sungai Asam	Karang Intan	1
6	SD Negeri Pemakuan	Sungai Tabuk	1

i) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 988.227.644 dengan realisasi keuangan Rp. 983.782.000 (99.55%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : 10 Unit dari 10 Unit dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama sekolah	Kecamatan	Ruang
1	SD NEGERI PEKAUMAN 2	MARTAPURA TIMUR	1
2	SD NEGERI PEMATANG DANAU 1	MATARAMAN	1
3	SD NEGERI PASAR JATI 3	ASTAMBUL	1
4	SD NEGERI ANTASAN SENOR	MARTAPURA TIMUR	1
5	SD NEGERI BAWAHAN SELAN 5	MATARAMAN	1
6	SD Negeri Jambu Burung	Beruntung Baru	1
7	SD Negeri Manarap Lama 2	Kertak Hanyar	1
8	SD Negeri Selat Makmur	Beruntung Baru	1
9	SD Negeri Dalam Pagar	Martapura Timur	1
10	SD Negeri Tambak Anyar Ulu 1	Martapura Timur	1

j) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 302.530.000 dengan realisasi keuangan Rp. 302.530.000 (100%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia : 2 Paket dari 2 Paket dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SDN Sungai Kitano1	9	Unit (Kursi)
2	SDN Sungai Kitano 1	9	Unit (Meja)
3	SDN Sungai Jati 3	9	Unit (Kursi)
4	SDN Sungai jati 3	9	Unit (Meja)
5	SDN Sungai Alang 1	9	Unit (Kursi)
6	SDN Sungai Alang 1	9	Unit (Meja)
7	SDN Sungai Arpat 2	9	Unit (Kursi)
8	SDN Sungai Arpat 2	9	Unit (Meja)
9	SDN Jawa 5	9	Unit (Kursi)
10	SDN Jawa 5	9	Unit (Meja)

k) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 1.952.930.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.220.100.000 (62.48%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia : 14 Paket dari 14 Paket dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kecamatan	Paket
1	SD NEGERI SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG	1
2	SD NEGERI SUNGAI ALANG 1	KARANG INTAN	1
3	SD NEGERI SUNGAI ASAM	KARANG INTAN	1
4	SD NEGERI SUNGAI KITANO 1	MARTAPURA TIMUR	1
5	SD NEGERI PEKAUMAN 1	MARTAPURA TIMUR	1
6	SD NEGERI PEKAUMAN 2	MARTAPURA TIMUR	1
7	SD NEGERI PEMATANG DANAU 1	MATARAMAN	1
8	SD NEGERI PASAR JATI 3	ASTAMBUL	1
9	SD NEGERI GUNUNG BATU	MATARAMAN	1
10	SD NEGERI GARIS HANYAR	SIMPANG EMPAT	1
11	SD NEGERI ASTAMBUL KOTA	ASTAMBUL	1
12	SD NEGERI ANTASAN SENOR	MARTAPURA TIMUR	1
13	SD NEGERI MANARAP LAMA 1	KERTAK HANYAR	1
14	SD NEGERI KELAMPAIAN ILIR 2	ASTAMBUL	1

l) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 852.281.800 dengan realisasi keuangan Rp. 684.744.800 (80.34%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah:

372 Satuan Pendidikan dari 372 Satuan Pendidikan dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (pemberian Insentif) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor yang bertugas memberikan pelayanan pembelajaran untuk anak kebutuhan khusus. Dicairkan di bulan juni dan desember 2023 sebanyak 150 orang.
- Kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran di daerah cukup sulit, sulit dan sangat sulit (pemberian Insentif) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor yang bertugas di daerah cukup sulit, sulit dan sangat sulit. Dicairkan di bulan juni dan desember 2023 sebanyak 150 orang.

m) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 2.860.216.757 dengan realisasi keuangan Rp. 2.858.186.757 (99.93%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun : 12 Ruang dari 12 Ruang dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kecamatan	Paket
1	SD NEGERI SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG	1
2	SD NEGERI SUNGAI ALANG 1	KARANG INTAN	1
3	SD NEGERI SUNGAI ASAM	KARANG INTAN	1
4	SD NEGERI SUNGAI KITANO 1	MARTAPURA TIMUR	1
5	SD NEGERI PEKAUMAN 2	MARTAPURA TIMUR	1
6	SD NEGERI PEMATANG DANAU 1	MATARAMAN	1
7	SD NEGERI PASAR JATI 3	ASTAMBUL	1
8	SD NEGERI ASTAMBUL KOTA	ASTAMBUL	1
9	SD NEGERI BAWAHAN SELAN 5	MATARAMAN	1
10	SD NEGERI MANARAP LAMA 1	KERTAK HANYAR	1
11	SD NEGERI LOK CANTUNG	SIMPANG EMPAT	1
12	SD NEGERI KELAMPAIAN ILIR 2	ASTAMBUL	1

n) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 812.390.600 dengan realisasi keuangan Rp. 719.225.600 (88.53%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian : 372 Satuan Pendidikan dari 372 Satuan Pendidikan dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1.	SDN Sungai Pinang (Kec. Sungai Tabuk)	Sungai Tabuk
2.	SDN Gudang Hirang 4	Sungai Tabuk
3.	SDN Sungai Tabuk Keramat 2	Sungai Tabuk
4.	SDN Sumber Baru 2	Sungai Pinang
5.	SDN Sumber Harapan 1	Sungai Pinang
6.	SDN Sumber Harapan 2	Sungai Pinang
7.	SDN Sungai Alang 1	Karang Intan
8.	SDN Sungai Alang 2	Karang Intan
9.	SDN Sungai Alat 1	Astambul
10.	SDN Sungai Alat 2	Astambul
11.	SDN Sungai Arpat 1	Karang Intan
12.	SDN Sungai Arpat 2	Karang Intan
13.	SDN Sungai Asam	Karang Intan
14.	SDN Sungai Bakung	Sungai Tabuk
15.	SDN Sumber Baru 1	Sungai Pinang
16.	SDN Sungai Pulantan	Aluh – Aluh
17.	SDN Simpang Warga 2	Aluh – Aluh
18.	SDN Sungai Tabuk Keramat 3	Sungai Tabuk
19.	SDN Sungai Tabuk Kota 1	Sungai Tabuk
20.	SDN Simpang Empat 1	Simpang Empat
21.	SDN Simpang Empat 2	Simpang Empat
22.	SDN Simpang Empat 3	Simpang Empat
23.	SDN Simpang Empat 4	Simpang Empat
24.	SDN Simpang Empat	Kertak Hanyar
25.	SDN Simpang Lima	Cintapuri Darussalam
26.	SDN Simpang Tiga	Mataraman
27.	SDN Simpang Warga 1	Aluh – Aluh
28.	SDN Sungai Bangkal	Sungai Tabuk
29.	SDN Sungai Batang 1	Martapura Barat
30.	SDN Sungai Lurus	Sambung Makmur
31.	SDN Sungai Musang	Aluh – Aluh
32.	SDN Sungai Paring 2	Martapura
33.	SDN Sungai Pinang Baru 1	Sungai Tabuk
34.	SDN Sungai Pinang Baru 2	Sungai Tabuk
35.	SDN Sungai Pinang (Kec. Sungai Pinang)	Sungai Pinang
36.	SDN Sungai Rangas	Martapura Barat
37.	SDN Sungai Rangas Ulu	Martapura Barat
38.	SDN Sungai Raya 1	Simpang Empat
39.	SDN Sungai Raya 2	Simpang Empat
40.	SDN Sungai Lulut 2	Sungai Tabuk
41.	SDN Sungai Lulut 1	Sungai Tabuk
42.	SDN Sungai Langsung	Simpang Empat
43.	SDN Sungai Batang 2	Martapura Barat

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
44.	SDN Sungai Batang Banyu	Sambung Makmur
45.	SDN Sungai Batang Ilir 1	Martapura Barat
46.	SDN Sungai Batang Ilir 2	Martapura Barat
47.	SDN Sungai Jati	Mataraman
48.	SDN Sungai Kitano 1	Martapura Timur
49.	SDN Sungai Kitano 2	Martapura Timur
50.	SDN Kupang	Simpang Empat
51.	SDN Sungai Lakum 1	Kertak Hanyar
52.	SDN Sungai Lakum 2	Kertak Hanyar
53.	SDN Sungai Landas	Karang Intan
54.	SDN Sungai Tabuk Kota 2 (SDN Abumbun Jaya)	Sungai Tabuk
55.	SDN Panyiuran	Pengaron
56.	SDN Pejambuan 2	Sungai Tabuk
57.	SDN Pekauman 1	Martapura Timur
58.	SDN Pekauman 2	Martapura Timur
59.	SDN Pemakuan	Sungai Tabuk
60.	SDN Pematang Baru	Martapura Timur
61.	SDN Pematang Danau 1	Mataraman
62.	SDN Pematang Panjang	Sungai Tabuk
63.	SDN Pembantanan 1	Sungai Tabuk
64.	SDN Pembantanan 2	Sungai Tabuk
65.	SDN Pejambuan 1	Sungai Tabuk
66.	SDN Pasayangan Selatan	Martapura
67.	SDN Paring Tali	Simpang Empat
68.	SDN Pasar Jati 1	Astambul
69.	SDN Pasar Jati 2	Astambul
70.	SDN Pasar Jati 3	Astambul
71.	SDN Pasar Kamis 1	Kertak Hanyar
72.	SDN Pasar Kamis 2	Kertak Hanyar
73.	SDN Pasayangan 1	Martapura
74.	SDN Pasayangan 2	Martapura
75.	SDN Pasayangan 3	Martapura
76.	SDN Pemurus 1	Aluh – Aluh
77.	SDN Pemurus 2	Aluh – Aluh
78.	SDN Rampah	Telaga Bauntung
79.	SDN Rantau Nangka	Sungai Pinang
80.	SDN Rantau Bakula	Sungai Pinang
81.	SDN Rantau Bujur (Aranio)	Aranio
82.	SDN Rantau Bujur	Telaga Bauntung
83.	SDN Remo	Paramasan
84.	SDN Salat Makmur	Beruntung Baru
85.	SDN Sungai Paring 1	Martapura
86.	SDN Sungai Rangas Hambuku	Martapura Barat

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
87.	SDN Pulau Nyiur 1	Karang Intan
88.	SDN Podok 2	Aluh – Aluh
89.	SDN Podok 1	Aluh – Aluh
90.	SDN Pengaron 2	Pengaron
91.	SDN Pengaron 3	Pengaron
92.	SDN Penggalaman 1	Martapura Barat
93.	SDN Penggalaman 2	Martapura Barat
94.	SDN Penyambaran 1	Karang Intan
95.	SDN Penyambaran 2	Karang Intan
96.	SDN Paramasan Atas	Paramasan
97.	SDN Pingaran 1	Astambul
98.	SDN Pingaran 2	Astambul
99.	SDN Pingaran Ulu	Astambul
100.	SDN Sungai Tabuk Keramat 1	Sungai Tabuk
101.	SDN Sungai Tandipah	Sungai Tabuk
102.	SDN Tambak Baru Ilir	Martapura
103.	SDN Tambak Baru Ulu	Martapura
104.	SDN Tambak Danau	Astambul
105.	SDN Tambak Padi 1	Beruntung Baru
106.	SDN Tambak Padi 2	Beruntung Baru
107.	SDN Tambak Raya	Martapura Timur
108.	SDN Tambak Sirang Baru	Gambut
109.	SDN Tampang Awang	Tatah Makmur
110.	SDN Tanah Habang	Mataraman
111.	SDN Tanah Intan	Simpang Empat
112.	SDN Tambak Anyar Ulu	Martapura Timur
113.	SDN Tambak Anyar	Martapura Timur
114.	SDN Tambak Sirang Darat	Gambut
115.	SDN Sungai Tuan	Astambul
116.	SDN Sungai Uyak	Sambung Makmur
117.	SDN Sungkai 1	Simpang Empat
118.	SDN Sungkai 2	Simpang Empat
119.	SDN Sungkai Baru	Simpang Empat
120.	SDN Surian (Mataraman)	Mataraman
121.	SDN Surian	Cintapuri Darussalam
122.	SDN Tatah Bangkal	Tatah Makmur
123.	SDN Tajau Landung 1	Sungai Tabuk
124.	SDN Tajau Landung 2	Sungai Tabuk
125.	SDN Takuti	Mataraman
126.	SDN Tatah Layap Baru	Tatah Makmur
127.	SDN Telaga Baru	Telaga Bauntung
128.	SDN Teluk Selong	Martapura Barat
129.	SDN Terapu	Aluh – Aluh

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
130.	SDN Tiwingan Baru	Aranio
131.	SDN Tiwingan	Aranio
132.	SDN Tunggul Irang Ulu	Martapura
133.	SDN Tungkaran	Martapura
134.	SDN Tatah Pemangkih Tengah	Tatah Makmur
135.	SDN Tatah Pemangkih Laut 2	Kertak Hanyar
136.	SDN Tatah Pemangkih Laut 1	Kertak Hanyar
137.	SDN Tanipah	Aluh – Aluh
138.	SDN Tanjung Rema	Martapura
139.	SDN Tanjung Rema Darat	Martapura
140.	SDN Tatah Belayung Baru	Kertak Hanyar
141.	SDN Tatah Jaruju	Tatah Makmur
142.	SDN Tatah Layap 1	Tatah Makmur
143.	SDN Tatah Layap 2	Tatah Makmur
144.	SDN Tatah Layap 3	Tatah Makmur
145.	SDN Tatah Pamangkih Baru	Tatah Makmur
146.	SDN Tatah Pamangkih Darat	Tatah Makmur
147.	SDN Pakutik	Sungai Pinang
148.	SDN Bunipah 3	Aluh – Aluh
149.	SDN Desa Lima	Mataraman
150.	SDN Galam Rabah 1	Cintapuri Darussalam
151.	SDN Galam Rabah 2	Cintapuri Darussalam
152.	SDN Galam Rabah 3	Cintapuri Darussalam
153.	SDN Galam Rabah 4	Cintapuri Darussalam
154.	SDN Gambut 1	Gambut
155.	SDN Gambut 10	Gambut
156.	SDN Gambut 11	Gambut
157.	SDN Gambut 2	Gambut
158.	SDN Gambut 3	Gambut
159.	SDN Desa Baru 2	Mataraman
160.	SDN Desa Baru 1	Mataraman
161.	SDN Cabi	Simpang Empat
162.	SDN Cindai Alus 1	Martapura
163.	SDN Cintapuri 1	Cintapuri Darussalam
164.	SDN Cintapuri 2	Cintapuri Darussalam
165.	SDN Dalam Pagar	Martapura Timur
166.	SDN Dalam Pagar Ulu 1	Martapura Timur
167.	SDN Dalam Pagar Ulu 2	Martapura Timur
168.	SDN Danau Salak 1	Astambul
169.	SDN Danau Salak 2	Astambul
170.	SDN Gambut 4	Gambut
171.	SDN Gambut 5	Gambut
172.	SDN Gunung Batu	Sambung Makmur

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
173.	SDN Gunung Ulin	Mataraman
174.	SDN Hakim	Sungai Pinang
175.	SDN Handil Bujur 1	Aluh – Aluh
176.	SDN Handil Bujur 2	Aluh – Aluh
177.	SDN Handil Purai 1	Beruntung Baru
178.	SDN Handil Purai 2	Beruntung Baru
179.	SDN Haur Kuning	Beruntung Baru
180.	SDN Indrasari 1	Martapura
181.	SDN Jambu Burung	Beruntung Baru
182.	SDN Guntung Ujung 2	Gambut
183.	SDN Guntung Ujung 1	Gambut
184.	SDN Guntung Papuyu	Gambut
185.	SDN Gambut 6	Gambut
186.	SDN Gambut 7	Gambut
187.	SDN Gambut 8	Gambut
188.	SDN Gambut 9	Gambut
189.	SDN Garis	Cintapuri Darussalam
190.	SDN Garis Hanyar	Cintapuri Darussalam
191.	SDN Gudang Hiram 1	Sungai Tabuk
192.	SDN Gudang Hiram 2	Sungai Tabuk
193.	SDN Gudang Hiram 3	Sungai Tabuk
194.	SDN Gudang Tengah	Sungai Tabuk
195.	SDN Jati 1	Astambul
196.	SDN Aranio 2	Aranio
197.	SDN Astambul Kota	Astambul
198.	SDN Astambul Seberang	Astambul
199.	SDN Atayau	Astambul
200.	SDN Ati'im	Pengaron
201.	SDN Awang Bangkal Barat	Karang Intan
202.	SDN Awang Bangkal Timur	Karang Intan
203.	SDN Bakambat	Aluh – Aluh
204.	SDN Balau	Karang Intan
205.	SDN Banyu Hiram	Gambut
206.	SDN Batu Balian 1	Simpang Empat
207.	SDN Aranio 1	Aranio
208.	SDN Antasan Senor	Martapura Timur
209.	SDN Antaraku	Pengaron
210.	SDN Abirau	Karang Intan
211.	SDN Akar Bagantung	Martapura Timur
212.	SDN Alalak Padang	Cintapuri Darussalam
213.	SDN Alimukim	Pengaron
214.	SDN Aluh-Aluh Besar 1	Aluh – Aluh
215.	SDN Aluh-Aluh Besar 2	Aluh – Aluh

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
216.	SDN Aluh-Aluh Besar 3	Aluh – Aluh
217.	SDN Aluh-Aluh Kecil 1	Aluh – Aluh
218.	SDN Aluh-Aluh Kecil 2	Aluh – Aluh
219.	SDN Aluh-Aluh Kecil Muara	Aluh – Aluh
220.	SDN Angkipih	Paramasan
221.	SDN Batu Balian 2	Simpang Empat
222.	SDN Batu Balian 3	Simpang Empat
223.	SDN Benua Anyar Danau Salak 1	Astambul
224.	SDN Benua Anyar Danau Salak 2	Astambul
225.	SDN Benua Anyar Sungai Tuan	Astambul
226.	SDN Benua Riam	Aranio
227.	SDN Bi'ih	Karang Intan
228.	SDN Bincau 1	Martapura
229.	SDN Bincau 2	Martapura
230.	SDN Bincau Muara	Martapura
231.	SDN Bumi Rata	Simpang Empat
232.	SDN Bunglai	Aranio
233.	SDN Bunipah 1	Aluh – Aluh
234.	SDN Benua Anyar	Cintapuri Darussalam
235.	SDN Benteng Seberang	Pengaron
236.	SDN Bawahan Pasar	Mataraman
237.	SDN Bawahan Selan 1	Mataraman
238.	SDN Bawahan Selan 2	Mataraman
239.	SDN Bawahan Selan 3	Mataraman
240.	SDN Bawahan Selan 4	Mataraman
241.	SDN Bawahan Selan 5	Mataraman
242.	SDN Bawahan Selan 6	Mataraman
243.	SDN Belangian	Aranio
244.	SDN Belimbing Baru	Sungai Pinang
245.	SDN Belimbing Lama 1	Sungai Pinang
246.	SDN Bunipah 2	Aluh – Aluh
247.	SDN Lawahan	Beruntung Baru
248.	SDN Makmur	Gambut
249.	SDN Mali-Mali	Karang Intan
250.	SDN Malintang 1	Gambut
251.	SDN Malintang 2	Gambut
252.	SDN Manarap Baru	Kertak Hanyar
253.	SDN Manarap Lama 1	Kertak Hanyar
254.	SDN Manarap Lama 2	Kertak Hanyar
255.	SDN Manarap Tengah 1	Kertak Hanyar
256.	SDN Manarap Tengah 2	Kertak Hanyar
257.	SDN Mandikapau Barat 1	Karang Intan
258.	SDN Mandikapau Barat 2	Karang Intan

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
259.	SDN Madurejo 1	Sambung Makmur
260.	SDN Madurejo 2	Sambung Makmur
261.	SDN Lawiran	Simpang Empat
262.	SDN Limamar	Astambul
263.	SDN Lok Baintan	Sungai Tabuk
264.	SDN Lok Baintan Dalam	Sungai Tabuk
265.	SDN Lok Buntar	Sungai Tabuk
266.	SDN Lok Gabang	Astambul
267.	SDN Lok Cantung	Simpang Empat
268.	SDN Lok Tanah 1	Telaga Bauntung
269.	SDN Loktangga	Karang Intan
270.	SDN Lok Tunggul	Pengaron
271.	SDN Mandiangin Timur 1	Karang Intan
272.	SDN Mandiangin Timur 2	Karang Intan
273.	SDN Melayu	Martapura Timur
274.	SDN Melayu Tengah	Martapura Timur
275.	SDN Muara Halayung	Beruntung Baru
276.	SDN Munggu Raya	Astambul
277.	SDN Murung Kenanga	Martapura
278.	SDN Padang Panjang	Karang Intan
279.	SDN Paku	Simpang Empat
280.	SDN Mekar Sari	Tatah Makmur
281.	SDN Mekar Raya	Kertak Hanyar
282.	SDN Mandikapau Timur	Karang Intan
283.	SDN Mangkauk 1	Pengaron
284.	SDN Mangkauk 2	Pengaron
285.	SDN Mangkauk 3	Pengaron
286.	SDN Maniapun	Pengaron
287.	SDN Mataraman 1	Mataraman
288.	SDN Mataraman 2	Mataraman
289.	SDN Mataraman 3	Mataraman
290.	SDN Mekar	Martapura Timur
291.	SDN Paku Alam	Sungai Tabuk
292.	SDN Jati 2	Astambul
293.	SDN Kaliukan 1	Astambul
294.	SDN Kaliukan 2	Astambul
295.	SDN Kampung Baru	Beruntung Baru
296.	SDN Karang Intan 1	Karang Intan
297.	SDN Karang Intan 2	Karang Intan
298.	SDN Kayu Bawang 1	Gambut
299.	SDN Kayu Bawang 2	Gambut
300.	SDN Keladan Baru	Gambut
301.	SDN Kelampaian	Astambul

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
302.	SDN Kelampaian Ilir 1	Astambul
303.	SDN Kelampaian Ilir 2	Astambul
304.	SDN Kalaan Baru	Aranio
305.	SDN Kahelaan 2	Sungai Pinang
306.	SDN Kahelaan 1	Sungai Pinang
307.	SDN Jawa 1	Martapura
308.	SDN Jawa 2	Martapura
309.	SDN Sekumpul 1	Martapura
310.	SDN Jawa 5	Martapura
311.	SDN Jawa Laut 1	Martapura
312.	SDN Jawa Laut 2	Martapura
313.	SDN Jingah Habang Hilir	Karang Intan
314.	SDN Jingah Habang Hulu	Karang Intan
315.	SDN Kelampaian Ulu	Astambul
316.	SDN Labat Muara	Aluh - Aluh
317.	SDN Kertak Empat	Pengaron
318.	SDN Kertak Hanyar 1-1	Kertak Hanyar
319.	SDN Kertak Hanyar 1-2	Kertak Hanyar
320.	SDN Kertak Hanyar 1-3	Kertak Hanyar
321.	SDN Kiram	Karang Intan
322.	SDN Kuin Besar 1	Aluh - Aluh
323.	SDN Kuin Besar 2	Aluh - Aluh
324.	SDN Kuin Kecil	Aluh - Aluh
325.	SDN Sungai Kupang	Gambut
326.	SDN Kupang Rejo	Sungai Pinang
327.	SDN Keraton 5	Martapura
328.	SDN Keliling Benteng Tengah	Martapura Barat
329.	SDN Keliling Benteng Ulu 1	Martapura Barat
330.	SDN Keliling Benteng Ulu 2	Martapura Barat
331.	SDN Keliling Benteng Ilir	Sungai Tabuk
332.	SDN Keramat	Martapura Timur
333.	SDN Keramat Mina	Cintapuri Darussalam
334.	SDN Keraton 1	Martapura
335.	SDN Keraton 4	Martapura
336.	SDN Keraton 3	Martapura
337.	SDN Keraton 2	Martapura
338.	SDN Baliangin	Sambung Makmur
339.	SDN Cindai Alus 2	Martapura
340.	SDN Indrasari 2	Martapura
341.	SDN Pulau Nyiur 2	Karang Intan
342.	SD Kecil Kiram	Karang Intan
343.	SDN Belimbing Lama 2	Sungai Pinang
344.	SDN Belimbing Lama 3	Sungai Pinang

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
345.	SDN Kahelaan 3	Sungai Pinang
346.	SDN Paramasan Bawah 2	Paramasan
347.	SDN Paramasan Bawah 3	Paramasan
348.	SDN Paramasan Bawah 4	Paramasan
349.	SD Kecil Paramasan Atas	Paramasan
350.	SD Kecil Remo	Paramasan
351.	SDN Lubang Baru 1	Pengaron
352.	SDN Lubang Baru 2	Pengaron
353.	SDN Lok Tanah 2	Telaga Bauntung
354.	SDN Cintapuri 3	Cintapuri Darussalam
355.	SDN Paramasan Bawah 1	Paramasan
356.	SDN Pematang Danau 2	Mataraman
357.	SDN Artain	Aranio
358.	SDN Paau	Aranio
359.	SDN Simpang Tiga 2	Mataraman
360.	SDN Sekumpul 2	Martapura
361.	SDIT USHULUDDIN	MARTAPURA TIMUR
362.	SD ISLAM SEKUMPUL	MARTAPURA
363.	SD ISLAM ARRIYADH	SAMBUNG MAKMUR
364.	SD ISLAMIC BILINGUAL SCIENCE	MARTAPURA
365.	SD ISLAM MIFTAKHUSSIBYAN	PENGARON
366.	SD ALAM MUHAMMADIYAH INDRASARI MARTAPURA	MARTAPURA
367.	SD ISLAM HIDAYATULLAH TAMAN HUDAYA	MARTAPURA
368.	SDIT SULLAMUL ULUM	GAMBUT
369.	SDITQ BAKKAH	MARTAPURA
370.	SD MUHAMMADIYAH MARTAPURA	MARTAPURA
371.	SDTQ-T AN-NAJAH	MARTAPURA
372.	SD MITRA KASIH	KERTAK HANYAR

- o) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 546.244.300 dengan realisasi keuangan Rp. 543.190.000 (99.44%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik : 581 Peserta Didik dari 990 Peserta Didik dengan target sebesar 100.% dan realisasi 58.68%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Kegiatan ini bertujuan menyediakan wahana bagi peserta didik SD untuk mengembangkan talenta di bidang matematika dan IPA sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil dan memecahkan masalah. Waktu pelaksanaan 8-9 Mei 2023

(tingkat Kabupaten), 19-20 Juni 2023 (Tingkat Provinsi, 27 Agustus – 2 September 2023 (tingkat Nasional) dengan lomba yang diselenggarakan.

- Lomba Bidang IPA : 52 orang
- Lomba Matematika : 55 orang

2) Lomba Membaca Menulis, Berhitung (Calistung)

Kegiatan ini bertujuan mendorong kemandirian yang lebih baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari memudahkan anak untuk lebih menyukai kegiatan dan proses pembelajaran yang dihadapi dan meningkatkan fokus perhatian dan motivasi untuk berprestasi dalam pembelajaran sehari-hari.. Waktu pelaksanaan 9 Mei 2023 dengan jumlah peserta 97 orang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

3) Karakter Islami

Kegiatan ini bertujuan agar siswa memiliki karakter yang religius, jujur, toleransi, disiplin kerja keras dan kreatif, memberikan motivasi kepada siswa untuk menerapkan karakter islami dalam kehidupan sehari-hari. Waktu pelaksanaan 11 Mei 2023 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan lomba yang diselenggarakan.

- Lomba Syarhil Qur'an : 69 orang
- Lomba Tausyiah : 17 orang
- Lomba Hapalan surat : 20 orang
- Lomba Praktek sholat : 21 orang
- Lomba Kaligrafi : 18 orang

4) Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar (OSN SD)

Kegiatan ini bertujuan memberikan wadah berkreasi dengan menampilkan karya kreatif dan inovatif peserta didik dan mengembangkan ekspresi seni sesuai dengan norma budi pekerti dan karakter peserta didik yang berbasis budaya bangsa. Waktu pelaksanaan selama 24 Mei 2023 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan lomba yang diselenggarakan.

- Lomba Kriya : 14 orang
- Lomba Gambar Bercerita : 15 orang
- Lomba menyanyi : 13 orang
- Lomba menari : 17 orang
- Lomba pantomim : 13 orang

5) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi untuk berkreasi dengan menampilkan potensi yang dimiliki peserta didik dan menumbuhkan kembangkan bakat dan minat peserta didik berbasis penguatan karakter. Waktu pelaksanaan selama 8 juni 2023 dengan lomba yang diselenggarakan

- Lomba atletik : 52 orang (Lapangan Mini Barakat)
- Lomba Senam : 23 orang (SDN Keraton 1)
- Lomba Karate : 23 orang (Dojo Martapura)
- Lomba Pencak silat: 17 orang (Dojo Martapura)
- Lomba Bulutangkis : 38 orang (Gedung Bulutangkis Abadi)
- Lomba Renang : 7 orang (Kolam Renang Antasari)

p) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 2.303.759.400 dengan realisasi keuangan Rp. 1.426.069.400 (61.90%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi : 580 Orang dari 629 Orang dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Bimbingan Teknis Implementasi Program Guru penggerak SD

Tujuan Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru dan menyiapkan guru untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Waktu pelaksanaan 13-17 maret 2023 dengan jumlah peserta 40 orang dan dilaksanakan di Aston Banua Hotel.

2) Diklat Pendampingan pedagogik, profesional dan kompetensi bagi calon PPG SD

Tujuan Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru dan memenuhi kompetensi pedagogik, profesional dan kompetensi bagi calon PPG SD. Waktu pelaksanaan 23 juli 2023, 7-10 agustus 2023 dan 21-24 agustus 2023 dengan jumlah peserta 200 orang dan dilaksanakan di Aston Banua Hotel.

3) Pelatihan Jurnalistik bagi guru

Tujuan Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan guru pada satuan pendidikan dasar. Waktu pelaksanaan 29-31 mei 2023 dengan jumlah peserta 120 orang dan dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

4) Pembiayaan pendidikan Profesi Guru PAI SD

Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru dan memenuhi kompetensi pedagogik kepribadian, sosial dan profesional guru PAI. Waktu pelaksanaan 14 agustus 2023 dengan jumlah peserta 119 orang yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Banjarmasin UIN Antasari Banjarmasin.

5) Kegiatan IHT Penanganan anak kebutuhan khusus untuk guru pembimbing khusus SD

Tujuan Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru honor yang bertugas memeberikan pelayanan pembelajaran anak kebutuhan khusus. Waktu pelaksanaan 11 desember 2023 dengan jumlah peserta 150 orang dan dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

q) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 41.413.722.896 dengan realisasi keuangan Rp. 39.794.727.326 (96.09%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS : 372 Satuan Pendidikan dari 372 Satuan Pendidikan dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	SDN Sungai Pinang (Kec. Sungai Tabuk)	Sungai Tabuk
2	SDN Gudang Hirang 4	Sungai Tabuk
3	SDN Sungai Tabuk Keramat 2	Sungai Tabuk
4	SDN Sumber Baru 2	Sungai Pinang
5	SDN Sumber Harapan 1	Sungai Pinang
6	SDN Sumber Harapan 2	Sungai Pinang
7	SDN Sungai Alang 1	Karang Intan
8	SDN Sungai Alang 2	Karang Intan
9	SDN Sungai Alat 1	Astambul
10	SDN Sungai Alat 2	Astambul
11	SDN Sungai Arpat 1	Karang Intan
12	SDN Sungai Arpat 2	Karang Intan
13	SDN Sungai Asam	Karang Intan
14	SDN Sungai Bakung	Sungai Tabuk
15	SDN Sumber Baru 1	Sungai Pinang

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
16	SDN Sungai Pulantan	Aluh - Aluh
17	SDN Simpang Warga 2	Aluh - Aluh
18	SDN Sungai Tabuk Keramat 3	Sungai Tabuk
19	SDN Sungai Tabuk Kota 1	Sungai Tabuk
20	SDN Simpang Empat 1	Simpang Empat
21	SDN Simpang Empat 2	Simpang Empat
22	SDN Simpang Empat 3	Simpang Empat
23	SDN Simpang Empat 4	Simpang Empat
24	SDN Simpang Empat	Kertak Hanyar
25	SDN Simpang Lima	Cintapuri Darussalam
26	SDN Simpang Tiga	Mataraman
27	SDN Simpang Warga 1	Aluh - Aluh
28	SDN Sungai Bangkal	Sungai Tabuk
29	SDN Sungai Batang 1	Martapura Barat
30	SDN Sungai Lurus	Sambung Makmur
31	SDN Sungai Musang	Aluh - Aluh
32	SDN Sungai Paring 2	Martapura
33	SDN Sungai Pinang Baru 1	Sungai Tabuk
34	SDN Sungai Pinang Baru 2	Sungai Tabuk
35	SDN Sungai Pinang (Kec. Sungai Pinang)	Sungai Pinang
36	SDN Sungai Rangas	Martapura Barat
37	SDN Sungai Rangas Ulu	Martapura Barat
38	SDN Sungai Raya 1	Simpang Empat
39	SDN Sungai Raya 2	Simpang Empat
40	SDN Sungai Lulut 2	Sungai Tabuk
41	SDN Sungai Lulut 1	Sungai Tabuk
42	SDN Sungai Langsung	Simpang Empat
43	SDN Sungai Batang 2	Martapura Barat
44	SDN Sungai Batang Banyu	Sambung Makmur
45	SDN Sungai Batang Ilir 1	Martapura Barat
46	SDN Sungai Batang Ilir 2	Martapura Barat
47	SDN Sungai Jati	Mataraman
48	SDN Sungai Kitano 1	Martapura Timur
49	SDN Sungai Kitano 2	Martapura Timur
50	SDN Kupang	Simpang Empat
51	SDN Sungai Lakum 1	Kertak Hanyar
52	SDN Sungai Lakum 2	Kertak Hanyar
53	SDN Sungai Landas	Karang Intan
54	SDN Sungai Tabuk Kota 2 (SDN Abumbun Jaya)	Sungai Tabuk
55	SDN Panyiuran	Pengaron
56	SDN Pejambuan 2	Sungai Tabuk
57	SDN Pekauman 1	Martapura Timur
58	SDN Pekauman 2	Martapura Timur
59	SDN Pemakuan	Sungai Tabuk
60	SDN Pematang Baru	Martapura Timur
61	SDN Pematang Danau 1	Mataraman
62	SDN Pematang Panjang	Sungai Tabuk
63	SDN Pembantanan 1	Sungai Tabuk
64	SDN Pembantanan 2	Sungai Tabuk
65	SDN Pejambuan 1	Sungai Tabuk
66	SDN Pasayangan Selatan	Martapura
67	SDN Paring Tali	Simpang Empat
68	SDN Pasar Jati 1	Astambul
69	SDN Pasar Jati 2	Astambul

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
70	SDN Pasar Jati 3	Astambul
71	SDN Pasar Kamis 1	Kertak Hanyar
72	SDN Pasar Kamis 2	Kertak Hanyar
73	SDN Pasayangan 1	Martapura
74	SDN Pasayangan 2	Martapura
75	SDN Pasayangan 3	Martapura
76	SDN Pemurus 1	Aluh - Aluh
77	SDN Pemurus 2	Aluh - Aluh
78	SDN Rampah	Telaga Bauntung
79	SDN Rantau Nangka	Sungai Pinang
80	SDN Rantau Bakula	Sungai Pinang
81	SDN Rantau Bujur (Aranio)	Aranio
82	SDN Rantau Bujur	Telaga Bauntung
83	SDN Remo	Paramasan
84	SDN Salat Makmur	Beruntung Baru
85	SDN Sungai Paring 1	Martapura
86	SDN Sungai Rangas Hambuku	Martapura Barat
87	SDN Pulau Nyiur 1	Karang Intan
88	SDN Podok 2	Aluh - Aluh
89	SDN Podok 1	Aluh - Aluh
90	SDN Pengaron 2	Pengaron
91	SDN Pengaron 3	Pengaron
92	SDN Penggalaman 1	Martapura Barat
93	SDN Penggalaman 2	Martapura Barat
94	SDN Penyambaran 1	Karang Intan
95	SDN Penyambaran 2	Karang Intan
96	SDN Paramasan Atas	Paramasan
97	SDN Pingaran 1	Astambul
98	SDN Pingaran 2	Astambul
99	SDN Pingaran Ulu	Astambul
100	SDN Sungai Tabuk Keramat 1	Sungai Tabuk
101	SDN Sungai Tandipah	Sungai Tabuk
102	SDN Tambak Baru Ilir	Martapura
103	SDN Tambak Baru Ulu	Martapura
104	SDN Tambak Danau	Astambul
105	SDN Tambak Padi 1	Beruntung Baru
106	SDN Tambak Padi 2	Beruntung Baru
107	SDN Tambak Raya	Martapura Timur
108	SDN Tambak Sirang Baru	Gambut
109	SDN Tampang Awang	Tatah Makmur
110	SDN Tanah Habang	Mataraman
111	SDN Tanah Intan	Simpang Empat
112	SDN Tambak Anyar Ulu	Martapura Timur
113	SDN Tambak Anyar	Martapura Timur
114	SDN Tambak Sirang Darat	Gambut
115	SDN Sungai Tuan	Astambul
116	SDN Sungai Uyak	Sambung Makmur
117	SDN Sungkai 1	Simpang Empat
118	SDN Sungkai 2	Simpang Empat
119	SDN Sungkai Baru	Simpang Empat
120	SDN Surian (Mataraman)	Mataraman
121	SDN Surian	Cintapuri Darussalam
122	SDN Tatah Bangkal	Tatah Makmur
123	SDN Tajau Landung 1	Sungai Tabuk

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
124	SDN Tajau Landung 2	Sungai Tabuk
125	SDN Takuti	Mataraman
126	SDN Tatah Layap Baru	Tatah Makmur
127	SDN Telaga Baru	Telaga Bauntung
128	SDN Teluk Selong	Martapura Barat
129	SDN Terapu	Aluh - Aluh
130	SDN Tiwingan Baru	Aranio
131	SDN Tiwingan	Aranio
132	SDN Tunggul Irang Ulu	Martapura
133	SDN Tungkaran	Martapura
134	SDN Tatah Pemangkih Tengah	Tatah Makmur
135	SDN Tatah Pemangkih Laut 2	Kertak Hanyar
136	SDN Tatah Pemangkih Laut 1	Kertak Hanyar
137	SDN Tanipah	Aluh - Aluh
138	SDN Tanjung Rema	Martapura
139	SDN Tanjung Rema Darat	Martapura
140	SDN Tatah Belayung Baru	Kertak Hanyar
141	SDN Tatah Jaruju	Tatah Makmur
142	SDN Tatah Layap 1	Tatah Makmur
143	SDN Tatah Layap 2	Tatah Makmur
144	SDN Tatah Layap 3	Tatah Makmur
145	SDN Tatah Pamangkih Baru	Tatah Makmur
146	SDN Tatah Pamangkih Darat	Tatah Makmur
147	SDN Pakutik	Sungai Pinang
148	SDN Bunipah 3	Aluh - Aluh
149	SDN Desa Lima	Mataraman
150	SDN Galam Rabah 1	Cintapuri Darussalam
151	SDN Galam Rabah 2	Cintapuri Darussalam
152	SDN Galam Rabah 3	Cintapuri Darussalam
153	SDN Galam Rabah 4	Cintapuri Darussalam
154	SDN Gambut 1	Gambut
155	SDN Gambut 10	Gambut
156	SDN Gambut 11	Gambut
157	SDN Gambut 2	Gambut
158	SDN Gambut 3	Gambut
159	SDN Desa Baru 2	Mataraman
160	SDN Desa Baru 1	Mataraman
161	SDN Cabi	Simpang Empat
162	SDN Cindai Alus 1	Martapura
163	SDN Cintapuri 1	Cintapuri Darussalam
164	SDN Cintapuri 2	Cintapuri Darussalam
165	SDN Dalam Pagar	Martapura Timur
166	SDN Dalam Pagar Ulu 1	Martapura Timur
167	SDN Dalam Pagar Ulu 2	Martapura Timur
168	SDN Danau Salak 1	Astambul
169	SDN Danau Salak 2	Astambul
170	SDN Gambut 4	Gambut
171	SDN Gambut 5	Gambut
172	SDN Gunung Batu	Sambung Makmur
173	SDN Gunung Ulin	Mataraman
174	SDN Hakim	Sungai Pinang
175	SDN Handil Bujur 1	Aluh - Aluh
176	SDN Handil Bujur 2	Aluh - Aluh
177	SDN Handil Purai 1	Beruntung Baru

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
178	SDN Handil Purai 2	Beruntung Baru
179	SDN Haur Kuning	Beruntung Baru
180	SDN Indrasari 1	Martapura
181	SDN Jambu Burung	Beruntung Baru
182	SDN Guntung Ujung 2	Gambut
183	SDN Guntung Ujung 1	Gambut
184	SDN Guntung Papuyu	Gambut
185	SDN Gambut 6	Gambut
186	SDN Gambut 7	Gambut
187	SDN Gambut 8	Gambut
188	SDN Gambut 9	Gambut
189	SDN Garis	Cintapuri Darussalam
190	SDN Garis Hanyar	Cintapuri Darussalam
191	SDN Gudang Hirang 1	Sungai Tabuk
192	SDN Gudang Hirang 2	Sungai Tabuk
193	SDN Gudang Hirang 3	Sungai Tabuk
194	SDN Gudang Tengah	Sungai Tabuk
195	SDN Jati 1	Astambul
196	SDN Aranio 2	Aranio
197	SDN Astambul Kota	Astambul
198	SDN Astambul Seberang	Astambul
199	SDN Atayau	Astambul
200	SDN Ati'im	Pengaron
201	SDN Awang Bangkal Barat	Karang Intan
202	SDN Awang Bangkal Timur	Karang Intan
203	SDN Bakambat	Aluh - Aluh
204	SDN Balau	Karang Intan
205	SDN Banyu Hirang	Gambut
206	SDN Batu Balian 1	Simpang Empat
207	SDN Aranio 1	Aranio
208	SDN Antasan Senior	Martapura Timur
209	SDN Antaraku	Pengaron
210	SDN Abirau	Karang Intan
211	SDN Akar Bagantung	Martapura Timur
212	SDN Alalak Padang	Cintapuri Darussalam
213	SDN Alimukim	Pengaron
214	SDN Aluh-Aluh Besar 1	Aluh - Aluh
215	SDN Aluh-Aluh Besar 2	Aluh - Aluh
216	SDN Aluh-Aluh Besar 3	Aluh - Aluh
217	SDN Aluh-Aluh Kecil 1	Aluh - Aluh
218	SDN Aluh-Aluh Kecil 2	Aluh - Aluh
219	SDN Aluh-Aluh Kecil Muara	Aluh - Aluh
220	SDN Angkipih	Paramasan
221	SDN Batu Balian 2	Simpang Empat
222	SDN Batu Balian 3	Simpang Empat
223	SDN Benua Anyar Danau Salak 1	Astambul
224	SDN Benua Anyar Danau Salak 2	Astambul
225	SDN Benua Anyar Sungai Tuan	Astambul
226	SDN Benua Riam	Aranio
227	SDN Bi'ih	Karang Intan
228	SDN Bincau 1	Martapura
229	SDN Bincau 2	Martapura
230	SDN Bincau Muara	Martapura
231	SDN Bumi Rata	Simpang Empat

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
232	SDN Bunglai	Aranio
233	SDN Bunipah 1	Aluh - Aluh
234	SDN Benua Anyar	Cintapuri Darussalam
235	SDN Benteng Seberang	Pengaron
236	SDN Bawahan Pasar	Mataraman
237	SDN Bawahan Selan 1	Mataraman
238	SDN Bawahan Selan 2	Mataraman
239	SDN Bawahan Selan 3	Mataraman
240	SDN Bawahan Selan 4	Mataraman
241	SDN Bawahan Selan 5	Mataraman
242	SDN Bawahan Selan 6	Mataraman
243	SDN Belangian	Aranio
244	SDN Belimbing Baru	Sungai Pinang
245	SDN Belimbing Lama 1	Sungai Pinang
246	SDN Bunipah 2	Aluh - Aluh
247	SDN Lawahan	Beruntung Baru
248	SDN Makmur	Gambut
249	SDN Mali-Mali	Karang Intan
250	SDN Malintang 1	Gambut
251	SDN Malintang 2	Gambut
252	SDN Manarap Baru	Kertak Hanyar
253	SDN Manarap Lama 1	Kertak Hanyar
254	SDN Manarap Lama 2	Kertak Hanyar
255	SDN Manarap Tengah 1	Kertak Hanyar
256	SDN Manarap Tengah 2	Kertak Hanyar
257	SDN Mandikapau Barat 1	Karang Intan
258	SDN Mandikapau Barat 2	Karang Intan
259	SDN Madurejo 1	Sambung Makmur
260	SDN Madurejo 2	Sambung Makmur
261	SDN Lawiran	Simpang Empat
262	SDN Limamar	Astambul
263	SDN Lok Baintan	Sungai Tabuk
264	SDN Lok Baintan Dalam	Sungai Tabuk
265	SDN Lok Buntar	Sungai Tabuk
266	SDN Lok Gabang	Astambul
267	SDN Lok Cantung	Simpang Empat
268	SDN Lok Tanah 1	Telaga Bauntung
269	SDN Loktangga	Karang Intan
270	SDN Lok Tunggul	Pengaron
271	SDN Mandiingin Timur 1	Karang Intan
272	SDN Mandiingin Timur 2	Karang Intan
273	SDN Melayu	Martapura Timur
274	SDN Melayu Tengah	Martapura Timur
275	SDN Muara Halayung	Beruntung Baru
276	SDN Munggu Raya	Astambul
277	SDN Murung Kenanga	Martapura
278	SDN Padang Panjang	Karang Intan
279	SDN Paku	Simpang Empat
280	SDN Mekar Sari	Tatah Makmur
281	SDN Mekar Raya	Kertak Hanyar
282	SDN Mandikapau Timur	Karang Intan
283	SDN Mangkauk 1	Pengaron
284	SDN Mangkauk 2	Pengaron
285	SDN Mangkauk 3	Pengaron

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
286	SDN Maniapun	Pengaron
287	SDN Mataraman 1	Mataraman
288	SDN Mataraman 2	Mataraman
289	SDN Mataraman 3	Mataraman
290	SDN Mekar	Martapura Timur
291	SDN Paku Alam	Sungai Tabuk
292	SDN Jati 2	Astambul
293	SDN Kaliukan 1	Astambul
294	SDN Kaliukan 2	Astambul
295	SDN Kampung Baru	Beruntung Baru
296	SDN Karang Intan 1	Karang Intan
297	SDN Karang Intan 2	Karang Intan
298	SDN Kayu Bawang 1	Gambut
299	SDN Kayu Bawang 2	Gambut
300	SDN Keladan Baru	Gambut
301	SDN Kelampaian	Astambul
302	SDN Kelampaian Ilir 1	Astambul
303	SDN Kelampaian Ilir 2	Astambul
304	SDN Kalaan Baru	Aranio
305	SDN Kahelaan 2	Sungai Pinang
306	SDN Kahelaan 1	Sungai Pinang
307	SDN Jawa 1	Martapura
308	SDN Jawa 2	Martapura
309	SDN Sekumpul 1	Martapura
310	SDN Jawa 5	Martapura
311	SDN Jawa Laut 1	Martapura
312	SDN Jawa Laut 2	Martapura
313	SDN Jingah Habang Hilir	Karang Intan
314	SDN Jingah Habang Hulu	Karang Intan
315	SDN Kelampaian Ulu	Astambul
316	SDN Labat Muara	Aluh – Aluh
317	SDN Kertak Empat	Pengaron
318	SDN Kertak Hanyar 1-1	Kertak Hanyar
319	SDN Kertak Hanyar 1-2	Kertak Hanyar
320	SDN Kertak Hanyar 1-3	Kertak Hanyar
321	SDN Kiram	Karang Intan
322	SDN Kuin Besar 1	Aluh – Aluh
323	SDN Kuin Besar 2	Aluh – Aluh
324	SDN Kuin Kecil	Aluh – Aluh
325	SDN Sungai Kupang	Gambut
326	SDN Kupang Rejo	Sungai Pinang
327	SDN Keraton 5	Martapura
328	SDN Keliling Benteng Tengah	Martapura Barat
329	SDN Keliling Benteng Ulu 1	Martapura Barat
330	SDN Keliling Benteng Ulu 2	Martapura Barat
331	SDN Keliling Benteng Ilir	Sungai Tabuk
332	SDN Keramat	Martapura Timur
333	SDN Keramat Mina	Cintapuri Darussalam
334	SDN Keraton 1	Martapura
335	SDN Keraton 4	Martapura
336	SDN Keraton 3	Martapura
337	SDN Keraton 2	Martapura
338	SDN Baliangin	Sambung Makmur
339	SDN Cindai Alus 2	Martapura

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
340	SDN Indrasari 2	Martapura
341	SDN Pulau Nyiur 2	Karang Intan
342	SD Kecil Kiram	Karang Intan
343	SDN Belimbing Lama 2	Sungai Pinang
344	SDN Belimbing Lama 3	Sungai Pinang
345	SDN Kahelaan 3	Sungai Pinang
346	SDN Paramasan Bawah 2	Paramasan
347	SDN Paramasan Bawah 3	Paramasan
348	SDN Paramasan Bawah 4	Paramasan
349	SD Kecil Paramasan Atas	Paramasan
350	SD Kecil Remo	Paramasan
351	SDN Lubang Baru 1	Pengaron
352	SDN Lubang Baru 2	Pengaron
353	SDN Lok Tanah 2	Telaga Bauntung
354	SDN Cintapuri 3	Cintapuri Darussalam
355	SDN Paramasan Bawah 1	Paramasan
356	SDN Pematang Danau 2	Mataraman
357	SDN Artain	Aranio
358	SDN Paau	Aranio
359	SDN Simpang Tiga 2	Mataraman
360	SDN Sekumpul 2	Martapura
361	SDIT USHULUDDIN	MARTAPURA TIMUR
362	SD ISLAM SEKUMPUL	MARTAPURA
363	SD ISLAM ARRIYADH	SAMBUNG MAKMUR
364	SD ISLAMIC BILINGUAL SCIENCE	MARTAPURA
365	SD ISLAM MIFTAKHUSSIBYAN	PENGARON
366	SD ALAM MUHAMMADIYAH INDRASARI MARTAPURA	MARTAPURA
367	SD ISLAM HIDAYATULLAH TAMAN HUDAYA	MARTAPURA
368	SDIT SULLAMUL ULUM	GAMBUT
369	SDITQ BAKKAH	MARTAPURA
370	SD MUHAMMADIYAH MARTAPURA	MARTAPURA
371	SDITQ-T AN-NAJAH	MARTAPURA
372	SD MITRA KASIH	KERTAK HANYAR

r) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 1.125.540.000 dengan realisasi keuangan Rp. 666.240.000 (59.19%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar : 744 Orang dari 744 Orang dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk sosialisasi Bos SD yang dihadiri oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Satuan Pendidikan. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	SDN Sungai Pinang (Kec. Sungai Tabuk)	Sungai Tabuk
2	SDN Gudang Hiranng 4	Sungai Tabuk
3	SDN Sungai Tabuk Keramat 2	Sungai Tabuk

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
4	SDN Sumber Baru 2	Sungai Pinang
5	SDN Sumber Harapan 1	Sungai Pinang
6	SDN Sumber Harapan 2	Sungai Pinang
7	SDN Sungai Alang 1	Karang Intan
8	SDN Sungai Alang 2	Karang Intan
9	SDN Sungai Alat 1	Astambul
10	SDN Sungai Alat 2	Astambul
11	SDN Sungai Arpat 1	Karang Intan
12	SDN Sungai Arpat 2	Karang Intan
13	SDN Sungai Asam	Karang Intan
14	SDN Sungai Bakung	Sungai Tabuk
15	SDN Sumber Baru 1	Sungai Pinang
16	SDN Sungai Pulantan	Aluh - Aluh
17	SDN Simpang Warga 2	Aluh - Aluh
18	SDN Sungai Tabuk Keramat 3	Sungai Tabuk
19	SDN Sungai Tabuk Kota 1	Sungai Tabuk
20	SDN Simpang Empat 1	Simpang Empat
21	SDN Simpang Empat 2	Simpang Empat
22	SDN Simpang Empat 3	Simpang Empat
23	SDN Simpang Empat 4	Simpang Empat
24	SDN Simpang Empat	Kertak Hanyar
25	SDN Simpang Lima	Cintapuri Darussalam
26	SDN Simpang Tiga	Mataraman
27	SDN Simpang Warga 1	Aluh - Aluh
28	SDN Sungai Bangkal	Sungai Tabuk
29	SDN Sungai Batang 1	Martapura Barat
30	SDN Sungai Lurus	Sambung Makmur
31	SDN Sungai Musang	Aluh - Aluh
32	SDN Sungai Paring 2	Martapura
33	SDN Sungai Pinang Baru 1	Sungai Tabuk
34	SDN Sungai Pinang Baru 2	Sungai Tabuk
35	SDN Sungai Pinang (Kec. Sungai Pinang)	Sungai Pinang
36	SDN Sungai Rangas	Martapura Barat
37	SDN Sungai Rangas Ulu	Martapura Barat
38	SDN Sungai Raya 1	Simpang Empat
39	SDN Sungai Raya 2	Simpang Empat
40	SDN Sungai Lulut 2	Sungai Tabuk
41	SDN Sungai Lulut 1	Sungai Tabuk
42	SDN Sungai Langsung	Simpang Empat
43	SDN Sungai Batang 2	Martapura Barat
44	SDN Sungai Batang Banyu	Sambung Makmur
45	SDN Sungai Batang Ilir 1	Martapura Barat
46	SDN Sungai Batang Ilir 2	Martapura Barat
47	SDN Sungai Jati	Mataraman
48	SDN Sungai Kitano 1	Martapura Timur
49	SDN Sungai Kitano 2	Martapura Timur
50	SDN Kupang	Simpang Empat
51	SDN Sungai Lakum 1	Kertak Hanyar
52	SDN Sungai Lakum 2	Kertak Hanyar
53	SDN Sungai Landas	Karang Intan
54	SDN Sungai Tabuk Kota 2 (SDN Abumbun Jaya)	Sungai Tabuk
55	SDN Panyiuran	Pengaron
56	SDN Pejambuan 2	Sungai Tabuk
57	SDN Pekauman 1	Martapura Timur

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
58	SDN Pekauman 2	Martapura Timur
59	SDN Pemakuan	Sungai Tabuk
60	SDN Pematang Baru	Martapura Timur
61	SDN Pematang Danau 1	Mataraman
62	SDN Pematang Panjang	Sungai Tabuk
63	SDN Pembantanan 1	Sungai Tabuk
64	SDN Pembantanan 2	Sungai Tabuk
65	SDN Pejambuan 1	Sungai Tabuk
66	SDN Pasayangan Selatan	Martapura
67	SDN Paring Tali	Simpang Empat
68	SDN Pasar Jati 1	Astambul
69	SDN Pasar Jati 2	Astambul
70	SDN Pasar Jati 3	Astambul
71	SDN Pasar Kamis 1	Kertak Hanyar
72	SDN Pasar Kamis 2	Kertak Hanyar
73	SDN Pasayangan 1	Martapura
74	SDN Pasayangan 2	Martapura
75	SDN Pasayangan 3	Martapura
76	SDN Pemurus 1	Aluh - Aluh
77	SDN Pemurus 2	Aluh - Aluh
78	SDN Rampah	Telaga Bauntung
79	SDN Rantau Nangka	Sungai Pinang
80	SDN Rantau Bakula	Sungai Pinang
81	SDN Rantau Bujur (Aranio)	Aranio
82	SDN Rantau Bujur	Telaga Bauntung
83	SDN Remo	Paramasan
84	SDN Salat Makmur	Beruntung Baru
85	SDN Sungai Paring 1	Martapura
86	SDN Sungai Rangas Hambuku	Martapura Barat
87	SDN Pulau Nyiur 1	Karang Intan
88	SDN Podok 2	Aluh - Aluh
89	SDN Podok 1	Aluh - Aluh
90	SDN Pengaron 2	Pengaron
91	SDN Pengaron 3	Pengaron
92	SDN Penggalaman 1	Martapura Barat
93	SDN Penggalaman 2	Martapura Barat
94	SDN Penyambaran 1	Karang Intan
95	SDN Penyambaran 2	Karang Intan
96	SDN Paramasan Atas	Paramasan
97	SDN Pingaran 1	Astambul
98	SDN Pingaran 2	Astambul
99	SDN Pingaran Ulu	Astambul
100	SDN Sungai Tabuk Keramat 1	Sungai Tabuk
101	SDN Sungai Tandipah	Sungai Tabuk
102	SDN Tambak Baru Ilir	Martapura
103	SDN Tambak Baru Ulu	Martapura
104	SDN Tambak Danau	Astambul
105	SDN Tambak Padi 1	Beruntung Baru
106	SDN Tambak Padi 2	Beruntung Baru
107	SDN Tambak Raya	Martapura Timur
108	SDN Tambak Sirang Baru	Gambut
109	SDN Tampang Awang	Tatah Makmur
110	SDN Tanah Habang	Mataraman
111	SDN Tanah Intan	Simpang Empat

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
112	SDN Tambak Anyar Ulu	Martapura Timur
113	SDN Tambak Anyar	Martapura Timur
114	SDN Tambak Sirang Darat	Gambut
115	SDN Sungai Tuan	Astambul
116	SDN Sungai Uyak	Sambung Makmur
117	SDN Sungkai 1	Simpang Empat
118	SDN Sungkai 2	Simpang Empat
119	SDN Sungkai Baru	Simpang Empat
120	SDN Surian (Mataraman)	Mataraman
121	SDN Surian	Cintapuri Darussalam
122	SDN Tatak Bangkal	Tatak Makmur
123	SDN Tajau Landung 1	Sungai Tabuk
124	SDN Tajau Landung 2	Sungai Tabuk
125	SDN Takuti	Mataraman
126	SDN Tatak Layap Baru	Tatak Makmur
127	SDN Telaga Baru	Telaga Bauntung
128	SDN Teluk Selong	Martapura Barat
129	SDN Terapu	Aluh - Aluh
130	SDN Tiwingan Baru	Aranio
131	SDN Tiwingan	Aranio
132	SDN Tunggul Irang Ulu	Martapura
133	SDN Tungkaran	Martapura
134	SDN Tatak Pamangkih Tengah	Tatak Makmur
135	SDN Tatak Pamangkih Laut 2	Kertak Hanyar
136	SDN Tatak Pamangkih Laut 1	Kertak Hanyar
137	SDN Tanipah	Aluh - Aluh
138	SDN Tanjung Rema	Martapura
139	SDN Tanjung Rema Darat	Martapura
140	SDN Tatak Belayung Baru	Kertak Hanyar
141	SDN Tatak Jaruju	Tatak Makmur
142	SDN Tatak Layap 1	Tatak Makmur
143	SDN Tatak Layap 2	Tatak Makmur
144	SDN Tatak Layap 3	Tatak Makmur
145	SDN Tatak Pamangkih Baru	Tatak Makmur
146	SDN Tatak Pamangkih Darat	Tatak Makmur
147	SDN Pakutik	Sungai Pinang
148	SDN Bunipah 3	Aluh - Aluh
149	SDN Desa Lima	Mataraman
150	SDN Galam Rabah 1	Cintapuri Darussalam
151	SDN Galam Rabah 2	Cintapuri Darussalam
152	SDN Galam Rabah 3	Cintapuri Darussalam
153	SDN Galam Rabah 4	Cintapuri Darussalam
154	SDN Gambut 1	Gambut
155	SDN Gambut 10	Gambut
156	SDN Gambut 11	Gambut
157	SDN Gambut 2	Gambut
158	SDN Gambut 3	Gambut
159	SDN Desa Baru 2	Mataraman
160	SDN Desa Baru 1	Mataraman
161	SDN Cabi	Simpang Empat
162	SDN Cindai Alus 1	Martapura
163	SDN Cintapuri 1	Cintapuri Darussalam
164	SDN Cintapuri 2	Cintapuri Darussalam
165	SDN Dalam Pagar	Martapura Timur

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
166	SDN Dalam Pagar Ulu 1	Martapura Timur
167	SDN Dalam Pagar Ulu 2	Martapura Timur
168	SDN Danau Salak 1	Astambul
169	SDN Danau Salak 2	Astambul
170	SDN Gambut 4	Gambut
171	SDN Gambut 5	Gambut
172	SDN Gunung Batu	Sambung Makmur
173	SDN Gunung Ulin	Mataraman
174	SDN Hakim	Sungai Pinang
175	SDN Handil Bujur 1	Aluh - Aluh
176	SDN Handil Bujur 2	Aluh - Aluh
177	SDN Handil Purai 1	Beruntung Baru
178	SDN Handil Purai 2	Beruntung Baru
179	SDN Haur Kuning	Beruntung Baru
180	SDN Indrasari 1	Martapura
181	SDN Jambu Burung	Beruntung Baru
182	SDN Guntung Ujung 2	Gambut
183	SDN Guntung Ujung 1	Gambut
184	SDN Guntung Papuyu	Gambut
185	SDN Gambut 6	Gambut
186	SDN Gambut 7	Gambut
187	SDN Gambut 8	Gambut
188	SDN Gambut 9	Gambut
189	SDN Garis	Cintapuri Darussalam
190	SDN Garis Hanyar	Cintapuri Darussalam
191	SDN Gudang Hirang 1	Sungai Tabuk
192	SDN Gudang Hirang 2	Sungai Tabuk
193	SDN Gudang Hirang 3	Sungai Tabuk
194	SDN Gudang Tengah	Sungai Tabuk
195	SDN Jati 1	Astambul
196	SDN Aranio 2	Aranio
197	SDN Astambul Kota	Astambul
198	SDN Astambul Seberang	Astambul
199	SDN Atayau	Astambul
200	SDN Ati'im	Pengaron
201	SDN Awang Bangkal Barat	Karang Intan
202	SDN Awang Bangkal Timur	Karang Intan
203	SDN Bakambat	Aluh - Aluh
204	SDN Balau	Karang Intan
205	SDN Banyu Hirang	Gambut
206	SDN Batu Balian 1	Simpang Empat
207	SDN Aranio 1	Aranio
208	SDN Antasan Senor	Martapura Timur
209	SDN Antaraku	Pengaron
210	SDN Abirau	Karang Intan
211	SDN Akar Bagantung	Martapura Timur
212	SDN Alalak Padang	Cintapuri Darussalam
213	SDN Alimukim	Pengaron
214	SDN Aluh-Aluh Besar 1	Aluh - Aluh
215	SDN Aluh-Aluh Besar 2	Aluh - Aluh
216	SDN Aluh-Aluh Besar 3	Aluh - Aluh
217	SDN Aluh-Aluh Kecil 1	Aluh - Aluh
218	SDN Aluh-Aluh Kecil 2	Aluh - Aluh
219	SDN Aluh-Aluh Kecil Muara	Aluh - Aluh

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
220	SDN Angkipih	Paramasan
221	SDN Batu Balian 2	Simpang Empat
222	SDN Batu Balian 3	Simpang Empat
223	SDN Benua Anyar Danau Salak 1	Astambul
224	SDN Benua Anyar Danau Salak 2	Astambul
225	SDN Benua Anyar Sungai Tuan	Astambul
226	SDN Benua Riam	Aranio
227	SDN Bi'ih	Karang Intan
228	SDN Bincau 1	Martapura
229	SDN Bincau 2	Martapura
230	SDN Bincau Muara	Martapura
231	SDN Bumi Rata	Simpang Empat
232	SDN Bunglai	Aranio
233	SDN Bunipah 1	Aluh - Aluh
234	SDN Benua Anyar	Cintapuri Darussalam
235	SDN Benteng Seberang	Pengaron
236	SDN Bawahan Pasar	Mataraman
237	SDN Bawahan Selan 1	Mataraman
238	SDN Bawahan Selan 2	Mataraman
239	SDN Bawahan Selan 3	Mataraman
240	SDN Bawahan Selan 4	Mataraman
241	SDN Bawahan Selan 5	Mataraman
242	SDN Bawahan Selan 6	Mataraman
243	SDN Belangian	Aranio
244	SDN Belimbing Baru	Sungai Pinang
245	SDN Belimbing Lama 1	Sungai Pinang
246	SDN Bunipah 2	Aluh - Aluh
247	SDN Lawahan	Beruntung Baru
248	SDN Makmur	Gambut
249	SDN Mali-Mali	Karang Intan
250	SDN Malintang 1	Gambut
251	SDN Malintang 2	Gambut
252	SDN Manarap Baru	Kertak Hanyar
253	SDN Manarap Lama 1	Kertak Hanyar
254	SDN Manarap Lama 2	Kertak Hanyar
255	SDN Manarap Tengah 1	Kertak Hanyar
256	SDN Manarap Tengah 2	Kertak Hanyar
257	SDN Mandikapau Barat 1	Karang Intan
258	SDN Mandikapau Barat 2	Karang Intan
259	SDN Madurejo 1	Sambung Makmur
260	SDN Madurejo 2	Sambung Makmur
261	SDN Lawiran	Simpang Empat
262	SDN Limamar	Astambul
263	SDN Lok Baintan	Sungai Tabuk
264	SDN Lok Baintan Dalam	Sungai Tabuk
265	SDN Lok Buntar	Sungai Tabuk
266	SDN Lok Gabang	Astambul
267	SDN Lok Cantung	Simpang Empat
268	SDN Lok Tanah 1	Telaga Bauntung
269	SDN Loktangga	Karang Intan
270	SDN Lok Tunggul	Pengaron
271	SDN Mandiangin Timur 1	Karang Intan
272	SDN Mandiangin Timur 2	Karang Intan
273	SDN Melayu	Martapura Timur

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
274	SDN Melayu Tengah	Martapura Timur
275	SDN Muara Halayung	Beruntung Baru
276	SDN Munggu Raya	Astambul
277	SDN Murung Kenanga	Martapura
278	SDN Padang Panjang	Karang Intan
279	SDN Paku	Simpang Empat
280	SDN Mekar Sari	Tatah Makmur
281	SDN Mekar Raya	Kertak Hanyar
282	SDN Mandikapau Timur	Karang Intan
283	SDN Mangkauk 1	Pengaron
284	SDN Mangkauk 2	Pengaron
285	SDN Mangkauk 3	Pengaron
286	SDN Maniapun	Pengaron
287	SDN Mataraman 1	Mataraman
288	SDN Mataraman 2	Mataraman
289	SDN Mataraman 3	Mataraman
290	SDN Mekar	Martapura Timur
291	SDN Paku Alam	Sungai Tabuk
292	SDN Jati 2	Astambul
293	SDN Kaliukan 1	Astambul
294	SDN Kaliukan 2	Astambul
295	SDN Kampung Baru	Beruntung Baru
296	SDN Karang Intan 1	Karang Intan
297	SDN Karang Intan 2	Karang Intan
298	SDN Kayu Bawang 1	Gambut
299	SDN Kayu Bawang 2	Gambut
300	SDN Keladan Baru	Gambut
301	SDN Kelampaian	Astambul
302	SDN Kelampaian Ilir 1	Astambul
303	SDN Kelampaian Ilir 2	Astambul
304	SDN Kalaan Baru	Aranio
305	SDN Kahelaan 2	Sungai Pinang
306	SDN Kahelaan 1	Sungai Pinang
307	SDN Jawa 1	Martapura
308	SDN Jawa 2	Martapura
309	SDN Sekumpul 1	Martapura
310	SDN Jawa 5	Martapura
311	SDN Jawa Laut 1	Martapura
312	SDN Jawa Laut 2	Martapura
313	SDN Jingah Habang Hilir	Karang Intan
314	SDN Jingah Habang Hulu	Karang Intan
315	SDN Kelampaian Ulu	Astambul
316	SDN Labat Muara	Aluh - Aluh
317	SDN Kertak Empat	Pengaron
318	SDN Kertak Hanyar 1-1	Kertak Hanyar
319	SDN Kertak Hanyar 1-2	Kertak Hanyar
320	SDN Kertak Hanyar 1-3	Kertak Hanyar
321	SDN Kiram	Karang Intan
322	SDN Kuin Besar 1	Aluh - Aluh
323	SDN Kuin Besar 2	Aluh - Aluh
324	SDN Kuin Kecil	Aluh - Aluh
325	SDN Sungai Kupang	Gambut
326	SDN Kupang Rejo	Sungai Pinang
327	SDN Keraton 5	Martapura

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
328	SDN Keliling Benteng Tengah	Martapura Barat
329	SDN Keliling Benteng Ulu 1	Martapura Barat
330	SDN Keliling Benteng Ulu 2	Martapura Barat
331	SDN Keliling Benteng Ilir	Sungai Tabuk
332	SDN Keramat	Martapura Timur
333	SDN Keramat Mina	Cintapuri Darussalam
334	SDN Keraton 1	Martapura
335	SDN Keraton 4	Martapura
336	SDN Keraton 3	Martapura
337	SDN Keraton 2	Martapura
338	SDN Baliangin	Sambung Makmur
339	SDN Cindai Alus 2	Martapura
340	SDN Indrasari 2	Martapura
341	SDN Pulau Nyiur 2	Karang Intan
342	SD Kecil Kiram	Karang Intan
343	SDN Belimbing Lama 2	Sungai Pinang
344	SDN Belimbing Lama 3	Sungai Pinang
345	SDN Kahelaan 3	Sungai Pinang
346	SDN Paramasan Bawah 2	Paramasan
347	SDN Paramasan Bawah 3	Paramasan
348	SDN Paramasan Bawah 4	Paramasan
349	SD Kecil Paramasan Atas	Paramasan
350	SD Kecil Remo	Paramasan
351	SDN Lubang Baru 1	Pengaron
352	SDN Lubang Baru 2	Pengaron
353	SDN Lok Tanah 2	Telaga Bauntung
354	SDN Cintapuri 3	Cintapuri Darussalam
355	SDN Paramasan Bawah 1	Paramasan
356	SDN Pematang Danau 2	Mataraman
357	SDN Artain	Aranio
358	SDN Paau	Aranio
359	SDN Simpang Tiga 2	Mataraman
360	SDN Sekumpul 2	Martapura
361	SDIT USHULUDDIN	MARTAPURA TIMUR
362	SD ISLAM SEKUMPUL	MARTAPURA
363	SD ISLAM ARRIYADH	SAMBUNG MAKMUR
364	SD ISLAMIC BILINGUAL SCIENCE	MARTAPURA
365	SD ISLAM MIFTAKHUSSIBYAN	PENGARON
366	SD ALAM MUHAMMADIYAH INDRASARI MARTAPURA	MARTAPURA
367	SD ISLAM HIDAYATULLAH TAMAN HUDAYA	MARTAPURA
368	SDIT SULLAMUL ULUM	GAMBUT
369	SDITQ BAKKAH	MARTAPURA
370	SD MUHAMMADIYAH MARTAPURA	MARTAPURA
371	SDITQ-T AN-NAJAH	MARTAPURA
372	SD MITRA KASIH	KERTAK HANYAR

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. Rp 32.581.473.908 dengan realisasi keuangan Rp. 28.985.993.718 (88.96%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam

pendidikan dasar Sekolah Menengah Pertama dengan target sebesar 100 % dan realisasi 98.51%. Kegiatan ini didukung oleh 24 Sub Kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 8.647.180.000 dengan realisasi keuangan Rp. 5.878.713.903 (67.98%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah : 2 Ruang dari 2 Ruang dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

No.	Nama Paket		Nama Sekolah	Kecamatan
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	SMP Negeri 2 Martapura Barat	Martapura Barat
2.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	SMP Negeri 3 Mataraman	Mataraman

b) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 498.820.000 dengan realisasi keuangan Rp. 470.421.000 (94.31%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun : 2 Ruang dari 2 Ruang dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian Pembangunan sebagai berikut :

No.	Nama Paket		Nama Sekolah	Kecamatan
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	SMP Negeri 4 Simpang Empat	Simpang Empat
2.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	SMP Negeri 2 Martapura Barat	Martapura Barat

c) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 138.877.500 dengan realisasi keuangan Rp. 138.681.000 (99.86%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun dengan realisasi 1 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP Negeri 1 Telaga Bauntung di Kecamatan Telaga Bauntung.

d) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 15.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 0 (00%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini tidak terpenuhi dikarenakan Anggaran dari dana ABT diperuntukkan untuk konsultan Perencanaan DAK 2024 Karena setelah sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan DAK 2024 tidak terdapat kegiatan pembangunan perpustakaan maka anggarannya tidak terpakai.

e) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 479.760.000 dengan realisasi keuangan Rp. 435.594.000 (90.79%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun dengan realisasi 1 ruang pembangunan laboratorium SMP Negeri 1 Telaga Bauntung di Kecamatan Aranio.

f) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 915.494.240 dengan realisasi keuangan Rp. 800.849.116 (87.48%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun: 7 Unit dari 7 Unit dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

No.	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	SMP Negeri 4 Cintapuri Darussalam SMP Negeri 1 Telaga Bauntung SMP Negeri 2 Gambut SMP Negeri 6 Karang Intan SMP Negeri 4 Simpang Empat SMP Negeri 3 Karang Intan SMPN 1 Simpang Empat	Cintapuri Darussalam Telaga Bauntung Gambut Karang Intan Simpang empat Karang Intan Simpang Empat

g) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 839.805.000 dengan realisasi keuangan Rp. 805.686.000 (95.94%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 5 Ruang dari 5 Ruang dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

No.	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SMP Negeri 3 Aranio SMP Negeri 8 Aluh-Aluh SMP Negeri 1 Sungai Tabuk SMP Negeri 1 Simpang Empat (dua ruang)	Aranio Aluh-Aluh Sungai Tabuk Simpang Empat

h) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 375.340.000 dengan realisasi keuangan Rp. 374.775.000 (99.85%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat" : 3 Ruang dari 3 Ruang dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

No.	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	SMP Negeri 4 Martapura SMP Negeri 1 Aranio	Martapura Aranio

i) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 8.490.000 (84.90%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi dengan realisasi 1 ruang yang direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP Negeri 3 Mataraman (Jasa Konsultan perencanaan untuk DAK 2024) di Kecamatan Mataraman.

j) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 680.647.500 dengan realisasi keuangan Rp. 641.270.000. (94.21%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 3 Ruang dari 3 Ruang dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut:

No.	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	SMP Negeri 3 Aranio SMP Negeri 4 Karang Intan SMP Negeri 1 Simpang Empat	Aranio Karang Intan Simpang empat

k) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 386.025.000 dengan realisasi keuangan Rp. 333.015.000 (86.27%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : 1 Ruang yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP Negeri 1 Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat.

l) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 261.142.500 dengan realisasi keuangan Rp. 260.590.907 (99.79%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : 3 Unit dari 3 Unit dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian pembangunan sebagai berikut:

No.	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Rehabilitasi Sedang/Berat	SMP Negeri 2 Mataraman	Mataraman

Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	SMP Negeri 1 Aluh-Aluh SMP Negeri 1 Simpang Empat	Aluh-Aluh Simpang Empat
---	--	----------------------------

m) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 97.955.000 dengan realisasi keuangan Rp. 97.895.000 (99.94%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia : 1 Paket dari 1 Pake dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Paket	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Pengadaan Mebel Sekolah (Locker Besi untuk 6 sekolah masing-masing mendapat 10 Locker	SMP Negeri 4 Martapura SMP Negeri 1 Martapura Timur SMP Negeri 2 Martapura Timur SMP Negeri 1 Martapura Barat SMP Negeri 1 Astambul SMP Negeri 1 Cintapuri Darussalam	Martapura Martapura Timur Martapura Timur Martapura Barat Astambul Cintapuri Darussalam

n) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 199.185.000 dengan realisasi keuangan Rp. 198.965.000 (99.89%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia : 1 Paket dari 1 Paket dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Jumlah (Meja)	Jumlah (Kursi)	Jumlah (Lemari Arsip)
1.	SMP NEGERI 1 SAMBUNG MAKMUR	Jl.Deso Pasar Baru RT.01	10	10	2
2.	SMP NEGERI 1 ALUH-ALUH	Jl.Inpres Aluh-Aluh Besar RT.01	10	10	2
3.	SMP NEGERI 1 ARANIO	Jl.Ir.P.Muhammad Noor	10	10	2
4.	SMPN 1 KERTAK HANYAR	Jl.A.Yani Km. 10.400 No. 29	10	10	2
5.	SMP NEGERI 1 SUNGAI PINANG	Jl.Inpres Ds Kupang Rejo	10	10	2
6.	SMP NEGERI 3 SUNGAI PINANG	Jl.Belimbing Raya Ds Belimbing	10	10	2
7.	SMP NEGERI 3 PENGARON	Jl.Abdul Karim RT.01 Ds Ali Mukim	10	10	2
8.	SMP NEGERI 4 SIMPANG EMPAT	Kec. Simpang Empat	10	10	2
9.	SMP NEGERI 4 CINTAPURI DARUSSALAM	Jl. Malintang	10	10	2
10.	SMP NEGERI 6 MARTAPURA	Cindai Alus RT.05 RW.01 Martapura	10	10	2
J U M L A H			100	100	20

o) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 135.891.000 dengan realisasi keuangan Rp. 135.891.000 (100%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia

: 1 Paket dari 1 Paket dengan target 100% dan realisasi 100%.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Jumlah Siswa yang memperoleh ATK
1	SMP NEGERI 1 MARTAPURA	Jl.A.Yani Km 39 No.44 Martapura	56
2	SMP NEGERI 2 MARTAPURA	Jl. SMP 3 Desa Indrasari Martapura	40
3	SMP NEGERI 3 MARTAPURA	Jl.A.Yani Km 37 RT.18 No.5 Martapura	50
4	SMP NEGERI 4 MARTAPURA	Jl. Damai Sungai Sipai Martapura	20
5	SMP NEGERI 5 MARTAPURA	Jl. Melati Martapura	20
6	SMP NEGERI 6 MARTAPURA	Cindai Alus RT.05 RW.01 Martapura	30
7	SMP NEGERI 1 MARTAPURA TIMUR	Jl. K. H. Anang Syarani Arif	30
8	SMP NEGERI 2 MARTAPURA TIMUR	Jl. Kertak Baru No.66	50
9	SMP NEGERI 1 MARTAPURA BARAT	Jl.Padat Karya No. 3 Sungai Rangas	30
10	SMP NEGERI 2 MARTAPURA BARAT	Jl.Martapura Lama Ds Sungai Batang Ilir	20
11	SMP NEGERI 1 KARANG INTAN	Jl.Melati Guntung Mas K.Intan	30
12	SMP NEGERI 2 KARANG INTAN	Jl.Ir.P.Muhammad Noor Mandiangin	25
13	SMP NEGERI 3 KARANG INTAN	Jl.Hutan Kandang	20
14	SMP NEGERI 4 KARANG INTAN	Jl. Pangeran Suryanata Ds Kiram	10
15	SMP NEGERI 5 KARANG INTAN	Jl.Seloka Indah	13
16	SMP NEGERI 6 KARANG INTAN	Jl.Gunung Balai Ds Sungai Landas RT.01	25
17	SMP NEGERI 7 KARANG INTAN	Jl.Ir.P.Muhammad Noor	25
18	SMP NEGERI 1 ARANIO	Jl.Ir.P.Muhammad Noor	11
19	SMP NEGERI 2 ARANIO	Jl.Ir.P.Muhammad Noor	10
20	SMP NEGERI 3 ARANIO	Jl.Ir.P.Muhammad Noor	15
21	SMP NEGERI 4 ARANIO	Jl.Utama Rt.3 Ds Rantau Bujur	10
22	SMP NEGERI 1 ASTAMBUL	Jl.A.Yani Km 48 Astambul	50
23	SMP NEGERI 2 ASTAMBUL	Jl.Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari	15
24	SMP NEGERI 3 ASTAMBUL	Jl.Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari	30
25	SMP NEGERI 4 ASTAMBUL	Jl.Pingaran Ulu RT.04	10
26	SMP NEGERI 1 MATARAMAN	Kompleks PTPN XIII Danau Salak	25
27	SMP NEGERI 2 MATARAMAN	Jl.Gunung Ulin Mataraman	20
28	SMP NEGERI 3 MATARAMAN	Jl.Bukit Manunggal Desa Takuti	14
29	SMP NEGERI 4 MATARAMAN	Jl. Musvira RT 3/1	10
30	SMP NEGERI 1 PARAMASAN	Jl. Trans Kandangan-Batulicin	12
31	SMP NEGERI 1 PENGARON	Jl.Pahlawan No.20 RT.01 Pengaron	25
32	SMP NEGERI 2 PENGARON	Jl.Gembira RT.05	15
33	SMP NEGERI 3 PENGARON	Jl.Abdul Karim RT.01 Ds Ali Mukim	10
34	SMP NEGERI 1 SAMBUNG MAKMUR	Jl.Desar Pasar Baru RT.01	13
35	SMP NEGERI 2 SAMBUNG MAKMUR	Desa Gunung Batu Sambung Makmur	10
36	SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT	Jl.Simpang Empat Rt.01	50

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Jumlah Siswa yang memperoleh ATK
37	SMP NEGERI 2 SIMPANG EMPAT	Jl.Muara Paku RT.3 Sungkai	30
38	SMP NEGERI 3 SIMPANG EMPAT	Jl.Mesjid Ruhama Ds Sungai Tabuk	12
39	SMP NEGERI 4 SIMPANG EMPAT	Kec. Simpang Empat	10
40	SMP NEGERI 1 CINTAPURI. D	Jl.Sindang Jaya	12
41	SMP NEGERI 2 CINTAPURI. D	Jl.Cintapuri	25
42	SMP NEGERI 3 CINTAPURI. D	Jl.Desa Surian RT.02	10
43	SMP NEGERI 4 CINTAPURI. D	Jl. Malintang	10
44	SMP NEGERI 1 SUNGAI PINANG	Jl.Inpres Ds Kupang Rejo	30
45	SMP NEGERI 2 SUNGAI PINANG	Desa Sungai Burung Hakim Makmur	10
46	SMP NEGERI 3 SUNGAI PINANG	Jl.Belimbing Raya Ds Belimbing	12
47	SMP NEGERI 1 TELAGA BAUNTUNG	Desa Rantau Bujur	10
48	SMP NEGERI 1 SUNGAI TABUK	Jl.Gerilya Sungai Tabuk	30
49	SMP NEGERI 2 SUNGAI TABUK	Handil Buluan RT.3 No.23 Sungai Tabuk	30
50	SMP NEGERI 3 SUNGAI TABUK	Jl.Alam Roh RT.01	20
51	SMP NEGERI 4 SUNGAI TABUK	Jl.Martapura Lama Km.7 Komp.Putra Gemilang	30
52	SMP NEGERI 1 KERTAK HANYAR	Jl.A.Yani Km. 10.400 No. 29	40
53	SMP NEGERI 2 KERTAK HANYAR	Jl.A.Yani Km. 8.200	30
54	SMP NEGERI 1 TATAH MAKMUR	Jl. Tatah Pemangkih	25
55	SMP NEGERI 1 GAMBUT	Jl.A.Yani Km. 16	40
56	SMP NEGERI 2 GAMBUT	Desa Guntung Ujung Handil Tengah	10
57	SMP NEGERI 3 GAMBUT	Jl.Pematang Panjang KM.5 RT.01.	30
58	SMP NEGERI 1 ALUH-ALUH	Jl.Inpres Aluh-Aluh Besar RT.01	35
59	SMP NEGERI 2 ALUH-ALUH	Jl. Jembatan 1	25
60	SMP NEGERI 3 ALUH-ALUH	Jl.Pemurus Ujung RT.02	15
61	SMP NEGERI 4 ALUH-ALUH	Ds Kuin Kecil Aluh-Aluh	20
62	SMP NEGERI 5 ALUH-ALUH	Jl.Saka Mangkok Rt.03 Ds Podok	20
63	SMP NEGERI 6 ALUH-ALUH	Jl. Aluh-Aluh Kecil RT. 03/01	10
64	SMP NEGERI 7 ALUH-ALUH	Jl. Sungai Musang Aluh-Aluh	10
65	SMP NEGERI 8 ALUH-ALUH	Jl.Tanipah RT.003 Rw.001 Ds Aluh-Aluh	15
66	SMP NEGERI 1 BERUNTUNG BARU	Jl.Jambu Raya Ds.Jambu Raya	25
		TOTAL	1.480

Untuk satu siswa mendapatkan:

Buku tulis	13 Buah
Penggaris	1 Buah
Balpoint	1 Buah
Goodi bag	1 Buah
Pensil 2B	6 Buah

- p) Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 199.920.000 dengan realisasi keuangan Rp. 188.700.000 (94.39%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik : 2040 Buku dari 2040 Buku dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Jumlah Buku
1	SMP NEGERI 1 MARTAPURA	Jl.A.Yani Km 39 No.44 Martapura	40
2	SMP NEGERI 2 MARTAPURA	Jl. SMP 3 Desa Indrasari Martapura	30
3	SMP NEGERI 3 MARTAPURA	Jl.A.Yani Km 37 RT.18 No.5 Martapura	40
4	SMP NEGERI 4 MARTAPURA	Jl. Damai Sungai Sipai Martapura	30
5	SMP NEGERI 5 MARTAPURA	Jl. Melati Martapura	30
6	SMP NEGERI 6 MARTAPURA	Cindai Alus RT.05 RW.01 Martapura	30
7	SMP NEGERI 1 MARTAPURA TIMUR	Jl. K. H. Anang Syarani Arif	30
8	SMP NEGERI 2 MARTAPURA TIMUR	Jl. Kertak Baru No.66	30
9	SMP NEGERI 1 MARTAPURA BARAT	Jl.Padat Karya No. 3 Sungai Rangas	30
10	SMP NEGERI 2 MARTAPURA BARAT	Jl.Martapura Lama Ds Sungai Batang Ilir	30
11	SMP NEGERI 1 KARANG INTAN	Jl.Melati Guntung Mas K.Intan	30
12	SMP NEGERI 2 KARANG INTAN	Jl.Ir.P.Muhammad Noor Mandiangin	30
13	SMP NEGERI 3 KARANG INTAN	Jl.Hutan Kandang	30
14	SMP NEGERI 4 KARANG INTAN	Jl. Pangeran Suryanata Ds Kiram	30
15	SMP NEGERI 5 KARANG INTAN	Jl.Seloka Indah	30
16	SMP NEGERI 6 KARANG INTAN	Jl.Gunung Balai Ds Sungai Landas RT.01	30
17	SMP NEGERI 7 KARANG INTAN	Jl.Ir.P.Muhammad Noor	30
18	SMP NEGERI 1 ARANIO	Jl.Ir.P.Muhammad Noor	30
19	SMP NEGERI 2 ARANIO	Jl.Ir.P.Muhammad Noor	30
20	SMP NEGERI 3 ARANIO	Jl.Ir.P.Muhammad Noor	30
21	SMP NEGERI 4 ARANIO	Jl.Utama Rt.3 Ds Rantau Bujur	30
22	SMP NEGERI 1 ASTAMBUL	Jl.A.Yani Km 48 Astambul	40
23	SMP NEGERI 2 ASTAMBUL	Jl.Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari	30
24	SMP NEGERI 3 ASTAMBUL	Jl.Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari	30
25	SMP NEGERI 4 ASTAMBUL	Jl.Pingaran Ulu RT.04	30
26	SMP NEGERI 1 MATARAMAN	Kompleks PTPN XIII Danau Salak	30
27	SMP NEGERI 2 MATARAMAN	Jl.Gunung Ulin Mataraman	30
28	SMP NEGERI 3 MATARAMAN	Jl.Bukit Manunggal Desa Takuti	30
29	SMP NEGERI 4 MATARAMAN	Jl. Musvira RT 3/1	30
30	SMP NEGERI 1 PARAMASAN	Jl. Trans Kandangan-Batulicin	30
31	SMP NEGERI 1 PENGARON	Jl.Pahlawan No.20 RT.01 Pengaron	30
32	SMP NEGERI 2 PENGARON	Jl.Gembira RT.05	30
33	SMP NEGERI 3 PENGARON	Jl.Abdul Karim RT.01 Ds Ali Mukim	30
34	SMP NEGERI 1 SAMBUNG MAKMUR	Jl.Desa Pasar Baru RT.01	30
35	SMP NEGERI 2 SAMBUNG MAKMUR	Desa Gunung Batu Sambung Makmur	30

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Jumlah Buku
36	SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT	Jl.Simpang Empat Rt.01	40
37	SMP NEGERI 2 SIMPANG EMPAT	Jl.Muara Paku RT.3 Sungai	30
38	SMP NEGERI 3 SIMPANG EMPAT	Jl.Mesjid Ruhama Ds Sungai Tabuk	30
39	SMP NEGERI 4 SIMPANG EMPAT	Kec. Simpang Empat	30
40	SMP NEGERI 1 CINTAPURI. D	Jl.Sindang Jaya	30
41	SMP NEGERI 2 CINTAPURI. D	Jl.Cintapuri	30
42	SMP NEGERI 3 CINTAPURI. D	Jl.Desa Surian RT.02	30
43	SMP NEGERI 4 CINTAPURI. D	Jl. Malintang	30
44	SMP NEGERI 1 SUNGAI PINANG	Jl.Inpres Ds Kupang Rejo	30
45	SMP NEGERI 2 SUNGAI PINANG	Desa Sungai Burung Hakim Makmur	30
46	SMP NEGERI 3 SUNGAI PINANG	Jl.Belimbing Raya Ds Belimbing	30
47	SMP NEGERI 1 TELAGA BAUNTUNG	Desa Rantau Bujur	30
48	SMP NEGERI 1 SUNGAI TABUK	Jl.Gerilya Sungai Tabuk	30
49	SMP NEGERI 2 SUNGAI TABUK	Handil Buluan RT.3 No.23 Sungai Tabuk	30
50	SMP NEGERI 3 SUNGAI TABUK	Jl.Alam Roh RT.01	30
51	SMP NEGERI 4 SUNGAI TABUK	Jl.Martapura Lama Km.7 Komp.Putra Gemilang	30
52	SMP NEGERI 1 KERTAK HANYAR	Jl.A.Yani Km. 10.400 No. 29	30
53	SMP NEGERI 2 KERTAK HANYAR	Jl.A.Yani Km. 8.200	40
54	SMP NEGERI 1 TATAH MAKMUR	Jl. Tatah Pemangkih	30
55	SMP NEGERI 1 GAMBUT	Jl.A.Yani Km. 16	40
56	SMP NEGERI 2 GAMBUT	Desa Guntung Ujung Handil Tengah	30
57	SMP NEGERI 3 GAMBUT	Jl.Pematang Panjang KM.5 RT.01.	30
58	SMP NEGERI 1 ALUH-ALUH	Jl.Inpres Aluh-Aluh Besar RT.01	30
59	SMP NEGERI 2 ALUH-ALUH	Jl. Jembatan 1	30
60	SMP NEGERI 3 ALUH-ALUH	Jl.Pemurus Ujung RT.02	30
61	SMP NEGERI 4 ALUH-ALUH	Ds Kuin Kecil Aluh-Aluh	30
62	SMP NEGERI 5 ALUH-ALUH	Jl.Saka Mangkok Rt.03 Ds Podok	30
63	SMP NEGERI 6 ALUH-ALUH	Jl. Aluh-Aluh Kecil RT. 03/01	30
64	SMP NEGERI 7 ALUH-ALUH	Jl. Sungai Musang Aluh-Aluh	30
65	SMP NEGERI 8 ALUH-ALUH	Jl.Tanipah RT.003 Rw.001 Ds Aluh-Aluh	30
66	SMP NEGERI 1 BERUNTUNG BARU	Jl.Jambu Raya Ds.Jambu Raya	30
TOTAL			2.040

q) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 589.631.550 dengan realisasi keuangan Rp. 562.231.550 (78.39%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian : 10758 Peserta Didik dari 19215 Peserta Didik dengan target 100% dan realisasi 55.98%. dengan rincian sebagai berikut :

- Kecamatan Martapura = 3.204 Peserta Didik
 - Kecamatan Martapura Timur = 489 Peserta Didik
 - Kecamatan Martapura Barat = 190 Peserta Didik
 - Kecamatan Karang Intan = 759 Peserta Didik
 - Kecamatan Aranio = 208 Peserta Didik
 - Kecamatan Astambul = 615 Peserta Didik
 - Kecamatan Mataraman = 333 Peserta Didik
 - Kecamatan Peramasan = 79 Peserta Didik
 - Kecamatan Pengaron = 189 Peserta Didik
 - Kecamatan Sambung Makmur = 211 Peserta Didik
 - Kecamatan Simpang Empat = 635 Peserta Didik
 - Kecamatan Cintapuri Darusslam = 254 Peserta Didik
 - Kecamatan Sungai Pinang = 189 Peserta Didik
 - Kecamatan Telaga Bauntung = 30 Peserta Didik
 - Kecamatan Sungai Tabuk = 765 Peserta Didik
 - Kecamatan Kertak Hanyar = 854 Peserta Didik
 - Kecamatan Tatah Makmur = 107 Peserta Didik
 - Kecamatan Gambut = 803 Peserta Didik
 - Kecamatan Aluh-aluh = 753 Peserta Didik
 - Kecamatan Beruntung Baru = 91 Peserta Didik
- r) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 453.008.300 dengan realisasi keuangan Rp. 445,508,300 (98.34%) Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik : 826 Peserta Didik dari 1118 Peserta Didik dengan target 100% dan realisasi 73.88%. dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN SMP)
 Kegiatan ini bertujuan untuk Memotivasi peserta didik untuk selalu meningkatkan kemampuan spritual dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan SMPN 1 Martapura pada tanggal 16-17 mei 2023 dengan jumlah peserta 198 peserta didik.
 - 2) Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari)
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong anak-anak berbakat secara akademik dari SMP terbuka diperlukan upaya memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri secara proaktif. Kegiatan ini dilaksanakan SMPN 1 Martapura pada tanggal 25 Mei 2023 dengan jumlah peserta 18 peserta

3) Festival lomba seni Siswa Nasional (FLS2N)

Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan etos berkesenian untuk mencapai prestasi yang tinggi dikancah internasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 bertempat di SMPN 2 Martapura, SMPN 3 Martapura dan SMKN 1 Martapura dengan jumlah peserta 107 peserta.

4) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Kegiatan ini bertujuan Mengembangkan talenta peserta didik dalam bidang olahraga dengan cabang olahraga:

- Atletik 83 siswa (SMPN 2 Martapura)
- Renang 20 siswa (Kolam Renang Antasari)
- Bulutangkis 54 siswa (Gedung abadi)
- Karate 36 siswa (Aula Kecamatan Martapura)
- Pencak Silat 33 Siswa (Aula Kecamatan Martapura)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6-7 Juni 2023.

5) Lomba Karakter Islam SMP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan karakter islam kepada peserta didik dilingkungan sekolah. Peserta perwakilannya dari SMP sekabupaten Banjar, dengan rincian jumlah sebagai berikut:

- Tahfih Qur'an : 69 siswa
- Tartil Qur'an : 86 siswa
- Fahmil Qur'an : 108 siswa
- Tilawah : 14 Siswa

Pelaksanaannya pada tanggal 31 oktober 2023 bertempat di Aula Dinas Pendidikan.

- s) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 970.010.200 dengan realisasi keuangan Rp. 685.058.200 (70.62%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi : 857 Orang dari 901 Orang dengan target 100% dan realisasi 95.11%. dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah
1	Aluh-Aluh	70
2	Aranio	41
3	Astambul	51

4	Beruntung Baru	11
5	Cintapuri Darussalam	45
6	Gambut	38
7	Karang Intan	95
8	Kertak Hanyar	34
10	Martapura	128
11	Martapura Barat	23
12	Martapura Timur	34
9	Mataraman	44
13	Paramasan	12
14	Pengaron	35
15	Sambung Makmur	38
16	Simpang Empat	48
17	Sungai Pinang	40
18	Sungai Tabuk	48
19	Tatah Makmur	10
20	Telaga Bauntung	12
	Jumlah	857

t) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 104.873.200 dengan realisasi keuangan Rp. 71.243.200 (67.93%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan" : 75 Satuan pendidikan dari 75 Satuan pendidikan dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

- Kecamatan Martapura 11 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Martapura Timur 3 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Martapura Barat 2 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Karang Intan 8 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Aranio 4 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Astambul 4 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Mataraman 4 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Peramasan 1 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Pengaron 3 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Sambung Makmur 3 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Simpang Empat 4 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Cintapuri Darusslam 4 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Sungai Pinang 3 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Telaga Bauntung 1 Satuan Pendidikan
- Kecamatan Sungai Tabuk 4 Satuan Pendidikan

- Kecamatan Kertak Hanyar 3 Satuan Pendidikan
 - Kecamatan Tatah Makmur 1 Satuan Pendidikan
 - Kecamatan Gambut 3 Satuan Pendidikan
 - Kecamatan Aluh-aluh 8 Satuan Pendidikan
 - Kecamatan Beruntung Baru 1 Satuan Pendidikan
- u) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 16.311.907.918 dengan realisasi keuangan Rp. 16.307.725.542 (99.97%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS : 75 Satuan Pendidikan dari 75 Satuan Pendidikan dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Status Sekolah	Kecamatan
1	SMP NEGERI 3 ARANIO	85	Negeri	Kec. Aranio
2	SMP NEGERI 2 SAMBUNG MAKMUR	61	Negeri	Kec. Sambung Makmur
3	SMP NEGERI 3 PENGARON	32	Negeri	Kec. Pengaron
4	SMP NEGERI 7 ALUH-ALUH	49	Negeri	Kec. Aluh-Aluh
5	SMP NEGERI 2 KARANG INTAN	115	Negeri	Kec. Karang Intan
6	SMP NEGERI 2 ASTAMBUL	79	Negeri	Kec. Astambul
7	SMP NEGERI 1 ASTAMBUL	404	Negeri	Kec. Astambul
8	SMP NEGERI 5 ALUH-ALUH	86	Negeri	Kec. Aluh-Aluh
9	SMP IT USHULUDDIN	59	Swasta	Kec. Martapura Timur
10	SMP NEGERI 4 ARANIO	43	Negeri	Kec. Aranio
11	SMP NEGERI 1 SAMBUNG MAKMUR	46	Negeri	Kec. Sambung Makmur
12	SMP NEGERI 2 SUNGAI TABUK	249	Negeri	Kec. Sungai Tabuk
13	SMP MITRA KASIH	0	Swasta	Kec. Kertak Hanyar
14	SMP NEGERI 6 MARTAPURA	351	Negeri	Kec. Martapura
15	SMP NEGERI 2 MARTAPURA TIMUR	307	Negeri	Kec. Martapura Timur
16	SMP NEGERI 2 MARTAPURA BARAT	84	Negeri	Kec. Martapura Barat
17	SMP NEGERI 1 TATAH MAKMUR	104	Negeri	Kec. Tatah Makmur
18	SMP NEGERI 7 KARANG INTAN	128	Negeri	Kec. Karang Intan
19	SMP NEGERI 1 MARTAPURA TIMUR	132	Negeri	Kec. Martapura Timur
20	SMP NEGERI 5 KARANG INTAN	102	Negeri	Kec. Karang Intan
21	SMP NEGERI 1 MARTAPURA BARAT	137	Negeri	Kec. Martapura Barat
22	SMP NEGERI 1 SUNGAI PINANG	135	Negeri	Kec. Sungai Pinang

No	Nama Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Status Sekolah	Kecamatan
23	SMP TAHFIDZUL QUR AN	197	Swasta	Kec. Martapura
24	SMP NEGERI 1 SUNGAI TABUK	305	Negeri	Kec. Sungai Tabuk
25	SMP NEGERI 3 SUNGAI PINANG	56	Negeri	Kec. Sungai Pinang
26	SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT	460	Negeri	Kec. Simpang Empat
27	SMP NEGERI 3 GAMBUT	198	Negeri	Kec. Gambut
28	SMP NEGERI 1 GAMBUT	660	Negeri	Kec. Gambut
29	SMP NEGERI 3 CINTAPURI DARUSSALAM	52	Negeri	Kec. Cintapuri Darussalam
30	SMP NEGERI 2 MARTAPURA	580	Negeri	Kec. Martapura
31	SMP MUHAMMADIYAH BIIH	57	Swasta	Kec. Karang Intan
32	SMP NEGERI 4 MATARAMAN	57	Negeri	Kec. Mataraman
33	SMP NEGERI 2 MATARAMAN	103	Negeri	Kec. Mataraman
34	SMP NEGERI 3 ALUH-ALUH	53	Negeri	Kec. Aluh-Aluh
35	SMP NEGERI 4 ALUH-ALUH	128	Negeri	Kec. Aluh-Aluh
36	SMP NEGERI 5 MARTAPURA	105	Negeri	Kec. Martapura
37	SMP NEGERI 4 CINTAPURI DARUSSALAM	45	Negeri	Kec. Cintapuri Darussalam
38	SMP NEGERI 1 KERTAK HANYAR	518	Negeri	Kec. Kertak Hanyar
39	SMP NEGERI 4 MARTAPURA	107	Negeri	Kec. Martapura
40	SMP ISLAM ARRIYADH	130	Swasta	Kec. Sambung Makmur
41	SMP NEGERI 2 GAMBUT	53	Negeri	Kec. Gambut
42	SMP NEGERI 2 ARANIO	47	Negeri	Kec. Aranio
43	SMP NEGERI 2 SUNGAI PINANG	60	Negeri	Kec. Sungai Pinang
44	SMP NEGERI 1 CINTAPURI DARUSSALAM	54	Negeri	Kec. Cintapuri Darussalam
45	SMP NEGERI 2 KERTAK HANYAR	396	Negeri	Kec. Kertak Hanyar
46	SMP NEGERI 1 KARANG INTAN	136	Negeri	Kec. Karang Intan
47	SMP NEGERI 1 PARAMASAN	96	Negeri	Kec. Paramasan
48	SMP DARUSSALAM MARTAPURA	133	Swasta	Kec. Martapura
49	SMP NEGERI 1 MATARAMAN	133	Negeri	Kec. Mataraman
50	SMP DARUL HIJRAH PUTERA	521	Swasta	Kec. Martapura
51	SMP NEGERI 3 KARANG INTAN	125	Negeri	Kec. Karang Intan
52	SMP NEGERI 1 MARTAPURA	817	Negeri	Kec. Martapura
53	SMP NEGERI 2 CINTAPURI DARUSSALAM	149	Negeri	Kec. Cintapuri Darussalam
54	SMP DARUL HIJRAH PUTERI	901	Swasta	Kec. Martapura
55	SMP NEGERI 3 SUNGAI TABUK	142	Negeri	Kec. Sungai Tabuk
56	SMP NEGERI 4 KARANG INTAN	82	Negeri	Kec. Karang Intan
57	SMP NEGERI 1 TELAGA BAUNTUNG	51	Negeri	Kec. Telaga Bauntung
58	SMP NEGERI 8 ALUH-ALUH	38	Negeri	Kec. Aluh-Aluh
59	SMP NEGERI 1 PENGARON	120	Negeri	Kec. Pengaron

No	Nama Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Status Sekolah	Kecamatan
60	SMP NEGERI 1 ALUH-ALUH	338	Negeri	Kec. Aluh-Aluh
61	SMP NEGERI 3 MATARAMAN	90	Negeri	Kec. Mataraman
62	SMP NEGERI 2 ALUH-ALUH	100	Negeri	Kec. Aluh-Aluh
63	SMP NEGERI 6 ALUH-ALUH	60	Negeri	Kec. Aluh-Aluh
64	SMP TAHFIZH AL-QURAN DARUL HIJRAH 3	34	Swasta	Kec. Martapura
65	SMPN 4 SUNGAI TABUK	267	Negeri	Kec. Sungai Tabuk
66	SMP NEGERI 4 SIMPANG EMPAT	22	Negeri	Kec. Simpang Empat
67	SMP NEGERI 3 SIMPANG EMPAT	35	Negeri	Kec. Simpang Empat
68	SMP NEGERI 2 PENGARON	49	Negeri	Kec. Pengaron
69	SMP NEGERI 6 KARANG INTAN	113	Negeri	Kec. Karang Intan
70	SMP NEGERI 2 SIMPANG EMPAT	179	Negeri	Kec. Simpang Empat
71	SMP NEGERI 3 MARTAPURA	634	Negeri	Kec. Martapura
72	SMP NEGERI 3 ASTAMBUL	120	Negeri	Kec. Astambul
73	SMP NEGERI 1 BERUNTUNG BARU	112	Negeri	Kec. Beruntung Baru
74	SMP NEGERI 4 ASTAMBUL	21	Negeri	Kec. Astambul
75	SMP NEGERI 1 ARANIO	67	Negeri	Kec. Aranio

v) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 261.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 234.700.000 (89.92%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama : 160 Orang dari 160 Orang dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah
1	Aluh-Aluh	16
2	Aranio	8
3	Astambul	8
4	Beruntung Baru	2
5	Cintapuri Darussalam	8
6	Gambut	6
7	Karang Intan	16
8	Kertak Hanyar	5
10	Martapura	33
11	Martapura Barat	4
12	Martapura Timur	6
9	Mataraman	8
13	Paramasan	2

No	Kecamatan	Jumlah
14	Pengaron	6
15	Sambung Makmur	6
16	Simpang Empat	8
17	Sungai Pinang	6
18	Sungai Tabuk	8
19	Tatah Makmur	2
20	Telaga Bauntung	2
	Jumlah	160

w) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 9.990.000 (99.90%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : 1 Ruang dari 1 Ruang dengan target 100% dan realisasi 100%. Adapun realisasinya Belanja berupa belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur jasa desain arsitektural untuk rehabilitasi 1 ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pagu Program ini sebesar Rp. 61.177.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.49.369.800,- (80,70%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini ditunjang 1 (satu) kegiatan yaitu: Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 61.177.800,- dengan realisasi keuangan sebesar keuangan sebesar Rp.49.369.800,- (80,70%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dengan sub kegiatan:

a) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 35.494.400 dengan realisasi keuangan Rp. 32.890.400 (92.66%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan : 7 Dokumen dari 7 Dokumen dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Adapun realisasinya belanja berupa Kegiatan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik SD dan SMP bertujuan melakukan pendataan mengenai kekurangan dan kelebihan guru di semua Sekolah Dasar di

Kabupaten Banjar, melaksanakan rapat penyusunan pengawas karena ada beberapa pengawas yang pensiun dan pemekaran korwil, melakukan pendataan guru penggerak yang telah lulus seleksi kandidat promosi kepala sekolah dan rapat perhitungan dan pemetaan pendidik bulan november- desember 2023

- b) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Pendidik Bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 25.683.400 dengan realisasi keuangan Rp. 16.479.400 (64.16%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan : 9 Laporan dari 9 Laporan dengan target sebesar 100.% dan realisasi 100%. Adapun realisasinya Belanja berupa mendata hasil kelulusan PPPK untuk jenjang pendidikan, membuat SK Plt untuk sekolah-sekolah yang kepekenya telah memasuki masa pensiun, membuat SK penugasan untuk guru-guru yang kelebihan guru untuk meliniernya pendidikan dengan jabatan agar semua sekolah terdapat pemerataan guru. Kegiatan ini memiliki kendala beberapa guru yang doublr tidak bisa dipindahkan karena status PNS belum 4 tahun dan kekurangan guru karena kelulusan PPPK, masalah ini diatasi dengan pendistribusian guru dengan pemberian surat penugasan bagi yang belum 4 tahun

Program Pengembangan Kurikulum

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 34.695.000,- dengan realisasi keuangan sebesar keuangan sebesar Rp.30.155.000,- (86,91%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung oleh Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 34.695.000,- dengan realisasi keuangan sebesar keuangan sebesar Rp. 30.155.000,- (86,91%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Dengan pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 34.695.000,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.155.000,- (86,91%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar adalah 1 dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian 100%. Adapun realisasinya Belanja berupa Pembuatan Modul muatan lokal SMP.

2. **Urusan Kesehatan**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh 1 program, 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan berikut ini : Program Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat.

Pagu anggaran program Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat sebesar Rp 2.024.293.226,- dengan realisasi keuangan Rp 1.322.220.950,- (65,317%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama dengan target sebesar 52% dan realisasi 100%. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang salah satunya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu: Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota.

Pagu anggaran kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sebesar Rp 2.024.293.226,- dengan realisasi keuangan Rp 1.322.220.950,- (65,317%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase capaian SPM Puskesmas dengan target sebesar 100 % dan realisasi 86,42 %. Kegiatan ini didukung oleh 28 Sub Kegiatan dan 12 diantaranya yang adalah yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

a) Pelayanan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp 680.660.000,- dengan realisasi keuangan Rp 535.965.250 (78,74%), realisasi fisik 100%. Capaian kinerja sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil diukur dengan indikator Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan target 10838 orang dengan realisasi 10360 orang (95,59%).

b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp. 145.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 39.682.000 (27,37%), realisasi fisik 96%. Capaian kinerja sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin diukur dengan indikator Jumlah iu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target kinerja sebesar 9046 orang dengan realisasi 8263 orang (92,45%).

c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp. 13.303.100 dengan realisasi keuangan Rp. 13.303.100 (100%), realisasi fisik 100%. Capaian kinerja sub kegiatan Pelayanan

Kesehatan Bayi Baru Lahir diukur dengan indikator Jumlah bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar dan target kinerja sebesar 8978 orang dengan realisasi 8850 orang (98,57%).

d) Pelayanan Kesehatan Balita

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp. 23.731.100,- dengan realisasi keuangan Rp. 23.731.100,- (100%), realisasi fisik 100%. Capaian kinerja sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita diukur dengan indikator Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target kinerja sebesar 41923 orang dengan realisasi 35370 orang (84,37%).

e) Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp. 146.841.000,- dengan realisasi keuangan 5.391.000 ,- (3,67%), realisasi fisik 100%. Capaian kinerja sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar diukur dengan indikator Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target kinerja sebesar 92386 orang dengan realisasi 54516 orang (59,01%).

f) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp. 612.032.400,- dengan realisasi keuangan Rp. 596.334.850 ,- (97,44%). Capaian kinerja sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif diukur dengan indikator Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target kinerja sebesar 385579 orang dengan realisasi 237754 orang (61,66%).

g) Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp. 41.001.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 7.001.500,- (17,08%), realisasi fisik 96%. Capaian kinerja sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diukur dengan indikator Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target kinerja sebesar 53990 orang dengan realisasi 43319 orang (80,24%).

h) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi adalah Rp. 11.700.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.937.500,- (50,75%) dan realisasi fisik 100%. Capaian kinerja Program diukur dengan Jumlah Penderita Hipertensi yang

- Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan target kinerja 38626 orang dan realisasi 32869 orang (85.1%).
- i) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus
Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus adalah Rp. 55.191.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 49.191.000,- (88,86%) dan realisasi fisik 100%. Capaian kinerja Program diukur dengan Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan target kinerja 5723 orang dan realisasi 5723 orang (100%).
 - j) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat adalah Rp. 55.191.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 49.041.000,- (88,86%) dan realisasi fisik 100%.Capaian kinerja Program diukur dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1034 orang dengan realisasi 1034 orang (100%).
 - k) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp. 35.180.000 dengan realisasi keuangan Rp. 26.633.000 (75,7%). Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis diukur dengan indikator Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dan target kinerja sebesar 8079 orang dan realisasi 7329 orang (90,72%).
 - l) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pagu anggaran sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp. 587.589.750 dengan realisasi keuangan Rp. 576.284.750 (98.1%). Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV diukur dengan indikator Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dengan target kinerja 13473 orang dan realisasi 13473 orang (100%).

3. Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan berikut ini :

Pelayanan Dasar : Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Capaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diukur dengan indikator Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak. Adapun target program ini adalah:

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Jalan diukur dengan indikator :

- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum layak dengan target 85,11% dan realisasi 86,94%.
- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman dengan target 17,98% dan realisasi 17,98%.

Program ini didukung Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 16.521.795.425 dengan realisasi Rp 15.186.886.006 (91,92%) dan realisasi fisik 105,4%. Terdapat kesalahan penginputan target pada penyusunan DPPA dimana target DPPA 2.214 Unit, sedangkan target Simondalev Perubahan 2.000 Unit. Adapun target capaian 2.000 Unit dengan realisasi 2.108 Unit, yaitu:

1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk	34 Unit
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungai Rangas Ulu Kec. Martapura Barat	1 Unit
3	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Zona Atas	136 Unit
4	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Zona Tengah	524 Unit
5	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Zona Bawah	291 Unit
6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Loktunggul Kec. Pengaron	107 Unit
7	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungai Besar Kec. Karang Intan	175 Unit
8	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bawah Seberang Kec. Mataraman	96 Unit
9	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungai Pinang Baru Kec. Sungai Tabuk	125 Unit
10	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karang Intan Kec. Karang Intan	70 Unit
11	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan	58 Unit
12	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Belimbing Baru Kec. Sungai Pinang	83 Unit
13	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mandikapau Barat Kec. Karang Intan	181 Unit
14	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Benua Anyar ST Kec. Astambul	54 Unit
15	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lokbaintan Kec. Sungai Tabuk	100 Unit
16	Pengembangan Jaringan SPAM Desa Haur Kuning Kec. Beruntung Baru	73 nit

- b) Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Desa yang Sarana Air Minumnya akan dilakukan optimalisasi dan perluasan. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2.012.000.000 dengan realisasi Rp 2.012.000.000 (100%) dan realisasi fisik 112,5%. Adapun target capaian 8 Desa dengan realisasi 9 Desa, yaitu :

1	Desa Babirik Kec. Beruntung Baru	1 Desa
2	Desa Karya Makmur Kec. Cintapuri Darussalam	1 Desa
3	Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan	1 Desa
4	Desa Handil Purai Kec. Beruntung Baru	1 Desa
5	Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat	1 Desa
6	Desa Lok Cantung Kec. Simpang Empat	1 Desa
7	Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan	1 Desa
8	Desa Sungai Asam Kec. Karang Intan	1 Desa
9	Desa Tambak Padi	1 Desa

- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Unit SPAM yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 443.867.711 dengan realisasi Rp 414.184.200 (93,31%) dan realisasi fisik 112,5%. Adapun target capaian 8 Unit dengan realisasi 9 Unit, yaitu :

1	Desa Babirik Kec. Beruntung Baru	1 Unit
2	Desa Karya Makmur Kec. Cintapuri Darussalam	1 Unit
3	Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan	1 Unit
4	Desa Handil Purai Kec. Beruntung Baru	1 Unit
5	Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat	1 Unit
6	Desa Lok Cantung Kec. Simpang Empat	1 Unit
7	Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan	1 Unit
8	Desa Sungai Asam Kec. Karang Intan	1 Unit
9	Desa Tambak Padi	1 Unit

- d) Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Sambungan Rumah Terpasang. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 5.101.604.895 dengan realisasi Rp 4.382.963.000 (85,91%) dan realisasi fisik 213,43%. Adapun target capaian 350 Unit SR dengan realisasi 747 Unit SR, yaitu :

1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cabi Kec. Simpang Empat	50 Unit SR
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat	45 Unit SR
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kupang rejo Kec. Sungai Pinang	83 Unit SR
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Murung Kenanga Kec. Martapura	183 Unit SR
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jingah Habang Ulu Kec. Karang Intan	125 Unit SR
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Malintang Kec. Gambut	173 Unit SR
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manarap Tengah Kec. Kerta Hanyar	30 Unit SR
8	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tatah Pemangkih	58 Unit SR

Pelayanan Dasar : Penyediaan Akses Air Limbah Domestik

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Capaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diukur dengan indikator :

- Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah dengan target 83,12 dan realisasi 84,95%;
- Persentase Akses Sanitasi Aman dengan target 8,94% dan realisasi 9,55%;
- Persentase Akses Sanitasi Layak dengan target 83,12% dan realisasi 84,95%.

Program ini didukung Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator :

- Persentase Akses Sanitasi Layak dengan target 83,12% dan realisasi 84,95%;
- Persentase Akses Sanitasi Aman dengan target 8,94% dan realisasi 9,55%.

Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 11.507.717.381 dengan realisasi Rp 11.311.350.550 (98,29%) dan realisasi fisik 102,43%. Adapun target sesungguhnya 1.150 Rumah Tangga dengan realisasi 1.178 Rumah Tangga, yaitu :

1	Pingaran Ilir Kecamatan Astambul	51 Rumah Tangga
2	Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat	51 Rumah Tangga
3	Bincau Kecamatan Bincau	50 Rumah Tangga
4	Sungai Batang Ilir Kecamatan Martapura Barat	50 Rumah Tangga
5	Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk	50 Rumah Tangga
6	Penyambaran Kecamatan Karang Intan	52 Rumah Tangga
7	Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan	51 Rumah Tangga
8	Mali-Mali Kecamatan Martapura	50 Rumah Tangga
9	Tambak Anyar Ulu Kecamatan Martapura Timur	50 Rumah Tangga
10	Tambak Anyar Ilir Kecamatan Martapura Timur	50 Rumah Tangga
11	Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk	51 Rumah Tangga
12	Kelampaian Ilir Kecamatan Astambul	50 Rumah Tangga
13	Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul	55 Rumah Tangga
14	Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk	54 Rumah Tangga
15	Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk	67 Rumah Tangga
16	Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk	50 Rumah Tangga
17	Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat	54 Rumah Tangga
18	Limamar Kecamatan Astambul	51 Rumah Tangga
19	Baru Kecamatan Mataraman	52 Rumah Tangga
20	Gudang HIRANG Kecamatan Sungai Tabuk	5 Rumah Tangga
21	Malintang Baru Kecamatan Gambut	5 Rumah Tangga
22	Guntung Ujung Kecamatan Gambut	17 Rumah Tangga
23	Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk	20 Rumah Tangga
24	Keramat Kecamatan Martapura Timur	8 Rumah Tangga

25	Jingah Habang Ilir Kecamatan Karang Intan	34 Rumah Tangga
26	Loktangga Kecamatan Karang Intan	16 Rumah Tangga
27	Labuan Tabu Kecamatan Martapura	24 Rumah Tangga
28	Pingaran Ulu Kecamatan Astambul	50 Rumah Tangga
29	Tambangan Kecamatan Astambul	10 Rumah Tangga

b) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 712.650.000 dengan realisasi Rp 697.693.200 (97,90%) dan realisasi fisik 100%. Adapun target capaian 19 KPP dengan realisasi 19 KPP, yaitu :

1	Pingaran Ilir Maju	1 KPP
2	Maju Desaku	1 KPP
3	Bincau	1 KPP
4	Perubahan	1 KPP
5	Sehat bangkit	1 KPP
6	Bina Bersama Manis	1 KPP
7	Barakat	1 KPP
8	Mali-Mali Maju	1 KPP
9	Tambak Anyar Ulu	1 KPP
10	Tambak Anyar Ilir Barokah	1 KPP
11	Bergerak Mantap	1 KPP
12	Makmur	1 KPP
13	Kelampaian Berkah	1 KPP
14	Tajau Landung Barakat	1 KPP
15	KBI Bungas	1 KPP
16	Harapan Bersama	1 KPP
17	Maju Bersama	1 KPP
18	Umamar Berbenah	1 KPP
19	Baru Peduli Lingkungan	1 KPP

c) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 251.500.000 dengan realisasi Rp 211.828.450 (84,23%) dan realisasi fisik 100%. Adapun target capaian 1 Unit dengan realisasi 1 Unit di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 356.450.000 dengan realisasi Rp 354.669.200 (99,50%) dan realisasi fisik 100%. Adapun target capaian 2 Unit STS dengan realisasi 1 Unit STS di Desa Keliling

Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk Unit STS dan 1 unit STS di Desa Sungai Tuan Ulu Kecamatan Astambul.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan berikut ini :

Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Perumahan

Pagu anggaran program Pengembangan Perumahan sebesar Rp. 488.974.160,- dengan realisasi keuangan Rp.475.611.361,- (97%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase penanganan rumah yang terkena bencana maupun terkena relokasi program Kabupaten dengan target sebesar 100% dan realisasi 99%.

1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 326.996.700 dengan realisasi keuangan Rp. 324.627.200 (99,27%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase unit Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

Pagu anggaran sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebesar Rp. 326.996.700 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 324.627.200 (99,27%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 15 unit dan realisasi sebesar 15 unit sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/341/KUM/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023, yaitu:

BNB A	No.KTP	NAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN	PENGHUNI RUMAH	PEKERJAAN
1	6304031705760001	KANI	JL. Pasar Kemis Rt.03	Pasar Kemis	Kertak Hanyar	3	Petani/Pekebun
2	6303035111640002	HALIMATU JASMANIAH	Pasar Sabtu Rt.01	Makmur	Gambut	6	Petani/Pekebun
3	6303042509170002	FITRIANNOR	Jl. Bhakti Pemakuan Rt.04	Pemakuan	Sungai Tabuk	2	Pedagang

4	6303041507700006	AHYANI	Jl. Bhakti Pemakuan Rt.03	Pemakuan	Sungai Tabuk	5	Buruh Harian
5	6303045211810003	MISDAH	Jl. Bhakti Pemakuan Rt.06	Pemakuan	Sungai Tabuk	5	Buruh Harian
6	6303041008870002	SURIYANI	Jl. Bhakti Rt.02	Pemakuan	Sungai Tabuk	5	Buruh Harian
7	6303041001520004	SARWANI	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	4	Wirausaha
8	6303045203580005	HJ SITI MARAN	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	4	Buruh Harian
9	6303042101800002	ABDUL HAMID	Jl. Bhakti Rt.01	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	4	Buruh Harian
10	6303040110600010	JOHANSYAH	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	5	Petani/Pekebun
11	6303044107720298	BAYAH	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	5	Buruh Harian
12	6303045708680002	NORHAYATI	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	1	Buruh Harian
13	6303044308820006	NOR AISYAH	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	6	Buruh Harian
14	6303040111650003	MAHYUDIN	Jl. Swadaya Rt.01	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	4	Sopir
15	6303041311750001	MUHAMMAD RAMLI	Jl. Swadaya Rt.01	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	5	Wirausaha

Tercapainya target Sub Kegiatan karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur SPM dan pelaporannya. Kerjasama yang baik dalam tim, pelaporan pemenuhan SPM sesuai jadwal yang ditentukan sehingga rehabilitasi 15 unit rumah korban bencana alam dapat selesai fisik 100% pada triwulan III dan IV dalam 2 tahap.



**IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM
DESA PASAR KAMIS**



**IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM
DESA SEI TABUK KERAMAT**



**PENGIRIMAN BAHAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM
DESA PEMAKUAN**



**PENGIRIMAN BAHAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM
DESA PASAR KAMIS**



Gambar 1 Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 0% sampai dengan 100%

2) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota.

Pagu anggaran kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota sebesar Rp. 67.447.200 dengan realisasi keuangan Rp. 65.588.200 (97%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase unit Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 67.447.200 dengan realisasi keuangan Rp. Rp. 65.588.200 (97%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. Tercapainya target Sub Kegiatan karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur Pendataan dan Penyusunan Dokumen melalui Konsultasi.

Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

a) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pagu anggaran program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh sebesar Rp. 557.854.500,- dengan realisasi keuangan Rp 510.253.050 (91%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan target sebesar 22,68% dan realisasi 22,68%. Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 557.854.500 dengan realisasi keuangan Rp. 510.253.050 (91%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Pagu anggaran sub kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp. 54.198.550,- dengan realisasi keuangan Rp. 49.898.329 (92,07%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan target sebesar 1 Laporan dan realisasi sebesar 1 Laporan. Tercapainya target Sub Kegiatan karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur SPM dan pelaporannya. Kerjasama yang baik dalam tim, pelaporan pemenuhan SPM sesuai jadwal yang ditentukan sehingga bantuan uang sewa 13 Unit korban relokasi program pemerintah dapat selesai 100% pada triwulan II.

b) Program Kawasan Permukiman

Pagu anggaran program Kawasan Permukiman sebesar Rp.3.480.081.422,- dengan realisasi keuangan Rp3.400.204.987,79

(85,62%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani dengan target sebesar 15,23% dan realisasi 15,26%. Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Pagu anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp. 3.593.611.422 dengan realisasi keuangan Rp. 3.400.204.987 (85,62%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase kawasan kumuh target sebesar 91,92% dan realisasi 84,74%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.

Pagu anggaran sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh sebesar Rp. 3.480.081.422 ,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.929.202.537,79 (84,17%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar dengan target sebesar 0,2 Ha dan realisasi sebesar 0,2 Ha dengan capaian 100%. Kemudian untuk pagu anggaran SPM tersebut didalam sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh adalah Rp. 1.303.090.000 dengan realisasi Rp. 1.283.290.907 (98,48%) Tercapainya target Sub Kegiatan karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur SPM dan pelaporannya. Kerjasama yang baik dalam tim sesuai jadwal yang ditentukan sehingga penyediaan rumah 13 Unit korban relokasi program pemerintah dapat selesai 100% pada triwulan IV.

5. Urusan Trantibumlinmas

Bidang Trantibum

Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum merupakan program utama dimana besar pagu anggaran tahun ini sebesar Rp. 1.299.266.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.255.480.550,- atau capaian realisasi anggaran 96,63% dan realisasi fisik sebesar 100% dari target 100% atau capaian kinerja pada tahun ini sebesar 100%.

Capaian kinerja program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan indikator persentase tingkat penyelesaian penanganan

pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas dengan formulasi perhitungan yaitu jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditangani dibagi jumlah kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan dikali 100%

Pencapaian target kinerja program tersebut diatas didukung dengan 2 (dua) kegiatan dengan 9 (sembilan) sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 besar pagu anggaran sebesar Rp. 1.175.643.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,133,029,700,- atau capaian realisasi anggaran 96.38% dan realisasi fisik sebesar 100% dari target 100% atau capaian kinerja pada tahun ini sebesar 100%.

Pencapaian target kinerja kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota tersebut diatas didukung dengan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.

Pada sub kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan pagu anggaran sebesar Rp. 626.448.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 608.280.000,- atau persentase realisasi anggaran 97.10%, sedangkan untuk realisasi kinerja sebanyak 356 kasus dari target kasus sebanyak 352 kasus pelanggaran.

b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pada sub kegiatan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa pagu anggarannya sebesar Rp. 5.562.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau persentase realisasi anggaran 89,90%, sedangkan untuk realisasi kinerja sebanyak 120 kasus dari target kasus sebanyak 117 kasus pelanggaran.

- c) **Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**
Pada sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum pagu anggaran sebesar Rp. 413.047.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 411.719.700,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 99,68% dan realisasi kinerja sebanyak 5 dokumen dari target 5 dokumen hasil kegiatan atau capaian kinerja pada tahun ini sebesar 100%.
- d) **Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**
Pada sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia besar pagu anggaran Rp. 123.634.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.030.000,- atau capaian realisasi anggaran 87,38% dan realisasi kinerja sebanyak 2 orang SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dari 5 orang yang direncanakan.
- e) **Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**
Pada sub kegiatan penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat besar pagu anggaran Rp. 450.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau capaian realisasi anggaran 0% dan realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan dari 1 dokumen.
- f) **Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada**
Pada sub kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada besar pagu anggaran Rp. 6.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau capaian realisasi anggaran 0% dan realisasi kinerja sebanyak 1 laporan dan dapat terealisasi 1 laporan penyediaan layanan dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
- 2) **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
Kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota besar pagu anggaran sebesar Rp. 123,622,300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 122,450,850,- atau capaian

realisasi anggaran 99.05 % dan realisasi fisik sebesar 63.93% dari target 63.93% atau capaian kinerja pada tahun ini sebesar 100%.

Capaian kinerja kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dimana dari 61 perda ditargetkan 39 perda dan terealisasikan 39 Perda.

Pencapaian target kinerja kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut diatas didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pada sub kegiatan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota besar pagu anggaran Rp. 60.861.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.290.450,- atau capaian realisasi anggaran 99.06% dan realisasi kinerja sebanyak 4 laporan hasil kegiatan triwulan hasil pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat /kelompok masyarakat /pelaku usaha dari 1 laporan yang ditargetkan atau capaian kerjanya 100%.

b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pada sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota besar pagu anggaran Rp. 5.946.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.946.900,- atau capaian realisasi anggaran 100% dan realisasi kinerja sebanyak 4 laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati hasil kegiatan triwulan dari 4 laporan yang ditargetkan atau capaian kerjanya 100%.

c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pada sub kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota besar pagu anggaran Rp. 56.813.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.213.500,- atau capaian realisasi anggaran 98.94% dan realisasi fisik sebanyak 4 laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani

sesuai SOP hasil kegiatan triwulan dari 4 laporan yang ditargetkan atau capaian kerjanya 100%.

Bidang Kebencanaan

Program Penanggulangan Bencana

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 3.426.809.901,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.694.044.936,- (78,62%) dan realisasi fisik sebesar 88,87%. Capaian kinerja Program Penanggulangan Bencana diukur dengan tiga (3) indikator yaitu :

1. Indeks Meningkatnya efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, target Kinerja 0,38 Indeks dengan realisasi kinerja 0,38
2. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, target Kinerja 0,67 Indeks dengan realisasi kinerja 0,54
3. Indeks Pengembangan Pemulihan Sistem Bencana, target kinerja 0,53 Indeks dengan realisasi kinerja 0,80

Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

Pagu Anggaran Kegiatan ini adalah Rp. 135.902.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 126.314.800,- (92,95%) dan fisik 100%.

Capaian kinerja kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota diukur dengan indikator Indeks Meningkatnya efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Adapun target kegiatan ini adalah 0,38 Indeks dengan realisasi 0,38 Indeks kegiatan ini didukung sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

Capaian kinerja sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) diukur dengan indikator Jumlah Orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya dan target kinerja 800 Orang.

Adapun realisasi belanja pada sub kegiatan ini yaitu:

- Apel Siaga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta kekeringan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 dan diikuti sebanyak 300 Orang peserta.
- Apel Siaga Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023 dengan jumlah peserta 300 Orang.

- Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana sebanyak 2 kali bertempat di Desa Tambak Baru ilir Kecamatan Martapura pada tanggal 9 Mei 2023 jumlah peserta 50 orang dan desa Keliling Benteng ulu Kecamatan Martapura Barat pada tanggal 10 Mei 2023 dengan jumlah peserta 50 orang.
- Kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan PBBM sebanyak 2 kali bertempat di Kecamatan Martapura Barat pada Tanggal 11 Mei 2023 peserta sebanyak 50 orang dan Kecamatan Martapura Timur pada tanggal 26 Juni 2023 dengan jumlah peserta 50 orang.

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pagu Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 623.882.700,- dengan realisasi Rp. 587.989.300,- (94,24%) dan fisik 100%.

Capaian kinerja kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana diukur dengan dua (2) indikator Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana target kinerja 0,38 dengan realisasi 0,38 dan Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana target kinerja 0,67 dengan realisasi 0,54 indeks.

kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pagu Anggaran sub.kegiatan ini adalah Rp. 78.679.500,- dengan realisasi Rp. 67.640.600,- (85,97%) fisik sebesar 100%.

Capaian kinerja sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana diukur dengan indikator Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dan target kinerja sebanyak 150 Orang dengan realisasi sebanyak 150 orang melalui kegiatan Latihan Bersama relawan di Kantor BPBD Kab.Banjar pada bulan November 2023, peserta pelatihan melibatkan Tagana, Tim Damkar, PMI, Rapi, EBR serta BPK se Kabupaten Banjar.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pagu Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 240.215.200,- realisasi Rp. 238.702.200,- (99,37%) dan realisasi fisik 100%.

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana diukur dengan indikator Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas, target kinerja berupa 11 unit dan

teralisasi sebanyak 11 unit. Adapun realisasi belanja pada sub.kegiatan ini adalah berupa pengadaan peralatan Selang Spiral 2 “ sebanyak 2 Unit, Selang Spiral 1 “ sebanyak 1 unit, Mesin perahu 3 Unit dan Tenda Paddock sebanyak 5 Unit.

c. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pagu Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 229.692.000,- dengan realisasi Rp. 220.410.500,- (95,96%) dan realisasi fisik 100%.

Capaian kinerja sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan diukur dengan indikator yaitu Jumlah Kawasan yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan target kinerja 1 kawasan dan realisasi 1 kawasan. Adapun realisasi belanja pada sub kegiatan ini adalah Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang dilaksanakan selama 9 hari terdiri dari aparaturnya pemerintah desa, lembaga desa, babinsa, babinkamtibnas dan masyarakat Desa Benteng Kecamatan Pengaron. Hari pertama tanggal 7 bulan agustus 2023 tentang sosialisasi pembentukan desa tangguh bencana. Hari kedua tanggal 8 agustus 2023 workshop pembentukan forum pengurangan resiko bencana desa (PRB) . Hari ketiga tanggal 9 agustus melakukan workshop profil desa dan pengkajian resiko bencana desa. Hari ke empat tanggal 10 agustus melakukan workshop terkait penyusunan rencana penanggulangan bencana desa. Hari ke lima tanggal 11 agustus 2023 melakukan workshop pembentukan relawan tim siaga bencana desa.Hari ke enam tanggal 14 agustus 2023 workshop penyusunan dokumen rencana kontijensi desa. Hari ke tujuh tanggal 15 agustus 2023 eorkshop pengembangan sistem peringatan dini bencana desa. Hari ke delapan tanggal 21 agustus 2023 workshop penyusunan rencana evakuasi dan simulasi Penanggulangan Bencana banjir tingkat desa. Hari ke sembilan tanggal 22 agustus 2023 simulasi penanganan bencana banjir tingkat desa.

d. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Pagu Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 75.296.000,- dengan realisasi Rp. 61.236.000,- (81,33%) dan realisasi fisik 100%.

Capaian kinerja sub kegiatan Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam diukur dengan indikator Jumlah Keluarga Tanggap Bencana Alam target kinerja berupa 100 Keluarga dan teralisasi

sebanyak 100 keluarga. Adapun realisasi Belanja pada sub kegiatan ini yaitu Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 bertempat di Aula Kecamatan Martapura dihadiri oleh ibu Bupati Banjar beserta jajaran yang merupakan bentuk kerjasama BPBD dengan PKK kab banjar, peserta meliputi perwakilan dari dua (2) Desa, yaitu desa Labuan Tabu sebanyak 50 Orang (Keluarga) dan Desa Bincau sebanyak 50 Orang (Keluarga). Kegiatan KATANA tersebut dilaksanakan dengan tujuan masyarakat terutama sektor keluarga agar menjadi keluarga yang siap dan tangguh dalam menghadapi bencana, sehingga tercipta keluarga yang maju mandiri dan agamis yang mana Sasaran ibu rumah tangga karena ada potensi kecelakaan atau bencana yang bisa terjadi di rumah dan bisa mengakibatkan ibu rumah tangga menjadi korban.

- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.562.605.101,- dengan realisasi Rp. 1.890.956.236,- (73,79%) dan realisasi fisik 100%
Capaian kinerja kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana diukur dengan indikator Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Darurat Bencana dengan target 0,67 Indeks dan realisasi 0,54 Indeks. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 2.062.685.100,- dengan realisasi Rp. 1.399.093.736,- (67,38%) dan realisasi fisik 100%.
Capaian kinerja sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu 1 SK Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir , Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan 1 SK Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan / lahan dan kekeringan
Adapun realisasi belanjanya terdiri dari Belanja Honorarium Petugas Lapangan BPBD dan petugas penanganan bencana lintas sektoral, Makan Minum Petugas Posko siaga / Darurat Bencana Banjir dan Posko Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian

Akademis Raperda Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 499.920.001,- dengan realisasi Rp. 491.862.500,- (98,39%) dan fisik sebesar 98%.

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana target kinerja 1300 orang dan realisasi sebanyak 8280 Orang. Adapun realisasi belanjanya adalah pembelian bahan logistik pangan dan bahan logistik sandang papan.

4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Pagu Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 104.419.600,- dengan realisasi Rp. 88.784.600,- (85,02%) dan fisik sebesar 100%

Capaian kinerja kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana diukur dengan indikator Indeks Pengembangan Pemulihan Sistem Bencana dengan target 0,53 Indeks dan realisasi 0,51 Indeks. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Pagu sub kegiatan ini adalah Rp. 67.177.600,- dengan realisasi Rp. 58.523.400,- (87,12%) dan realisasi fisik 100%. Capaian kinerja sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota dengan target kinerja 5 dokumen dan realisasi kinerja 5 dokumen berupa 1 Dokumen Laporan Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, 1 Dokumen Laporan Rapat Koordinasi Siaga Darurat Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor, 1 Dokumen Laporan Rapat koordinasi / Focus Group Discussion (FGD) Perhitungan Mandiri IKD Kabupaten Banjar dan 2 Dokumen laporan CSR (Corporate Social Responsibility). Adapun realisasi belanjanya berupa 1 Kali kegiatan Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan pada bulan Juni 2023, 2 Kali Rapat koordinasi / Focus Group Discussion (FGD) Perhitungan Mandiri IKD Kabupaten Banjar pada bulan juli dan agustus, 1 Kali

Rapat Koordinasi Siaga Darurat Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor pada bulan November 2023, dan 2 Kali Kegiatan Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait CSR/pada saat bencana masif pada bulan Juni dan November 2023.

b. Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 37.242.000,- dengan realisasi Rp. 30.261.000,- (81,26%) dan fisik sebesar 100%. Capaian kinerja sub kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu Pasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) target kinerja 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen berupa 1 Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Angin Puting Beliung Januari s.d Maret 2023, 1 Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Angin Puting Beliung Oktober 2023 dan 1 Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Tanah Longsor Desa Mali-mali Kecamatan Karang Intan 08 Agustus 2023. Adapun realisasi belanjanya berupa Alat Tulis Kantor kegiatan pendataan, pelatihan penyusunan R3P dan sosialisasi sosial ekonomi pascabencana.

Bidang Damkar

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 613.265.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 403.905.573 (65,86%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran diukur dengan lima (5) indikator yaitu :

1. Persentase layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran target Kinerja 86,45 persen dengan realisasi kinerja 68,64 persen
2. Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran target Kinerja 100 persen dengan realisasi kinerja 99,40 persen
3. Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi target Kinerja 100 persen dengan realisasi kinerja 100 persen
4. Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran target Kinerja 13,79 Persen dengan realisasi kinerja 20,34

5. Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran target Kinerja 100 persen dengan realisasi kinerja 100 persen

Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran Kegiatan ini adalah Rp. 228,546,500,- dengan realisasi keuangan Rp. 212,251,573,- (92.87 %) dan fisik 100%

Capaian kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator persentase layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi 84,02 persen. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja sub ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 12 laporan.

Adapun realisasi kegiatan berupa Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran di wilayah Kabupaten Banjar sebanyak 12 Laporan (100%) berupa laporan kejadian per bulan yang terdiri dari:

- Laporan hasil pelaksanaan piket
- Laporan kejadian kebakaran

- b) Sub Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran

Capaian kinerja sub ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan target kinerja 12 laporan.

Adapun realisasi kegiatan berupa kegiatan penyelamatan dan evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran maupun Non Kebakaran (yang membahayakan manusia) sebanyak 12 Dokumen (100%) berupa dokumen kegiatan penyelamatan per bulan yang terdiri dari :

- Dokumen hasil pelaksanaan piket

- Dokumen pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
- c) Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
- Capaian kinerja sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan target kinerja 1 Orang.
- Adapun realisasi berupa pelaksanaan kegiatan diklat Damkar I dan Diklat Inspektur Muda Kebakaran sebanyak 7 Orang (500%). Data pegawai yang telah mengikuti Diklat dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:
- a. DR. Eddy Elminsyah Jaya, SH, SE, S.Pi, MS
 - b. H.M. Sofyani Noor, S.Sos, M.Pd
 - c. Gt, Yudhi. S.Pi, MM
 - d. M. Dimiyati
 - e. Isriani Hidayah, S.AP
 - f. Dwi Noor Wahidah, S.Ak
 - g. Nor Halimah
- d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- Capaian kinerja sub ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan target kinerja 3 Dokumen.
- Adapun realisasi kegiatan berupa 3 dokumen :
- a. Nota kesepakatan antara Lembaga Pembinaan Khusus Kelas I Martapura dengan Pemerintah Kabupaten Banjar tentang penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. Perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Nomor : 253/PKS/DISDUKCAPIL/2023, Nomor : 000.5.7.2/087/DPKP/2023 tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar;

- c. Nota kesepakatan antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Banjar dan Radio Antrar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 02 Kabupaten Banjar

2) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Pagu Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 71,750,000,- dengan realisasi Rp. 42,515,000,- (59.25 %) dan fisik 100%.

Faktor penghambat tidak maksimalnya serapan realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah:

Pada sub kegiatan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran, karena tidak terdapat data jumlah bangunan/gedung di wilayah kabupaten Banjar yg menjadi target tahun 2023, tidak tersusunnya jadwal target per bulan seperti berapa jumlah gedung yg akan didata.

Capaian kinerja kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Sesuai SOP dengan target kinerja 100 persen dan realisasi 100 persen.

kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran

Pagu Anggaran sub.kegiatan ini adalah Rp. 34,625,000,- dengan realisasi Rp. 7,075,000,-(20,43%) fisik sebesar 100%.

Capaian kinerja sub kegiatan ini diukur dengan Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dengan realisasi sebanyak 4 dokumen. Adapun realisasi kegiatan berupa dokumen pendataan Bangunan/Gedung milik pemerintah/Swasta yang memiliki sistem proteksi kebakaran di wilayah Kabupaten Banjar.

b. Sub Kegiatan Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran

Pagu Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 37,125,000,- realisasi Rp. 35,440,000,- (95,46%) dan realisasi fisik 100%

Capaian kinerja sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan target kinerja 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Adapun realisasi kegiatan berupa dokumen penilaian Bangunan/Gedung milik pemerintah/Swasta yang sudah Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.

- 3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 Pagu Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 301,900,000,- dengan realisasi Rp. 138,070,000,- (45,73%) dan realisasi fisik 100%.

Faktor penghambat tidak maksimalnya serapan realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah : Pada sub kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, tidak dilakukan sesuai dengan yang seharusnya, yaitu tidak mengumpulkan peserta sosialisasi yang akan diedukasi tentang pencegahan kebakaran di suatu tempat. Misalnya target sosialisasi 200 orang, maka dikumpulkan di suatu tempat dengan kapasitas 100 atau 200 orang. Capaian kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator yaitu Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan target kinerja 100 persen dan realisasi 100 persen.

Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat

Pagu Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 242,900,000,- dengan realisasi Rp. 118,540,000,- (48,80%) dan realisasi fisik 100%

Capaian kinerja sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya target kinerja berupa 250 orang dan teralisasi sebanyak 1762 orang.

NO.	KEGIATAN	LOKASI	HARI/TANGGAL	JUMLAH ORG
1	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Klinik Global Farma Jl. A. Yani Km 6,6 Kecamatan Kertak Hanyar	Selasa, 02 Mei 2023	14
2	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	PT. Kalimantan Medika RSU Danau Salak Kec. Mataraman	Selasa, 09 Mei 2023	8
3	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Martapura	Rabu, 10 Mei 2023	10
4	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Pizza Hut Restoran Kecamatan Martapura	Rabu, 10 Mei 2023	5
5	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	PT. Cakra Perkasa Jaya Mulia Kec. Gambut	Kamis, 11 Mei 2023	12
6	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	PT. Adira Finance Martapura	Senin, 15 Mei 2023	8

NO.	KEGIATAN	LOKASI	HARI/TANGGAL	JUMLAH ORG
7	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	DM Clinic Beauty Salon & Spa Martapura	Senin, 15 Mei 2023	10
8	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	PT. FIF Group Cabang Martapura	Selasa, 16 Mei 2023	6
9	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Dealer Sepeda Motor Kawasaki Kec. Martapura	Selasa, 16 Mei 2023	7
10	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Mitra 10 Kec. Kertak Hanyar	Rabu, 17 Mei 2023	10
11	Pembentukan dan Pembinaan Redkar	Desa Jingah Habang Ilir Kec. Karang Intan	Senin, 22 Mei 2023	30
12	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Yamaha Wijaya Motor Martapura	Selasa, 23 Mei 2023	6
13	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Dealer Honda Trio Motor Martapura	Selasa, 23 Mei 2023	8
14	Pembentukan dan Pembinaan Redkar	Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan	Senin, 29 Mei 2023	40
15	Pembentukan dan Pembinaan Redkar	Desa Muara Halayung Kec. Beruntung Baru	Selasa, 30 Mei 2023	37
16	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) sekaligus Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	UPTD. Puskesmas Sungai Tabuk 3 Kec. Sungai tabuk	Rabu, 31 Mei 2023	21
17	Pembentukan dan Pembinaan Redkar	Desa Jingah Habang Ulu Kec. Karang Intan	Senin, 05 Juni 2023	10
18	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	PT. Prada Makmur Komatsu Kec. Gambut	Senin, 05 Juni 2023	9
19	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	SPBU Indrasari	Rabu, 07 Juni 2023	5
20	Pelatihan Tali Menali	Aula DPKP Lantai 2	Kamis, 08 Juni 2023	52
21	Latihan Bersama Redkar	Desa Pemangkih Darat Kecamatan Tatah Makmur	Senin, 12 Juni 2023	55
22	Pelatihan Peningkatan Kapasitas pada Sistem dan Alat Proteksi Kebakaran	PT. Palmina Utama Kec. Cintapuri Darussalam	Jumat, 16 Juni 2023	35
23	Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura	Selasa, 20 Juni 2023	45
24	Pelatihan Peningkatan Kapasitas pada Sistem dan Alat Proteksi Kebakaran	PT. Putra Bangun Bersama Kecamatan Cintapuri Darussalam	Kamis, 22 Juni 2023	33
25	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Waterboom Pesona Modern Kec. Kertak Hanyar	Senin, 03 Juli 2023	14
26	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	PT. Surya Internusa Timur Kec. Gambut	Selasa, 04 Juli 2023	10
27	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Bizzpark Commercial Estate blok C2 Kec. Gambut	Rabu, 05 Juli 2023	21
28	Rapat Koordinasi dan Penerapan Manajemen Keselamatan Kebakaran	Aston Banua Hotel	Kamis, 06 Juli 2023	140

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	LOKASI	HARI/TANGGAL	JUMLAH ORG
	Gedung (MKKG)			
29	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	SPBU Gambut Kec. Gambut	Senin, 10 Juli 2023	5
30	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	PT. BPR Mitratama Arthabuana Kec. Kertak Hanyar	Selasa, 11 Juli 2023	21
31	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Dunkin Donuts Kec. Kertak hanyar	Kamis, 13 Juli 2023	6
32	Pembentukan dan Pembinaan Redkar	Desa Batu Balian Kec. Kertak Hanyar	Senin, 17 Juli 2023	25
33	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD. Puskesmas Martapura 2 Kec. Martapura	Selasa, 18 Juli 2023	53
34	Pembentukan dan Pembinaan Redkar	Desa Madurejo Kec. Sambung Makmur	Senin, 24 Juli 2023	7
35	Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Sejak Dini	SMA Banua Bilingual Boarding School Kec. Gambut	Selasa, 25 Juli 2023	22
36	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD. Puskesmas Sungai Tabuk 2 Kec. Sungai Tabuk	Kamis, 27 Juli 2023	41
37	Pembentukan dan Pembinaan Redkar	Desa Teluk Selong Kec. Martapura Barat	Jumat, 28 Juli 2023	14
38	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD Puskesmas Gambut	Senin, 14 Agustus 2023	48
39	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Warehouse Honda Trio Motor Kec. Gambut	Selasa, 15 Agustus 2023	19
40	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Kec. Gambut	Rabu, 16 Agustus 2023	9
41	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD Puskesmas Kertak Hanyar	Jumat, 18 Agustus 2023	23
42	Pembentukan dan Pembinaan Redkar	Kecamatan Martapura	Selasa, 22 Agustus 2023	35
43	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD. Puskesmas Beruntung Baru	Kamis, 24 Agustus 2023	27
44	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	Perum Damri Cabang Banjarmasin	Senin, 28 Agustus 2023	17
45	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Bencana Kebakaran warga Desa Jawa Laut	Kantor Desa Jawa Laut	Kamis, 31 Agustus 2023	47
46	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran/Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)	PT. Anugerah Wattiendo Kecamatan Karang Intan	Jumat, 01 September 2023	16
47	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD. Puskesmas Simpang Empat 1	Senin, 04 September 2023	31
48	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD. Puskesmas Sungai Tabuk 1	Selasa, 05 September 2023	42
49	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD. Puskesmas Cintapuri Darussalam	Kamis, 07 September 2023	24
50	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	Klinik Pratama Firdaus	Rabu, 13 September 2023	15
51	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Bencana Kebakaran warga Kelurahan Murung Keraton	Kelurahan Murung Keraton	Senin, 11 September 2023	35
52	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD. Puskesmas Simpang Empat 2	Senin, 18 September 2023	23
53	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD. Puskesmas Paramasan	Rabu, 20 September 2023	27
54	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	UPTD. Puskesmas Sambung Makmur	Kamis, 21 September 2023	41
55	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan dan Simulasi Kebakaran	UPTD. Puskesmas Martapura Barat	Rabu, 04 Oktober 2023	25

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	LOKASI	HARI/TANGGAL	JUMLAH ORG
56	Menghadiri Undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2024	Gedung PAUD Subur Desa Jawa Laut	Jum'at, 20 Oktober 2023	50
57	Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana (Bencana Skala Kecil) Kelurahan Sungai Paring	Hotel Rodhita Banjarbaru Ruang Ercilla	Kamis, 09 November 2023	20
58	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Simulasi Kebakaran	Klinik Nurmada kel. Sungai Sipai Kec. Martapura	Senin, 20 November 2023	13
59	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Terhadap Pentingnya Bahaya Potensi Kebakaran	Desa Bunipah Kec. Aluh-Aluh	Selasa, 21 November 2023	35
60	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran Sejak Dini kepada Anak TK atau Paud	Sektor Gambut-Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Banjar	Jum'at, 24 November 2023	35
61	Sosialisasi dan Edukasi Pelatihan Tanggap Darurat Kebakaran	PT. Sukanda Djaya-Cabang Banjarmasin Kec. Gambut	Sabtu, 25 November 2023	25
62	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Simulasi Kebakaran	PT. Borneo Perkasa Medika Kec. Gambut	Selasa, 28 November 2023	7
63	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Terhadap Pentingnya Bahaya Potensi Kebakaran	Desa Kaliukan Kec. Astambul	Kamis, 30 November 2023	25
64	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sekaligus Pembekalan Dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran	Kantor Balai Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan	Senin, 04 Desember 2023	26
65	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Terhadap Pentingnya Bahaya Potensi Kebakaran	PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk (Sari Roti) Kec. Gambut	Selasa, 05 Desember 2023	17
66	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran tentang Pengenalan Profesi Pemadam Kebakaran dan Cara Mencegah terjadinya Kebakaran pada Kompor dan Gas	Sekolah Akhlak SD Alam Muhammadiyah Kec. Martapura	Selasa, 05 Desember 2023	13
67	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebagai Tenaga Pengajar Materi K3	PT. Satya Haprabu Perkasa	Minggu, 17 Desember 2023	35
68	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Simulasi Kebakaran	PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk (Sari Roti) Kec. Gambut	Kamis, 21 Desember 2023	34
69	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Simulasi Kebakaran	Kelurahan Gambut	Rabu, 27 Desember 2023	22
70	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Simulasi Kebakaran	Kelurahan Gambut Barat	Kamis, 28 Desember 2023	25
71	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Simulasi Kebakaran	PERUM DAMRI Cabang Banjarmasin	Kamis, 28 Desember 2023	21
Jumlah Peserta				1762

Sumber : DPKP, 2024

b. Sub Kegiatan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Pagu Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 59,000,000,- dengan realisasi Rp. 19,530,000,- (48,80%) dan realisasi fisik 33.10%.

Faktor penghambat tidak maksimalnya serapan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Capaian kinerja sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya target kinerja berupa 20 Desa/Kelurahan dan teralisasi sebanyak 36 Desa/Kelurahan.

NO	NAMA DESA	TANGGAL	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA
1	Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan	10 Januari	KARANG INTAN	55
2	Desa Pandak Daun Kec. Karang Intan	17 Januari	KARANG INTAN	25
3	Desa Jingah Habang Ilir Kec. Karang Intan	22 Mei	KARANG INTAN	30
4	Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan	29 Mei	KARANG INTAN	40
5	Desa Muara Halayung Kec. Beruntung Baru	30 Mei 20203	BERUNTUNG BARU	37
6	Desa Jingah Habang Ulu Kec. Karang Intan	5 Juni 2023	KARANG INTAN	55
7	Desa Batu Balian Kec. Kertak Hanyar	17 Juli 2023	KERTAK HANYAR	25
8	Desa Madurejo Kec. Sambung Makmur	24 Juli 2023	SAMBUNG MAKMUR	7
9	Desa Teluk Selong Kec. Martapura Barat	28 Juli 2023	MARTAPURA BARAT	14
Desa dan kelurahan Sekecamatan Martapura				
11	Bincau	22 Agustus 2023		2
12	Bincau Muara	22 Agustus 2023		2
13	Cindai Alus	22 Agustus 2023		3
14	Indra Sari	22 Agustus 2023		2
15	Jawa Laut	22 Agustus 2023		2
16	Labuan Tabu	22 Agustus 2023		3
17	Murung Kenanga	22 Agustus 2023		3
18	Pasayangan Barat	22 Agustus 2023		3
19	Pasayangan Selatan	22 Agustus 2023		2
20	Pasayangan Utara	22 Agustus 2023		3
21	Sungai Sipai	22 Agustus 2023		2
22	Tambak Baru	22 Agustus 2023		3
23	Tambak Baru Ilir	22 Agustus 2023		3
24	Tambak Baru Ulu	22 Agustus 2023		2
25	Tanjung Rema	22 Agustus 2023		2
26	Tunggul Irang	22 Agustus 2023		3
27	Tunggul Irang Ilir	22 Agustus 2023		3
28	Tunggul Irang Ulu	22 Agustus 2023		3
29	Tungkaran	22 Agustus 2023		2
30	Jawa	22 Agustus 2023		2
31	Keraton	22 Agustus 2023		2
32	Murung Keraton	22 Agustus 2023		3
33	Pasayangan	22 Agustus 2023		2
34	Sekumpul	22 Agustus 2023		3
35	Sungai Paring	22 Agustus 2023		3
36	Tanjung Rema Darat	22 Agustus 2023		3

NO	NAMA DESA	TANGGAL	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA
		JUMLAH		354

Sumber : DPKP, 2024

4) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 11,069,000,- dengan realisasi Rp. 11,069,000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Capaian kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia

Pagu Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 11,069,000,- dengan realisasi Rp. 11,069,000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Capaian kinerja sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia dengan target 12 laporan berupa laporan kejadian per bulan.

2. Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh program, kegiatan dan sub kegiatan berikut ini:

Program Rehabilitasi Sosial

Pagu anggaran program ini sebesar Rp.563.639.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.512.465.00,- (90,92%) dan realisasi fisik sebesar 138%. Capaian kinerja Program Rehabilitasi Sosial diukur dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dengan target 13,50% dan realisasi sebesar 18,63%. Program ini dapat melebihi target dikarenakan belum adanya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga perhitungan target belum maksimal. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.321.746.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.300.082.400,- (93,26%) dan realisasi fisik 112,29%. Capaian Kinerja kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial diukur dengan indikator sebagai berikut. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan target sebesar 75% dan realisasi 84,22%. Kegiatan ini dapat melebihi target dikarenakan belum adanya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga perhitungan target belum maksimal. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan Permakanan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.158.990.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.158.590.000,- (99,75%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan Penyediaan Permakanan sebagai berikut : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota adapun target 290 Orang, dengan rincian 250 Orang Lanjut Usia Terlantar, dan 40 Orang Penyandang Disabilitas Terlantar.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota adapun jumlah 290 orang, dengan rincian 250 Orang Lanjut Usia Terlantar, dan 40 Orang Penyandang Disabilitas Terlantar.

2) Penyediaan Alat Bantu

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.20.012.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.875.000,- (99,32%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu sebagai berikut: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota adapun target 13 Orang, dengan rincian 3 Orang Lanjut Usia Terlantar Penerima Alat Bantu Kursi Roda, 5 Orang Lanjut Usia Terlantar Penerima Tripod, dan 5 Orang Penyandang Disabilitas Terlantar Penerima Alat Bantu Kursi Roda.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan jumlah 13

Orang, dengan rincian 3 Orang Lanjut Usia Terlantar Penerima Alat Bantu Kursi Roda, 5 Orang Lanjut Usia Terlantar Penerima Tripod, dan 5 Orang Penyandang Disabilitas Terlantar Penerima Alat Bantu Kursi Roda.

3) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.35.895.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.32.595.000,- (90,80%) dan realisasi fisik sebesar 96,36%. Target kinerja pada sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga sebagai berikut : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota adapun target 55 Orang, dengan rincian 15 Orang Anak Terlantar, dan 40 Orang Lanjut Usia Terlantar.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan jumlah 53 Orang, dengan rincian 13 Orang Anak Terlantar, dan 40 Orang Lanjut Usia Terlantar.

Realisasi keuangan hanya 96,36% karena banyaknya sisa anggaran yang tidak terserap diantaranya Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial.

4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.19.161.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.17.043.400,- (88,95%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial sebagai berikut : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota adapun target 33 Orang dengan rincian 33 Orang Penyandang Disabilitas yang di berikan Bimbingan Sosial, 7 Orang Penyandang Disabilitas yang di berikan Bimbingan Sosial ke PRSPD, dan 6 Orang Penyandang Disabilitas yang di berikan Bimbingan Sosial ke PSBN.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota adapun jumlah 33 Orang, dengan rincian 20 Orang Penyandang Disabilitas yang di berikan Bimbingan Sosial, 7 Orang Penyandang Disabilitas yang di berikan Bimbingan Sosial ke PRSPD, dan 6 Orang Penyandang Disabilitas yang di berikan Bimbingan Sosial ke PSBN.

Realisasi keuangan hanya 88,95% karena banyaknya sisa anggaran yang tidak terserap diantaranya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

- 5) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.12.516.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.459.000,- (99,54%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebagai berikut : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adapun target 60 Orang dengan rincian 60 Orang.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adapun jumlah 60 Orang dengan rincian 60 Orang.

- 6) Pemberian Layanan Kedaruratan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.45.172.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.31.691.000,- (70,16%) dan realisasi fisik sebesar 77,85%. Target kinerja pada sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan sebagai berikut : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota adapun target 158 Orang dengan rincian 30 Orang Luar Daerah, 8 Orang Dalam Daerah dan 120 Orang Kebutuhan Pokok.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

Jumlah Orang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan jumlah 123 Orang, 0 Orang Luar Daerah, 2 Orang Dalam Daerah dan 121 Orang Kebutuhan Pokok.

Sub kegiatan ini belum mencapai target dikarenakan tidak adanya orang yang mendapatkan layanan kedaruratan yang dipulangkan ke luar daerah. Realisasi keuangan hanya 70,16% karena tidak terserapnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dan Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

7) Pemberian Layanan Rujukan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.27.829.000,- (92,76%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan sebagai berikut : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota adapun target 16 Orang, dengan rincian 16 Orang Anak Terlantar.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan jumlah 16 Orang, dengan rincian 16 Orang Anak Terlantar.

Realisasi keuangan hanya 92,76% karena tidak terserapnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

Program Penanganan Bencana

Pagu anggaran program ini sebesar Rp.335.395.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.330.485.400,- (98,54%) dan realisasi fisik sebesar 85,3%. Capaian kinerja Program Penanganan Bencana diukur dengan indikator Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan.

Program ini belum mencapai target dikarenakan menargetkan berdasarkan proyeksi sehingga menganggarkan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa pengadaan Bufferstock sebanyak 1.000 Paket sembako dan hanya terealisasikan sebanyak 853 Paket. Program ini didukung dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.335.395.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 330.485.400,- (98,53%) dan realisasi fisik 85,3%. Capaian Kinerja kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.

Kegiatan ini belum mencapai target dikarenakan menargetkan berdasarkan proyeksi sehingga menganggarkan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa pengadaan Bufferstock sebanyak 1.000 Paket sembako dan hanya terealisasikan sebanyak 853 Paket. Kegiatan ini didukung sub kegiatan Penyediaan Makanan.

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.296.995.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.292.932.000,- (98,63%) dan realisasi fisik

sebesar 85,3%. Target kinerja pada sub kegiatan Penyediaan Makanan sebagai berikut : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Kabupaten/Kota adapun target 1000 Orang, dengan rincian 1.000 Orang Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Kabupaten/Kota adapun jumlah 853 Orang, dengan rincian 853 Orang Korban Bencana Alam dan Sosial.

Sub Kegiatan ini belum mencapai target dikarenakan menargetkan berdasarkan proyeksi sehingga menganggarkan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa pengadaan Bufferstock sebanyak 1.000 Paket sembako dan hanya terealisasikan sebanyak 853 Paket.

BAB V

PENUTUP

LPPD Kabupaten Banjar Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Bupati Banjar Tahun 2023, Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banjar, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023.

Syukur Alhamdulillah dalam kebersamaan dan kebersahajaan saat ini kita telah melewati Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, secara berkelanjutan berupaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2023 mengacu pada visi Kabupaten Banjar “Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, Dan Agamis” untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 misi yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
- 3) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
- 5) Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

LPPD ini secara dominan menjelaskan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian penerapan standar pelayanan minimal, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Adapun simpulan dari penjelasan LPPD tahun 2023 sebagai berikut :

Capaian kinerja makro Kabupaten Banjar Tahun 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

- 1) Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 4,652% dari tahun 2022 sebesar 70,72 menjadi 74,01 ditahun 2023.
- 2) Angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar -12,545% dari 2,79 ditahun 2022 menjadi 2,44 ditahun 2023.

- 3) Tingkat pengangguran di Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dari 2,72 ditahun 2022 menjadi 2,73 ditahun 2023.
- 4) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mengalami penurunan dari 4,48 menjadi 4,35.
- 5) Pendapatan per kapita dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dari Rp. 12.871 miliar tahun 2022 menjadi Rp. 13.301 miliar tahun 2023.
- 6) Ketimpangan pendapatan dengan pendekatan *Gini ratio* mengalami penurunan dari 0,300 pada tahun 2022 menjadi 0,297 pada tahun 2023.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- 1) Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah 46 perangkat daerah. Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Banjar per Tahun 2023 sebanyak 7.259 yang terdiri atas 2.668 laki-laki dan 4.591 perempuan.
- 2) Total Anggaran Pendapatan dalam APBD tahun 2023 sebesar Rp. 2.232.265.489.838,- dengan realisasi sebesar Rp 2.361.160.190.815,04 (105,77%).
- 3) Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2023 sebesar Rp. 2.559.653.131.121,-. dengan realisasi Belanja APBD Tahun 2023 sebesar Rp 2.261.883.473.556,98 SILPA Tahun 2023 sebesar Rp 429.120.334.540,89
- 4) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil/Outcome, IKK Keluaran/Output, IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan total sebanyak 628 indikator telah dipenuhi. LPPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 sebelum terbit telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Kabupaten Banjar.

Capaian penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), Kabupaten Banjar belum maksimal dalam menerapkan SPM Pelayanan Dasar tahun 2023 dikarenakan beberapa hal berikut ini :

- 1) Program dan kegiatan standar pelayanan minimal (SPM) belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam perencanaan; dan
- 2) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Walaupun terdapat banyak kendala dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dapat disampaikan progres positif yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menerapkan SPM pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Urusan SPM bidang Pendidikan mempunyai indeks pencapaian sebesar 89,26% dengan kategori Tuntas Madya.

- 2) Urusan SPM bidang Kesehatan mempunyai indeks pencapaian sebesar 86,14% dengan kategori Tuntas Madya.
- 3) Urusan SPM bidang Pekerjaan Umum memiliki indeks pencapaian sebesar 85,64% dengan kategori Tuntas Madya.
- 4) Urusan SPM bidang perumahan rakyat memiliki indeks pencapaian sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.
- 5) Urusan SPM bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat memiliki indeks pencapaian sebesar 97,07% dengan kategori Tuntas Utama.
- 6) Urusan SPM bidang sosial memiliki indeks pencapaian sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

Meskipun standar pelayanan minimal secara ideal target harus tetap konsisten 100% namun dikarenakan banyak permasalahan dalam kendalanya menyebabkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Banjar belum maksimal.

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yaitu pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam target kinerja dan perjanjian kinerja. Berikut hasil pengukuran indikator kinerja dari setiap tujuan/sasaran yang telah tercapai target kinerjanya:

- 1) Hasil indikator kinerja utama Indeks Kesehatan Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 2) Hasil indikator kinerja utama Indeks Pendidikan Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 3) Hasil indikator kinerja utama Indeks Daya Beli Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi
- 4) Hasil indikator kinerja utama Indeks Ketahanan pangan Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 5) Hasil indikator kinerja utama Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 6) Hasil indikator kinerja utama Indeks Perlindungan anak (IPA) Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 7) Hasil indikator kinerja utama Indeks Konektivitas Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 8) Hasil indikator kinerja utama LPE sub sektor pertanian Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
- 9) Hasil indikator kinerja utama LPE sub sektor perikanan Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sedang.

- 10) Hasil indikator kinerja utama Nilai Tukar Petani (NTP) Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 11) Hasil indikator kinerja utama LPE sektor industri pengolahan Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sedang.
- 12) Hasil indikator kinerja utama Jumlah Kunjungan wisatawan Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
- 13) Hasil indikator kinerja utama Tingkat pengangguran terbuka Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 14) Hasil indikator kinerja utama Persentase Koperasi berkualitas Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 15) Hasil indikator kinerja utama Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 16) Hasil indikator kinerja utama Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mandiri Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
- 17) Hasil indikator kinerja utama Indeks Desa Membangun (IDM) Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 18) Hasil indikator kinerja utama Persentase usaha pening-katan penda-patan keluarga sejahtera (UPPKS) yang aktif Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
- 19) Hasil indikator kinerja utama Indeks Infrastruktur Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 20) Hasil indikator kinerja utama Persentase kepatuhan terhadap rencana tata ruang Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 21) Hasil indikator kinerja utama Persentase kawasan kumuh Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 22) Hasil indikator kinerja utama Indeks Resiko bencana Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
- 23) Hasil indikator kinerja utama persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 24) Hasil indikator kinerja utama Persentase peningkatan pendapatan asli daerah Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 25) Hasil indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 26) Hasil indikator kinerja utama Nilai Opini BPK Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 27) Hasil indikator kinerja utama Nilai SAKIP Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.

- 28) Hasil indikator kinerja utama Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 29) Hasil indikator kinerja utama Indeks SPBE Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
- 30) Hasil indikator kinerja utama Indeks Profesionalitas ASN (IPA) Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sedang.
- 31) Hasil indikator kinerja utama Angka kasus konflik ideologi, SARA, sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat yang tertangani Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 32) Hasil indikator kinerja utama Persentase Cakupan Pelestarian Budaya Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
- 33) Hasil indikator kinerja utama Prestasi Pemuda dan Santri dalam Olahraga Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sedang.
- 34) Hasil indikator kinerja utama Rasio pelanggaran perda dan trantibum Menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.

Demikian gambaran yang dapat disajikan dalam penyampaian laporan ini, sebagai satu kewajiban untuk disampaikan progres kemajuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan dalam bingkai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar. Oleh karena itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif DPRD Kabupaten Banjar selaku mitra Pemerintah serta semua unsur yang terlibat. Semoga apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi catatan dan koreksi akan dilakukan perbaikan untuk tahap pelaksanaan selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Aamiin.

